



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau**

PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU



2021-2026



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam masa pemerintahannya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur perangkat daerah maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Jangka Panjang Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran.
 - (3) Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Pasal 9 dihapus.
 3. Pasal 10 dihapus.
 4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian program RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah atas Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan memiliki Nomenklatur dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak sesuai (berbeda) dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

cukup jelas

Angka 2

cukup jelas

Angka 3

cukup jelas

Angka 4

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2024 NOMOR 63



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I 1
	1.1 Latar Belakang	I 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I 8
	1.3 Maksud Dan Tujuan	I 12
	1.4 Hubungan Antar Dokumen	I 13
	1.5 Sistematika Penulisan	I 18
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II 1
	2.1 Kondisi Umum Daerah	II 2
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demograf	II 2
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II 46
	2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II 64
	2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II 127
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III 1
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III 1
	3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III 3
	3.1.2 Pendapatan Daerah	III 4
	3.1.3 Belanja Daerah	III 10
	3.1.4 Pembiayaan Daerah	III 14
	3.1.5 Neraca Daerah	III 16
	3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III 29
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III 29
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III 35
	3.2. KERANGKA PENDANAAN	III 36
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III 37
	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III 60
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV 1
	4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV 2
	4.2. ISU-ISU STRATEGIS	IV 18
	4.2.1. Isu Strategis Internasional	IV 19
	4.2.2. Isu Strategis Nasional	IV 24
	4.2.3. Isu Strategis Regional	IV 32
	4.2.4. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau	IV 111



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V 1
	5.1. VISI DAN MISI	V 2
	5.2. TUJUAN DAN SASARAN	V 6
	5.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2021- 2026	V 7
	5.2.2. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017	V 12
	5.2.3. Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	V 27
	5.3. KESELARASAN RPJMD 2021-2026 DAN RPJPD 2005-2025	V 76
	5.3.1. Kesesuaian Misi RPJMD 2021-2026 dan Misi RPJPD 2005- 2025	V 76
	5.3.2. Kesesuaian Tujuan Pembangunan RPJMD 2021-2026 dan Penekanan Prioritas Pembangunan RPJPD 2005-2025	V 80
	5.4. KESELARASAN RPJMD 2021-2026 DAN RPJMN 2020-2024	V 85
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI 1
	6.1. STRATEGI	VI 1
	6.2. ARAH KEBIJAKAN	VI 7
	6.3. Program Pembangunan Daerah	VI 17
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII 1
	7.1. Kerangka Pendanaan	VII 1
	7.2. Program Perangkat Daerah	VII 9
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII 1
	8.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan	VIII 1
	8.2. Indikator Kinerja Utama	VIII 2
	8.3. Indikator Kinerja Kunci	VIII 3
BAB IX	PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	IX 1
	9.1 KEBIJAKANPEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	IX 1
	9.1.1 ArahRencana Tata Ruang Wilayah	IX 1
	9.1.2 KerangkaUmum Pengembangan Wilayah	IX 2
	9.1.3 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota	IX 8



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

BAB X	PENUTUP	X 1
	10.1 Pedoman Transisi	X 1
	10.2 Kaidah Pelaksanaan	X 1
	10.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	X 3
	10.4 Penutup	X 4



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015	II	3
Tabel 2.2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007	II	4
Tabel 2.3	Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	II	4
Tabel 2.4	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi	II	5
Tabel 2.5	Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	II	6
Tabel 2.6	Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota	II	7
Tabel 2.7	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota	II	7
Tabel 2.8	Daftar DAS di WS Kepulauan Riau	II	10
Tabel 2.9	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2022	II	13
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	II	26
Tabel 2.11	Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	II	28
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau	II	29
Tabel 2.13	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	II	31
Tabel 2.14	Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau	II	33
Tabel 2.15	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	II	35
Tabel 2.16	Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	II	37
Tabel 2.17	Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	II	39
Tabel 2.18	Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	II	41
Tabel 2.19	Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau	II	42
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 Menurut Kabupaten/Kota	II	44
Tabel 2.21	Karakteristik Kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	44
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	45
Tabel 2.23	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	48
Tabel 2.24	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	49
Tabel 2.25	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	50



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tabel 2.26	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Milyar Rp) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	51
Tabel 2.27	Nilai PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rp) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	52
Tabel 2.28	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	53
Tabel 2.29	Laju Inflasi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2018-2022	II	54
Tabel 2.30	Karakteristik Kemiskinan Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	II	55
Tabel 2.31	Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	58
Tabel 2.32	Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	58
Tabel 2.33	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	60
Tabel 2.34	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	62
Tabel 2.35	Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020	II	63
Tabel 2.36	Perkembangan Jumlah Grup Kesenian Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020	II	63
Tabel 2.37	Perkembangan Jumlah Klub Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020	II	64
Tabel 2.38	Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	65
Tabel 2.39	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	67
Tabel 2.40	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	68
Tabel 2.41	Perkembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	69
Tabel 2.42	Kompetensi Lulusan SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	70
Tabel 2.43	Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	71



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tabel 2.44	Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	72
Tabel 2.45	Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	72
Tabel 2.46	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	75
Tabel 2.47	Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	76
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	77
Tabel 2.49	Pencapaian Target SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	79
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	80
Tabel 2.51	Pencapaian Target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	81
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	82
Tabel 2.53	Pencapaian Target SPM Bidang Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	83
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	87
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	89
Tabel 2.56	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	90
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	92
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	93
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	94
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	96
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	97



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	97
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	98
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	99
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	100
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	101
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	102
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	103
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	103
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	104
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	105
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	106
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	107
Tabel 2.74	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	109
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	110
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	111
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	112
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	113
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	114



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tabel 2.80	Capaian Kinerja Urusan Industri Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	115
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	116
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	117
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	118
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	120
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	121
Tabel 2.86	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	121
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	122
Tabel 2.88	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	123
Tabel 2.89	Capaian Kinerja Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	124
Tabel 2.90	Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	125
Tabel 2.91	Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	II	126
Tabel 2.92	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	127
Tabel 2.93	Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	127
Tabel 2.94	Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	128
Tabel 2.95	Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020	II	128
Tabel 2.96	Rata-rata Lama Perizinan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	129
Tabel 2.97	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kegiatan dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditempatkan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	131
Tabel 2.98	Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	132



Tabel 2.99	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	134
Tabel 2.100	Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	135
Tabel 2.101	Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	137
Tabel 3.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III	2
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2019	III	3
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	III	8
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	III	12
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	III	15
Tabel 3.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	III	18
Tabel 3.7	Rasio Lancar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)	III	24
Tabel 3.8	Rasio Hutang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III	25
Tabel 3.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III	26
Tabel 3.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III	27
Tabel 3.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III	28
Tabel 3.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (Rupiah)	III	31
Tabel 3.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)	III	33
Tabel 3.14	Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)	III	35
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)	III	36
Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (dalam jutaan)	III	41
Tabel 3.17	Proyeksi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (dalam Jutaan)	III	49



Tabel 3.18	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (dalam Jutaan)	III	53
Tabel 3.19	Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026	III	59
Tabel 3.20	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	III	61
Tabel 3.21	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (dalam Jutaan)	III	63
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	IV	4
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022	IV	6
Tabel 4.3	Permasalahan Pokok dan Permasalahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	IV	8
Tabel 4.4	Pusat-Pusat Kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau	IV	17
Tabel 4.5	Indikasi Program Utama	IV	35
Tabel 5.1	Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	V	8
Tabel 5.2	Kesesuaian Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Permendagri 86 Tahun 2017	V	13
Tabel 5.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	V	30
Tabel 5.4	Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	V	36
Tabel 5.5	Sandingan Sasaran RPJMD Murni Tahun 2021-2026 dan RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau	V	63
Tabel 5.6	Keselarasan Misi RPJMD 2021-2026 dan RPJPD 2005-2025 Provinsi Kepulauan Riau	V	77
Tabel 5.7	Keselarasan Misi RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024	V	86
Tabel 5.8	Penyelarasan Tujuan RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024	V	87
Tabel 6.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	VI	2
Tabel 6.2	Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan	VI	11
Tabel 6.3	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah beserta target kinerja dan Pagu Tahun 2022-2023	VI	18



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tabel 6.4	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah beserta target kinerja dan Pagu Tahun 2024-2026	VI	67
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Jutaan Rupiah)	VII	3
Tabel 7.2	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (dalam Jutaan)	VII	6
Tabel 7.3	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	VII	8
Tabel 8.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	VIII	2
Tabel 8.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	VIII	2
Tabel 8.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	VIII	4
Tabel 9.1	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	IX	9
Tabel 9.2	Target Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	IX	9
Tabel 9.3	Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	IX	10
Tabel 9.4	Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	IX	10
Tabel 9.5	Target Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	IX	11
Tabel 9.6	Target PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	IX	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I	14
Gambar 2.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau	II	2
Gambar 2.2	Peta WS Kepulauan Riau	II	12
Gambar 2.3	Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	II	27
Gambar 2.4	Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	II	29
Gambar 2.5	Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau	II	30
Gambar 2.6	Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	II	32
Gambar 2.7	Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau	II	34
Gambar 2.8	Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	II	36
Gambar 2.9	Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	II	38
Gambar 2.10	Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau	II	40
Gambar 2.11	Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	II	41
Gambar 2.12	Grafik Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau	II	43
Gambar 2.13	Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau	II	48
Gambar 2.14	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (Juta Rp)	II	52
Gambar 2.15	Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (Juta Rp)	II	52
Gambar 2.16	Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	55
Gambar 2.17	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Bulan Maret (%) Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022	II	56
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	57
Gambar 2.19	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	59
Gambar 2.20	Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	61
Gambar 2.21	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	68
Gambar 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	86



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Gambar 2.23	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022	II	88
Gambar 3.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)	III	4
Gambar 3.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)	III	5
Gambar 4.1	Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Provinsi Kepulauan Riau	IV	3
Gambar 4.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Sumatera Tahun 2022	IV	5
Gambar 4.3	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Se-Sumatera Tahun 2023 (Kondisi Maret)	IV	9
Gambar 4.4	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Se-Sumatera Tahun 2023 (Kondisi Maret)	IV	10
Gambar 4.5	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi se-Sumatera Tahun 2023 (Bulan Februari)	IV	10
Gambar 4.6	Perbandingan IPM Provinsi se-Indonesia Tahun 2022	IV	11
Gambar 4.7	Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi se-Sumatera Tahun 2022	IV	12
Gambar 4.8	Pusat-Pusat Kegiatan di Kepulauan Riau	IV	13
Gambar 5.1	Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	V	6
Gambar 6.1	Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026	VI	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang berisi tentang penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu H. Ansar Ahmad dan Hj. Marlin Agustina. Visi dan Misi ini kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran; strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”. Dalam rangka mencapainya, visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 misi yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa;
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD telah dilakukan. Hasil evaluasi tersebut adalah rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Perubahan ini secara valid memenuhi syarat pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilakukan antara lain apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, serta memiliki sisa masa berlaku tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dalam pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun (RKPD 2022 dan RKPD 2023), dinyatakan bahwa terdapat beberapa hal mendasar yang memerlukan perubahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pembangunan hingga akhir periode. Beberapa urgensi dan alasan dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Dari hasil evaluasi RPJMD masih terdapat IKU yang belum merepresentasikan pencapaian atas tujuan dan sasaran, sehingga belum menggambarkan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh sebab perlu dilakukan penelaahan kembali dalam rangka memperbaiki cascading sebagai upaya pencapaian visi Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya. Perubahan ini tentu saja berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau termasuk di dalamnya penyesuaian target-target pembangunan yang mengacu pada pencapaian pembangunan saat ini. Adanya perubahan IKU daerah juga memengaruhi IKU Perangkat Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77 bahwa RPJMD menjadi pedoman Renstra dan RKPD. Penyesuaian ini diharapkan akan meningkatkan kontribusi dalam perwujudan Visi Provinsi Kepulauan Riau.



2. Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan nasional semenjak RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan mengalami perubahan di antaranya adalah:

- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berimplikasi pada berubahnya gambaran umum keuangan daerah yang sudah dirumuskan dalam dokumen RPJMD.
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang berdampak pada penganggaran.
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya pemuakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, memerlukan penyesuaian dengan Program dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
- 3. Penambahan Perangkat Daerah Baru dan Penambahan Bidang pada Perangkat Daerah.**

Terdapatnya Peraturan Daerah yang belum dilakukan penyesuaian dalam RPJMD yang lalu yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dua peraturan ini terdapat menyebabkan beberapa perubahan antara lain:



- a. Pada Sekretariat Daerah yang sebelumnya memiliki 9 (sembilan) biro saat ini berkurang menjadi 8 (delapan biro), dimana sebelumnya Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Administrasi Perekonomian terpisah, sekarang bergabung menjadi Biro Perekonomian dan Pembangunan. Nomenklatur Biro Pemerintahan dan Perbatasan berubah menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara Bagian Perbatasan yang sebelumnya adalah Bagian dari Biro Pemerintahan dan Perbatasan berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Nomenklatur Biro Organisasi dan Korpri berubah menjadi Biro Organisasi. Sedangkan Korpri saat ini menjadi bagian/bidang dari Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri. Kemudian nomenklatur Biro Humas Protokol dan Penghubung pada akhir Tahun 2021 berubah menjadi menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Adapun Bagian Humas fungsinya berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika sedangkan Bagian Penghubung berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penghubung Daerah.
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi dua Perangkat Daerah baru yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perubahan RPJMD dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 bahwa penambahan program dapat dilaksanakan melalui perubahan RPJMD, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-

2026 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika Regulasi Nasional.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berisikan arahan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga memuat poin bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila,

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar sebagaimana yang termuat dalam pasal 342 ayat (3) yaitu perubahan yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 selain sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global dan dinamika regulasi nasional juga mempertimbangkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau hingga dengan tahun 2022 di mana dalam hasil evaluasi ditemukan:

1. Pada integrasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tersebut, secara umum program RPJMD sudah diadopsi oleh Renstra namun masih terdapat inkonsistensi indikator sehingga belum menggambarkan pencapaian daerah.
2. Pencapaian pembangunan tahun 2022 melalui capaian indikator makro (Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan Indeks Gini), telah baik namun jika dilihat dari target akhir pembangunan jangka menengah daerah maka capaian kinerja baru mencapai 95,66 persen.



3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama, meskipun telah memiliki angka sebesar 97,74 persen di tahun 2022 namun jika dibandingkan dengan target akhir periode pembangunan jangka menengah terdapat angka yang lebih rendah yaitu sebesar 86,18 persen.
4. Berdasarkan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan yang direpresentasikan melalui 61 (enam puluh satu) indikator pembangunan, maka pencapaian kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2022 sebanyak 40 (empat puluh) indikator dengan persentase mencapai 65,57 persen. Sementara itu secara umum rata-rata capaian pembangunan di tahun 2022 mencapai 95,06 persen, perbaikan dan akselerasi masih harus dilakukan pada kinerja pembangunan yang masih rendah.
5. Pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2022 juga belum sepenuhnya optimal di mana indikator yang telah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) indikator atau sebesar 57,27 persen dari total keseluruhan indikator program sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh). Begitu pula hasil pencapaian rata-rata kinerja program di tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 98,83 persen, kendati demikian pelaksanaan beberapa program pada urusan pemerintah masih perlu diperhatikan. Dengan masih cukup tingginya indikator yang belum terhitung angka realisasinya (*non available*), maka pencapaian yang belum optimal pada tahun 2022 ini akan berdampak pada pencapaian akhir tahun pembangunan jika tidak diupayakan akselerasi dan/atau perbaikan dari tata kelola kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau juga merekomendasikan bahwa dalam rangka menjaga keselarasan, sinergitas dan integrasi perencanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 perlu penyesuaian secara substantif baik terhadap RPJMN 2020-2024 begitu juga dengan regulasi perencanaan serta regulasi penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 perlu dilakukan. Selain sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global dan dinamika regulasi nasional, perubahan ini juga



didasarkan kepada hasil pengendalian dan evaluasi atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan agar dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan pembangunan di sisa periode perencanaan dengan kondisi lebih terkini, lebih efektif yang dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan, serta mengakselerasi percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi dan pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang



- Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);



35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional serta hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 agar dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan pembangunan di akhir periode perencanaan dengan kondisi lebih terkini, lebih efektif sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan, dan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi dan pencapaian target/indikator pembangunan tahunan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan dengan kondisi terkini yang akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau di sisa periode pembangunan, utamanya dalam akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan, selengkapny Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu di sisa periode pembangunan;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kepulauan Riau dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan sumber dana lainnya;

3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
4. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
5. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat; dan
7. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

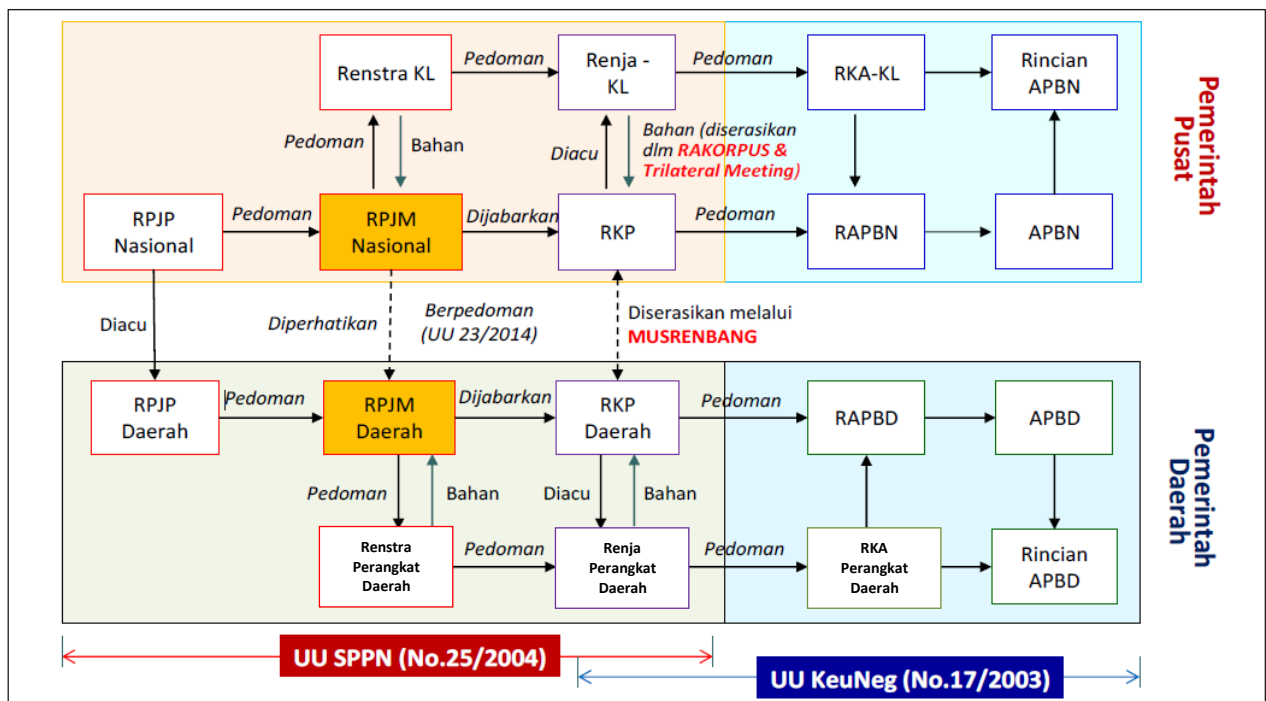
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Oleh karena itu, perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. Selanjutnya Perubahan RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan Perubahan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD selanjutnya akan dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW, sehingga RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berpedoman pada RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan





1. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 terutama pada bagian visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Perubahan RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025. Sehingga, penyusunan Perubahan RPJMD memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2021-2026 dan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 yang telah disusun, diarahkan untuk mencapai visi **“KEPULAUAN RIAU BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA”**. Untuk mendukung pencapaian visi ini terdapat 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia;
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi;
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata;
4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak; dan
5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata.

2. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJMN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan skema ini, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

3. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017–2037. Penuangan keselarasan RPJMD dengan RTRW Provinsi dalam dokumen perubahan RPJMD telah melalui proses penelaahan antara sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW Provinsi dan indikasi program yang terdapat dalam dokumen RTRW Provinsi diharapkan tidak hanya menjadi dasar perumusan perubahan RPJMD, namun juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau agar sesuai dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan Renstra Perangkat Daerah

Perubahan RPJMD menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran setiap urusan bidang dan/fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD akan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Hubungan Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota serta Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi RPJMD Kabupaten /Kota untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional maupun provinsi. Beberapa dokumen tersebut adalah: a) Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), b) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), c)

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), d) Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-MAPI), e) Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), f) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan Perubahan RPJMD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam periode 2021-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau serta pagu anggaran setiap tahunnya.



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap tahun hingga akhir periode masa jabatan.

BAB IX PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Pembangunan Kewilayahan berisi uraian tentang kebijakan-kebijakan Daerah tahun 2021-2026 yang difokuskan pada pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi daerah

BAB X PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita luhur yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkualitas melalui pelaksanaan pembangunan. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang dibunyikan dalam Pasal 33 Ayat 3 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melihat hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk memberdayakan setiap elemen pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun perubahan perencanaan jangka menengah. Salah satu poin penting dalam perumusan berbagai kebijakan dalam perubahan rencana pembangunan adalah ditelaahnya hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini, khususnya tahun pembangunan pada periode ini, melalui analisis berbagai data dan informasi pembangunan sebelumnya. Hal ini menjadikan data dan informasi menjadi salah satu komoditi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah agar terjaga relevansi antara program dan kegiatan pembangunan dengan permasalahan yang ingin dihadapi.

Ketepatan rumusan dalam memilih kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode pembangunan harus terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai acuan perumusan perubahan kebijakan pembangunan ini, maka disusunlah gambaran umum kondisi daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai potret dari hasil pembangunan daerah. Berikut penjabaran gambaran umum kondisi Kepulauan Riau.

2.1 Kondisi Umum Daerah

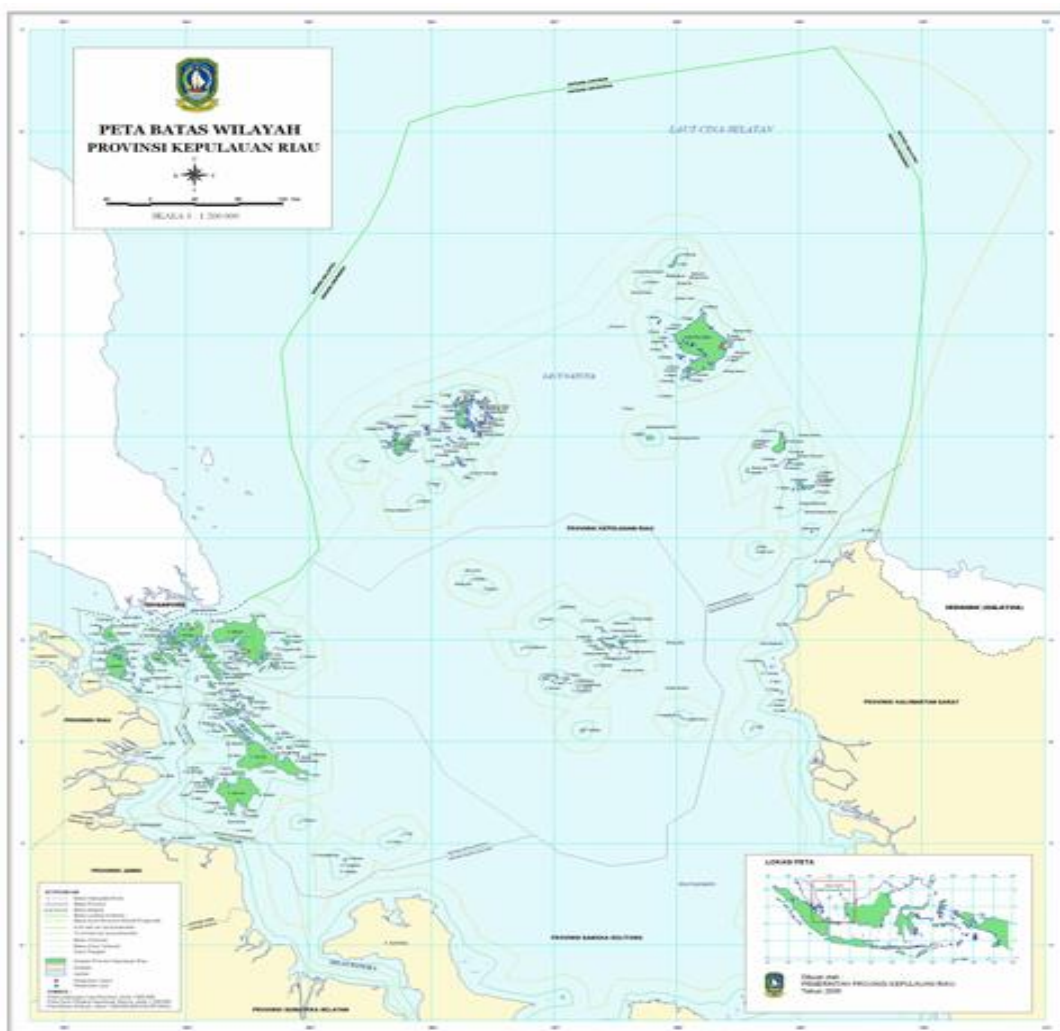
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km², terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

Gambar 2.1
Peta Provinsi Kepulauan Riau





Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Provinsi Kepulauan Riau hampir 96% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.269,708 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Karimun	930,453
2.	Kabupaten Bintan	1.317,149
3.	Kabupaten Natuna	1.999,155
4.	Kabupaten Lingga	2.210,819
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	627,027
6.	Kota Batam	1.034,732
7.	Kota Tanjungpinang	150,373
	Total	8.269,708

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut) adalah seluas 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan
Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
Total		417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2023

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau di mana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-



pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun saat ini, jumlah pulau Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2.028 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau
1	Kota Batam	454
2	Kota Tanjungpinang	8
3	Kabupaten Bintan	263
4	Kabupaten Karimun	248
5	Kabupaten Natuna	172
6	Kabupaten Lingga	630
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	239
Jumlah		2.028

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022

Di samping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Keci
2	Kota Batam	4	Pulau Pelampung, Pulau Nipa, Pulau Batu Berantai/Batu Berhanti, Pulau Nongsa/Putri
3	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar
5	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Boro, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala
Jumlah		22	

Sumber: Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017



2.1.1.3 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah, diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada tabel 2.6 berikut.



Tabel 2.6
Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m
5	Kepulauan Anambas	7 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2023)

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2023)

2.1.1.4 Kondisi Geologi, Struktur Tanah dan Hidrologi

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau di antaranya adalah batuan



ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga



dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari *organosol*, *glei* humus, *podsolik* merah kunicng, *latosol* dan *aluvial*. Jenis tanah *Organosol* dan *glei* humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulkdensity* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah *Organosol* tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah *Latosol*, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah *Aluvial* yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air



bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.408 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

WS Kepulauan Riau terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Daftar DAS di WS Kepulauan Riau

No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,20	90.	DAS Selamak	0,60
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,50	92.	DAS Selor	0,07
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,10

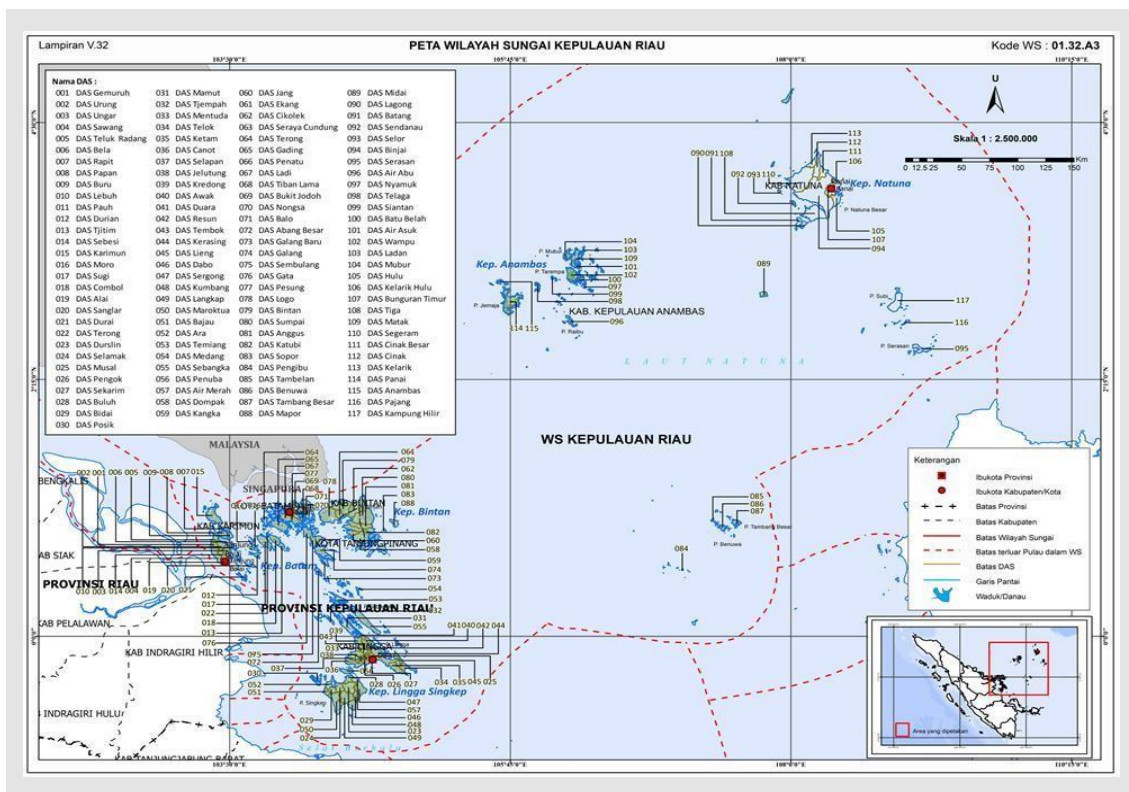


**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintan	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,90
18.	DAS Bukit Jodoh	0,51	58.	DAS Lebu	0,10	98.	DAS Siantan	0,10
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,20	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,50	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18
25.	DAS Cinak Besar	0,60	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompok	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,20	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban Lama	0,75
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS Ekan	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pau	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01	117.	DAS Wampu	1,06
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57			
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,50			

Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

Gambar 2.2
Peta WS Kepulauan Riau



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang.

Rata-rata suhu udara tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 36,8 °C sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 31,5 °C. Curah Hujan tertinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 3.968,5 mm³ dan terendah di Kabupaten Karimun 2.132,8 mm³. Kelembaban udara tertinggi di Kota Batam dan Kabupaten Lingga sebesar 100%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan,
dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Stasiun	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (m/s)	Curah Hujan (mm ³)	Penyinaran Matahari (%)
1. Karimun	Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah	34,0	99	1013,1	7,7	2132,8	40,10
2. Bintan	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	31,8	92	1017,6	12,0	3298,0	54
3. Natuna	Stasiun Meteorologi Ranai Natuna	34,3	99	1016,2	17,5	2538,5	59,60
4. Lingga	Stasiun Meteorologi Dabo Singkep	31,5	100	1013,4	7,1	3140,7	52
5. Kepulauan Anambas	Stasiun Meteorologi Tarempa	36,8	98	1015,3	24,0	2472,0	48
6. Batam	Stasiun Meteorologi Hang Nadim	34,4	100	1016,2	16,0	2512,9	59
7. Tanjung pinang	Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah	33,2	96	1014,9	16,4	3968,5	54

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2023).

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,8°C dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) 26,8°C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Dabo (Lingga) sebesar 87,5%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 81,73%. Curah hujan tertinggi di Tanjungpinang sebanyak 287,23 mm³ sedangkan curah hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 147,03 mm³. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,69 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.010,0 mb. Kecepatan angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot, terendah di Dabo (Lingga) sebesar 3,25 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 65,16%, terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 22,50%.



2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar.

Namun di tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 330 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas $\pm$ 7.560 Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.

Dengan diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi (HPK) seluas 81.927 ha. Dimana peruntukan Kawasan hutan lindung di Pulau Batam menjadi Kawasan taman buru Pulau Rempang seluas + 75.60 ha menjadi Kawasan hutan produksi yang dapat di konversi. Selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16.012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan



kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering di mana pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana). Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi Ketinggian < 1000 m dpl dan Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

b. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir.

Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan



agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor-faktor:

- 1) Ketinggian < 2.000 m dpl;
- 2) Kelerengan 40%;
- 3) Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah:

- a. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan;
- b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.



Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat zonasi kawasan yang terdiri dari:

a. Zona Inti

Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.

b. Zona Perikanan Berkelanjutan

Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.

c. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.

d. Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Sedangkan pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton,



di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%.

Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.

b. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

c. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna.

d. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)



Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Barek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta



Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:

- a. Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
- b. Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan peruntukan industri yakni sebagai berikut;

- a. Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
- b. Tersedia sistem air baku yang cukup;
- c. Adanya sistem pembuangan limbah;
- d. Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat;



- e. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di:

- a. Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang);
- b. Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang);
- c. Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang);
- d. Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup);
- e. Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat);
- f. Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga); dan
- g. Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja).

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:



- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadukan-serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*cultural diversity*). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif.

Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna dan juga sudah diusulkan untuk masuk sebagai salah satu prioritas RPJMN 2020-2024. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian



keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung.

Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan;
- c. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu ke waktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara



keseluruhan. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Pola perencanaan pembangunan hendaknya memasukkan unsur lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada bagi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km² didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.028 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.



Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (*Anchorage Area*), kawasan alih muat muatan kapal *Ship to Ship (STS) Transfer*, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya.

b. Kawasan konservasi

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.

c. Kawasan strategis nasional

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Alur laut

Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi



hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

1. Bahaya Banjir

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019).

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	1.379	24.818	17.854	44.051	TINGGI
2	KARIMUN	642	13.531	10.471	24.644	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	32	235	327	594	TINGGI
4	LINGGA	890	24.872	17.618	43.379	TINGGI
5	NATUNA	1.413	29.372	29.242	60.028	TINGGI
B	Kota					



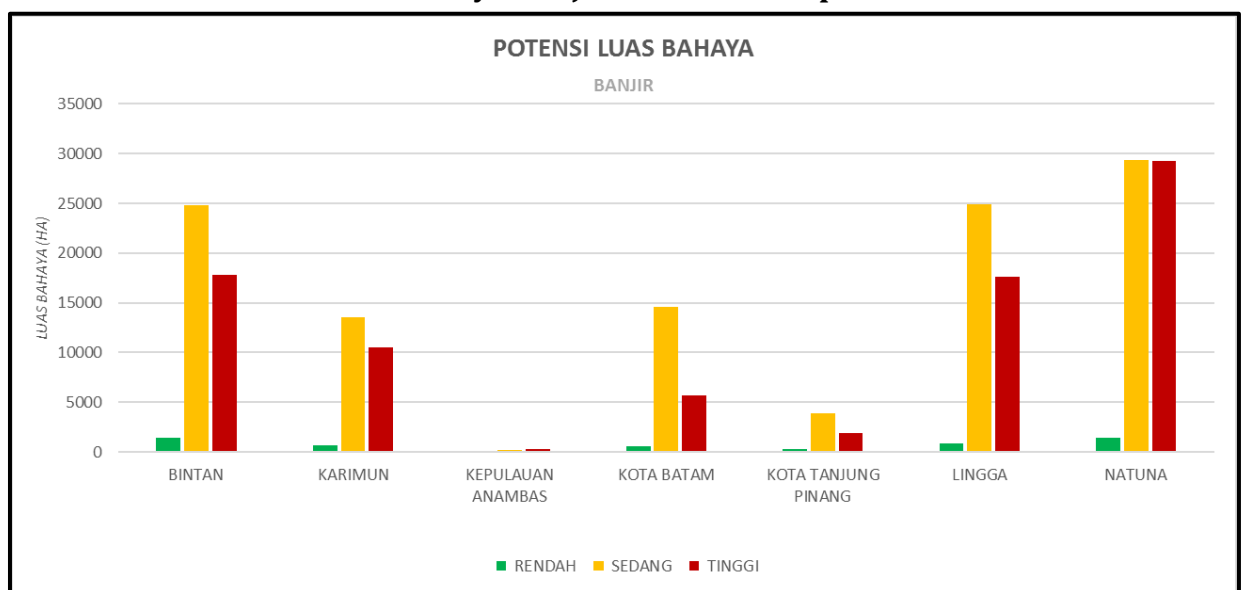
Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	KOTA BATAM	607	14.632	5.731	20.970	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	310	3.879	1.880	6.070	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		5.273	111.339	83.123	199.735	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak banjir.

Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **199.735 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas **5.273 Ha**, kelas sedang seluas **111.339 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas **83.123 Ha**

Gambar 2.3
Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya banjir. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Natuna dengan luas **1.413 Ha**. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Natuna dengan luas **29.372 Ha**. Sedangkan untuk kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna dengan luas **29.242 Ha**.

2. Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau pada tiap-tiap kabupaten, kelas bahaya tersebut terdistribusi dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya banjir bandang per kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	KEPULAUAN ANAMBAS	3	30	52	85	TINGGI
2	NATUNA	604	1.942	4.141	6.687	TINGGI
Provinsi Kepulauan Riau		606	1.971	4.194	6.771	TINGGI

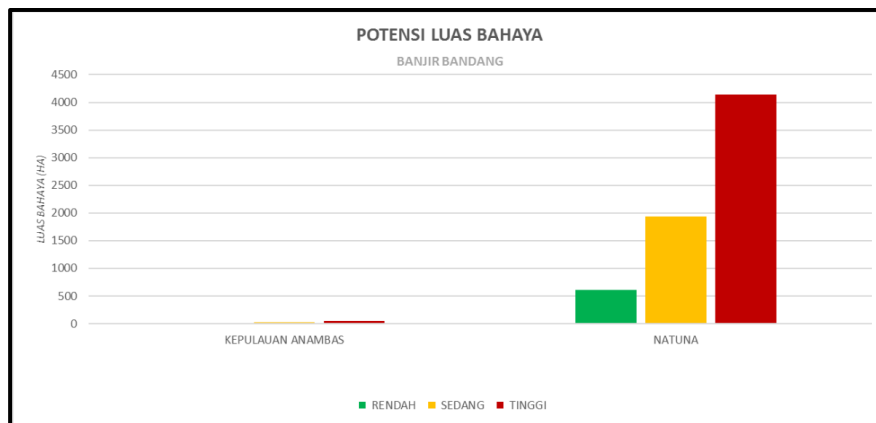
Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau adalah **6.771 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3

kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas **606 Ha**, kelas sedang seluas **1.971 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas **4.194 Ha**.

Gambar 2.4
Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bahaya banjir bandang. Bahaya banjir bandang berpotensi terjadi di dua kabupaten dengan luas bahaya tertinggi di kelas rendah adalah Kabupaten Natuna, yakni seluas **604 Ha**. pada kelas sedang yakni seluas **1.971 Ha** dan kelas tinggi seluas **4.194 Ha**.

3. Bahaya Cuaca Ekstrim

Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	23.278	46.792	59.108	129.179	TINGGI
2	KARIMUN	23.674	39.513	18.694	81.880	TINGGI



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

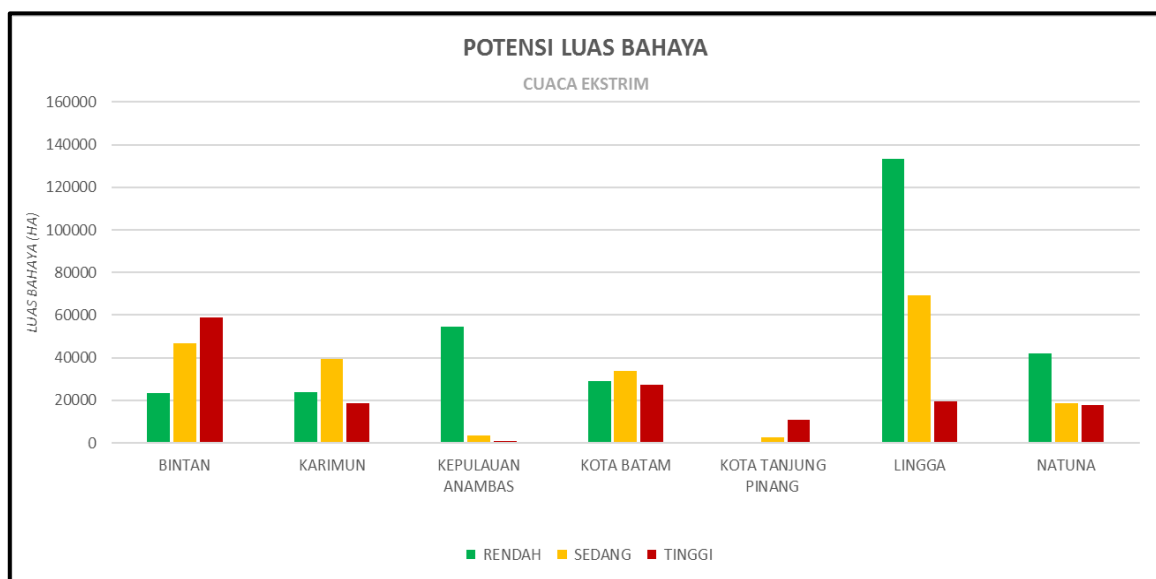
Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
3	KEPULAUAN ANAMBAS	54.463	3.397	681	58.541	RENDAH
4	LINGGA	133.562	69.102	19.683	222.347	SEDANG
5	NATUNA	42.133	18.813	17.913	78.859	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	29.099	33.973	27.282	90.355	TINGGI
2	KOTA TANJUNG PINANG	117	2.515	11.059	13.691	TINGGI
	Provinsi Kepulauan Riau	306.327	214.106	154.420	674.852	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak cuaca ekstrim.

Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah seluas **674.852 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas **306.327 Ha**, pada kelas sedang seluas **214.106 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas **154.420Ha**.

Gambar 2.5
Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Pada gambar di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim di di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dan sedang terdapat di Kabupaten Lingga dengan luas masing-masing yaitu **133.562 Ha** dan **69.102 Ha**. Sementara itu kabupaten yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi terdapat di Kabupaten Bintan yaitu **59.108 Ha**.

4. Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan **bencana** alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>).

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai dengan metode yang terdapat dalam Perka Nomor 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusunan tersebut terdiri dari tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk **garis** pantai. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter kemudian dilakukan penilaian berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring.

Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut di atas, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	9.551	1.688	2.538	13.777	RENDAH
2	KARIMUN	12.759	486	735	13.980	RENDAH

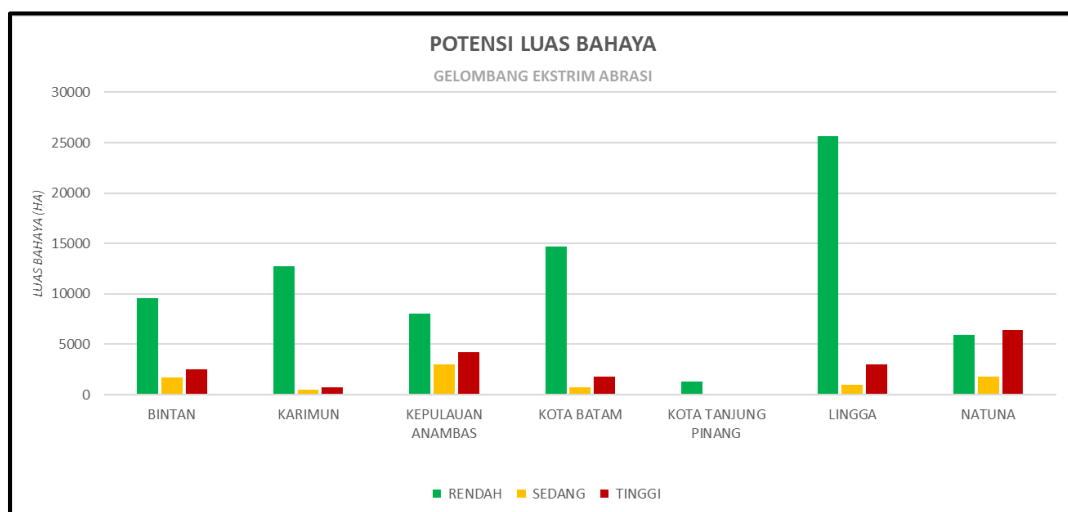
Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
3	KEPULAUAN ANAMBAS	8.026	3.002	4.257	15.284	TINGGI
4	LINGGA	25.650	1.014	3.006	29.669	TINGGI
5	NATUNA	5.965	1.780	6.418	14.163	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	14.678	735	1.754	17.168	TINGGI
2	KOTA TANJUNG PINANG	1.299	0	33	1.332	RENDAH
Provinsi Kepulauan Riau		77.927	8.705	18.741	105.373	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **105.373 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas **77.927 Ha**, pada kelas sedang seluas **8.705 Ha**, dan kelas tinggi dengan luas **18.741 ha**.

Gambar 2.6
Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dengan Kabupaten Lingga memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah seluas **25.650 Ha**. Untuk kelas sedang di Kabupaten Kepulauan Anambas seluas **3.002 Ha** Sementara itu untuk daerah yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi yaitu Kabupaten Natuna, yakni seluas **6.418 Ha**.

5. Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan. Dari penjelasan bencana gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut; (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan.

Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempa bumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Bahaya Luas (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A Kabupaten					
1 BINTAN	131.821	0	0	131.821	RENDAH
2 KARIMUN	91.275	0	0	91.275	RENDAH
3 KEPULAUAN ANAMBAS	59.014	0	0	59.014	RENDAH
4 LINGGA	222.347	0	0	222.347	RENDAH
5 NATUNA	200.904	0	0	200.904	RENDAH
B Kota					
1 KOTA BATAM	96.025	0	0	96.025	RENDAH
2 KOTA TANJUNG PINANG	14.456	0	0	14.456	RENDAH
Provinsi Kepulauan Riau	815.842	0	0	815.842	RENDAH

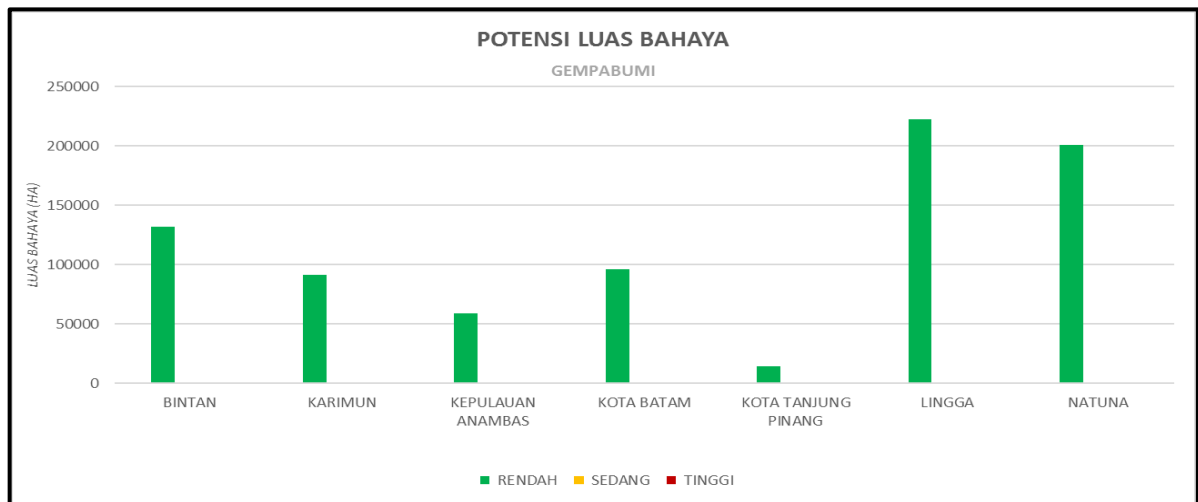
Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel diatas memperlihatkan potensi luas bahaya gempa bumi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap

bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota.

Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **815.842 Ha** dan berada pada kelas **Rendah**. Tidak ada daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam kelas bahaya gempa bumi sedang dan tinggi.

Gambar 2.7
Grafik Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana gempa bumi. Kabupaten Lingga adalah kabupaten terluas yang berpotensi terpapar bencana gempa bumi yakni **222.347 Ha**.

6. Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, social budaya dan politik (Peraturan Menteri Lingkungan Hutan dan Kehutanan Nomor P.32/MENLK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan). Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam dokumen ini, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

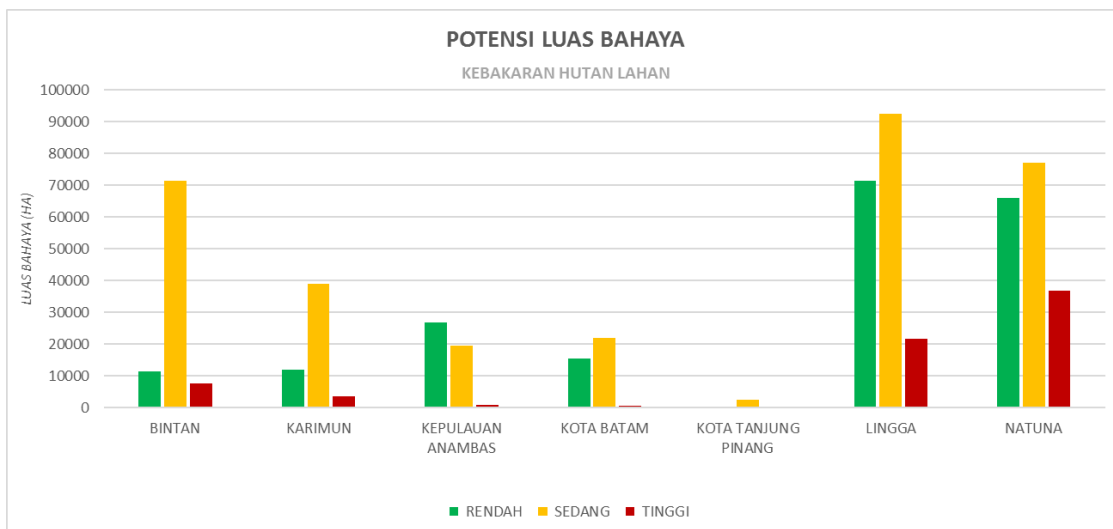
Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	11.261	71.575	7.528	90.364	SEDANG
2	KARIMUN	11.931	39.033	3.435	54.399	SEDANG
3	KEPULAUAN ANAMBAS	26.724	19.541	697	46.962	SEDANG
4	LINGGA	71.512	92.419	21.583	185.513	SEDANG
5	NATUNA	65.954	77.127	36.803	179.885	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	15.399	21.858	644	37.900	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	387	2.587	96	3.070	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		203.168	324.140	70.786	598.094	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel 2.15 merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Secara keseluruhan total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau adalah **598.094 Ha** tergolong kelas bahaya **Tinggi**. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah **203.168 Ha**, kelas sedang seluas **324.140 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi adalah seluas **70.786 Ha**.

Gambar 2.8
Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022–2026

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga memiliki luas tertinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah dan kelas sedang yaitu masing-masing seluas **71.512 Ha** dan **92.419 Ha**. Sementara itu untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kabupaten Natuna yakni seluas **36.803 Ha**.

7. Bahaya Kekeringan

Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.16
Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

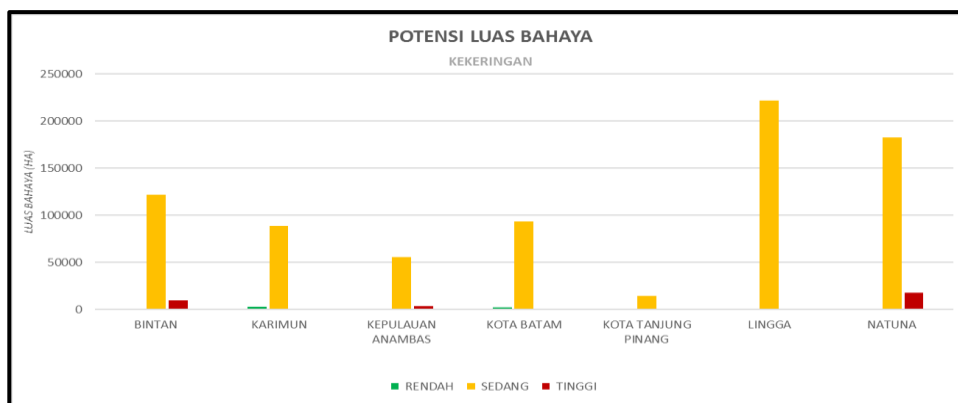
Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	0	122.023	9.798	131.821	TINGGI
2	KARIMUN	2.447	88.828	0	91.275	SEDANG
3	KEPULAUAN ANAMBAS	0	55.702	3.312	59.014	SEDANG
4	LINGGA	0	221.742	605	222.347	SEDANG
5	NATUNA	0	182.974	17.930	200.904	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	2.375	93.650	0	96.025	SEDANG
2	KOTA TANJUNG PINANG	0	14.456	0	14.456	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		4.823	779.374	31.645	815.842	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak kekeringan, sedangkan kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kekeringan.

Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **815.842 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah **4.823 Ha** dan kelas sedang seluas **779.374 Ha**, serta kelas tinggi seluas **31.645 Ha**.

Gambar 2.9
Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Kota Batam menjadi wilayah yang memiliki luas bahaya kekeringan dengan kelas **Rendah** terkecil yaitu seluas **2.375 Ha**. Wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang adalah Kabupaten Lingga, yaitu seluas **221.742 Ha**. Wilayah dengan luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna, yaitu seluas **17.930 Ha**.

8. Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut: kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

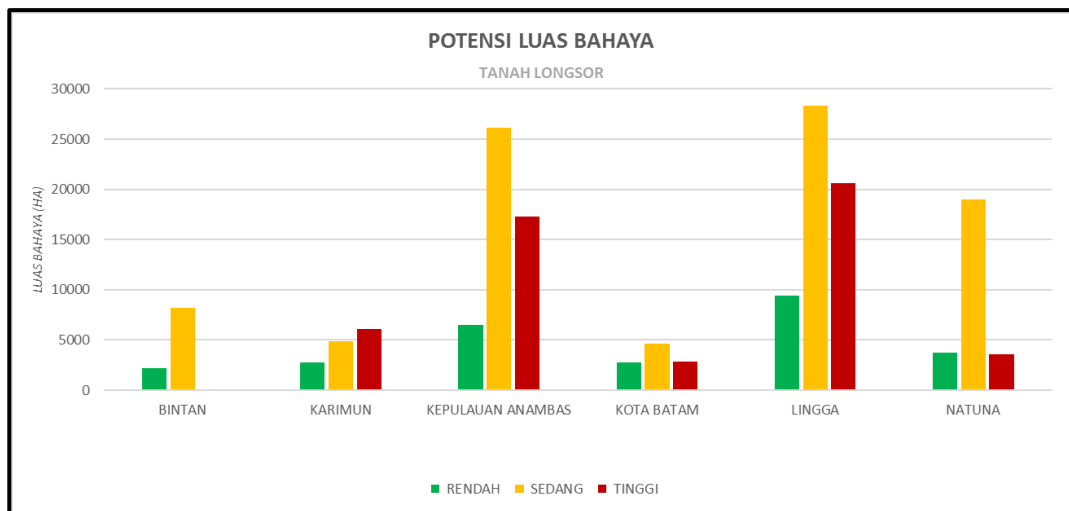
Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	2.157	8.191	0	10.348	SEDANG
2	KARIMUN	2.805	4.894	6.129	13.828	TINGGI
3	KEPULAUAN ANAMBAS	6.459	26.150	17.270	49.879	TINGGI
4	LINGGA	9.420	28.348	20.604	58.371	TINGGI
5	NATUNA	3.751	18.988	3.616	26.355	TINGGI
B	Kota					
1	KOTA BATAM	2.764	4.647	2.870	10.281	TINGGI
Provinsi Kepulauan Riau		27.355	91.218	50.489	169.062	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor.

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah **169.062 Ha** dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas **27.355 Ha**, kelas sedang seluas **91.218 Ha** dan kelas tinggi seluas **50.489 Ha**.

Gambar 2.10
Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Gambar di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana tanah longsor. Kabupaten Lingga adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah yaitu **9.420 Ha**, kelas sedang seluas **28.348 Ha** dan kelas tinggi dengan luas yaitu **20.604 Ha**.

9. Bahaya Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.

Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Luasan wilayah terdampak kegagalan teknologi berbeda untuk setiap kawasan tergantung kondisi daerah. Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

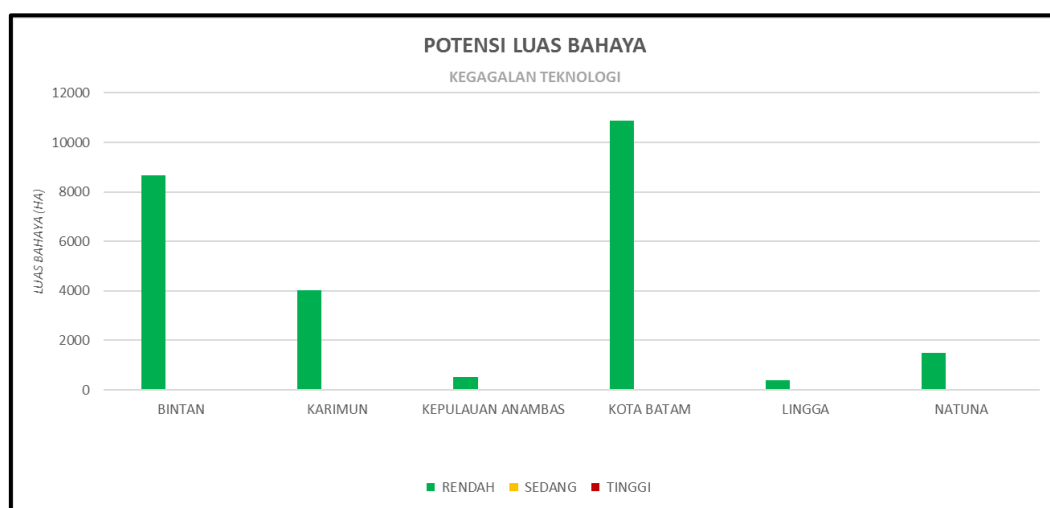
Kabupaten/Kota		Bahaya				Kelas
		Luas (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
A	Kabupaten					
1	BINTAN	8.674	0	0	8.674	RENDAH
2	KARIMUN	4.014	0	0	4.014	RENDAH
3	KEPULAUAN ANAMBAS	523	0	0	523	RENDAH
4	LINGGA	378	0	0	378	RENDAH
5	NATUNA	1.485	0	0	1.485	RENDAH
B	Kota					
1	KOTA BATAM	10.893	0	0	10.893	RENDAH
Provinsi Kepulauan Riau		25.967	0	0	25.967	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya kegagalan teknologi pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kegagalan teknologi.

Potensi luas bahaya kegagalan teknologi secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas **25.967** Ha dan berada pada kelas **Rendah**.

Gambar 2.11
Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kota Batam seluas **10.893 Ha**, sedangkan Kabupaten Lingga adalah wilayah yang memiliki luas terendah bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah dengan luas **378 Ha**.

10. Bahaya Covid-19

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya Covid-19 dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dokumen ini, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

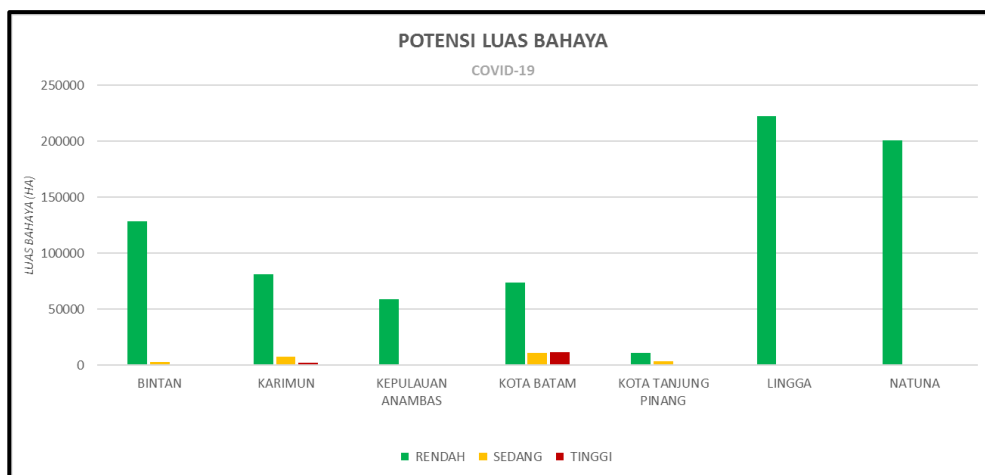
Tabel 2.19
Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota		Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	BINTAN	128.720	3.047	54	131.821	RENDAH
2	KARIMUN	81.375	7.668	2.233	91.275	SEDANG
3	KEPULAUAN ANAMBAS	58.746	268	0	59.014	RENDAH
4	LINGGA	222.347	0	0	222.347	RENDAH
5	NATUNA	200.846	58	0	200.904	RENDAH
B	Kota					
1	KOTA BATAM	73.581	10.789	11.655	96.025	TINGGI
2	KOTA TANJUNG PINANG	10.899	3.557	0	14.456	SEDANG
Provinsi Kepulauan Riau		776.514	25.386	13.942	815.842	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Potensi luas bahaya Covid-19 dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana. Potensi luas bahaya Covid-19 adalah **815.842 Ha** dan berada pada kelas **Tinggi**. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah **776.514 Ha**, kelas sedang seluas **25.386 Ha**, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas **13.942 Ha**.

Gambar 2.12
Grafik Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022-2026

Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana Covid-19. Kabupaten Lingga adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi Covid-19 pada kelas rendah seluas **222.347 Ha**. Sedangkan daerah dengan luas bahaya tertinggi pada kelas sedang dan tinggi ada pada Kota Batam yang secara berturut-turut sebesar **10.789 Ha** dan **11.655 Ha**.

2.1.1.8 Kondisi Demografis

Demografi berasal dari kata *demos* yang berarti penduduk dan *grafein* yang berarti gambaran. Berdasarkan asal kata tersebut, demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Kependudukan itu sendiri menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk secara umum memiliki pola meningkat di setiap tahunnya di mana pada tahun 2022 mencapai angka 2.179.820 jiwa. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 2.064.564 jiwa. Penurunan ini selain dikarenakan perbedaan metodologi dalam penghitungan penduduk (2020-2022 menggunakan proyeksi penduduk tahun 2020), juga sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kematian cukup masif. Adapun jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Batam sebagai pusat perekonomian di Kepulauan Riau dengan distribusi penduduk sebesar 58,24 persen.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022
Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Kepulauan Riau	2.136.521	2.189.653	2.064.564	2.118.240	2.179.820
Karimun	231.145	232.797	253.457	259.450	266.180
Bintan	157.927	159.403	159.518	162.560	165.780
Natuna	76.968	77.771	81.495	83.360	85.450
Lingga	89.501	89.781	98.633	100.660	102.850
Kepulauan Anambas	41.927	42.309	47.402	48.740	50.300
Kota Batam	1.329.773	1.376.009	1.196.396	1.230.100	1.269.410
Kota Tanjungpinang	209.280	211.583	227.663	23.370	239.850

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim sebanyak 2.179.820 jiwa yang terdiri atas 1.112.152 jiwa penduduk laki-laki dan 1.067.668 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,2 ini berarti di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki. Adapun kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 264 penduduk per km², di mana wilayah yang terpadat berada di Kota Tanjung pinang sebesar 1.595 penduduk per km².

Tabel 2.21
Karakteristik Kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	2.136.521	2.189.653	2.064.564	2.118.239	2.179.820
Laki-laki	1.089.442	1.115.765	1.053.296	1.080.717	1.112.152
Perempuan	1.047.079	1.073.888	1.011.268	1.037.522	1.067.668
Laju Pertumbuhan Penduduk	2,6	2,5	-5,7	1,94	3,15
Kepadatan Penduduk	260,0	267,0		258,27	264,0
Rasio Jenis Kelamin	104,1	103,9	104,2	104,16	104,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau



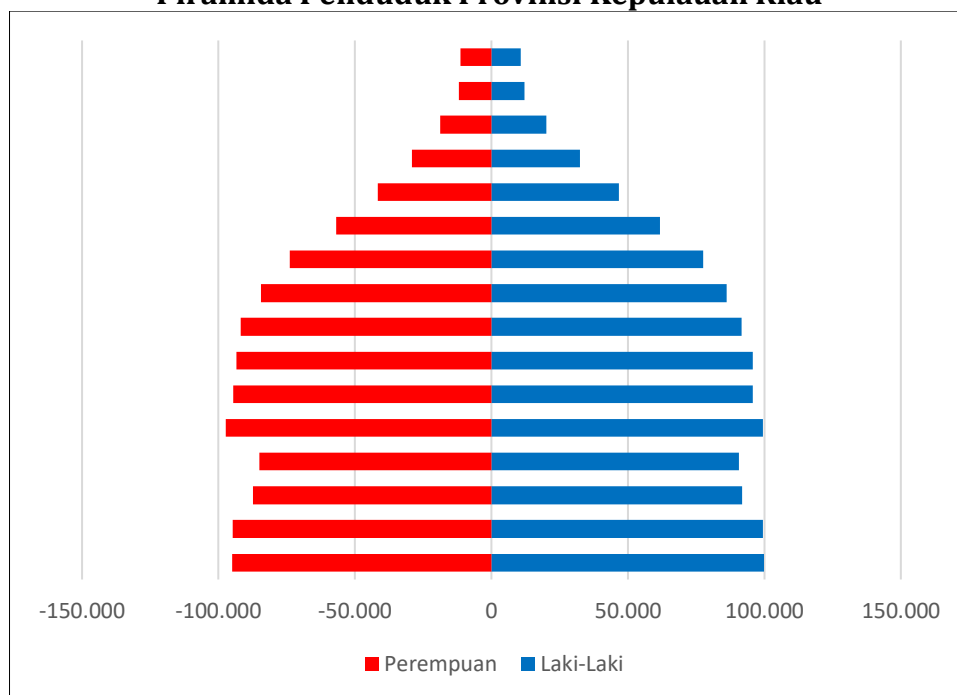
Jika dilihat dari persebaran kelompok umurnya, maka jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur penduduk 20-24 tahun dengan jumlah 196.799 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada umur di atas 75 tahun. Jika dilakukan pengolahan pada tabel tersebut, maka dapat terlihat piramida penduduk Kepulauan Riau. Piramida penduduk Kepulauan Riau menunjukkan dominasi penduduk usia muda di mana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, mengingat perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan (utamanya jangka panjang).

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	99.767	94.952	194.719
5-9	99.549	94.766	194.315
10-14	91.920	87.432	179.352
15-19	90.703	85.094	175.797
20-24	99.503	97.296	196.799
25-29	95.689	94.682	190.371
30-34	95.730	93.475	189.205
35-39	91.639	91.865	183.504
40-44	86.092	84.357	170.449
45-49	77.647	73.884	151.531
50-54	61.728	56.938	118.666
55-59	46.653	41.678	88.331
60-64	32.487	29.201	61.688
65-69	20.143	18.738	38.881
70-74	12.123	11.883	24.006
75+	10.779	11.427	22.206
Provinsi Kepulauan Riau	1.112.152	1.067.668	2.179.820

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 2.13
Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Provinsi Kepulauan Riau utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Provinsi Kepulauan Riau.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier.



Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

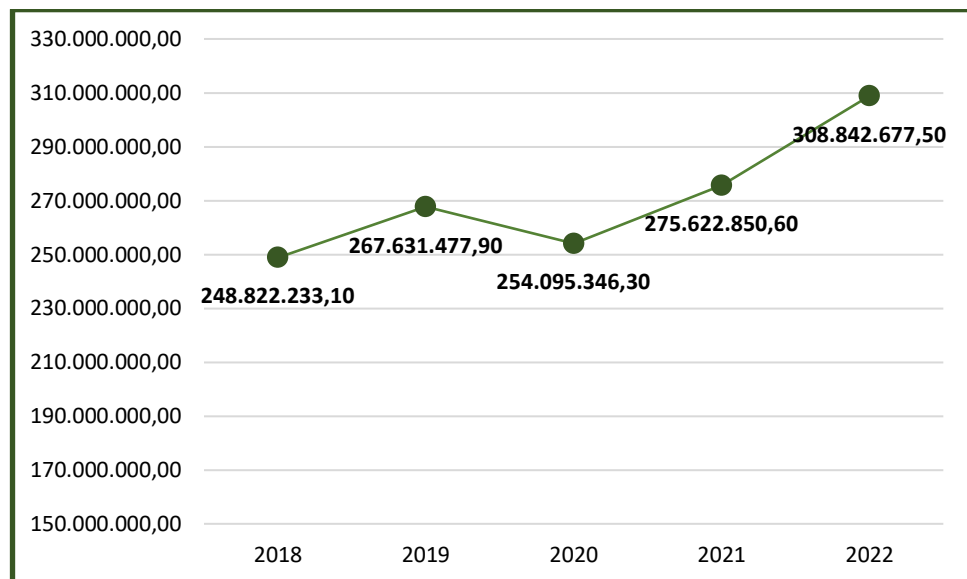
Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku pada 2022 mencapai 308.842.677,50 juta rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 275.622.850,60 juta rupiah, sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami kenaikan.

Gambar 2.14
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022 (Juta Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2.23
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.100.215,59	8.223.770,10	8.047.270,10	8.461.827,90	9.225.890,90
B	Pertambangan dan Penggalian	35.148.524,03	34.937.670,00	28.365.899,70	34.696.081,00	38.839.295,30
C	Industri Pengolahan	91.792.574,06	100.705.378,60	105.789.964,40	115.852.489,00	126.038.598,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.644.609,63	2.763.729,30	2.602.411,30	2.733.325,10	3.263.278,30
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	288.735,55	291.287,10	281.458,40	279.639,10	306.162,70
F	Konstruksi	46.628.248,31	52.239.254,80	49.317.721,90	53.159.158,00	59.316.269,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	22.074.794,10	24.314.345,42	21.561.951,70	22.474.866,10	27.284.127,10
H	Transportasi dan Pergudangan	7.648.632,38	7.219.023,71	4.111.948,10	3.826.598,70	5.887.715,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.585.876,45	6.208.870,52	3.388.221,60	3.167.569,30	4.874.867,80
J	Informasi dan Komunikasi	5.016.209,28	5.603.091,08	6.483.543,90	7.078.070,20	7.719.849,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.781.343,52	7.271.530,18	6.991.384,70	7.191.818,70	7.906.248,30
L	Real Estate	3.467.236,77	3.563.184,73	3.191.314,80	3.116.588,40	3.353.474,10
M,N	Jasa Perusahaan	12.475,70	11.378,51	5.815,10	6.634,30	8.476,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.385.002,87	6.791.467,49	7.347.301,60	6.697.960,20	7.202.778,50
P	Jasa Pendidikan	3.708.434,66	3.849.230,76	3.896.179,00	3.878.478,90	4.182.918,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.228.235,58	2.305.965,16	2.277.152,30	2.571.774,70	2.646.255,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.311.084,62	1.332.300,44	435.807,90	429.971,00	786.472,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		248.822.233,10	267.631.477,90	254.095.346,30	275.622.850,60	308.842.677,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha dalam perekonomian di Kepulauan Riau, maka lapangan usaha yang mendominasi adalah Kategori Industri Pengolahan di mana nilai PDRBnya mencapai 126 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadikan struktur



ekonomi di Kepulauan Riau mencapai 40,81 persen dari Kategori Industri Pengolahan. Dominasi struktur ekonomi disusul oleh Kategori Konstruksi (19,21%); Pertambangan dan Penggalian (12,58%); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda (8,83%).

Tabel 2.24
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	Kontribusi Lapangan Usaha				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,26	3,09	3,17	3,07	2,99
B	Pertambangan dan Penggalian	14,13	13,05	11,16	12,59	12,58
C	Industri Pengolahan	36,89	37,63	41,63	42,03	40,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,06	1,03	1,02	0,99	1,06
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
F	Konstruksi	18,74	19,52	19,41	19,29	19,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	8,87	9,09	8,49	8,15	8,83
H	Transportasi dan Pergudangan	3,07	2,70	1,62	1,39	1,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,24	2,32	1,33	1,15	1,58
J	Informasi dan Komunikasi	2,02	2,09	2,55	2,57	2,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,73	2,72	2,75	2,61	2,56
L	Real Estate	1,39	1,33	1,26	1,13	1,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,57	2,54	2,89	2,43	2,33
P	Jasa Pendidikan	1,49	1,44	1,53	1,41	1,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,86	0,90	0,93	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,53	0,50	0,17	0,16	0,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau mencapai titik tertinggi selama lima tahun terakhir di tahun 2022. Tingginya capaian perekonomian ini merupakan titik balik dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga mencapai -3,80 persen. Adapun industri pengolahan sebagai kategori yang memiliki dominasi struktur ekonomi juga mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di angka 4,55 persen. Namun pada kategori pertambangan dan penggalian, terjadi

kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral sebagai dampak kondisi global yang belum menentu, khususnya dampak geopolitik pada krisis Rusia-Ukraina.

Tabel 2.25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,16	-0,7	-4,39	-2,65	3,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1,35	0,09	-4,17	-0,74	-7,00
C	Industri Pengolahan	4,14	6,25	3,25	6,45	4,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,32	3,3	-4,38	4,32	16,38
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,07	-0,06	-2,78	0,01	8,82
F	Konstruksi	7,93	8,23	-6,4	4,74	5,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6,28	6,1	-12,72	1,07	13,59
H	Transportasi dan Pergudangan	0,91	-8,87	-40,23	-1,7	38,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,17	9,95	-41,01	-6,69	49,71
J	Informasi dan Komunikasi	10,71	11,84	16,55	9,59	8,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,77	4,82	-3,1	0,73	4,17
L	Real Estate	-0,27	0,12	-8,33	-3,56	4,64
M,N	Jasa Perusahaan	6,84	-8,82	-41,88	14,14	10,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7	1,52	7,97	-8,42	3,36
P	Jasa Pendidikan	1,32	0,44	-8,2	-3,38	3,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,04	2,78	-2,05	12,3	-0,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	18,4	0,86	-68,83	-3,4	69,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,47	4,83	-3,80	3,43	5,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Jika dilihat pada capaian PDRB per Kabupaten/Kota, terlihat bahwa secara umum pencapaian perekonomian makro wilayah mengalami kenaikan di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19. Adapun nilai PDRB tertinggi berada di Kota Batam dengan capaian 194,84 triliun rupiah atau mencapai 63,09 persen dari seluruh struktur ekonomi di Kepulauan Riau. Sedangkan capaian PDRB terendah berada di Kabupaten Lingga dengan nilai PDRB sebesar 4,85 triliun rupiah atau sebesar 1,57 persen dari seluruh capaian perekonomian Kepulauan Riau.

Tabel 2.26
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Milyar Rp)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Kepulauan Riau	248.822,23	267.631,48	254.095,35	275.622,85	308.842,678
Karimun	12.628,78	13.544,17	13.310,63	14.195,74	15.554,50
Bintan	19.597,81	21.303,01	20.743,70	21.251,13	22.995,78
Natuna	21.123,65	21.795,50	18.405,91	20.870,16	24.265,43
Lingga	3.969,33	4.274,27	4.292,43	4.499,27	4.852,61
Kepulauan Anambas	16.849,27	17.439,77	14.453,58	16.697,53	19.909,09
Kota Batam	151.285,14	164.490,12	161.364,18	172.843,90	194.836,26
Kota Tanjungpinang	19.078,15	20.167,98	19.665,01	20.099,37	21.792,47

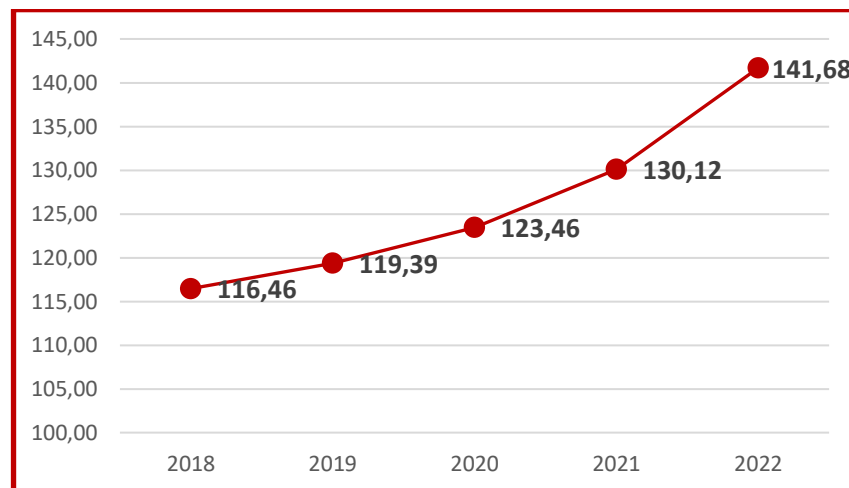
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

2. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena pembagian nilai tambah secara langsung dengan jumlah penduduk, namun indikator ini dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Peningkatan PDRB per kapita secara umum menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat secara makro meningkat meskipun pemerataannya masih belum bisa diperkirakan. Kondisi peningkatan tersebut dialami oleh Kepulauan Riau di mana pada tahun 2022 angka PDRB per Kapita mencapai 141,68 juta rupiah. Adanya kenaikan nilai PDRB per Kapita ini juga secara umum terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Kepulauan Riau dengan capaian PDRB per Kapita tertinggi berada di Kepulauan Anambas (395,84 juta rupiah) dan Natuna (283,99 juta rupiah). Adapun PDRB per Kapita terendah berada di Kabupaten Lingga dengan capaian sebesar 47,18 juta rupiah.

Gambar 2.15
Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022 (Juta Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2.27
Nilai PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rp)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Kepulauan Riau	116,46	119,39	123,46	130,12	141,68
Karimun	54,64	57,73	52,64	54,71	58,44
Bintan	124,09	132,14	130,15	130,73	138,71
Natuna	274,45	276,59	226,34	250,35	283,99
Lingga	44,35	47,45	43,58	44,70	47,18
Kepulauan Anambas	401,87	409,58	306,11	342,60	395,84
Kota Batam	113,77	115,79	135,40	140,40	153,49
Kota Tanjungpinang	91,16	94,40	86,62	86,13	90,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

3. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horizontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sulitnya kondisi geografis wilayah, terlebih cukup banyaknya wilayah kepulauan dengan domisili penduduk yang merata.

Secara umum terjadi penurunan indeks gini di Kepulauan Riau yang mengindikasikan pemerataan kehidupan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Namun kondisi ini sempat kembali meningkat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di tahun 2021 di mana indeks gini meningkat kembali menjadi 0,339, meskipun tahun berikutnya menurun hingga 0,325. Pola fluktuasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena menjadi salah satu *early warning* bahwa masyarakat mengalami kerentanan dalam kesenjangan kehidupan, khususnya terkait kesejahteraan. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan strategis untuk mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan dan kembali melebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.28
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Kepulauan Riau	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325
Karimun	0,350	0,303	0,315	0,307	0,288
Bintan	0,325	0,300	0,325	0,272	0,288
Natuna	0,326	0,299	0,337	0,300	0,291
Lingga	0,289	0,282	0,281	0,289	0,277
Kepulauan Anambas	0,286	0,281	0,296	0,304	0,313
Kota Batam	0,314	0,331	0,323	0,334	0,336
Kota Tanjungpinang	0,320	0,314	0,345	0,347	0,347

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

4. Laju Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan suatu daerah atau wilayah. Dengan inflasi dapat diukur persentase kenaikan harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat sehingga perlu adanya kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah.

Selama kurun waktu 2018 hingga 2022 laju inflasi tahunan menunjukkan peningkatan dari sebesar 3,47 persen pada tahun 2018, menjadi 5,83 persen pada tahun 2022. Tingkat inflasi *year on year* (yoy) tahun 2022 sebesar 5,83 persen, lebih besar



dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 sebesar 2,26 persen. Dari 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi *year on year* (yoy) sebesar 5,95 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 4,96 persen. Adapun jika dibandingkan dengan angka nasional, maka pola senada terjadi antara Kepulauan Riau dan Nasional namun pada tahun terakhir capaian inflasi lebih tinggi Kepulauan Riau dibandingkan angka nasional yang mencapai 5,51 persen.

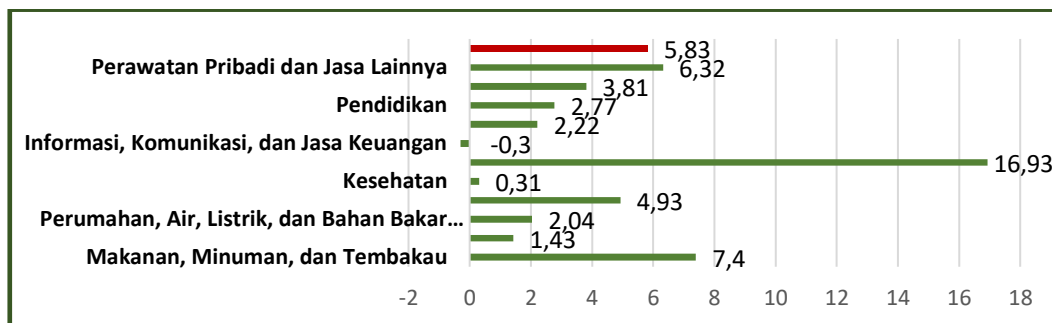
Tabel 2.29
Laju Inflasi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
Provinsi Kepulauan Riau	3,47	2,03	1,18	2,26	5,83
Kota Batam	3,65	1,97	1,12	2,45	5,95
Kota Tanjungpinang	2,36	2,4	1,66	0,86	4,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Secara umum, laju inflasi Kepulauan Riau tahun 2022 tergolong cukup tinggi di mana kelompok pengeluaran transportasi merupakan pengeluaran dengan inflasi tertinggi di Kepulauan Riau. Kelompok ini pada Desember 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 2,05 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy, yaitu: bensin sebesar 1,01 persen; angkutan udara sebesar 0,80 persen; dan angkutan laut sebesar 0,06 persen. Adapun kelompok pengeluaran dengan inflasi tinggi berikutnya adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kelompok ini pada Desember 2022 memberikan andil/sumbangan inflasi yoy sebesar 2,17 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy yaitu: rokok kretek filter sebesar 0,41 persen; kangkung sebesar 0,20 persen; daging ayam ras sebesar 0,17 persen; bayam sebesar 0,16 persen; dan telur ayam ras sebesar 0,14 persen.

Gambar 2.16
Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

5. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara Nasional berdasarkan konsep internasional oleh Badan Pusat Statistik.

Dari pola yang terlihat, angka kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami penurunan dimana tingkat kemiskinan sebesar 6,03 persen di tahun 2022. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian pemerintah di mana garis kemiskinan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kondisi ini diperparah dengan fluktuasinya indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan dengan capaian masing-masing pada tahun 2022 sebesar 1,05 dan 0,25.

Tabel 2.30
Karakteristik Kemiskinan Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	131,68	128,46	131,97	144,46	151,68
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,2	5,9	5,92	6,12	6,03*
Garis Kemiskinan (Rp)					
Perkotaan	563.993	597.894	616.743	644.601	687.245



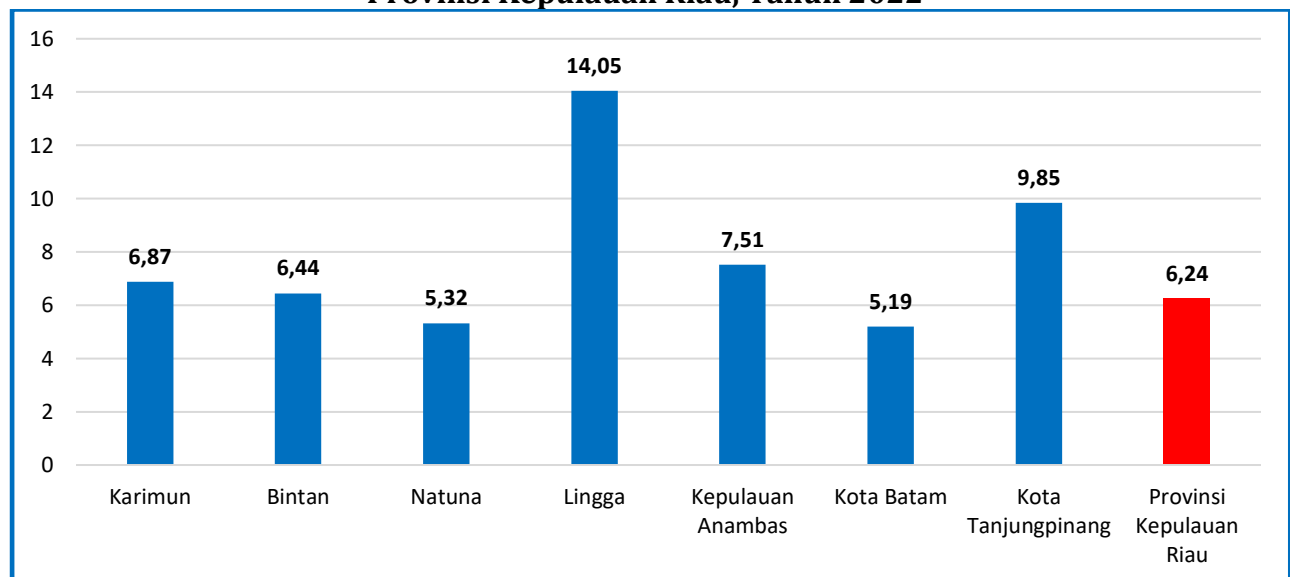
Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Perdesaan	528.788	556.248	595.249	614.746	659.308
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,00	0,69	1,11	1,07	1,05
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,24	0,12	0,28	0,28	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

*data bulan september

Jika dijabarkan menurut kabupaten/kota, maka angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Lingga dengan tingkat kemiskinan sebesar 14,05 persen. Adapun angka kemiskinan terendah adalah Kota Batam dengan tingkat kemiskinan 5,19 persen dan Natuna dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,32 persen. Meskipun memiliki angka kemiskinan terendah, Kota Batam memberikan sumbangan terbesar pada angka kemiskinan di Kepulauan Riau dengan 82,59 ribu jiwa yang berstatus penduduk miskin diikuti Kota Tanjung Pinang sebanyak 21,67 ribu jiwa penduduk miskin.

Gambar 2.17
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Bulan Maret (%)
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari beberapa aspek, namun dari seluruh aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Provinsi Kepulauan Riau.

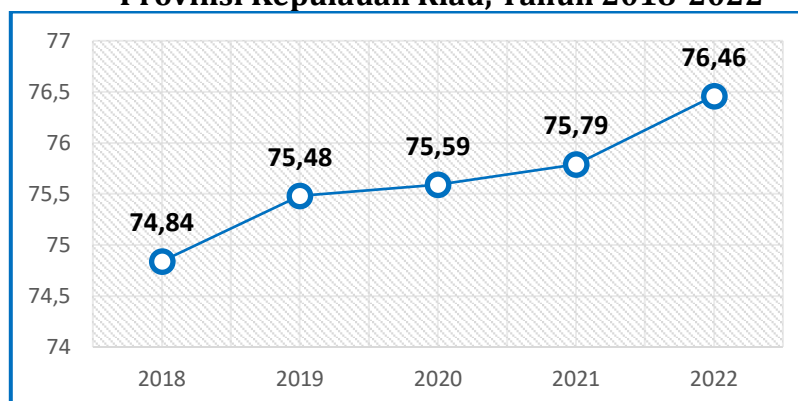
1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Peningkatan perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan capaian kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator yang disusun oleh Angka Harapan Hidup sebagai Indeks Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan dan Pengeluaran per kapita sebagai Indeks Hidup Layak.

Secara umum, pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau meningkat cukup signifikan di mana pada tahun 2018 memiliki capaian IPM sebesar 74,84 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 76,46. Meskipun sempat mengalami penurunan pada komponen standar hidup layak di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19, namun pada akhir penghitungan dengan formulasi IPM tetap menunjukkan pola positif.

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2.31
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Wilayah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,64	69,8	69,96	70,12	70,5
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/Kapita/Tahun	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Seluruh wilayah kabupaten/kota di Kepulauan Riau mengalami kenaikan IPM. Adapun IPM terbesar berada di Kota Batam dengan capaian 81,67 dan disusul oleh IPM Kota Tanjungpinang dengan capaian 79,64. Adapun kelima kabupaten lainnya, memiliki IPM di bawah angka Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.32
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

Wilayah	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM
Nasional	71,85	13,10	8,69	11.479	72,91
Provinsi Kepulauan Riau	70,50	12,99	10,37	14.469	76,46
Karimun	71,53	12,59	8,48	12.304	72,65
Bintan	70,76	13,27	8,70	14.739	74,99
Natuna	65,76	13,92	8,96	14.834	73,47
Lingga	61,44	12,61	7,12	12.134	66,57
Kepulauan Anambas	67,73	12,89	7,38	12.137	69,61
Kota Batam	73,62	13,32	11,17	18.506	81,67
Kota Tanjungpinang	72,49	14,14	10,49	15.864	79,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

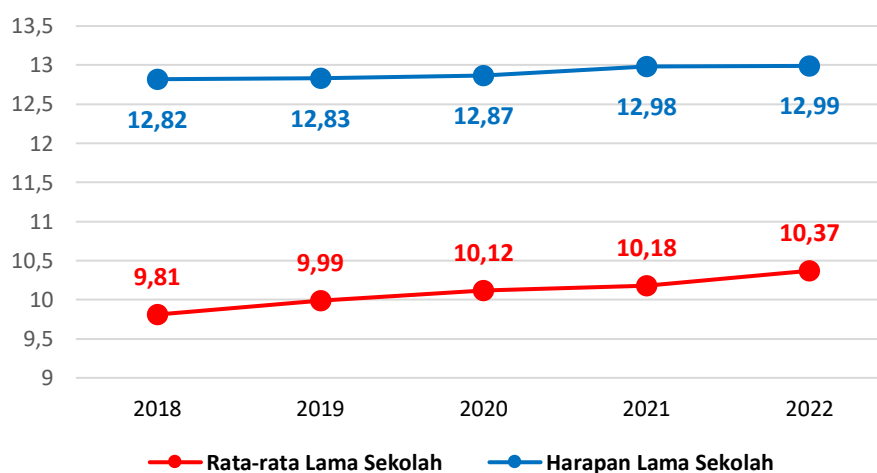
2. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang

pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan di setiap tahunnya di mana pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah sebesar 9,81 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai 10,37 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, sempat mengenyam bangku pendidikan hingga 10,37 tahun atau secara rata-rata telah menduduki jenjang pendidikan hingga SMA kelas 2 Semester pertama.

Gambar 2.19
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah, capaian harapan lama sekolah juga mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya meskipun lebih landai pergerakannya. Pada tahun 2018, harapan lama sekolah di Kepulauan Riau sebesar 12,82 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 12,99 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah (kurang lebih 7 tahun) memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 12,99 tahun atau menduduki jenjang pendidikan hingga kuliah semester ke dua.

Kota Batam merupakan wilayah yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di Kepulauan Riau dengan capaian 11,17 tahun. Namun dari sisi harapan lama sekolah, angka Kota Batam masih di bawah Kota Tanjungpinang yang mencapai 14,14 tahun. Adapun capaian rata-rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Lingga dengan capaian 7,12 tahun dan harapan lama sekolah terendah adalah Kabupaten Karimun dengan capaian 12,59 tahun.

Tabel 2.33
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Wilayah	Harapan Lama Sekolah					Rata-rata Lama Sekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69
Provinsi Kepulauan Riau	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37
Karimun	12,16	12,3	12,42	12,57	12,59	7,81	7,92	8,17	8,18	8,48
Bintan	12,75	12,95	13,1	13,26	13,27	8,35	8,36	8,44	8,67	8,70
Natuna	13,88	13,89	13,9	13,91	13,92	8,71	8,72	8,73	8,92	8,96
Lingga	12,43	12,44	12,45	12,59	12,61	6,27	6,51	6,67	6,88	7,12
Kepulauan Anambas	12,32	12,75	12,81	12,88	12,89	6,70	6,91	7,17	7,34	7,38
Kota Batam	12,95	13,15	13,16	13,17	13,32	11,12	11,13	11,14	11,15	11,17
Kota Tanjungpinang	14,08	14,09	14,12	14,13	14,14	9,98	9,99	10,25	10,26	10,49

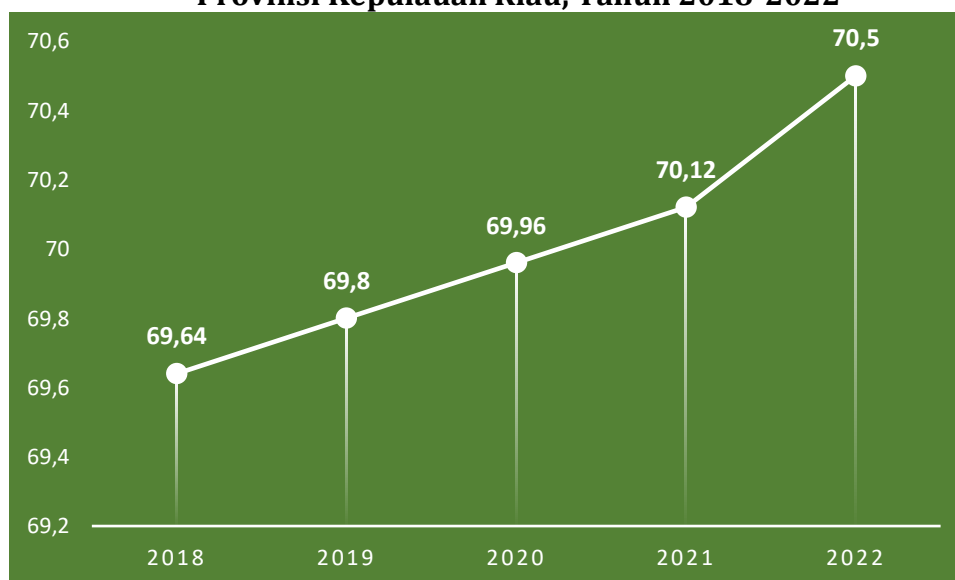
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

3. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kepulauan Riau terlihat pada indikator capaian pembangunan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari capaian angka harapan hidup Kepulauan Riau terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki kendala dalam aksesibilitas wilayah, peningkatan ini merupakan prestasi dan kondisi ini harus terus diupayakan melalui program strategis pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal cakupan dan pemerataan layanan kesehatan. Angka harapan hidup Kepulauan Riau meningkat hingga mencapai 70,50 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022, akan memiliki kesempatan hidup hingga berumur 70-71 tahun.

Gambar 2.20
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Jika melihat perbandingan antar kabupaten/kota, maka terlihat bahwa angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Batam yang mencapai 73,62 tahun dan diikuti oleh Kota Tanjungpinang dengan capaian sebesar 72,49 tahun. Adapun angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Lingga dengan capaian 61,44 tahun diikuti Kabupaten Natuna dengan capaian 65,76 tahun.

Tabel 2.34
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Wilayah	Harapan Hidup				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85
Provinsi Kepulauan Riau	69,64	69,8	69,96	70,12	70,50
Karimun	70,52	70,71	70,91	71,11	71,53
Bintan	70,21	70,3	70,38	70,46	70,76
Natuna	64,57	64,81	65,06	65,31	65,76
Lingga	62,92	62,39	62,06	61,75	61,44
Kepulauan Anambas	66,91	67,06	67,21	67,36	67,73
Kota Batam	73,24	73,29	73,33	73,36	73,62
Kota Tanjungpinang	71,93	72,02	72,1	72,18	72,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian pelestarian kesenian, budaya, serta olahraga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan merupakan penanda jati diri yang menjadi kekhasan dan karakter suatu daerah. Kekayaan budaya seharusnya dikelola dengan baik agar menjadi penggerak dan modal pembangunan manusia.

1. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembangan seni dan budaya di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dalam beberapa hal yaitu dengan pelestarian kesenian sesuai dengan tradisi lokal pada sanggar kesenian. Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal dengan target capaian pada tahun 2021 sebesar 72,03 persen, pada tahun 2020 sudah mencapai 78,48 persen. Data sanggar seni yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 323 sanggar dan pada tahun 2017 setelah diverifikasi ulang ada sanggar seni yang tidak aktif lagi sebanyak 114 sehingga menjadi 209 hingga tahun 2020. Meskipun jumlah sanggar tetap, namun sanggar yang aktif mengajarkan kesenian dan



tradisi lokal setiap tahun bertambah, penambahan signifikan pada tahun 2019 sebesar 136 sanggar.

Tabel 2.35
Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Sanggar	Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal
2016	323	10
2017	206	13
2018	207	27
2019	208	136
2020	209	164

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dengan demikian, grup kesenian per 10.000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 0,92 grup. Indikator grup kesenian ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 0,94 grup. Sementara, gedung kesenian dari tahun 2016-2020 tidak ada unit gedung kesenian yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki gedung kesenian khusus yang representatif untuk pengembangan kesenian.

Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Grup Kesenian Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk
2016	1,02	-
2017	0,99	-
2018	0,96	-
2019	0,94	-
2020	0,92	-

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2. Fokus Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi hal yang penting dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan kepemudaan melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan prestasi kepemudaan, pelatihan

kewirausahaan kepada pemuda dan kegiatan lain yang dapat mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat akan mendorong tumbuhnya klub-klub olahraga. Keberadaan klub ini dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya prestasi olahraga secara lokal maupun nasional. Munculnya klub olahraga di Provinsi Kepulauan Riau baru dimulai tahun 2020 sebesar 0,09. Sementara, pemerintah belum optimal dalam menyediakan gedung olahraga dan fasilitas pendukungnya. Salah satu Sarpras yang dibangun adalah gedung olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat dan klub olahraga dalam latihan rutin untuk mendukung tumbuhnya bibit-bibit atlet daerah.

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Klub Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk
2016	-	-
2017	-	-
2018	-	-
2019	0,09	-
2020	0,09	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis aspek pelayanan umum yang terbagi menjadi fokus layanan urusan pemerintah wajib dasar, fokus layanan urusan pemerintah wajib non-dasar, dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan berikut ini.

1. Urusan Pendidikan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Dasar hukum SPM Bidang Urusan Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Target pencapaian SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada target dan indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 persen. Namun demikian, pada tahun 2022 realisasi pencapaian kedua indikator SPM belum mampu memenuhi target tersebut. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pendidikan Menengah	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK	100%	85,42
2	Pendidikan Khusus	Jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB	100%	74,76

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan masih belum dilakukan secara optimal. Di mana dari dua indikator tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bahkan secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga perlu perhatian khusus pada urusan pendidikan, khususnya dalam menjalankan pelayanan minimal pendidikan menengah maupun pendidikan khusus.

Capaian Kinerja Bidang Urusan Pendidikan



Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan pendidikan menengah; pengelolaan pendidikan khusus; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi; penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

APK dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini,



pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu SMA sederajat. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Dari angka partisipasi pendidikan tersebut, terdapat beberapa anak yang tidak mengenyam jenjang pendidikan menengah. Kondisi ini disebabkan karena beberapa hal seperti belum mendapatkan akses layanan pendidikan (Letak Sekolah Lanjutan Jauh dari Tempat Tinggal dan Tidak ada Transportasi), Anak tersebut bekerja atau menjadi pekerja Anak, Anak Penyandang Disabilitas atau anak yang sedang berurusan dengan Hukum.

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APK					
SMA/SMK/MA/Paket C	92,12	94,92	96,02	111,97	106,72
Sekolah Luar Biasa (SLB)	72,00	77,03	82,49	92,32	85,35
APM					
SMA/SMK/MA/Paket C	77,32	76,70	77,20	89,69	85,43

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

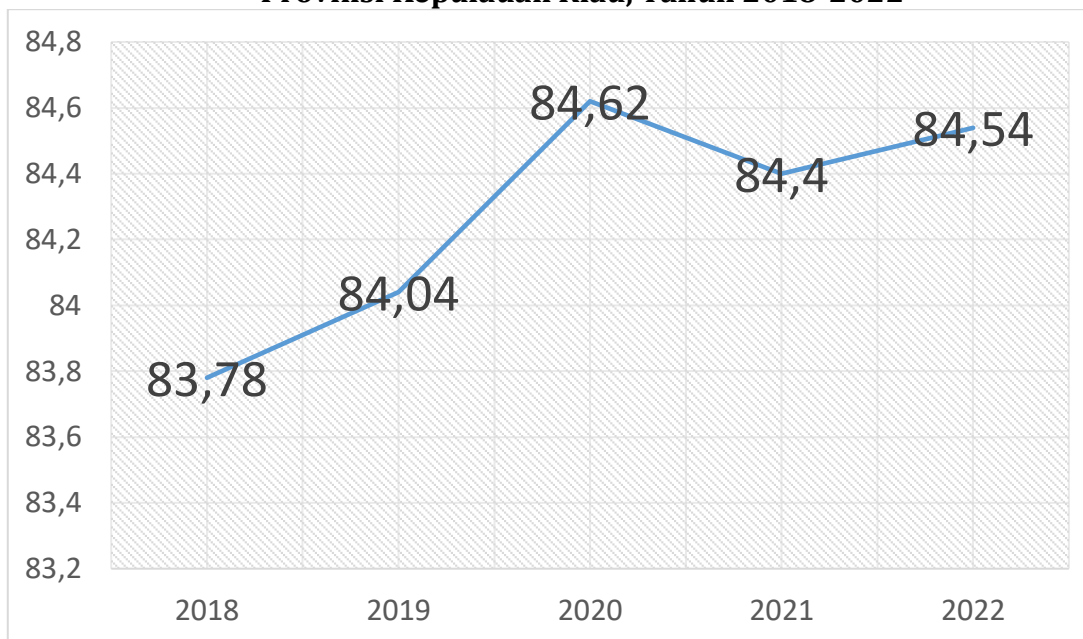
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Negeri dan Swasta

Sementara itu, data Angka Partisipasi Sekolah yang merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai, secara umum pada



jenjang pendidikan MA/SMA/SMK mengalami kenaikan di mana pada tahun 2022 mencapai 84,54.

Gambar 2.21
Angka Partisipasi Sekolah
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Sedangkan rasio murid terhadap jumlah gedung sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Rasio Murid Terhadap Jumlah Gedung Sekolah
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Murid per Gedung Sekolah SD/MI					
Sekolah Dasar	1:244	1:241	1:229	1:234	1:232
Madrasah Ibtidaiyah	1:195	1:199	...	1:216	1:214
Rasio Murid per Gedung Sekolah SMP/MTs					
SMP	1:249	1:244	1:238	1:242	1:238
MTs	1:12	1:13	...	1:139	1:137
Rasio Murid per Gedung Sekolah SMA/SMK/MA					
SMA/SMK	1:307	1:318	1:308	1:342	1:332
MA	1:99	1:118	1:136	1:128	1:128

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan jaman. Guru merupakan bagian penting dalam pendidikan, sehingga perannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan. Sebagai pelaksana pendidikan, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan kompetensi akademik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Capaian indikator terkait tenaga kependidikan dan mutu pendidikan yang juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada capaian kualifikasi maupun kompetensi guru yang meningkat baik dari sisi pendidikan maupun sertifikasi/kompetensinya.

Tabel 2.41
Perkembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kualifikasi Guru					
Persentase guru SMA/SMK/SLB yang berkualifikasi S1/D-IV	95,99	96,11	95,63	96,59	-
Kompetensi Guru					
Persentase guru yang sudah sertifikasi	38,69	39,87	39,09	38,69	37,47
Persentase kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	65,30	65,70	65,54	65,54	-
Rasio Guru dengan Murid (SMA/SMK/MA)	793,86	743,58	703,31	712,8	644,92
Rasio Guru dengan Sekolah (SMA/SMK/MA)	22,27	21,43	20,07	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) dan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, persentase guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau dengan kualifikasi S1/D4 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 95,63 persen guru sekolah menengah memiliki ijazah S1 sederajat.

Dari sisi kompetensi guru, persentase guru yang sudah sertifikasi setiap tahun memang meningkat, namun peningkatannya sangat kecil. Hal ini dikarenakan hanya sedikit guru



yang bisa dilatih untuk mengikuti Tunjangan Profesi Guru (TPG) setiap tahunnya karena program ini dari pusat dan sudah dialokasikan kuotanya untuk masing-masing kabupaten/kota. Tahun 2021 baru sekitar 38,69 persen guru SMA/SMK/SLB yang sudah sertifikasi. Sedangkan, untuk persentase kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan juga telah mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir dengan pola meningkat hingga mencapai 65,54 persen pada tahun 2021.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari sisi kompetensi lulusan baik SMA maupun SMK. Kompetensi lulusan SMA/MA diukur dari persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi. Kompetensi lulusan SMK diukur dari persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha dan persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non akademik (minat, bakat, prestasi).

Tabel 2.42
Kompetensi Lulusan SMA/SMK
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lulusan SMA					
Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di PT	43,00	56,30	58,50	28,37	61,00
Lulusan SMK					
Persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha	50,00	56,87	60,10	21,85	32,23
Persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non-akademik (minat, bakat dan prestasi)	42,00	8,27	24,28	11,81	-

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Lulusan SMA yang diterima di PT meningkat setiap tahunnya, mulai tahun 2018 diterima sebanyak 43,00 persen dari siswa yang tamat, kemudian meningkat menjadi 58,50 persen pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021, kondisi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 45,12 persen. Peningkatan kompetensi lulusan juga pada lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha juga berada pada titik 2020 dengan capaian 60,10 persen, namun menurun di tahun 2021 menjadi 38,24 persen. Kondisi ini mengharuskan kompetensi lulusan SMK perlu



ditingkatkan lagi supaya lulusan SMK ini dapat lebih diterima lagi di dunia industri atau dapat berwirausaha.

Sementara itu, untuk indikator persentase Peserta Didik yang memiliki Kompetensi non-Akademik (minat, bakat dsan prestasi) cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 meskipun di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan untuk tahun 2019. Adapun kondisi tahun 2021, menurun kembali menjadi 11,81 persen.

Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi

Di samping layanan yang dilakukan Dinas Pendidikan secara umum juga ada layanan yang dilakukan dengan tujuan mencapai kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi informasi yang difokuskan pada Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi yang dimiliki Dinas Pendidikan. Layanan berupa siaran televisi pendidikan dan pelatihan guru dan siswa yang berbasis teknologi informasi. Walaupun dalam pengembangan Baltekkomdik ini terkendala dengan dana, namun sumber daya di Balai Tekkomdik ini terus berusaha untuk memajukan kualitas pendidikan melalui jaringan telekomunikasi dan informasi.

Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator yang Baltekkomdik yang meningkat setiap tahun walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 memang terjadi defisit besar-besaran sehingga capaian indikatornya menurun drastis dari 63,35 persen pada tahun 2017 menjadi 28,57 persen di tahun 2018, namun tahun 2019 mengalami kenaikan hingga mencapai 71,14 persen dan pada tahun 2020-2021 menjadi 78 persen.

Tabel 2.43
Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase SMA/SMK yang memiliki sistem informasi manajemen berbasis IT	65,35	75,00	78,00	84,75	-
Persentase kabupaten/kota yang sudah terlayani akses siaran TV Pendidikan	28,57	71,14	71,42	100,00	-

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

2. Urusan Kesehatan

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 25 indikator yang tersebar pada 7 program pembangunan dan juga pencapaian

pada bidang SPM. Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Pencapaian pada bidang SPM untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi capaian telah mencapai 100% untuk dua jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diwajibkan bagi Provinsi.

Adapun Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan untuk Provinsi terdiri atas:

pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi.

Adapun realisasi capaian SPM Provinsi Kepulauan Riau Bidang Kesehatan dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warganegara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat layanan kesehatan	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 26 indikator yang tersebar pada 5 program (program pembangunan), dengan rincian yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
**Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 kelahiran hidup	92	128	78,24
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 kelahiran hidup	11,1	15	10,04
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16,82	16,3	15,4



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
5	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100
6	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	7	2	6
7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90,46	90	83,38
8	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	63,78	60	71,95
9	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	42,86	42,86	57,14
10	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	89,63	92,9	92
11	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	5	57	100
12	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	89,65	87,88	92,71
13	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96,51	95,5	82,86
14	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	82,86	80	89,25
15	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	93,18	90	91
16	Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna
17	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	-	-	Utama
18	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna
19	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	78,5	78,5	93,85
20	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud	Indeks	n/a	80	78
21	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	49,43	50	59,14
22	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	85,7	60	54
23	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	15	25	66,75
24	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	75,44	85	90
25	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	57,14	57,14	71,43

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kondisi kesehatan masyarakat digambarkan Angka kematian ibu di Kepulauan Riau dengan capaian sebesar 78,24 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 10,04 per 1.000 KH, prevalensi stunting pada balita pada tahun 2022 mencapai sebesar 4,2 persen dari target 15,8 persen, dan cakupan Kabupaten/Kota Sehat sebesar melebihi target yang ditetapkan yaitu dari 2 target dan 6 realisasi (300 persen). Capaian Angka kematian ibu, Angka kematian bayi, dan persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada tahun 2021 menunjukkan penurunan dari tahun 2017.



Kasus kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran.

Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congenital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (succes rate) yang belum memenuhi target 90 persen, capaian hanya 83,38, capaian ODHA yang mendapatkan ARV sudah mencapai target, dari target 64 persen realisasi sebesar 71,95 persen, kemudian eliminasi malaria (kabupaten/kota) mencapai target dari 43 persen yang ditargetkan, realisasi 57,14 persen, persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tercapai di angka 92 persen.

Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022: persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 89,25 persen, sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 85 persen. Persentase Puskesmas terakreditasi hanya sebesar 89,25 persen belum mencapai target, Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS 92,71 persen; Status Akreditasi RSUD RAT Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,85; Status Akreditasi RSUD EHD Provinsi Kepulauan Riau (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78; Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan 59,14 persen; Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib 54 persen,



Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20 Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud 66,75 persen.

Fasilitas Kesehatan

Angka harapan hidup yang bergantung pada sarana kesehatan yang tersedia merupakan salah satu indikator untuk pembangunan non fisik. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi tingkat pelayanan kesehatan yang terselenggara secara terintegrasi yang menyangkut aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif dan aspek rehabilitatif. Semua aspek pelayanan kesehatan tersebut sangat membutuhkan sarana pendukung. Sebagai gambaran jenis sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa rumah sakit umum dan khusus, puskesmas, klinik/balai kesehatan dan posyandu. Faktor ketersediaan sarana kesehatan dapat dilihat dari jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 27 rumah sakit umum, 92 puskesmas, 71 klinik dan 231 puskesmas pembantu. Rincian fasilitas kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Karimun	3	0	7	14	35	17
2	Bintan	2	0	6	16	25	5
3	Natuna	3	0	2	13	34	4
4	Lingga	2	0	0	13	39	2
5	Kepulauan Anambas	3	0	2	10	44	6
6	Batam	11	1	38	19	46	36
7	Tanjungpinang	3	0	16	7	8	14
Kepulauan Riau		27	1	71	92	231	84

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau ini didukung oleh ketersediaan tenaga medis, yaitu dokter umum yang, meliputi 420 orang dokter spesialis, 983 orang dokter umum, 168 orang dokter gigi, 5.219 orang perawat, dan 2.780 orang bidan. Sedangkan jumlah ahli farmasi dan ahli gizi masing-masing sebanyak 1.161 orang dan 278 orang.



3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM mencakup pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pada tabel pencapaian target SPM, pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100 persen dari target 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota pada tahun 2022 telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Sedangkan pada pencapaian Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/Desa memiliki capaian 0 persen di mana masih sesuai dengan targetnya.

Tabel 2.47
Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	50-54%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/ Desa	0%	0%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Sarana dan Prasarana Umum

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan



meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100 persen yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase jumlah titik rawan banjir ditargetkan 15 terealisasi 15, Persentase jalan Provinsi berkondisi baik, ditargetkan sebesar 63,25 persen terealisasi pada tahun 2022 sebesar 76,55 persen; Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli ditargetkan 9 terealisasi sebesar 23,76.

Untuk indikator yang belum tercapai antara lain: persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang ditargetkan 13,53 persen baru terealisasi 7,54 persen. Cakupan Pelayanan Drainase dari yang ditargetkan 50,79 persen baru terealisasi 45,1 persen. Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dari yang ditargetkan 100 persen baru terealisasi sebesar 68,75 persen.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 14 Indikator yang tersebar pada 11 program. Dari sebanyak 14 indikator yang telah rilis data tahun 2022 yang tercapai sebanyak 5 indikator, sedangkan yang Belum Tercapai sebanyak 6 indikator. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	20	18	15
2	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	%	n/a	7,54	7,54



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
3	Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	%	n/a	51,59	51,59
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	92,68	93,76	91,82
5	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	83,84	87,06	91,62
6	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	%	45,1	45,1	50,79
7	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	100	68,75
8	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	23	25	100
9	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	%	59,99	66	59,99
10	Persentase jalan kondisi baik (%)	%	n/a	61,75	76,55
11	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	n/a	8	23,76
12	Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	%	13	20	85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2023

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Tabel 2.49
Pencapaian Target SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau,
Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Permasalahan perumahan yang terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti backlog, rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh banyak



dipengaruhi oleh regulasi perumahan yang ada dalam mendukung penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR. Regulasi dalam hal pembiayaan merupakan salah satu contoh regulasi yang memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBR.

Gambaran perkembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum optimal, di mana terdapat beberapa penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian positif terlihat pada Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) dari 10.000 unit di tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 dengan realisasi sebanyak 12.000 unit.

Adapun indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dari target 100 persen memperoleh realisasi 100 persen, Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dari target 100 persen realisasi 100 persen, Persentase RTLH yang dibenahi, target 10 persen realisasi 0 persen, Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani yang ditargetkan 27,45 persen realisasi hanya 23,30 persen. Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi target 5 usaha realisasi masih 0. Secara rinci realisasi indikator kinerja perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	100
3	Persentase RTLH yang dibenahi	%	n/a	n/a	0
4	Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	0	0	23,30



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	n/a	10.000	12.000
6	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	n/a	n/a	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, 2023

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi. Adapun pencapaian SPM pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum Kepulauan Riau mencapai 100 persen.

Tabel 2.51
Pencapaian Target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi Ketenteraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah. Bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PNS provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. Terkait dengan Ketenteraman dan ketertiban umum, capaian kinerja indikator-indikator kuncinya beberapa sudah memiliki capaian yang baik, di antaranya: Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi dari target 50 persen realisasi juga sebesar 50 persen, Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada dari target 41,67 persen realisasi 41,67 persen, Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan target 100 persen realisasi 100 persen. Sementara itu indikator yang belum tercapai targetnya ialah indikator Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana target 0,46 sementara capaian masih 0,27.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	n/a	16,67	50
2	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	n/a	33,33	41,67
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
4	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya	%	42,85	42,85	60
5	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	1,15	1,28	2,36
6	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,2	0,2	0,31



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
7	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,2	0,24	0,27

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau, 2023

6. Urusan Sosial

Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) di dalam panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Pencapaian Target SPM Bidang Sosial
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti Skala Provinsi	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti Skala Provinsi	Persentase (%) Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti Skala Provinsi	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis	Persentase (%) Gelandangan Dan	100%	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
	Di Dalam Panti Skala Provinsi	Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti		
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi	100%	100%
6		Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Disediakan Di Dalam Panti	6 Orang	6 Orang
7		Jumlah Tenaga Kesehatan (Dokter, Psikiater, Peksos Medis) Yang Disediakan Di Dalam Panti	6 Orang	6 Orang

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Capaian Kinerja Bidang Urusan Sosial

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan PPKS didasarkan atas jenis-jenis PPKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, untuk menunjang kinerja penanganan PMKS, pemerintah provinsi juga melibatkan lembaga-lembaga penyelenggara pemberdayaan sosial, dan juga tenaga-tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

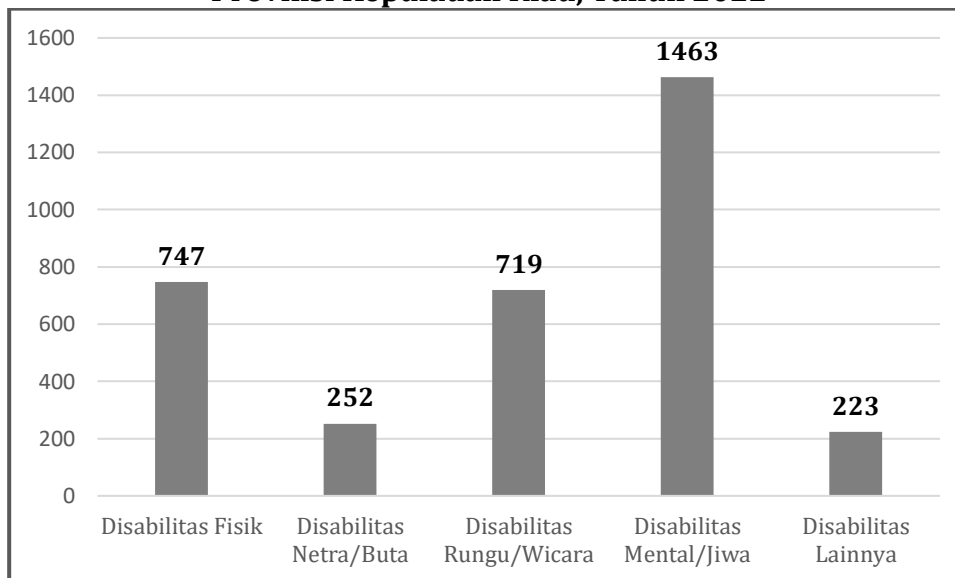
Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal; (4) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan melalui mekanisme usaha ekonomi produktif pada tahun 2022 terlihat meningkat, meskipun capaiannya masih sangat kecil yakni 0,42 persen. Sementara itu untuk keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan dari target 0,79 persen terealisasi sebesar 9,20 persen.

Gambar 2.22
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenisnya
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Urusan sosial juga melihat terkait penanganan terhadap penyandang disabilitas dimana terdapat 3.404 penduduk Kepulauan Riau yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Penyandang disabilitas di Kepulauan Riau tertinggi merupakan disabilitas mental atau jiwa yang mencapai 1.463 penduduk. Selain itu juga terdapat beberapa disabilitas yang mendominasi seperti disabilitas fisik dan disabilitas rungu atau wicara dimana masing-masing sebanyak 747 jiwa dan 719 jiwa.

Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Penanganan PMKS didasarkan atas jenis-jenis PMKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja penanganan PMKS berada di angka 36,92 persen dari target 31,63 persen.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	2,98	6,55	35,71
2	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	24	24,4	44,8
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100
4	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100
5	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	100	0	25
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	0	0	100
8	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100
9	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,16	0,15	0,42
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	8,1	2,92	9,20
11	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,79	31,63	36,92
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100
13	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	n/a	33,33	11,11

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2023

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Urusan Tenaga Kerja

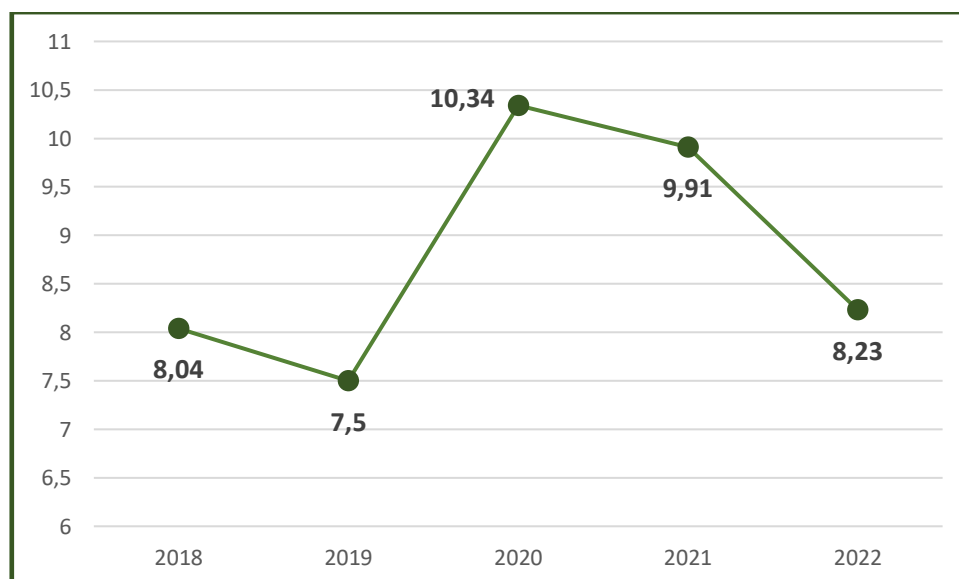
Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan

yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Gambar 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Secara umum, pembangunan ketenagakerjaan Kepulauan Riau memiliki progress yang positif yang terlihat dari beberapa capaian kinerja, khususnya angka pengangguran



yang menurun pada tahun 2022 menjadi 8,23 persen dari tahun 2021 yang sebesar 9,91 persen. Adapun dari potensi tenaga kerja yang juga meningkat di mana partisipasi angkatan kerja menjadi 68,94 yang menunjukkan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Adapun indikator ketenagakerjaan lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	11,82	54,09	54,3
2	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	1,50	4,66	7,69
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	29,17	29,30	34,12
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	64,31	79,27	48,60
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,50	68,27	68,94
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	n/a	30,00	25,29
7	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	n/a	100,00	98,07
8	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	3,65	3,12	10,03
9	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	94,80	94,53	84,56
10	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	74,71	86,66	83,78
11	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	n/a	100,00	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Secara umum, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun masih belum pada kondisi normal pasca Pandemi Covid-19. Capaian pengangguran di Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 8,23 persen dengan tingkat kesempatan kerja yang meningkat menjadi 91,77 persen. Kondisi ini tentu juga dialami kabupaten/kota di Kepulauan Riau di mana pengangguran terendah berada di Kepulauan Anambas dan pengangguran tertinggi di Kota Batam. Adapun dari potensi tenaga kerja terlihat bahwa ketersediaan angkatan kerja paling tinggi berada di Kepulauan Anambas (TPAK=71,64) jika dibandingkan penduduk usia kerjanya dan paling rendah berada di Karimun dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 60,46.

Tabel 2.56
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Kesempatan Kerja
1	Karimun	60,46	6,87	93,13
2	Bintan	66,04	6,91	93,09
3	Natuna	67,89	4,15	95,85
4	Lingga	65,11	3,09	96,91
5	Kepulauan Anambas	71,64	2,15	97,85
6	Kota Batam	71,24	9,56	90,44
7	Kota Tanjungpinang	65,37	5,27	94,73
Kepulauan Riau		68,94	8,23	91,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2023

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

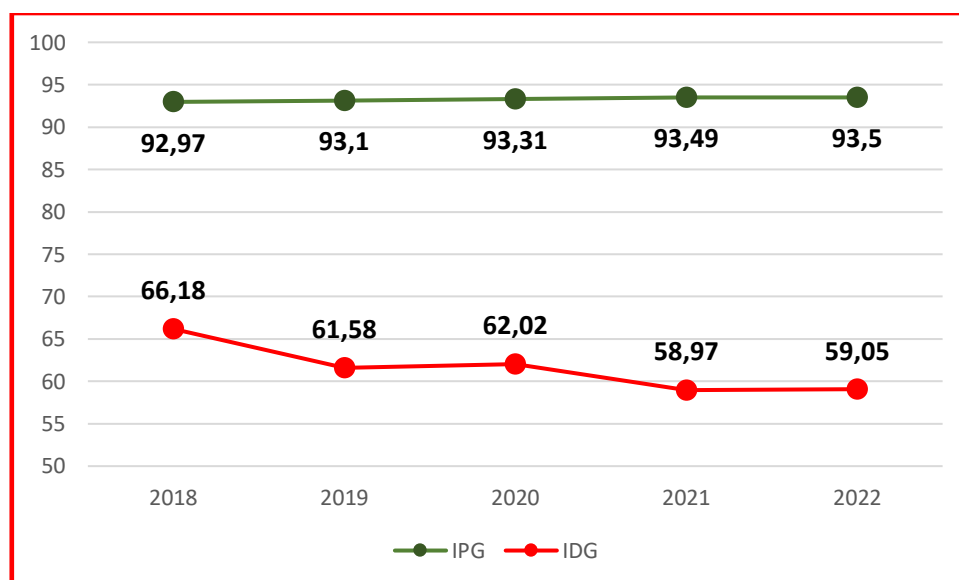
Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 suburusan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih

diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pembangunan gender di Kepulauan Riau mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan di mana pada tahun 2022 memiliki capaian Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,50. Namun pola ini tidak diikuti oleh Indeks Pemberdayaan Gender yang secara umum mengalami penurunan hingga mencapai 59,05 pada tahun 2022. Belum optimalnya pemberdayaan gender ini lebih disebabkan pada komponen masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen sebagai anggota dewan mewakili perempuan.

Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya yang semakin membaik. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komitmen pengarusutamaan gender di dalam penyusunan program dan kegiatan responsif gender semakin membaik, dilihat dari semakin meningkatnya proporsi



anggaran yang responsif gender dibandingkan dengan belanja langsung APBD. Pada tahun 2022 proporsi anggaran tersebut mencapai 11,26 persen dari target 5,4 persen.

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan juga semakin membaik. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO realisasi kinerjanya cukup baik, di mana terjadi penurunan yang signifikan dari 44,25 persen menjadi 29,46 persen. Namun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target seperti Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) realisasi 60,21 dari target 73,6, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) realisasi 80,86 dari target 86,64.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,34	5,34	11,26
2	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,61	28,71
3	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,11	11,1	8,89
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	33,42	44,25	29,46
5	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,61	28,71
6	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	15,38	38,46	41,86
7	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	71,24	72,6	60,21
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	83,08	86,34	80,86

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2023

3. Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Suburusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Suburusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran



pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Suburusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Suburusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkauan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa).

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	111	111	124
2	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	0,117	≤10	0,066



3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	0,854	0,862	0,89
4	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	10	≤10	6,6
5	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	94%	80	98
6	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2023

4. Urusan Pertanahan

Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanahan ditunjukkan dengan indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 persen secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	100	100



5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100 persen yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah dari target 20 persen capaian sebesar 50 persen, Indeks Kualitas Air Laut target 76,75 capaian 85,56, indeks kualitas air dari target 56,7 capaian 56,79, indeks kualitas udara ambien target 88,25 capaian 90,27, indeks kualitas tutupan lahan target 59,08 capaian 58.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 14 Indikator yang tersebar pada 9 program (program pembangunan). Dari ke 14 indikator yang telah rilis data tahun 2022, terdapat 3 indikator yang tidak mencapai target yakni Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau, Persentase Kabupaten/Kota yang meraih Penghargaan, Persentase Pengurangan Sampah. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	n/a	100	50
2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	n/a	76,1	85,56
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	54	56,6	56,79
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	90,59	88,14	90,27
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,06	59,07	58
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0	0	0
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	20	26,67	40
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	100	100
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	0	28,57	42,85
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	83,33	57,14	100
12	Persentase Pengurangan Sampah	%	22	24	14,82
13	Persentase Penanganan Sampah	%	75	74	72,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk berKTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan sebanyak 4 indikator kinerja program dengan 3 indikator sudah mencapai target, di antaranya: Persentase Kabupaten/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk dengan capaian 100, Persentase



ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) ditargetkan 75% dengan realisasi 75%, Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri capaian 100%, dan 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	100	100
2	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100	100	0
3	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	25	75	75
4	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas yang ditarget sebesar 44,64 persen dan terealisasi sebesar 66,67 persen (RT, RW, PKK dan Posyandu). Meskipun sampai saat ini belum terealisasi kerjasama antar desa sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi desa dalam rangka kemandirian desa, namun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas melalui bantuan tambahan insentif kepada Perangkat Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	14,05	18,13	n.a.



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	%	26,66	36,65	66,67
3	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	100	0
4	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang belum begitu baik. Tahun 2022 persentase *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) berada diangka 45,51 persen dari target 49,01 persen, sedangkan angka *unmet need* sudah mencapai target dari 9,5 persen terealisasi di angka 24,9 persen.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>	%	44,2	47,5	45,51



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
2	<i>Unmet need</i>	%	10,14	10,1	24,9
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	63,27	58	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

9. Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemadirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian sudah mencapai 100 persen yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan target 6 trayek capaian juga 6 trayek, Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga dengan target 20 persen dan realisasi 20 persen, Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan target 16 lintas capaian 18 lintas.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	6	6	6
2	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	0	0	20,00
3	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	12	14	18

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di



tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik, terlihat capaian nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau dari target 78 persen realisasi sebesar 96,03 persen. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi target tahun 2022 sebesar 20 persen dan realisasi di angka 20,09 persen. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga telah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	74,18	76	96,03
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	n/a	20	20,09
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	n/a	20	6,56
4	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	n/a	82,93	81,40

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;



(6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, terlihat dari Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dari target 11,34 persen realisasi sebesar 12,86 persen, Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan target sebesar 31,18 persen di tahun 2022 dan terealisasi sebesar 31,45 persen, sementara rasio wirausaha target di tahun 2022 adalah 28,02 persen sementara realisasi 28,66 persen.

Dilihat dari persentase UMKM yang dikembangkan kondisinya belum mencapai target, dari target 25,86 persen realisasi sebesar 23,65 persen, demikian juga Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan target 13,80 persen realisasi masih 12,27 persen.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6,34	6,34	12,86
2	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	29,18	29,18	31,45
3	Rasio Wirausaha Baru	%	27,52	27,52	28,66
4	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	22,30	22,30	23,65
5	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	8,80	8,80	12,27
6	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0,24	0,24	0,44
7	Persentase Koperasi yang diawasi	%	1,53	1,53	2,69
8	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	3,67	3,67	5,79

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023

12. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik. Dapat dilihat melalui indikator: Persentase



pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi yang sudah mencapai target, Persentase kenaikan minat Penanaman Modal juga sudah memenuhi target, Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP juga memenuhi target. Sementara itu, indikator yang belum memenuhi target yaitu Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Th 2020	Th 2021	Th 2022
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	0	0	0
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	0	0	100
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	0	5	7
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21	70	99,8
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	81,93	82,5	85,86
6	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100
7	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%	n/a	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Secara umum capaian kinerja indikator kepemudaan dan olahraga provinsi Kepulauan Riau sudah dalam kondisi yang baik, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, di antaranya; Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Peningkatan Prestasi Olahraga, Cakupan Pembinaan Atlet Muda.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	n/a	0,51	0,65
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	n/a	4,79	8,84
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	n/a	0	16
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	n/a	0,54	0,64
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	n/a	17,31	19,23
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	n/a	35,2	38,09
7	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	n/a	0	8,43

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

14. Urusan Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistem yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.

Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan, demikian juga Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang juga sudah mencapai target.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023



15. Urusan Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi.

Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Tingkat keamanan informasi pemerintah yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 68,13 sementara realisasi 73,41.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	n.a.	68,13	73,41

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

16. Urusan Kebudayaan

Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat



provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Gambaran perkembangan indikator menunjukkan kinerja yang cukup baik. Di antaranya ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut; Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dari target yang ditetapkan 16,75 persen terealisasi sebesar 25,01 persen. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) mencapai target 100 persen. Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi juga mencapai target 100 persen.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a	15,16	25,01
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	n/a	1,43	1,5
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	n/a	47,03	51,44
4	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	n/a	28,06	28,11
5	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	%	n/a	5	20
6	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a	26,29	30,97
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	n/a	12,10	13,89

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2022

17. Urusan Perpustakaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca.



Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100 persen yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dari 62,47 yang ditargetkan realisasi sebesar 62,02, indeks pembangunan literasi masyarakat dari target 14,95 realisasi sebesar 15,31.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	54,47	61,83	62,02
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	14,45	21,33	15,31*

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2023

Ket: *) terdapat perbedaan metodologi perhitungan sekala sebelumnya skala 1-100 berubah menjadi 1-20 di tahun 2022

18. Urusan Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan



teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi.

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100 persen yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Tingkat Ketersediaan Arsip sudah memenuhi target dari 13,98 persen yang ditargetkan realisasi sebesar 15,67 persen, Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip target 27,5 persen dengan realisasi 28,33 persen.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	0,8266	10,97	15,67
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	18,33	4,83*	28,33
3	Izin Penggunaan Arsip**)	Skor	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2023

*)Ada capaian indikator yg tidak tercapai, terdapat 6 variabel indikator hanya 1 yang tercapai

**) tidak pernah dilaksanakan indikator tersebut sehingga menyebabkan capaian nol.



2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada suburusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada suburusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada suburusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96 persen wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (*seaweed*), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.



Untuk indikator tahun 2022 capaian indikator terbilang cukup baik, melihat hamPir semua indikator mencapai target yang ditetapkan, di antaranya; Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap kinerjanya mencapai 99,16 persen, Nilai Tukar Nelayan/NTN (persen) kinerja capaian mencapai 97,90, persen Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya kinerjanya mencapai 103,56 persen, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (persen) kinerjanya mencapai 97,90 persen.

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	0	4	1
2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	319.196,89	306.463,70	304.489,16
3	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%		110,57	112,58
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21.421,10	33.920,50	27.436,03
5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%		108,47	110,3
6	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	90	100
7	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	6205,9	1331,88	8391,68

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

2. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengelolaan daya tarik wisata provinsi; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2021 menunjukkan kinerja cukup baik. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata



kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat.

Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau mempunyai kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai target, dengan realisasi kinerja 204,63 persen, namun jumlah perjalanan wisatawan nusantara tahun 2022 tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari target 1.988.600 orang realisasi hanya 817.282 atau realisasi kinerja 41,10 persen, namun untuk Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau mencapai target, dengan realisasi kinerja 178,82 persen.

Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2022 sudah Tercapai yaitu sebesar 2,32 persen, untuk wisatawan nusantara juga telah mencapai target yaitu diangka 1,8 persen. Sedangkan indikator rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau pada tahun 2022 sudah tercapai yaitu sebesar 29,78 persen dari 22,70 persen yang di targetkan.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	4,27	2,92	2,32
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,31	1,81	1,80
3	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	27,41	37,04	29,78
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	408.005	3.103	758.154
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	7.153.725	719.206	817.282
6	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	14.399,00	2.139	7.147,24
7	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	n/a	7,75	1,63
8	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	n/a	n/a	2,05

Sumber: Dinas Pariwisata, 2023

3. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup suburusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.

Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Gambaran capaian indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2022 cukup baik, di antaranya; Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak target 1,20 persen terealisasi sebesar 2,35 persen, Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan target 1 persen terealisasi 1,56 persen, Persentase Angka Kesembuhan Penyakit, target 62,00 persen sedangkan realisasi 64,75 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) dari target 99,88 persen terealisasi sebesar 103,44 persen.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,10	1,10	2,35
2	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	55,21	55,21	89,98
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	-4,50	1,29	1,56
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	-2,60	0,52	0,83
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	1,40	2,50	2,91
6	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	60,00	61,00	64,75
7	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	67,50	58,17	79,75



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	37,50	37,50	62,50
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	52,23	62,40	84,43
10	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	15,00	20,00	98,88
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,84	99,84	103,34
12	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	40	40	49,02

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2023

4. Urusan Kehutanan

Pembangunan kehutanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan swasta. Beberapa capaian pembangunan kehutanan baik dari segi ekonomi maupun kualitas hutan terlihat dari peningkatan PDRB Sektor Kehutanan di mana target 27,1 milyar dengan realisasi sebesar 28,34 milyar. Selain itu juga pada rehabilitasi lahan kritis memiliki target 5 ha dan terealisasi sebesar 330 ha. Indikator lain seperti meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat memiliki realisasi 100 persen dan meningkatnya kesehatan daerah aliran sungai Kepulauan Riau juga terealisasi 100 persen.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	25,31	27	28,34
2	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	5	5	330
3	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	88	500	500
4	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS		2	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral sebagai salah satu sumber daya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian



Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta geopolitik dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan (4) Ketenagalistrikan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah cukup baik, dilihat pada masing-masing indikator antara lain: Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi yang telah mencapai target, demikian juga Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dari target 13 persen pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 14,17 persen.

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan ESDM
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	%	43,33	43,33	36,36
2	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	%	0,13	12	14,17
3	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	82,11	100	100
4	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	91,35	95	100
5	Rasio Elektrifikasi	%	93,72	94,50	96,32

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022

6. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.



Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 dari target 100 persen terealisasi sebesar 100 persen, Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan dari target yang ditetapkan 70 persen terelisasi 74,38 persen, sementara nilai inflasi dari target 3,14 persen realisasi sebesar 5,83 persen terjadi kenaikan inflasi yang cukup signifikan (realisasi kinerja-82,52 persen).

Dilihat dari sisi peningkatan dan pengembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau yaitu terutama pada indikator Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau terjadi peningkatan dari target 3,5 persen realisasi sebesar 24,33 persen.

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	0	35	100
2	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	0	50	74,38
3	Nilai Inflasi	%	0	2,26	5,83
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	%	6,5	3,5	24,33
5	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	<20	8
6	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	0	68	80

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

7. Urusan Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IPUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota



dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota. Kinerja urusan perindustrian dilihat dari Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB pada tahun 2022 dengan target 38,5 milyar dapat terealisasi sebesar 41,84 milyar, persentase izin usaha industri dari target 60 persen dapat terealisasi sebesar 60 persen di tahun 2022, jumlah dokumen informasi industri juga telah mencapai target pada tahun 2022.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Urusan Industri
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	41,7	38,5	41,84
2	Persentase Izin Usaha Industri	%	0	46,92	60,00
3	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	0	0	1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

8. Urusan Transmigrasi

Salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan ketenagakerjaan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pematangan.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari 3 indikator yaitu, Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang *clear and clean* yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan pada tahun 2022 ditargetkan 33,3 persen namun realisasinya hanya 25 persen artinya belum mencapai target yang ditetapkan, Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi target pada tahun 2022 sebesar 25,8 persen namun realisasi 21,23 persen juga belum mencapai target, Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan juga belum memenuhi target, di mana target tahun 2022 sebesar 6,25 persen namun capaian hanya 3,12 persen. Ketiga indikator kinerja urusan transmigrasi belum



memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sehingga diperlukan upaya keras di masa yang akan datang agar bisa tercapai.

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang <i>clear and clean</i> yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	n.a.	n.a.	25
2	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	n.a.	23,00	21,23
3	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	n.a.	n.a.	6,25

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Administrasi Pemerintahan

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undan-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan



pula koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal yang menghasilkan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan ke depannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD hanya baru mencapai angka 100 persen pada tahun 2022, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 80 persen. Sementara itu Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD hanya miliki capaian sebesar 98,98 persen setelah sempat mencapai angka 100 persen di tahun sebelumnya, dan keselarasan muatan RKA perangkat daerah dengan RKPD memiliki capaian 95,95 persen sesuai dengan target tahun 2022.

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	n/a	80	100
2	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100	100	98,88
3	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	n/a	95	95,95

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2023

3. Urusan Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan,



dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah.

Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan sudah 100 persen perangkat daerah yang menyampaikan laporan. Namun Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan belum memenuhi target, dari target sebesar 91 persen pada tahun 2022 terealisasi 101,92 persen. Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD sudah tercapai.

Selain itu dilihat dari realisasi Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah dari target 4,89 persen pada tahun 2022 terealisasi sebesar 25,32 persen, jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan mencapai target yang ditetapkan, Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan target pada tahun 2022 sebesar 15.300 wajib pajak realisasi 49.090 wajib pajak (kinerja realisasi 320,85 persen), namun persentase piutang pajak daerah yang tertagih dari target 22 persen dan terealisasi sebesar 45,48 persen.

Pada indikator Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81 persen.

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	98,32	100,67	101,92
2	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100	100	100
3	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100	100	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	-12,81	15,27	25,32
5	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	1	1
6	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	14.200	15.000	49.090
7	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	26,69	28,13	45,48
8	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	56	66	81
9	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	28,30	13,79	-0,78
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100

Sumber: Badan Pendapatan Daerah; dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

4. Urusan Pengawasan

Jika dilihat berdasarkan capaian indikator pada inspektorat hampir sebagian besar telah mencapai target, beberapa indikator yang mencapai target di antaranya; Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN 100 persen dengan capaian 100 persen, Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN 100 persen dengan capaian 100 persen, Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau, dan Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas capaian 100 persen.

Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat capaian juga di angka 100 persen, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK dari target 80 persen capaian di angka 85 persen, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas dari target 78 persen capaian di angka 88 persen, Rata- Rata Nilai *Peer Review* Antar Irban dari target 78 persen terealisasi 80 persen. Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dari target 80 persen capaian di angka 90 persen, Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan target 100 persen capaian 100 persen.

Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 12 indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dari 12 indikator yang telah rilis data tahun 2022, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yakni Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan target



75 persen realisasi di angka 63 persen, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD target 60 persen capaian masih berada diangka 39 persen.

Tabel 2.84
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100	100	100
2	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	97	90	100
3	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	Hijau	Hijau
4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	N/A	5	6
5	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<10	<10	<10
6	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	84	84	85
7	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	50	50	63
8	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	65	70	88
9	Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban	%	n/a	n/a	80
10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	58,5	50	39
11	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	41,185	80	90
12	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100	100	100

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

5. Urusan Kepegawaian

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja unsur penunjang kepegawaian pada tahun 2022 sudah memiliki capaian yang baik, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator di antaranya: Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan capaiannya 47,97 memenuhi target yang ditetapkan



yaitu sebesar 44,63 persen, Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi juga memenuhi target dengan capaian 96,37 persen dari target yang ditetapkan yaitu 73 persen, persentase ASN yang memiliki kinerja baik juga memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian 98,08 persen dari target 95 persen.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	n.a	43,42	47,97
2	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	n.a	70	96,37
3	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	n.a	95	98,08
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri, 2023

6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Terbentuknya peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, menyebabkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang menjadi dua badan baru yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan pengembangan SDM memiliki tugas pokok fungsi sebagai pelaksana urusan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

BPSDM memiliki sasaran pengembangan SDM, capaian indikator persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 32 persen memiliki capaian sebesar 28,4 persen.

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	n/a	30	28,4

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, 2023

7. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada dibawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Capaian pada tahun 2022 sebesar 75 persen sesuai dengan target tahun 2022, dengan realisasi capaian target 100 persen. Selain itu indikator Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 48,78 persen diatas target sebesar 35 persen. Secara lebih rinci capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	65	70	75
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20	30	48,78

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2023

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan pembentukan unit kerja Riset dan Inovasi di Daerah, maka urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.



Selanjutnya untuk memastikan pelaksanaan Riset dan Inovasi perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagai salah satu fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

8. Urusan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 3 program yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; Program Penantaan Peraturan Perundang-Undangan; dan Program Peningkatan Publikasi, komunikasi dan informasi.

Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD sejauh ini dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari target tahun 2022 sebesar 72 persen memiliki capaian 80 persen. Hal yang sama juga terjadi Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan capaian di angka 100 persen.

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Sekretariat DPRD
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	68	70	80
2	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD, 2023

9. Badan Pengelola Perbatasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55), Badan Penghubung berdiri sebagai OPD tersendiri. Badan Pengelola Perbatasan berfungsi melaksanakan fungsi penunjang bidang perbatasan. Capaian



indikator Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi dari target sebesar 35 persen terealisasi 49 persen atau mencapai target.

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Bidang Perbatasan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	n/a	n/a	49

10. Badan Penghubung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55), Badan Penghubung berdiri sebagai OPD tersendiri. Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

11. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah-Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 8 biro penunjang yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Biro Hukum; Biro Perekonomian Pembangunan; Biro Pengadaan Barang dan Jasa; Biro Umum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Organisasi; dan Biro Administrasi Pimpinan.

Program biro pemerintahan dan otonomi daerah dengan indikator Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) pada tahun 2022 mencapai skor sebesar 3,42 dengan target 3,03, sehingga pada tahun 2022 telah melampaui target yang sudah di tetapkan. Capaian indikator Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan pada Biro hukum sudah melebihi target yang ditetapkan dari 100 persen realisasi capaiannya 108 persen.



Capaian indikator Tingkat kematangan daerah pada biro organisasi capaian indikatornya 45,17 persen berada di atas target sebesar 38,6 persen. Capaian indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan pada biro kesejahteraan rakyat capaian sebesar 20 persen sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti pada biro perekonomian dan pembangunan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sudah melebihi target yang telah ditetapkan, dari target 8,2 persen terealisasi sebesar 11,43 persen

Capaian indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor sudah melebihi target yang telah ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 86 persen terealisasi sebesar 140,35 persen.

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,0221	3,0221	3,42
2	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	100	108
3	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	n/a	37,1	45,17
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	n/a	n/a	20
5	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	n/a	90	90
6	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	85	88	106
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8	8,1	11,43
8	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	85	85	140,35

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

12. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara dengan memberikan pengetahuan



wawasan kebangsaan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Adapun capaian di Kepulauan Riau, terlihat bahwa seluruh konflik sosial mampu tertangani dalam tiga tahun terakhir dengan jumlah konflik suku dan etnis serta konflik antar agama yang tidak terjadi.

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	0	0
2	Persentase Konflik antar Agama	%	0	0	0
3	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100
4	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	%	66,90	-	0
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100	100	0
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21	80	97,86

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Nilai konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat Kepulauan Riau mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai Rp 1.831.701,- pada tahun 2022. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Provinsi Kepulauan Riau untuk kelompok makanan mencapai Rp 846.222,- sedangkan kelompok non makanan mencapai Rp 985.479,-. Terlihat bahwa persentase pengeluaran non pangan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pangan yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan



masyarakat Kepulauan Riau sudah cukup baik karena fokus pengeluaran sudah lebih ke arah kebutuhan sekunder bahkan tersier.

Jika dilihat pada perbandingan wilayah, maka terlihat pengeluaran rata-rata per kapita sebulan tertinggi mencapai Rp 2.056.461,- di Kota Batam sedangkan yang terendah ada pada Kabupaten Lingga sebesar Rp 1.260.029,-

Tabel 2.92
Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Kelompok	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita	Rp	1.773.521	1.855.296	1.831.701
	- Makanan	Rp	800.424	828.206	846.222
	- Non Makanan	Rp	973.097	1.027.089	985.479
2	Persentase Pengeluaran per Kapita				
	- Makanan	%	45,13	44,64	46,20
	- Non Makanan	%	54,87	55,36	53,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2.93
Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Karimun	Rp.	1.272.446	1.387.154	1.307.875
2	Bintan	Rp.	1.231.160	1.211.579	1.428.749
3	Natuna	Rp.	1.270.498	1.363.540	1.305.329
4	Lingga	Rp.	1.124.471	1.255.939	1.260.029
5	Kepulauan Anambas	Rp.	1.481.523	1.486.441	1.623.388
6	Kota Batam	Rp.	1.988.534	2.067.955	2.056.461
7	Kota Tanjungpinang	Rp.	1.826.706	1.863.506	1.550.593
	Kepulauan Riau	Rp.	1.773.521	1.855.296	1.831.701

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu *proxy* indikator kesejahteraan petani dengan melihat tingkat daya beli petani. Nilai Tukar Petani adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun



2022 mengalami kenaikan dan penurunan, di mana NTP tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 109,96 dan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 103,53.

Tabel 2.94
Nilai Tukar Petani
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No	Bulan	Indeks Yang Diterima	Indeks Yang Dibayar	NTP
1	Januari	114,20	106,74	106,99
2	Februari	114,62	106,94	107,18
3	Maret	114,40	106,85	107,07
4	April	115,15	107,65	106,96
5	Mei	116,30	107,73	107,96
6	Juni	116,85	108,07	108,12
7	Juli	119,66	108,82	109,96
8	Agustus	118,08	108,84	108,49
9	September	117,49	110,27	106,54
10	Oktober	116,24	110,43	105,27
11	November	114,37	110,39	103,61
12	Desember	114,45	110,54	103,53
Tahun 2022		115,98	108,61	106,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif adalah lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah produktif terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perikanan. Persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau dan persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95
Persentase Luas Wilayah Produktif
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Wilayah Produktif	226.451	226.451	226.451	226.451	226.451
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	708.172	708.172	708.172	708.172	708.172
3	Rasio	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)

Tabel 2.96
Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
1	Kota Tanjungpinang	0	13.941	0
2	Bintan	18.864	100.151	18,8
3	Kota Batam	9.624	77.999	12,3
4	Karimun	39.914	83.868	47,5
5	Lingga	92.268	189.620	48,6
6	Kepulauan Anambas	24.404	59.528	41,0
7	Natuna	41.375	183.062	22,6

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)

Wilayah produktif di sini merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar di dalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan peruntukan pertanian yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau ini adalah 20 tahun sampai dengan sebelum adanya revisi perubahan sebagaimana Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki rentang waktu tahun 2017-2037.

2. Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel nonbintang. Sepanjang tahun 2022 tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Non Berbintang di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing sebesar 53,07 dan 25,58 persen. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni 53,07 persen dan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang pada bulan Juli yakni 31,41 persen Rata-rata menginap tamu asing di hotel berbintang sepanjang 2022 di adalah 1,6 hari dan tamu domestik adalah 1,4 hari.

3. Jumlah Rumah Makan/Restoran

Salah satu pendukung dalam pengembangan kepariwisataan daerah adalah penyediaan rumah makan/restoran di wilayah tersebut. Adapun hingga tahun 2022, wilayah yang memiliki paling banyak rumah makan/restoran adalah di Kota Batam dengan jumlah rumah makan/restoran mencapai 1.003 unit. Selain itu, sebanyak 185 unit



rumah makan/restoran berada di Kabupaten Bintan. Peningkatan penyediaan makan dan minum ini masih memiliki ruang untuk tumbuh dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor akomodasi dan penyediaan makan minum.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah, pemerintah daerah mengupayakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Tugas pokok dan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018. Dengan adanya acuan tersebut sudah jelas tugas, fungsi, dan Standar Operasional Pelayanan yang harus dilakukan DPMPTSP dalam pemberian pelayanan perizinan di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai panduan teknis pelayanan perizinan di DPMPTSP

Provinsi Kepulauan Riau, telah didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur, penanggung jawab dan juga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perizinan. dalam pelaksanaannya setidaknya sudah terjadi beberapa kali revisi terhadap SOP Pelayanan Perizinan di DPMPTSP yang didasarkan pada penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan. Adapun kebijakan SOP yang ada di DPMPTSP provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 944 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau



- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 945 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan perizinan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peralihan sistem pelayanan ke *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan melalui sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan mulai dari izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip alih status, izin prinsip penggabungan dan izin perubahan, yang sebelumnya terdata melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dengan diberlakukannya system OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission, para investor diharuskan pendaftaran ulang izin usahanya melalui sistem yang baru ini.

Sebagai evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. pada survey yang dilakukan pada pelayanan tahun 2020, DPMPTSP mendapat kategori sangat baik untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dan juga Persentase Pelayanan Sesuai SOP. Capaian ini memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.97
Pelayanan Perizinan DPMPTSP
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin dan Non Perizinan yang dilayani oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Izin	1.246	1,011	1,938	1,348	2,505
2	Jumlah Jenis Izin dan Non Izin yang Diterbitkan DPMPTSP	Jenis	110	154	154	158	157
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	%	81,25	76,61	77,2	82,34	81,93
4	Jumlah Permohonan Izin yang Terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan	Permohonan Izin	NA	493	242	NA	NA



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)						

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Proses pelaksanaan verifikasi dan penerbitan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk penerbitan pada sektor penanaman modal tahun 2020, DPMPTSP Kepulauan Riau memberi jangka waktu penyelesaian selama 5 hari kerja atau Normatif satu minggu kerja.

Terkait perubahan jangka waktu penyelesaian pada SP dan SOP tahun 2018 dan tahun 2020, Hal tersebut sudah menjadi bahasan dan sudah dilakukan FGD Evaluasi bersama tim ahli. Alasannya, karena pada sektor penanaman modal masih ada beberapa jenis perizinan yang belum sepenuhnya terealisasi dengan maksimal dalam jangka waktu 3 hari tersebut. Kondisi ini tentu saja menjadi capaian positif karena rata-rata lama perijinan menjadi lebih singkat sehingga meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya.

Tabel 2.98
Rata-rata Lama Perizinan Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

No	Jenis Perizinan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
2	Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
4	Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
6	Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
9	Izin Pembukaan Kantor Cabang	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
10	Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
11	Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari



No	Jenis Perizinan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
12	Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
13	Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
14	Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

Keterangan

**Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015*

Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

***Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor :*

821.2/20 SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator Rasio Ketergantungan dan Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

1. Kualitas Tenaga Kerja

Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki jenjang pendidikan hingga SMA sebanyak 588.088 jiwa dan diikuti pekerja dengan pendidikan SD ke bawah (termasuk tidak pernah sekolah dan tidak lulus SD) yang mencapai 246.846 jiwa. Kondisi ini tentu saja perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kepulauan Riau. Selain itu, potensi tenaga kerja yang terlihat dari indikator TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), secara umum tertinggi adalah angkatan kerja penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan perguruan tinggi (82,74) disusul angkatan kerja berpendidikan SMA (75,58).

Tabel 2.99
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kegiatan dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditempatkan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	TKK	TPAK
1	SD ke Bawah	246.846	8.460	255.306	96,69	61,29
2	SMP	141.532	16.391	157.923	89,62	50,62
3	SMA	588.088	73.790	661.878	88,85	75,58
4	Perguruan Tinggi	179.531	5.074	184.605	97,25	82,74
5	Total	1.155.997	103.715	1.259.712	91,77	68,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2. Rasio Ketergantungan

Struktur penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi pada suatu daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju pertumbuhannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, termasuk pada ketersediaan pangan dan daya dukung alam serta lingkungan.

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun, per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang berusia 15-64 tahun. Dengan demikian, besaran dari rasio ketergantungan menggambarkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang aktif secara ekonomi (penduduk usia produktif) untuk membiayai hidup penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (penduduk usia nonproduktif).

Pola penurunan rasio ketergantungan di Kepulauan Riau merupakan kondisi positif bagi pembangunan di Kepulauan Riau, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penurunan rasio ketergantungan hingga mencapai 42,81 pada tahun 2022 yang mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk di Kepulauan Riau menanggung sekitar 42-43 penduduk usia nonproduktif baik karena usia sekolah maupun usia lanjut.

Tabel 2.100
Rasio Ketergantungan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	632.262	644.297	554.899	560.344	568.386
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	51.135	58.986	73.01	78.709	85.093
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 + 2)	683.397	703.283	627.909	639.053	653.479
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun (Usia produktif)	1.399.297	1.486.370	1.436.655	1.479.186	152.6341
5	Rasio Ketergantungan	48,85	47,31	43,70	43,20	42,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2.2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja pembangunan suatu daerah digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan indikator outcome yang dicapai melalui program



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Berikut capaian indikator pembangunan daerah yang merupakan potret keberhasilan pembangunan daerah Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.



Tabel 2.101
Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET 2022	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022			
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	4,84	-3,8	3,43	5,09	4,8 - 5,6	100,00	Tercapai
2	Laju Inflasi	%	3,47	2,03	1,18	2,26	5,83	3,14+1	59,18	Tidak Tercapai asumsi Rendah
3	Indeks Gini	Indeks	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,332	100,00	Tercapai
4	Angka Kemiskinan	%	5,83	5,8	6,13	5,75	6,03	6,01	100,00	Tercapai
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,84	75,84	75,59	75,59	76,46	76,7	100,00	Tercapai
B	Aspek Pelayanan Umum									
	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar									
	Urusan Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	83,78	82,87	84,62	84,72	84,54	100	84,54	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	92,12	94,92	96,02	97	107,72	98	100,00	Tercapai
3	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	72	72	82,49	83	82,35	84	98,04	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	77,3	76,7	77,2	77,2	85,43	78	100,00	Tercapai
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,42	0,41	0,4	0,39	0,08	0,38	100,00	Tercapai
6	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	94	100	95,61	95,78	99,97	95,94	100,00	Tercapai
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%			93,31	95,77	99,93	97,43	100,00	Tercapai
8	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio			29,3	33,7	33,16	33,75	98,25	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
9	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%			n/a	59,2	67,28	60	100,00	Tercapai



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
10	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%			n/a	28,3	40,68	30	100,00	Tercapai
11	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%			17	20	97,22	24,32	100,00	Tercapai
12	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Sekolah Menengah	Rasio	01:22,3	01:21,4	01:20,1	712,8	644,92	724,76	88,98	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
13	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
	Urusan Kesehatan									
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran	130	98	92	128	78,24	125	100,00	Tercapai
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 kelahiran	15	13	11,5	15	10,04	14	100,00	Tercapai
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%			16,82	16,3	15,4	15,8	100,00	Tercapai
4	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
5	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	81	87,7	90,46	90	83,38	90	92,64	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
6	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	82,58	86,1	89,65	87,88	92,71	89	100,00	Tercapai
7	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	79,3	96,5	96,51	95,5	82,86	96	86,31	Tidak Tercapai asumsi Tinggi

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-138



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
8	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%			82,86	80	89,25	85	100,00	Tercapai
9	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status			Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00	Tercapai
10	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%			49,43	50	59,14	52	100,00	Tercapai
11	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%			57,14	57,14	71,43	71,43	100,00	Tercapai
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	25	22	20	18	15	15	100,00	Tercapai
2	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada	%	46,5	46,5	46,5	7,54	7,54	13,53	55,73	Tidak Tercapai asumsi Rendah
3	Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk	%	70,42	73,13	74,96	51,59	51,59	53,69	96,09	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,15	92,47	92,68	93,76	93,76	96,15	97,51	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
5	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	86,62	87,06	83,84	87,06	87,06	91,32	95,34	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
6	Cakupan Pelayanan Drainase	%	36,48	37,26	45,1	45,1	45,1	48,1	93,76	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
7	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%					n.a	100		
8	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%			100	100	66,67	100	66,67	Tidak Tercapai asumsi Sedang
9	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan	%			23	25	100	28	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-139



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
10	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	59,93	59,99	59,99	66	66	67,8	97,35	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
11	Persentase jalan kondisi baik	%	70,30732	73,6427	60,249875	61,75	76,55	63,25	100,00	Tercapai
12	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%			n/a	8	23,76	9	100,00	Tercapai
13	Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda	%			13	20	85	70	100,00	Tercapai
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%			0	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%			0	100	100	100	100	Tercapai
3	Persentase RTLH yang dibenahi	%			n/a	n/a	n.a	10		
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%			0	0	23,3	15	100,00	Tercapai
5	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit			n/a	10000	12000	12	100,00	Tercapai
6	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha			n/a	n/a	n.a	5		

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-140



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%			n/a	16,67	50	50	100,00	Tercapai
2	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%			n/a	33,33	41,67	41,67	100,00	Tercapai
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
4	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	%			42,85	50	60	60	100,00	Tercapai
5	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor			1,15	1,28	2,36	1,99	100,00	Tercapai
6	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor			0,2	0,2	0,31	0,32	96,88	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
7	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor			0,2	0,24	0,27	0,46	58,70	Tidak Tercapai asumsi Rendah
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
	Urusan Sosial									
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%			2,98	6,55	35,71	2,98	100,00	Tercapai
2	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%			24	24,4	44,8	52	86,15	Tidak Tercapai asumsi Tinggi

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-141



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	23,76	25,86	100	100	100	100	100,00	Tercapai
4	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
5	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%			100	0	25	25	100,00	Tercapai
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	6,03	7,02	100	100	100	100	100,00	Tercapai
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%			0	0	100	100	100,00	Tercapai
8	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
9	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%			0,16	0,15	0,42	0,17	100,00	Tercapai
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	38,09	38,09	8,1	2,92	9,2	0,79	100,00	Tercapai
11	Persentase PPKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%			30,79	31,63	36,92	31,63	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-142



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	25	25,83	100	100	100	100	100,00	Tercapai
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Tenaga kerja									
1	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%			11,82	44,51	54,3	51,28	100,00	Tercapai
2	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%			1,5	4	7,69	6	100,00	Tercapai
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%			29,17	34,56	26,06	40	65,15	Tidak Tercapai asumsi Sedang
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	60,5	60,69	64,31	60	16,17	61	26,51	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,72	64,76	67,5	67,52	68,94	67,55	100,00	Tercapai
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,04	7,5	10,34	9,91	8,23	10,1	100,00	Tercapai
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%			n/a	30	25,29	35	72,26	Tidak Tercapai asumsi Sedang
8	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%			n/a	100	98,07	100	98,07	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
9	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	12	2,74	3,65	10,8	10,03	11,8	85,00	Tidak Tercapai asumsi Tinggi

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-143



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET 2022	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022			
10	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	89	88,72	94,8	94,9	84,56	95,25	88,78	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
11	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	100	83,72	74,71	75	83,78	75,5	100,00	Tercapai
12	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	9,32	11,24	5,34	5,34	16,46	5,4	100,00	Tercapai
2	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%			11,11	11,1	8,89	11,1	80,09	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	28,08	30,52	33,42	44,25	29,46	44,07	100,00	Tercapai
4	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%			28,61	28,61	28,71	28,75	99,86	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
5	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%			15,38	38,46	41,86	46,15	90,70	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%			71,24	72,6	65,52	73,6	89,02	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%			83,08	86,34	73,11	86,64	84,38	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
	Urusan Pangan									
1	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%			111	111	124	113	100,00	Tercapai
2	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	9,2	9,26	11,7	≤10	6,6	≤11	100,00	Tercapai
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87	89,1	85,4	86,2	89	86,9	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-144



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
4	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%			10	≤10	6,6	≤10	100,00	Tercapai
5	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	82,61	94	94	80	98	81	100,00	Tercapai
	Pertanahan									
1	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari OPD, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	0	100	100	100	100	100,00	Tercapai
	Lingkungan Hidup									
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100	100	n/a	100	50	20	100,00	Tercapai
2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks			n/a	76,1	85,56	76,75	100,00	Tercapai
3	Indeks Kualitas Air	Indeks			54	56,6	56,79	56,7	100,00	Tercapai
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks			90,59	88,14	90,27	88,25	100,00	Tercapai
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks			59,06	59,07	58	59,08	98,17	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%			0	0	n.a	14,28		
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	20,6	20,3	20	26,67	40	33,33	100,00	Tercapai
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%			0	28,57	n.a	42,85		
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%			83,33	57,14	100	57,14	100,00	Tercapai
12	Persentase Pengurangan Sampah	%			22	24	14,82	26	57,00	Tidak Tercapai asumsi Rendah
13	Persentase Penanganan Sampah	%			75	74	72,42	73	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-145



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
2	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%			100	100	n.a	100	0	Tahun 2022, tidak dilaksanakan
3	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%			25	75	75	75	100,00	Tercapai
4	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%			14,05	18,13	27,79	25,68	100,00	Tercapai
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%			26,66	26,66	48,56	44,64	100,00	Tercapai
3	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%			100	100	n.a	100	0	Tahun 2022, tidak dilaksanakan
4	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%			0	0	n.a	1,45	0	Tahun 2022, tidak dilaksanakan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-146



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Prevalence Rate	%			44,2	47,5	42,26	49,01	86,23	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
2	Unmetneed	%			10,14	10,1	26,3	9,5	0,00	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%			63,27	58	63,27	59,3	100,00	Tercapai
	Perhubungan									
1	Rasio Konektivitas Provinsi	%			6	6	0,51	41,33	100,00	
2	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%			0	0	20	20	100,00	Tercapai
3	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas			12	14	18	16	100,00	Tercapai
	Komunikasi dan Informatika									
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	53,87	43,24	74,18	76	96,03	78	100,00	Tercapai
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%			n/a	20%	20,09	20	100,00	Tercapai
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%			n/a	20	6,56	20	32,8	TidakTercapai asumsi sangat rendah
4	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%			n/a	82,93	81,4	82,93	98,16	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%			6,34	6,34	12,86	11,34	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-147



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET 2022	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022			
2	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%			29,18	29,18	31,45	31,18	100,00	Tercapai
3	Rasio Wirausaha	%			27,52	27,52	28,66	28,02	100,00	Tercapai
4	Persentase UMKM yang dikembangkan	%			22,3	22,3	23,65	25,86	91,45	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
5	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%			8,8	8,8	12,27	13,8	88,91	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
6	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%			0,24	0,24	0,44	0,44	100,00	Tercapai
7	Persentase Koperasi yang diawasi	%			1,53	1,53	2,69	2,53	100,00	Tercapai
8	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%			3,67	3,67	5,79	5,77	100,00	Tercapai
	Penanaman Modal									
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%			0	0	0	0	100,00	Tercapai
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%			0	0	100	100	100,00	Tercapai
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%			0	5	7	7	100,00	Tercapai
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%			95,21	70	99,8	80	100,00	Tercapai
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	77,2	82,34	81,93	82,5	85,86	83,15	100,00	Tercapai
6	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
7	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
	Kepemudaan dan Olahraga									

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-148



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET 2022	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%			n/a	0,51	0,65	0,56	100,00	Tercapai
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%			n/a	4,79	8,84	4,8	100,00	Tercapai
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali			n/a	0	16	0	100,00	Tercapai
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%			n/a	0,54	0,64	0,64	100,00	Tercapai
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%			n/a	17,31	19,23	19,23	100,00	Tercapai
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%			n/a	35,2	38,09	38,09	100,00	Tercapai
7	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%			n/a	0	8,43	8,43 (7	100,00	Tercapai
Statistik										
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
Persandian										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks			n/a	68,13	73,41	68,13	100,00	Tercapai
Kebudayaan										
1	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%			n/a	15,16	25,01	16,75	100,00	Tercapai
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat	%			n/a	1,43	1,5	1,49	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-149



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni									
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%			n/a	47,03	51,44	51,01	100,00	Tercapai
4	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%			n/a	28,06	28,11	28,11	100,00	Tercapai
5	Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	%			n/a	5	20	20	100,00	Tercapai
6	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%			n/a	26,29	30,97	31,75	97,54	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%			n/a	12,1	13,89	12,76	100,00	Tercapai
	Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai			56,36	58,47	62,02	62,47	99,28	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks			14,45	14,7	72,87	14,95	100,00	Tercapai
	Kearsipan									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%			1,01	10,97	14	13,98	100,00	Tercapai
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor			18,33	23	27,6	27,5	100,00	Tercapai
3	Izin Penggunaan Arsip	Skor			0	5	n.a	5		
	Urusan Pilihan Dasar									
	Kelautan dan Perikanan									

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-150



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET 2022	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan			0	4	1	3	33,33	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	304975,02	309287,15	319196,89	306464	304489	307076,6	99,16	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
3	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	115,26	117,42	103,56	110,57	112,58	115	97,90	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	34399,86	33003,11	21421,1	33921	27436	26491,92	100,00	Tercapai
5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%	108,2	126,77	101,63	108,47	110,3	109,55	10,00	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
6	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	100	100	90	100	90	100,00	Tercapai
7	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton			6205,9	1331,9	8391,7	1334,88	100,00	Tercapai
	Pariwisata									
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari			4,27	2,92	2,32	2,3	100,00	Tercapai
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari			1,31	1,81	1,80	1,75	100,00	Tercapai
3	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	53,75	50,87	27,41	37,04	29,78	22,70	100,00	Tercapai
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	2.635.664	2.867.795	408.005	3.103	758.154	370.500	100,00	Tercapai
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	3.547.971	4.227.770	7.153.725	719.206	817.282	1.988.600	41,10	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
6	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	14,299	19,625	14.399,00	2.139	7.147,24	3.996.88	100,00	Tercapai
7	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	n/a	n/a	n/a	7,75	1,63	3	54,33	Tidak Tercapai asumsi Rendah
8	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	2,05	2	100,00	Tercapai
	Pertanian									

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-151



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%			1,1	1,1	2,35	1,2	100,00	Tercapai
2	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%			55,21	55,21	89,98	59,49	100,00	Tercapai
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%			-4,5	1,29	1,56	1,35	100,00	Tercapai
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%			-2,6	0,52	0,86	0,74	100,00	Tercapai
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%			1,4	2,5	2,92	2,8	100,00	Tercapai
6	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%			60	61	64,75	62	100,00	Tercapai
7	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	85,71	57,31	67,5	58,17	79,75	58,5	100,00	Tercapai
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%			37,5	37,5	62,5	38	100,00	Tercapai
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%			52,23	62,4	84,43	72,5	100,00	Tercapai
10	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%			15	20	98,88	20	100,00	Tercapai
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	97,02	101,41	99,84	99,84	103,34	99,88	100,00	Tercapai
12	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%			40	40	49,02	42	100,00	Tercapai
	Kehutanan									
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp			25,31	27	27,13	36,36	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-152



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
2	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	386	400	5	5	330	13	100,00	Tercapai
3	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha			88	500	500	100	100,00	Tercapai
4	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS				2	2	98	100,00	Tercapai
	Energi dan Sumber Daya Mineral									
1	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	23	33,33	43,33	43,33	36,36	36,36	100,00	Tercapai
2	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0007	0,0007	0,13	12	14,17	13	109,00	Tercapai
3	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	32,1	70,79	82,11	100	100	100	100,00	Tercapai
4	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	85,1	89,9	91,35	95	100	98	100,00	Tercapai
	Perdagangan									
1	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%			0	35	100	50	100,00	Tercapai
2	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%			0	50	74,38	70	100,00	Tercapai
3	Nilai Inflasi	%			0	2,26	5,83	3.14+1	59,18	Tidak Tercapai asumsi Rendah
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	%			6,5	3,5	24,33	3,5	100,00	Tercapai
5	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%			<20	<20	8	<20	100,00	Tercapai
6	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%			0	68	80	80	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-153



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	Perindustrian									
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	36,12	37,5	41,7	38,5	41,84	38,5	100,00	Tercapai
2	Persentase Izin Usaha Industri	%			0	46,92	60	60	100,00	Tercapai
3	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen			0	0	1	1	100,00	Tercapai
	Transmigrasi									
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang <i>clear and clean</i> yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%			n/a	n/a	25	33,3	75,08	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
2	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%			n/a	23	21,23	25,8	82,29	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
3	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%			n/a	n/a	3,12	6,25	49,92	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Sekretariat Daerah									
1	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%			100	100	108	100	100,00	Tercapai
2	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor			n/a	37,1	45,17	38,6	100,00	Tercapai
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%			n/a	n/a	20	20	100,00	Tercapai
4	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang	%			n/a	90	90	90	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-154



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
	Perekonomian yang Ditindaklanjuti									
5	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%			85	88	106	90	100,00	Tercapai
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%			8	8,1	11,43	8,2	100,00	Tercapai
7	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor			3,0221	3,0221	3,42	3,03	100	Tercapai
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			85	85	140,35	86	100	Tercapai
	Urusan Perbatasan									
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			85	85	86,55	86	100,00	Tercapai
2	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%			n/a	n/a	49	35	100,00	Tercapai
	Sekretariat DPRD									
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%			68	70	80	72	100,00	Tercapai
2	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
3	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Perencanaan									

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-155



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
1	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%			n/a	80	100	82	100,00	Tercapai
2	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%			100	100	98,88	100	98,88	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
3	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%			n/a	95	95,95	95	100,00	Tercapai
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			n/a	100	95,83	100	95,83	Tidak Tercapai asumsi Sangat Tinggi
	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	55	55	65	70	75	75	100,00	Tercapai
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	0	5	20	30	48,78	35	100,00	Tercapai
	Keuangan									
1	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%			98	90	81,27	91	89,31	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
2	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
3	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
4	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%			-12,81	2,5	25,32	4,89	100,00	Tercapai
5	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelavanoan	Jenis Pelayanan			1	1	1	1	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-156



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET 2022	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022			
6	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi			14200	15000	49090	15300	100,00	Tercapai
7	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%			29,69	20	0,4121	22	1,87	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
8	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%			56	66	81	81	100,00	Tercapai
9	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%			-18,77	25,58	-50,78	11,91	0,00	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
Kepegawaian										
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%			n/a	43,42	47,97	44,63	100,00	Tercapai
2	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%			n/a	70	96,37	73	100,00	Tercapai
3	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%			n/a	95	98,08	95	100,00	Tercapai
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan										
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%			n/a	30	28,4	32	100,00	Tercapai
Unsur Pengawasan										
Inspektorat Daerah										
1	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
2	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%			97	90	100	100	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-157



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
3	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100,00	Tercapai
4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%			n/a	5	6	6	100	Tercapai
5	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%			<10	<10	<10	<10	100	Tercapai
6	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%			84	84	85	80	100,00	Tercapai
7	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%			50	50	63	75	84,00	Tidak Tercapai asumsi Tinggi
8	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%			65	70	88	78	100,00	Tercapai
9	Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban	%			n/a	n/a	80	78	100,00	Tercapai
10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%			58,5	50	39	60	65,00	Tidak Tercapai asumsi Rendah
11	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%			41,185	80	90	80	100,00	Tercapai
12	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
	Unsur Pemerintahan Umum									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%			0	0	0	0	100,00	Tercapai
2	Persentase Konflik antar Agama	%			0	0	0	0	100,00	Tercapai
3	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-158



NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAIAN 2022	STATUS
			2018	2019	2020	2021	2022	2022		
4	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)		59	Pileg : 82.00; Pilpres : 82.00	66,9	-	n.a	-		
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%			100	100	100	100	100,00	Tercapai
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	163,64	158,8	84,21	80	97,86	83	100,00	Tercapai
7	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai
C	Aspek Daya Saing									
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	77,2	82,34	81,93	82,5	85,86	83,15	100,00	Tercapai

2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Indonesia maka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk meningkatkan capaian pembangunan daerah dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup sehingga akan berdampak positif bagi generasi di masa yang akan datang.

Provinsi Kepulauan Riau sedang dalam merumuskan perubahan atas perencanaan pembangunan jangka menengah. Untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tersebut, maka perlu melihat gambaran umum capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Kepulauan Riau sebagai salah satu acuan dalam menyusun kebijakan, khususnya dalam ranah pembangunan berkelanjutan. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022
(Meta Data 1)

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 1.1 Pada Tahun 2030, Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem Bagi Semua Orang Yang Saat Ini Berpendapatan Kurang Dari 1,25 Dolar Amerika Per Hari							
1.1.1*	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	PM	PM	PM	1,74	BPS Provinsi Kepulauan Riau
Target 1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi Setidaknya Setengah Proporsi Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Di Semua Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional							
1.2.1*	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	%	5,83	5,8	6,13	5,75	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
1.2.2*	Persentase Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan dalam Berbagai Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional	%	PM	PM	PM	PM	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
Target 1.3 Menerapkan Secara Nasional Sistem Dan Upaya Perlindungan Sosial Yang Tepat Bagi Semua, Termasuk Kelompok Yang Paling Miskin, Dan Pada Tahun 2030 Mencapai Cakupan Substansial Bagi Kelompok Miskin Dan Rentan							



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
1.3.1*	Proporsi Penduduk Yang Menerima Program Perlindungan Sosial, Menurut Jenis Kelamin, Untuk Kategori Kelompok Semua Anak, Pengangguran, Lansia, Penyandang Difabilitas, Ibu Hamil/Melahirkan, Korban Kecelakaan Kerja, Kelompok Miskin dan Rentan	%	70	72	78	87,88	BPJS Kesehatan/Dinas Kesehatan
1.3.1.(a)	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	70	72	78	87,88	BPJS Kesehatan/Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	82,58	59,61	43,45	45,6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 1.4 Pada Tahun 2030, Menjamin Bahwa Semua Laki-Laki Dan Perempuan, Khususnya Masyarakat Miskin Dan Rentan, Memiliki Hak Yang Sama Terhadap Sumber Daya Ekonomi, Serta Akses Terhadap Pelayanan Dasar, Kepemilikan Dan Kontrol Atas Tanah Dan Bentuk Kepemilikan Lain, Warisan, Sumber Daya Alam, Teknologi Baru, Dan Jasa Keuangan Yang Tepat, Termasuk Keuangan Mikro							
1.4.1	Proporsi Penduduk/Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar	%	85,87	89,13	89,19	91,62	BPS Provinsi Kepulauan Riau
	Persentase Penduduk Dengan Akses Pada Layanan Air Minum Dasar	%	16,6	16,46	13,02	13,02	
	Persentase Penduduk Dengan Akses Pada Layanan Sanitasi Dasar	%	85,87	89,13	89,19	91,62	
	Persentase Penduduk Rural Dengan Akses Pada Layanan Mobilitas Dasar	%	PM	PM	PM	PM	
	Persentase Penduduk Dengan Akses Pada Layanan Mobilitas Dasar	%	PM	PM	PM	PM	



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Persentase Penduduk Dengan Akses Pada Fasilitas Penyehatan Dasar (Kebersihan Dasar)	%	78,45	74,49	80,35	80,35	
1.4.2	Proporsi Dari Penduduk Dewasa Yang Mendapatkan Hak Atas Tanah Yang Didasari Oleh Dokumen Hukum dan Yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tipe Kepemilikan						BPS/Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Rumah milik (% HM).	%	69,44	66,62	66,37	66,37	
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Rumah Sewa (% Sewa).	%	23,48	24,03	26,69	26,69	
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Rumah Kontrak (% Kontrak)	%	23,48	24,03	26,69	26,69	
Target 1.5 Pada Tahun 2030, Membangun Ketahanan Masyarakat Miskin Dan Mereka Yang Berada Dalam Kondisi Rentan, Dan Mengurangi Kerentanan Mereka Terhadap Kejadian Ekstrem Terkait Iklim Dan Guncangan Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Dan Bencana							
1.5.1*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang						BPBD Provinsi Kepulauan Riau
	Jumlah Korban Meninggal Per 100.000 Orang	per 100.000 orang	0,41	0,25	6,3	84,6	
	Jumlah Korban Hilang Per 100.000 Orang	per 100.000 orang	-	-	-	-	



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Korban Terluka Per 100.000 Orang	per 100.000 orang	0,31	2,13	0,05	0,1	
	Jumlah Korban Mengungsi Per 100.000 Orang	per 100.000 orang	104,18	12,54	0,19	5,95	
1.5.2*	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	BPBD Provinsi Kepulauan Riau
1.5.3*	Rencana dan Implementasi Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Yang Selaras Dengan The <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> 2015 – 2030	%	PM	PM	PM	PM	BPBD Provinsi Kepulauan Riau
1.5.4*	Persentase Pemerintah Daerah Yang Mengadopsi Dan Menerapkan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Daerah Yang Selaras dengan Strategi Pengurangan Risiko Bencana Nasional	%	PM	14,28	14,28	14,28	BPBD Provinsi Kepulauan Riau
Target 1.a Menjamin Mobilisasi Yang Signifikan Terkait Sumber Daya Dari Berbagai Sumber, Termasuk Melalui Kerjasama Pembangunan Yang Lebih Baik, Untuk Menyediakan Sarana Yang Memadai Dan Terjangkau Bagi Negara Berkembang, Khususnya Negara Kurang Berkembang Untuk Melaksanakan Program Dan Kebijakan Mengakhiri Kemiskinan Di Semua Dimensi							
1.a.1*	Proporsi Sumber Daya Yang Dialokasikan Oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan kemiskinan		PM	PM	PM	PM	BKAD Provinsi Kepulauan Riau
1.a.2*	Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan, Dan						BKAD Provinsi Kepulauan Riau



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Perlindungan Sosial) Sebagai Persentase Dari Total Belanja Pemerintah)						
	Persentase Pengeluaran/ Belanja Pemerintah Untuk Pendidikan	%	26,23	26,41	25,73	29,79	
	Persentase Pengeluaran/ Belanja Pemerintah Untuk Kesehatan	%	10,7	11,64	10,63	8,53	
	Persentase Pengeluaran/ Belanja Pemerintah Untuk Perlindungan sosial	%	PM	PM	PM	12,86	

Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 2.2 Pada Tahun 2030, Menghilangkan Kelaparan Dan Menjamin Akses Bagi Semua Orang, Khususnya Orang Miskin Dan Mereka Yang Berada Dalam Kondisi Rentan, Termasuk Bayi, Terhadap Makanan Yang Aman, Bergizi, Dan Cukup Sepanjang Tahun							
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	4,38	4,08	6,07	7,71	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
2.1.2*	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	11,32	11,32	4,12	6,07	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Target 2.2 Pada Tahun 2030, Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi, Termasuk Pada Tahun 2025 Mencapai Target Yang Disepakati Secara Internasional Untuk Anak Pendek Dan Kurus Di Bawah Usia 5 Tahun, Dan Memenuhi Kebutuhan Gizi Remaja Perempuan, Ibu Hamil Dan Menyusui, Serta Manula							
2.2.1*	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita	%	13	11,9	5,6	11	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
2.2.2*	Prevalensi <i>Wasting</i> (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe	%	11,2	7,9	4,27	13,4	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
2.2.2.(a)	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	87	89,1	89,1	91,9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
2.2.3	Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun	%	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Target 2.3 Pada Tahun 2030, Menggandakan Produktivitas Pertanian Dan Pendapatan Produsen Makanan Skala Kecil, Khususnya Perempuan, Masyarakat Penduduk Asli, Keluarga Petani, Penggembala Dan Nelayan, Termasuk Melalui Akses Yang Aman Dan Sama Terhadap Lahan, Sumber Daya Produktif, Dan Input Lainnya, Pengetahuan, Jasa Keuangan, Pasar, Dan Peluang Nilai Tambah, Dan Pekerjaan Non-Pertanian							
2.3.1	Volume Produksi Per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/ Peternakan/Perikanan/Kehutanan	%	PM	120.088	72.165	72.165	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/ Peternakan/ Perikanan/ Kehutanan	%	112.616.91,56	109.921.407,37	88.571.947,27	86.555.429,70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.3.2*	Rata-Rata Pendapatan Produsen Pertanian Skala Kecil, Menurut Sub Sektor	%	112.616.920	114.321.347	88.571.947	88.571.347	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Target 2.4 Pada Tahun 2030, Menjamin Sistem Produksi Pangan Yang Berkelanjutan Dan Menerapkan Praktek Pertanian Tangguh Yang Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas, Membantu Menjaga Ekosistem, Memperkuat Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Banjir, Dan Bencana Lainnya, Serta Secara Progresif Memperbaiki Kualitas Tanah Dan Lahan							
2.4.1	Proporsi Areal Pertanian Produktif Dan Berkelanjutan	Ha	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
2.4.1.(a)	Proporsi Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-165



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 2.5 Pada Tahun 2020, Mengelola Keragaman Genetik Benih, Tanaman Budidaya Dan Hewan Ternak Dan Peliharaan Dan Spesies Liar Terkait, Termasuk Melalui Bank Benih Dan Tanaman Yang Dikelola Dan Dianekaragamkan Dengan Baik Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional, Serta Meningkatkan Akses Terhadap Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata, Hasil Dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait, Sebagaimana Yang Disepakati Secara Internasional							
2.5.1*	Jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman Dan Hewan Untuk Pangan Dan Pertanian Yang Disimpan Di Fasilitas Konservasi, Baik Jangka Menengah Atau Jangka Panjang		0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
2.5.2*	Proporsi Ras Ternak Lokal Yang Berisiko Punah		0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Target 2.a Meningkatkan Investasi, Termasuk Melalui Kerjasama Internasional Yang Kuat, Dalam Infrastruktur Pedesaan, Layanan Kajian Dan Perluasan Pertanian, Pengembangan Teknologi Dan Bank Gen Untuk Tanaman Dan Ternak, Untuk Meningkatkan Kapasitas Produktif Pertanian Di Negara Berkembang, Khususnya Negara Kurang Berkembang							
2.a.1*	Indeks Orientasi Pertanian (IOP) Untuk Pengeluaran Pemerintah		PM	PM	PM	PM	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
2.a.2*	Total Bantuan Pembangunan (ODA) Dan Bantuan Lain Untuk Sektor Pertanian		PM	PM	PM	PM	
Target 2.b Memperbaiki Dan Mencegah Pembatasan Dan Distorsi Dalam Pasar Pertanian Dunia, Termasuk Melalui Penghapusan Secara Bersamaan Segala Bentuk Subsidi Ekspor Pertanian Dan Semua Tindakan Ekspor Dengan Efek Setara, Sesuai Dengan Amanat The Doha Development Round							
2.b.1*	Subsidi Ekspor Pertanian		PM	PM	PM	PM	
Target 2.c Mengadopsi Langkah-Langkah Untuk Menjamin Berfungsinya Pasar Komoditas Pangan Serta Turunannya Dengan Tepat, Dan Memfasilitasi Pada Waktu Yang Tepat Akses Terhadap Informasi Pasar, Termasuk Informasi Cadangan Pangan, Untuk Membantu Membatasi Volatilitas Harga Pangan Yang Ekstrem							
2.c.1*	Anomali Harga Pangan		PM	PM	PM	PM	



Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 3.1 Pada Tahun 2030, Mengurangi Rasio Angka Kematian Ibu Hingga Kurang Dari 70 Per 100.000 Kelahiran Hidup							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	120	98,3	92	241,3	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.1.2*	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya (a) Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih; (b) Di Fasilitas Kesehatan						Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
	Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	92,2	92,4	92,2	91,7	
	Di Fasilitas Kesehatan	%	90,2	91	91,1	90,7	
Target 3.2 Pada Tahun 2030, Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir Dan Balita Yang Dapat Dicegah, Dengan Seluruh Negara Berusaha Menurunkan Angka Kematian Neonatal Setidaknya Hingga 12 Per 1.000 Kh (Kelahiran Hidup) Dan Angka Kematian Balita 25 Per 1.000							
3.2.1	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	%	7,5	7,1	6	8	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	%	7	6,5	5,5	7,5	
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	%	5,9	5,2	4,4	5,9	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Target 3.3 Pada Tahun 2030, Mengakhiri Epidemi Aids, Tuberkulosis, Malaria, Dan Penyakit Tropis Yang Terabaikan, Dan Memerangi Hepatitis, Penyakit Bersumber Air, Serta Penyakit Menular Lainnya							
3.3.1*	Jumlah Infeksi Baru HIV Per 1.000 Penduduk Tidak Terinfeksi	%	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) Per 100.000 Penduduk	%	PM	0,316	0,352	0,474	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.3.3*	Kejadian Malaria Per 1.000 Orang	%	141	139	198	39	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.3.3 (a)	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria	%	0	0	0	1	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	74	0	29	12	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (a) Filariasis Dan (b) Kusta	Orang	81	81	81	81	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
		Orang	65	58	64	43	
3.3.5.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Eliminasi Kusta	Orang	65	58	64	43	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.3.5.(b)	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi	Kab./ Kota	1	0	2	2	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Target 3.4 Pada Tahun 2030, Mengurangi Hingga Sepertiga Angka Kematian Dini Akibat Penyakit Tidak Menular, Melalui Pencegahan Dan Pengobatan, Serta Meningkatkan Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan							
3.4.1	Kematian Akibat Penyakit Kardiovaskuler, Kanker, Diabetes Atau Penyakit Pernapasan Kronis						Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.4.1.(a)	Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun	%	22,8	22,3	20,2	17,2	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	26,27	28,2	25,7	26,35	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun	%	37,27	28,1	28,75	26,65	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.4.2	Angka Kematian (<i>Insidens Rate</i>) Akibat Bunuh Diri	%	PM	PM	PM	PM	Polda Kepulauan Riau
Target 3.5 Memperkuat Pencegahan Dan Pengobatan Penyalahgunaan Zat, Termasuk Penyalahgunaan Narkotika Dan Penggunaan Alkohol Yang Membahayakan							
3.5.1	Cakupan Intervensi Pengobatan (Farmakologi, Psikososial, Rehabilitasi Dan Layanan Pasca Intervensi) Bagi Gangguan Penyalahgunaan Zat		PM	PM	PM	PM	BNN/Loka Rahabilitasi Kota Batam

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-168



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
3.5.1.(a)	Jumlah Penyalahguna NAPZA Yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis	Kasus	233	256	163	156	BNN/Loka Rahabilitasi Kota Batam
3.5.1.(b)	Jumlah Yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi		PM	PM	PM	PM	BNN
3.5.2*	Konsumsi Alkohol (Liter Per Kapita) Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir	%	0,48	0,41	0,39	0,36	BPS/ Dinas Kesehatan
Target 3.6 Pada Tahun 2030, Mengurangi Hingga Setengah Jumlah Kematian Global Dan Cedera Dari Kecelakaan Lalu Lintas							
3.6.1	Angka Kematian Akibat Cedera Fatal Kecelakaan Lalu Lintas		PM	PM	PM	PM	Polda Kepulauan Riau
Target 3.7 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi, Termasuk Keluarga Berencana, Informasi Dan Pendidikan, Dan Integrasi Kesehatan Reproduksi Ke Dalam Strategi Dan Program Nasional							
3.7.1	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi Menurut Metode Kontrasepsi Modern	%	90,5	88,65	75,1	73,7	DP3AP2KB
3.7.2	Angka Kelahiran Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19 Tahun) Per 1.000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang Sama	%	0	0	30,9	11,4	DP3AP2KB
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	2,2	1,9	2,2	2,53	DP3AP2KB
Target 3.8 Mencapai Cakupan Kesehatan Universal, Termasuk Perlindungan Risiko Keuangan, Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Baik, Dan Akses Terhadap Obat-Obatan Dan Vaksin Dasar Yang Aman, Efektif, Berkualitas, Dan Terjangkau Bagi Semua Orang							
3.8.1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	%	PM	100	100	100	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.8.1.(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan	%	3,46	3,05	2,61	2,25	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.8.2*	Proporsi Populasi Dengan Pengeluaran Rumah Tangga Yang Besar Untuk Kesehatan Sebagai Bagian Dari Total Pengeluaran Rumah Tangga Atau Pendapatan	%	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	82,58	86,1	89,76	90,85	BPJS Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 3.9 Pada Tahun 2030, Secara Signifikan Mengurangi Jumlah Kematian Dan Kesakitan Akibat Bahan Kimia Berbahaya Serta Polusi Dan Kontaminasi Udara, Air Dan Tanah							
3.9.1	Angka Kematian Akibat Rumah Tangga Dan Polusi Udara Ambien	%	0	0	0	0	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.9.2	Angka Kematian Akibat Air Tidak Aman, Sanitasi Tidak Aman, Dan Tidak Higienis	%	0	0	0	0	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.9.3	Angka Kematian Akibat Keracunan	%	0	0	0	0	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Target 3.a Memperkuat Pelaksanaan The Framework Convention On Tobacco Control Who Di Seluruh Negara Sebagai Langkah Yang Tepat							
3.a.1*	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	%	23,9	21	17,4	18,35	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Target 3.b Mendukung Penelitian Dan Pengembangan Vaksin Dan Obat Penyakit Menular Dan Tidak Menular Yang Terutama Berpengaruh Terhadap Negara Berkembang, Menyediakan Akses Terhadap Obat Dan Vaksin Dasar Yang Terjangkau, Sesuai The Doha Declaration Tentang The Trips Agreement And Publik Health, Yang Menegaskan Hak Negara Berkembang Untuk Menggunakan Secara Penuh Ketentuan Dalam Kesepakatan Atas Aspek- Aspek Perdagangan Dari Hak Kekayaan Intelektual Terkait Keleluasaan Untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat, Dan Khususnya, Menyediakan Akses Obat Bagi Semua							
3.b.1*	Proporsi Target Populasi Yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional		PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
		Cakupan Vaksin Yang Mengandung DPT (dosis ke -3)	97,8	97,2	86,6	80,3	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
		Cakupan campak (dosis kedua)	90,2	71,1	62,7	70,5	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
		Cakupan vaksin konjugat pneumokus/ PCV2	0	0	0	0	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.b.2*	Total <i>Official Development Assistance</i> (ODA) Untuk Penelitian Medis Dan Sektor Kesehatan Dasar		PM	PM	PM	PM	
3.b.3*	Proporsi Fasilitas Kesehatan Dengan Paket Obat Essensial Yang Tersedia Dan Terjangkau Secara Berkelanjutan		96	93	97	91	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Target 3.c Meningkatkan Secara Signifikan Pembiayaan Kesehatan Dan Rekrutmen, Pengembangan, Pelatihan, Dan Retensi Tenaga Kesehatan Di Negara Berkembang, Khususnya Negara Kurang Berkembang, Dan Negara Berkembang Pulau Kecil							
3.c.1*	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan		PM	0,15	0,18	0,2	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
	Kepadatan Dan Distribusi Dokter Spesialis Per 1.000 Penduduk		0,25	0,58	0,35	0,63	
	Kepadatan Dan Distribusi Dokter Umum Per 1.000 Penduduk		PM	0,07	0,08	0,12	
	Kepadatan Dan Distribusi Dokter Gigi Per 1.000 Penduduk		PM	1,65	1,83	2,52	
	Kepadatan Dan Distribusi Perawat Per 1.000 Penduduk		PM	0,03	0,03	0,04	
	Kepadatan Dan Distribusi Perawat Gigi Per 1.000 Penduduk		PM	0,81	0,91	1,29	
	Kepadatan Dan Distribusi Bidan Per 1.000 Penduduk		PM	0,06	0,08	0,12	
	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Gizi Per 1.000 Penduduk		0,77	0,88	0,11	0,15	
	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan Lingkungan Per 1.000 Penduduk		PM	0,03	0,03	0,04	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Keterampilan Fisik Per 1.000 Penduduk		PM	0,1	0,11	0,13	
	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Keteknisan Medis Per 1.000 Penduduk		PM	0,1	0,12	0,15	
	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan Masyarakat Per 1.000 Penduduk		PM	PM	PM	0,15	
Target 3.d Memperkuat Kapasitas Semua Negara, Khususnya Negara-Negara Berkembang, Untuk Peringatan Dini, Pengurangan Risiko Dan Manajemen Risiko Kesehatan Nasional Dan Global							
3.d.1	Regulasi Kesehatan Internasional Dan Kesiapsiagaan Darurat Kesehatan		PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3.d.2	Persentase Infeksi Aliran Darah Akibat Organisme Antimikroba-Resisten Terpilih/Tertentu		PM	PM	PM	PM	

Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 4.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Bahwa Semua Anak Perempuan Dan Laki-Laki Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Tanpa Dipungut Biaya, Setara, Dan Berkualitas, Yang Mengarah Pada Capaian Pembelajaran Yang Relevan Dan Efektif							
4.1.1.(a)	Proporsi Anak-Anak Dan Remaja Di (1) Kelas 5 (b) Kelas 8, Dan (c) Usia 15 Tahun Yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum Dalam (i) Membaca, (ii) Matematika		PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat		PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau/BPS
	SD/Sederajat		98,13	95,69	97,8	95,26	
	SMP/Sederajat		90,15	91,56	94,8	92,71	
	SMA/Sederajat		82,86	78,14	78,65	81,07	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-172



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
4.1.2.(a)	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang PAUD, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, Dan SMA/Sederajat		PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau/BPS
	PAUD		PM	PM	PM	PM	
	SD/Sederajat		PM	PM	PM	PM	
	SMP/Sederajat		PM	PM	PM	PM	
	SMA/Sederajat		17,14	PM	PM	PM	
Target 4.2 Pada Tahun 2030, Menjamin Bahwa Semua Anak Perempuan Dan Laki-Laki Memiliki Akses Terhadap Perkembangan Dan Pengasuhan Anak Usia Dini, Pengasuhan, Pendidikan Pra Sekolah Dasar Yang Berkualitas, Sehingga Mereka Siap Untuk Menempuh Pendidikan Dasar							
4.2.1*	Proporsi Anak Usia 24-59 Bulan Yang Berkembang Dengan Baik Dalam Bidang Kesehatan, Pembelajaran, Dan Psikososial, Menurut Jenis Kelamin		PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
4.2.2*	Tingkat Partisipasi Dalam Pembelajaran Yang Teroganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar), Menurut Jenis Kelamin		PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau/BPS
			PM	PM	PM	PM	
Target 4.3 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Yang Sama Bagi Semua Perempuan Dan Laki-Laki, Terhadap Pendidikan Teknik, Kejuruan Dan Pendidikan Tinggi, Termasuk Universitas, Yang Terjangkau Dan Berkualitas							
4.3.1*	Tingkat Partisipasi Remaja Dan Dewasa Dalam Pendidikan Dan Pelatihan Formal Dan Non Formal Dalam 12 Bulan Terakhir, Menurut Jenis Kelamin		PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau/BPS
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	%	27,64	25,11	26,68	27,59	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau/BPS
Target 4.4 Pada Tahun 2030, Meningkatkan Secara Signifikan Jumlah Pemuda Dan Orang Dewasa Yang Memiliki Keterampilan Yang Relevan, Termasuk Keterampilan Teknik Dan Kejuruan, Untuk Pekerjaan, Pekerjaan Yang Layak Dan Kewirausahaan							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-173



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
4.4.1	Proporsi Remaja Dan Dewasa Dengan Ketrampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)		PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
4.4.1.(a)	Proporsi Remaja (Usia 15-24 Tahun) Dan Dewasa (Usia 15-59 Tahun) Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun)	86,37	93,05	90,65	97,33	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau/BPS
		Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun)	65,6	77,18	81,73	89,06	
Target 4.5.1 Pada Tahun 2030, Menghilangkan Disparitas Gender Dalam Pendidikan, Dan Menjamin Akses Yang Sama Untuk Semua Tingkat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan, Bagi Masyarakat Rentan Termasuk Penyandang Cacat, Masyarakat Penduduk Asli, Dan Anak-Anak Dalam Kondisi Rentan							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Pada Tingkat SD/Sederajat, Dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Tingkat SMP/Sederajat, SMA/SMK/Sederajat, Dan Perguruan Tinggi Untuk (a) Perempuan/Laki-Laki, (b) Pedesaan/ Perkotaan, (c) Kuintil Terendah/Tertinggi, (d) Disabilitas/Tanpa Disabilitas		99,12	99,97	100,71	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
	Rasio Antara APM Perempuan Dan Laki-Laki Pada Usia 7 Sampai 12 Tahun		PM	PM	PM	PM	
	Rasio Antara APM Pedesaan dan Perkotaan Pada Usia 7 Sampai 12 Tahun		PM	99,06	100,74	PM	
	Rasio Antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi Pada Usia 7 Sampai 12 Tahun		PM	PM	PM	PM	
	Rasio Antara APM Siswa Disabilitas Dan Siswa Tanpa Disabilitas Pada Usia 7 Sampai 12 Tahun		PM	89,61	101,31	PM	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Rasio Antara APK Perempuan Dan Laki Laki Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat		PM	PM	PM	PM	
	Rasio Antara APK Pedesaan Dan Perkotaan Jenjang Pendidikan SMP/ Sederajat		PM	85,04	87,37	PM	
	Rasio Antara APK Kuintil Terendah Dan Kuintil Tertinggi Di Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat		PM	PM	PM	PM	
	Rasio Antara APK Siswa Disabilitas Dan Siswa Tanpa Disabilitas Di Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat		PM	124,89	97,69	PM	
	Rasio Antara APK Perempuan Dan Laki Laki Jenjang Pendidikan SMA/ sederajat		PM	100,15	98,25	PM	
	Rasio Antara APK Pedesaan Dan Perkotaan Jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat		PM	80,02	109,35	PM	
	Rasio Antara APK Kuintil Terendah Dan Kuintil Tertinggi Di Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat		PM	PM	PM	PM	
	Rasio Antara APK Siswa Disabilitas Dan Siswa Tanpa Disabilitas Di Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat		PM	PM	PM	PM	
Target 4.6 Pada Tahun 2030, Menjamin Bahwa Semua Remaja Dan Proporsi Kelompok Dewasa Tertentu, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan, Memiliki Kemampuan Literasi Dan Numerasi							
4.6.1	Persentase Remaja/Dewasa Pada Kelompok Usia Tertentu, Paling Tidak Mahir/ Mampu Pada Level Tertentu Dalam Keterampilan (a) Membaca Dan (ii) Menghitung, Menurut Jenis Kelamin		PM	PM	PM	PM	
4.6.1 (a)	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur $\geq$ 15 Tahun		98,87	99	99	99,09	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau/BPS
Target 4.a Membangun Dan Meningkatkan Fasilitas Pendidikan Yang Ramah Anak, Ramah Penyandang Cacat Dan Gender, Serta Menyediakan Lingkungan Belajar Yang Aman, Anti Kekerasan, Inklusif Dan Efektif Bagi Semua							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-175



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
4.a.1*	Proporsi Sekolah Dengan Akses Terhadap (a) Listrik (b) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (c) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (d) Air Minum Layak, (e) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (f) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (WASH)		PM	PM	PM	PM	
	SD		97,75	99,14	99,45	99,64	
	SMP						
	SMA						
	SLB						
	SD		97,75	99,14	99,45	99,64	
	SMP						
	SMA						
	SLB						
	SD		PM	PM	PM	PM	
	SMP						
	SMA						
	SLB						
	SD		PM	PM	PM	PM	
	SMP						
	SMA						
	SLB						

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-176



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	SD						
	SMP						
	SMA						
	SLB						
	SD						
	SMP						
	SMA						
	SLB						
4.a.1.(a)	Persentase Siswa Yang Mengalami Perundungan Dalam 12 Bulan Terakhir		NA	NA	NA	2,8	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Target 4.b Pada Tahun 2020, Secara Signifikan Memperluas Secara Global, Jumlah Beasiswa Bagi Negara Berkembang, Khususnya Negara Kurang Berkembang, Negara Berkembang Pulau Kecil, Dan Negara-Negara Afrika, Untuk Mendaftar Di Pendidikan Tinggi, Termasuk Pelatihan Kejuruan, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Program Teknik, Program Rekayasa Dan Ilmiah, Di Negara Maju Dan Negara Berkembang Lainnya							
4.b.1*	Jumlah Bantuan Resmi Pemerintah Indonesia Kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang		PM	PM	PM	PM	
Target 4.c Pada Tahun 2030, Secara Signifikan Meningkatkan Pasokan Guru Yang Berkualitas, Termasuk Melalui Kerjasama Internasional Dalam Pelatihan Guru Di Negara Berkembang, Terutama Negara Kurang Berkembang, Dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil							
4.c.1*	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Dengan Standar Nasional Menurut Jenjang Pendidikan		PM	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
	Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK SLB Yang Bersertifikat Pendidik		28,06	24,75	24,08	23,43	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-177



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Persentase Guru SM Yang Memenuhi Kualifikasi Minimal S1/D4		95,99	96,11	95,63	96,59	
	Persentase Guru TK Yang Memenuhi Kualifikasi Minimal S1/D4		PM	PM	PM	PM	
	1. Persentase Guru SD Yang Memenuhi Kualifikasi Minimal S1/D4		93,26	92,08	93,06	93,41	
	1. Persentase Guru SMP Yang Memenuhi Kualifikasi Minimal S1/D4		93,26	93,76	94,18	94,33	
	1. Persentase Guru SMA Yang Memenuhi Kualifikasi Minimal S1/D4		93,95	94,29	93,39	94,39	
	1. Persentase Guru SMK Yang Memenuhi Kualifikasi Minimal S1/D4		88,24	89,41	88,87	89,29	
	1. Persentase Guru SLB Yang Memenuhi Kualifikasi Minimal S1/D4		93,91	94,03	94,91	93,78	

Tujuan 5 : Kesenjangan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 5.1 Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Dimanapun							
5.1.1*	Ketersediaan Kerangka Hukum Yang Mendorong, Menetapkan Dan Memantau Kesenjangan Gender Dan Penghapusan Diskriminasi Berdasarkan Jenis Kelamin		PM	PM	PM	PM	DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Target 5.2 Menghapuskan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Di Ruang Publik Dan Pribadi, Termasuk Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Seksual, Serta Berbagai Jenis Eksploitasi Lainnya							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-178



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
5.2.1*	Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Fisik	62	82	68	71	DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
		Seksual	48	11	13	16	
		Emosional	49	54	65	49	
		Total	159	147	146	136	
5.2.2*	Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir		48	11	13	16	DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Target 5.3 Menghapuskan Semua Praktik Berbahaya, Seperti Perkawinan Usia Anak, Perkawinan Dini Dan Paksa, Serta Sunat Perempuan							
5.3.1*	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Usia Kawin Pertama Atau Usia Hidup Bersama Pertama (a) Sebelum Umur 15 Tahun Dan (b) Sebelum Umur 18 Tahun		03:31	0,1903	NA	PM	DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
5.3.2	Persentase Anak Perempuan Dan Perempuan Berusia 15-49 Tahun Yang Telah Menjalani FGM/C, Menurut Kelompok Umur		PM	PM	PM	PM	
Target 5.5 Menjamin Partisipasi Penuh Dan Efektif, Dan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin Di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan Dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, Dan Masyarakat							
5.5.1*	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di (a) Parlemen Tingkat Pusat Dan (b) Pemerintah Daerah		17,78	11,1	11,1	11,1	DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
5.5.2	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial		9,09	9,75	10,25	10	DP3AP2KB, BPS, BKPSDM
Target 5.6 Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual Dan Reproduksi, Dan Hak Reproduksi Seperti Yang Telah Disepakati Sesuai Dengan Programme Of Action Of The International Conference On Population And Development And The Beijing Platform Serta Dokumen-Dokumen Hasil Reviu Dari Konferensi-Konferensi Tersebut							
5.6.1*	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi 15-49 Tahun Yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan		PM	PM	PM	PM	DP3AP2KB

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-179



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, Dan Layanan Kesehatan						
5.6.2*	Regulasi Yang Menjamin Akses Yang Setara Bagi Perempuan Dan Laki-Laki Untuk Mendapatkan Pelayanan, Informasi Dan Pendidikan Terkait Kesehatan Seksual Dan Reproduksi		PM	PM	PM	PM	DP3AP2KB
Target 5.a Melakukan Reformasi Untuk Memberi Hak Yang Sama Kepada Perempuan Terhadap Sumber Daya Ekonomi, Serta Akses Terhadap Kepemilikan Dan Kontrol Atas Tanah Dan Bentuk Kepemilikan Lain, Jasa Keuangan, Warisan Dan Sumber Daya Alam, Sesuai Dengan Hukum Nasional							
5.a.1*	(1) Proporsi Penduduk Pertanian Yang Memiliki Hak Atas Tanah Pertanian; (2) Proporsi Perempuan Penduduk Pertanian Sebagai Pemilik Atau Yang Memiliki Hak Atas Tanah Pertanian, Menurut Jenis Kepemilikan		PM	PM	PM	PM	BPS
5.a.2*	Ketersediaan Kerangka Hukum (Termasuk Hukum Adat) Yang Menjamin Persamaan Hak Perempuan Untuk Kepemilikan Tanah Dan/Atau Hak kontrol		PM	PM	PM	PM	DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau
Target 5.b Meningkatkan Penggunaan Teknologi Yang Memampukan, Khususnya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan							
5.b.1*	Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam		74,11	76,39	74,33	81,83	Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau
Target 5.c Mengadopsi Dan Memperkuat Kebijakan Yang Baik Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Untuk Peningkatan Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Kaum Perempuan Di Semua Tingkat							
5.c.1*	Ketersediaan Sistem Untuk Melacak Dan Membuat Alokasi Umum Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		PM	PM	PM	PM	Barenlitbang /DP3AP2KB



Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 6.1 Pada Tahun 2030, Mencapai Akses Universal Dan Merata Terhadap Air Minum Yang Aman Dan Terjangkau Bagi Semua							
6.1.1*	Presentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Layanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman		PM	PM	PM	PM	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Target 6.3 Pada Tahun 2030, Mencapai Akses Terhadap Sanitasi Dan Kebersihan Yang Memadai Dan Merata Bagi Semua, Dan Menghentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan Di Tempat Terbuka, Memberikan Perhatian Khusus Pada Kebutuhan Kaum Perempuan, Serta Kelompok Masyarakat Rentan							
6.2.1*	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan Dengan Air Dan Sabun		72	84	92	96	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Target 6.3 Pada Tahun 2030, Meningkatkan Kualitas Air Dengan Mengurangi Polusi, Menghilangkan Pembuangan, Dan Meminimalkan Pelepasan Material Dan Bahan Kimia Berbahaya, Mengurangi Setengah Proporsi Air Limbah Yang Tidak Diolah, Dan Secara Signifikan Meningkatkan Daur Ulang, Serta Penggunaan Kembali Barang Daur Ulang Yang Aman Secara Global							
6.3.1	Proporsi Limbah Cair Rumah Tangga Dan Industri Cair Yang Diolah Secara Aman		PM	PM	PM	PM	



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
6.3.1.(a)	Persentase Limbah Cair Industri Cair Yang Diolah Secara Aman		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3.2	Proporsi Badan Air Dengan Kualitas Air Ambien Yang Baik		PM	PM	PM	PM	
6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku		PM	PM	PM	PM	DLHK/BWSS/Dinas PUPR/BPDAS
6.3.2.(b)	Kualitas Air Tanah Sebagai Air Baku		57,85	54	50	PM	DLHK/BWSS/Dinas PUPR/BPDAS
Target 6.4 Pada Tahun 2030, Secara Signifikan Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air Di Semua Sektor, Dan Menjamin Penggunaan Dan Pasokan Air Tawar Yang Berkelanjutan Untuk Mengatasi Kelangkaan Air, Dan Secara Signifikan Mengurangi Jumlah Orang Yang Menderita Akibat Kelangkaan Air							
6.4.1	Perubahan Efisiensi Penggunaan Air Dari Waktu Ke Waktu		PM	PM	PM	PM	
6.4.2	Tingkat <i>Water Stress</i> , Proporsi Pengambilan (<i>Withdrawal</i>) Air Tawar Terhadap Ketersediaannya		PM	PM	PM	PM	
6.4.2.(a)	Proporsi Pengambilan Air Baku Bersumber Dari Air Permukaan Terhadap Ketersediaannya		PM	PM	PM	PM	Dinas PU/BWSS
6.4.2.(b)	Proporsi Pengambilan Air Baku Bersumber Dari Air		PM	PM	PM	PM	BWSS/ESDM/ Dinas PU



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Tanah Terhadap Ketersediaannya						
Target 6.5 Pada Tahun 2030, Menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Di Semua Tingkatan, Termasuk Melalui Kerjasama Lintas Batas Sesuai Kepantasan							
6.5.1*	Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu (0-100)		PM	PM	PM	PM	Dinas PU/BWSS
6.5.2*	Proporsi Wilayah Cekungan Lintas Batas Dengan Pengaturan Kerja Sama Sumberdaya Air Yang Operasional		PM	PM	PM	PM	
Target 6.6 Pada Tahun 2020, Melindungi Dan Merestorasi Ekosistem Terkait Sumber Daya Air, Termasuk Pegunungan, Hutan, Lahan Basah, Sungai, Air Tanah, Dan Danau							
6.6.1*	Perubahan Tingkat Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Air Pada Ekosistem Perairan Dari Waktu Ke Waktu		PM	PM	PM	PM	Dinas PU/BWSS
Target 6.a Pada Tahun 2030, Memperluas Kerjasama Dan Dukungan Internasional Dalam Hal Pembangunan Kapasitas Bagi Negara-Negara Berkembang, Dalam Program Dan Kegiatan Terkait Air Dan Sanitasi, Termasuk Pemanenan Air, Pengolahan Air Limbah, Daur Ulang Dan Teknologi Daur Ulang							
6.a.1	Jumlah ODA Terkait Air Dan Sanitasi Yang Menjadi Bagian Rencana Belanja Pemerintah		PM	PM	PM	PM	
Target 6.b Mendukung Dan Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Meningkatkan Pengelolaan Air Dan Sanitasi							
6.b.1	Proporsi Unit Pemerintahan Lokal Yang Menerbitkan Dan		PM	PM	PM	PM	



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Melaksanakan Kebijakan Dan Prosedur Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Dan Sanitasi						

Tujuan 7 : Energi Bersih & Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 7.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Universal Layanan Energi Yang Terjangkau, Andal Dan Modern							
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	%	90,5	92,5	93,72	94,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.1.(a)	Konsumsi Listrik Per Kapita	%	581,2	1.523,33	595,96	609,97	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.2.(a)	Jumlah Sambungan Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga	%	PM	PM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7.1.2.(b)	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	PM	PM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target 7.2 Pada Tahun 2030, Meningkatkan Secara Substansial Pangsa Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi Global							
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	%	10	10	12	12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 7.3 Pada Tahun 2030, Melakukan Perbaikan Efisiensi Energi Di Tingkat Global Sebanyak Dua Kali Lipat							
7.3.1*	Intensitas Energi Primer	%	PM	PM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Target 7.b Pada Tahun 2030, Memperluas Infrastruktur Dan Meningkatkan Teknologi Untuk Penyediaan Layanan Energi Modern Dan Berkelanjutan Bagi Semua Negara-Negara Berkembang, Khususnya Negara Kurang Berkembang, Negara Berkembang Pulau Kecil Dan Negara Berkembang							
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Dari Energi Terbarukan (Dalam Watt Per Kapita)	%	PM	PM	PM	PM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 8.1 Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Sesuai Dengan Kondisi Nasional Dan, Khususnya, Setidaknya 7 Persen Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Per Tahun Di Negara Kurang Berkembang							
8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita		4,47	4,84	-3,8	3,43	Barenlitbang
8.1.1.(a)	PDRB Per Kapita		116,58	122,43	123,53	130,13	Barenlitbang
Target 8.2 Mencapai Tingkat Produktivitas Ekonomi Yang Lebih Tinggi, Melalui Diversifikasi, Peningkatan Dan Inovasi Teknologi, Termasuk Fokus Pada Peningkatan Nilai Tambah Tinggi Dan Sektor Padat Karya							
8.2.1*	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil Per Orang Bekerja Per Tahun		4,09	4,89	-2,32	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.3 Mempromosikan Kebijakan Pembangunan Yang Mendukung Kegiatan Produktif, Penciptaan Lapangan Kerja Yang Layak, Kewirausahaan, Kreativitas Dan Inovasi, Dan Mendorong Formalisasi Dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Termasuk Melalui Akses Pada Layanan Keuangan							
8.3.1*	Proporsi Lapangan Kerja Informal, Berdasarkan Sektor Dan Jenis Kelamin		PM	PM	21,14	27,99	Dinas Koperasi dan UKM
8.3.1.(a)	Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Ke Layanan Keuangan		116,58	122,43	123,53	130,13	Dinas Koperasi dan UKM
Target 8.4 Meningkatkan Secara Progresif, Hingga 2030, Efisiensi Sumber Daya Global Dalam Konsumsi Dan Produksi, Serta Usaha Melepas Kaitan Pertumbuhan Ekonomi Dari Degradasi Lingkungan, Sesuai Dengan <i>The 10-Year Framework Of Programs On Sustainable Consumption And Production</i> , Dengan Negara-Negara Maju Sebagai Pengarah							



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
8.4.1	Jejak Material (<i>material footprint</i>) Yang Dihitung Selama Tahun Berjalan		PM	PM	PM	PM	
8.4.1 (a)	Rencana dan implementasi strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan		PM	PM	PM	PM	
8.4.2	Konsumsi Material Domestik (<i>Domestic Material Consumption</i>)		PM	PM	PM	PM	
Target 8.5 Pada Tahun 2030, Memberikan Pekerjaan Penuh Dan Produktif Yang Layak Bagi Semua Wanita Dan Pria, Termasuk Bagi Orang-Orang Muda Dan Penyandang Disabilitas, Dan Upah Yang Sama Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya							
8.5.1*	Upah Rata-Rata Per Jam Kerja		22.912	25.032	PM	21.247	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur		8.04	7.50	10.34	10,12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Persentase Setengah Pengangguran		3.81	2.84	5,75	5,1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.6 Pada Tahun 2020, Mengurangi Proporsi Usia Muda Yang Tidak Bekerja Dan Tidak Dalam Pelatihan Dan Tidak Sekolah							
8.6.1*	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, Atau Mengikuti Pelatihan (NEET)		19,74	16,55	20,71	22,61	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.7 Mengambil Tindakan Cepat Dan Untuk Memberantas Kerja Paksa, Mengakhiri Perbudakan Dan Penjualan Manusia, Mengamankan Larangan Dan Penghapusan Bentuk Terburuk Tenaga Kerja Anak, Termasuk Perekrutan Dan Penggunaan Tentara Anak-Anak, Dan Pada Tahun 2025 Mengakhiri Tenaga Kerja Anak Dalam Segala Bentuknya							
8.7.1	Persentase Dan Jumlah Anak Usia 5-17 Tahun, Yang Bekerja, Dibedakan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur (Dibedakan Berdasarkan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)		PM	PM	PM	PM	
8.7.1.(a)	Persentase Dan Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun, Yang Bekerja, Dibedakan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur		1,09	0,98	1,19	1,18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.8 Melindungi Hak-Hak Tenaga Kerja Dan Mempromosikan Lingkungan Kerja Yang Aman Dan Terjamin Bagi Semua Pekerja, Termasuk Pekerja Migran, Khususnya Pekerja Migran Perempuan, Dan Mereka Yang Bekerja Dalam Pekerjaan Berbahaya							
8.8.1	Tingkat Frekuensi Kecelakaan Kerja Fatal Dan Non Fatal, Berdasarkan Jenis Kelamin, Sektor Pekerjaan Dan Status Migrain		PM	PM	PM	PM	
8.8.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3		PM	PM	PM	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.8.2	Peningkatan Kepatuhan Atas Hak-Hak Pekerja (Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Kolektif) Berdasarkan Sumber Tekstual ILO Dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Terkait		PM	PM	PM	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 8.9 Pada Tahun 2030, Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Untuk Mempromosikan Pariwisata Berkelanjutan Yang Menciptakan Lapangan Kerja Dan Mempromosikan Budaya Dan Produk Lokal							
8.9.1*	Proporsi Dan Laju Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	Dinas Pariwisata
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.635.664	2.867.795	408.005	3.103	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	3.547.971	4.227.770	7.153.725	719.206	Dinas Pariwisata
8.9.1.(c)	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Rp.	PM	14.060.927.224.389	2.964.641.128.863	27.205.694.693	Dinas Pariwisata
Target 8.10 Memperkuat Kapasitas Lembaga Keuangan Domestik Untuk Mendorong Dan Memperluas Akses Terhadap Perbankan, Asuransi Dan Jasa Keuangan Bagi Semua							
8.10.1*	Jumlah Kantor Bank Dan ATM Per 100.000 Penduduk Dewasa		89	89	88	87	Bank Indonesia/ OJK
8.10.1.(a)	Proporsi Kredit Umkm Terhadap Total Kredit		18,48	17,84	16,56	17,3	Bank Indonesia/ UMKM
Target 8.a Meningkatkan Bantuan Untuk Mendukung Perdagangan Bagi Negara Berkembang, Terutama Negara Kurang Berkembang, Termasuk Melalui The Enhanced Integrated Framework For Trade-Related Technical Assistance Bagi Negara Kurang Berkembang							
8.a.1	Bantuan Untuk Komitmen Perdagangan Dan Pencairan Pendanaan		PM	PM	PM	PM	
Target 8.b Pada Tahun 2020, Mengembangkan Dan Mengoperasionalkan Strategi Global Untuk Ketenagakerjaan Pemuda Dan Menerapkan The Global Jobs Pact Of The International Labour Organization							
8.b.1	Adanya Strategi Nasional Terkait Ketenagakerjaan Pemuda Yang Sudah Dikembangkan Dan Operasional Sebagai Strategi Khusus Atau Sebagai Bagian Dari Strategi Ketenagakerjaan Nasional		PM	PM	PM	PM	

Tujuan 9 : Infrastruktur, Industri dan Inovasi

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 9.1 Mengembangkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Andal, Berkelanjutan Dan Tangguh, Termasuk Infrastruktur Regional Dan Lintas Batas, Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Manusia, Dengan Fokus Pada Akses Yang Terjangkau Dan Merata Bagi Semua							
9.1.1*	Populasi Penduduk Desa Yang Tinggal Dalam Jarak 2 Km Terhadap Jalan Yang Layak		PM	PM	PM	PM	BPS
9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi		70,31	73,64	74,51	76,38	Dinas PUPR
9.1.1.(b)	Panjang Pembangunan Jalan Tol		PM	PM	PM	PM	Dinas PUPR / BPJN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-187



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
9.1.1.(c)	Panjang Jalur Kereta Api		PM	PM	PM	PM	
9.1.2*	Jumlah Penumpang Dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi		PM	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan
	Jumlah Penumpang Kapal		17.860.415	3.717.980	PM	3.717.980	Dinas Perhubungan
	Jumlah Penumpang Pesawat		4.636.867	1.261.700	PM	1.261.700	Dinas Perhubungan
	Jumlah Barang Yang Diangkut Pesawat		72.086.740	13.763.970	PM	13.763.970	Dinas Perhubungan
	Jumlah Barang Yang Diangkut Kapal		30.255.306	10.910.520	PM	10.910.520	Dinas Perhubungan
9.1.2.(a)	Jumlah Bandara		7	7	8	8	Dinas Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan		10	10	10	10	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah Pelabuhan Strategis		20	20	20	31	Dinas Perhubungan
Target 9.2 Mempromosikan Industrialisasi Inklusif Dan Berkelanjutan, Dan Pada Tahun 2030, Secara Signifikan Meningkatkan Proporsi Industri Dalam Lapangan Kerja Dan Produk Domestik Bruto, Sejalan Dengan Kondisi Nasional, Dan Meningkatkan Dua Kali Lipat Proporsinya Di Negara Kurang Berkembang							
9.2.1*	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB Dan Per Kapita		37,47	37,98	40,76	PM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			- 30.432,00	- 31.548,00	- 31.811,00	PM	
9.2.1.(a)	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur		4,14	6,25	3,25	PM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.2.2*	Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur		23,7	23,91	22,76	25,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 9.3 Meningkatkan Akses Industri Dan Perusahaan Skala Kecil, Khususnya Di Negara Berkembang, Terhadap Jasa Keuangan, Termasuk Kredit Terjangkau, Dan Mengintegrasikan Ke Dalam Rantai Nilai Dan Pasar							
9.3.1*	Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Sektor Industri		PM	PM	PM	PM	
9.3.2*	Proporsi Industri Kecil Dengan Pinjaman Atau Kredit		PM	PM	21,14	27,99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ Bank Indonesia
Target 9.4 Pada Tahun 2030, Meningkatkan Infrastruktur Dan Retrofit Industri Agar Dapat Berkelanjutan, Dengan Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dan Adopsi Yang Lebih Baik Dari Teknologi Dan Proses Industri Bersih Dan Ramah Lingkungan, Yang Dilaksanakan Semua Negara Sesuai Kemampuan Masing-Masing							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-188



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.4.1.(a)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.4.1.(b)	Intensitas Emisi Sektor Industri		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 9.5 Memperkuat Riset Ilmiah, Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Sektor Industri Di Semua Negara, Terutama Negara-Negara Berkembang, Termasuk Pada Tahun 2030, Mendorong Inovasi Dan Secara Substansial Meningkatkan Jumlah Pekerja Penelitian Dan Pengembangan Per 1 Juta Orang Dan Meningkatkan Pembelanjaan Publik Dan Swasta Untuk Penelitian Dan Pengembangan							
9.5.1*	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	
9.5.2*	Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Peneliti, Perekayasa, Dan Dosen) Pada Instansi Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Per Satu Juta Penduduk		PM	PM	PM	PM	BPS
9.5.2.(a)	Proporsi Sumberdaya Manusia Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dengan Gelar Doktor (S3)		PM	PM	PM	PM	
Target 9.a Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Tangguh Di Negara Berkembang, Melalui Peningkatan Keuangan, Teknologi Dan Dukungan Teknis Bagi Negara-Negara Afrika, Negara-Negara Kurang Berkembang, Negara-Negara Berkembang Terkurung Daratan Dan Negara-Negara Pulau Kecil							
9.a.1	Total Dukungan Resmi Internasional (Bantuan Resmi Pembangunan Ditambah Aliran Bantuan Resmi Biaya) Untuk Infrastruktur		PM	PM	PM	PM	
Target 9.b Mendukung Pengembangan Teknologi Domestik, Riset Dan Inovasi Di Negara-Negara Berkembang, Termasuk Dengan Memastikan Kondisi Kebijakan Yang Kondusif Untuk Diversifikasi Industri Dan Penambahan Nilai Komoditas							
9.b.1	Proporsi Nilai Tambah Teknologi Menengah Dan Tinggi Terhadap Total Nilai Tambah		PM	PM	PM	PM	
9.b.1.(a)	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi		47,79	51,35	54,88	54,88	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Target 9.c Secara Signifikan Meningkatkan Akses Terhadap Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Dan Mengusahakan Penyediaan Akses Universal Dan Terjangkau Internet Di Negara-Negara Kurang Berkembang Pada Tahun 2020							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-189



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
9.c.1*	Proporsi Penduduk Terlayani <i>Mobile Broadband</i>		79,69	PM	PM	79,69	Dinas komunikasi dan Informasi

Tujuan 10 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 10.1 Pada Tahun 2030, Secara Progresif Mencapai Dan Mempertahankan Pertumbuhan Pendapatan Penduduk Yang Berada Di Bawah 40% Dari Populasi Pada Tingkat Yang Lebih Tinggi Dari Rata-Rata Nasional							
10.1.1*	Rasio Gini		0,339	0,337	0,334	0,336	Barenlitbang
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	%	6,2	5,9	9,92	PM	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	111	66	33	28	DPMD Dukcapil
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	1	1	1	DPMD Dukcapil
10.1.1.(d)	Jumlah Daerah Tertinggal	Kabupaten	0	0	0	0	DPMD Dukcapil
10.1.1.(e)	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Tertinggal	%	0	0	0	0	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-190



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
10.1.1.(f)	Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Tertinggal	%	0	0	0	0	DPMD Dukcapil
Target 10.2 Pada Tahun 2030, Memberdayakan Dan Meningkatkan Inklusi Sosial, Ekonomi Dan Politik Bagi Semua, Terlepas Dari Usia, Jenis Kelamin, Difabilitas, Ras, Suku, Asal, Agama Atau Kemampuan Ekonomi Atau Status Lainnya							
10.2.1*	Proporsi Penduduk Yang Hidup Di Bawah 50 Persen Dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin Dan Penyandang Difabilitas		1,22	0,56	1,84	PM	Dinas Sosial
Target 10.3 Menjamin Kesempatan Yang Sama Dan Mengurangi Kesenjangan Hasil, Termasuk Dengan Menghapus Hukum, Kebijakan Dan Praktik Yang Diskriminatif, Dan Mempromosikan Legislasi, Kebijakan Dan Tindakan Yang Tepat Terkait Legislasi Dan Kebijakan Tersebut							
10.3.1	Proporsi Penduduk Yang Melaporkan Merasa Didiskriminasikan Atau Dilecehkan Dalam Kurun 12 Bulan Terakhir Atas Dasar		PM	PM	PM	PM	



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Larangan Diskriminasi Sesuai Hukum Internasional HAK Asasi Manusia						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan		91,05	92,66	PM	PM	Kesbangpol
10.3.1.(b)	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)		PM	0	8	1	Kanwil Hukum dan Ham
10.3.1.(c)	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Terutama Kekerasan Terhadap Perempuan		135	153	172	144	KOMNASHAM/ DP3A2KB
10.3.1.(d)	Jumlah Kebijakan Yang Diskriminatif Dalam 12 Bulan		PM	PM	PM	PM	DP3A2KB



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM Internasional						
Target 10.4 Mengadopsi Kebijakan, Terutama Kebijakan Fiskal, Upah Dan Perlindungan Sosial, Serta Secara Progresif Mencapai Kesenjangan Yang Lebih Besar							
10.4.1	Proporsi Upah Dan Subsidi Perlindungan Sosial Dari Pemberi Kerja Terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	
10.4.1.(a)	Persentase Rencana Anggaran Untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat		PM	PM	PM	PM	BKAD
10.4.1.(b)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		82,58	59,61	43,45	67,29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.4.2	Proporsi Upah Dan Subsidi		PM	PM	PM	PM	



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Perlindungan Sosial Dari Pemberi Kerja Terhadap PDB						
Target 10.5 Memperbaiki Regulasi Dan Pengawasan Pasar Dan Lembaga Keuangan Global, Dan Memperkuat Pelaksanaan Regulasinya							
10.5.1	Financial Soundness Indicator		PM	PM	PM	PM	
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan		LDR = 104,12	LDR = 100,67	LDR = 82,97	LDR = 90,62	Bank Indonesia/OJK
			NPL = 3,57	NPL = 4,19	NPL = 4,38	NPL = 3,57	
10.7 Memfasilitasi Migrasi Dan Mobilitas Manusia Yang Teratur, Aman, Berkala Dan Bertanggung Jawab, Termasuk Melalui Penerapan Kebijakan Migrasi Yang Terencana Dan Terkelola Dengan Baik							
10.7.2.(a)	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan Dan Perlindungan Pekerja Migran Antara Negara RI Dengan Negara Tujuan Penempatan		PM	PM	PM	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
10.7.2.(b)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Penempatan TKLN Berdasarkan Okupasi		PM	PM	PM	PM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 11.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Dan Pelayanan Dasar, Serta Menata Kawasan Kumuh							
11.1.1	Proporsi Populasi Penduduk Perkotaan Yang Tinggal Di Daerah Kumuh, Permukiman Liar Atau Rumah Yang Tidak Layak		PM	PM	PM	PM	
11.1.1.(a)	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau		98,44	44,09	48,19	PM	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.2 Pada Tahun 2030, Menyediakan Akses Terhadap Sistem Transportasi Yang Aman, Terjangkau, Mudah Diakses Dan Berkelanjutan Untuk Semua, Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Terutama Dengan Memperluas Jangkauan Transportasi Umum, Dengan Memberi Perhatian Khusus Pada Kebutuhan Mereka Yang Berada Dalam Situasi Rentan, Perempuan, Anak, Penyandang Difabilitas Dan Orang Tua							
11.2.1	Proporsi Populasi Yang Mendapatkan Akses Yang Nyaman Pada Transportasi Publik, Terpilah Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Dan Penyandang Disabilitas		PM	PM	PM	PM	
11.2.1.(a)	Proporsi Populasi Yang Mendapatkan Akses Yang Nyaman Pada Transportasi Publik		PM	PM	56,11	PM	Dinas Perhubungan



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
11.2.1.(b)	Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum		PM	PM	5,31	PM	Dinas Perhubungan
Target 11.3 Pada Tahun 2030, Memperkuat Urbanisasi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Kapasitas Partisipasi, Perencanaan Penanganan Permukiman Yang Berkelanjutan Dan Terintegrasi Di Semua Negara							
11.3.1	Rasio Laju Peningkatan Konsumsi Tanah Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk		PM	PM	PM	PM	
11.3.1.(a)	Rasio Laju Perluasan Lahan Terbangun Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.3.2	Proporsi Kota Dengan Struktur Partisipasi Langsung Masyarakat Sipil Dalam Perencanaan Dan Manajemen Kota Yang Berlangsung Secara Teratur Dan Demokratis		PM	PM	PM	PM	
Target 11.4 Mempromosikan Dan Menjaga Warisan Budaya Dunia Dan Warisan Alam Dunia							
11.4.1	Total Pengeluaran Per Kapita Yang Diperuntukkan Untuk Preservasi, Perlindungan Konservasi Pada Semua Warisan Budaya Dan Alam (Dengan <i>Purchase Power Parity</i> , PPP)		PM	PM	PM	PM	
11.4.1.(a)	Total Pengeluaran Per Kapita Yang Diperuntukkan Untuk Preservasi, Perlindungan, Konservasi Pada Semua Warisan Budaya Dan Alam (Non-PPP)		PM	PM	PM	PM	Dinas Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Kebudayaan/ DLHK
Target 11.5 Pada Tahun 2030, Secara Signifikan Mengurangi Jumlah Kematian Dan Jumlah Orang Terdampak, Dan Secara Substansial Mengurangi Kerugian Ekonomi Relatif Terhadap Pdb Global Yang Disebabkan Oleh Bencana, Dengan Fokus Melindungi Orang Miskin Dan Orang-Orang Dalam Situasi Rentan							
11.5.1*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang		PM	PM	PM	PM	BPBD



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Korban Meninggal Per 100.000 Orang		PM	PM	56,11	PM	
	Jumlah Korban Terluka Per 100.000 Orang		PM	PM	5,31	PM	
	Jumlah Korban Mengungsi Per 100.000 Orang						
11.5.2	Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Terhadap GDP, Termasuk Kerusakan Bencana Terhadap Infrastruktur Yang Kritis Dan Gangguan Terhadap Pelayanan Dasar		PM	PM	PM	PM	BPBD
11.5.2.(a)	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	BPBD
Target 11.6 Pada Tahun 2030, Mengurangi Dampak Lingkungan Perkotaan Per Kapita Yang Merugikan, Termasuk Dengan Memberi Perhatian Khusus Pada Kualitas Udara, Termasuk Penanganan Sampah Kota							
11.6.1	Proporsi Limbah Padat Perkotaan Yang Dikumpulkan Secara Teratur Dengan Pemrosesan Akhir Yang Baik Terhadap Total Limbah Padat Perkotaan Yang Dihasilkan Oleh Suatu Kota		PM	PM	PM	PM	
11.6.1.(a)	Persentase Rumah Tangga Di Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Sampahnya		PM	70	65,97	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.1.(b)	Persentase Sampah Nasional Yang Terkelola		0	61	62	67,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.2	Rata-Rata Tahunan Materi Partikular Halus (PM 2,5 Dan PM 10) Di Perkotaan (Dibobotkan Jumlah Penduduk)		PM	PM	PM	PM	
11.6.2.(a)	Rata-Rata Tahunan Materi Partikular Halus PM 10		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara		90,83	90,63	90,8	90,91	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 11.7 Pada Tahun 2030, Menyediakan Ruang Publik Dan Ruang Terbuka Hijau Yang Aman, Inklusif Dan Mudah Dijangkau Terutama Untuk Perempuan Dan Anak, Manula Dan Penyandang Difabilitas							
11.7.1	Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan Untuk Semua, Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin Dan Penyandang Disabilitas		PM	PM	PM	PM	
11.7.1.(a)	Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan Untuk Semua		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.7.2	Proporsi Orang Yang Menjadi Korban Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Menurut Jenis Kelamin, Usia, Status Disabilitas, Dan Tempat Kejadian (12 Bulan Terakhir)		PM	PM	PM	PM	
11.7.2.(a)	Proporsi Penduduk Yang Mengalami Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir		0,06	0,03	PM	PM	BPS
Target 11.a Mendukung Hubungan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Antara Urban, Pinggiran Kota, Dan Perdesaan Dengan Memperkuat Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah							
11.a.1.(a)	Proporsi Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Dengan RTRW Yang Sudah Dilengkapi KLHS		100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.b Pada Tahun 2020, Meningkatkan Secara Substansial Jumlah Kota Dan Permukiman Yang Mengadopsi Dan Mengimplementasi Kebijakan Dan Perencanaan Yang Terintegrasi Tentang Penyertaan, Efisiensi Sumber Daya, Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim, Ketahanan Terhadap Bencana, Serta Mengembangkan Dan Mengimplementasikan Penanganan Holistik Risiko Bencana Di Semua Lini, Sesuai Dengan The Sendai Framework For <i>Disaster Risk Reduction</i> 2015-2030							



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
11.b.1*	Rencana Dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Bencana Yang Selaras Dengan <i>The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>		PM	PM	PM	PM	BPBD
11.b.2*	Persentase Pemerintah Daerah Yang Mengadopsi Dan Menerapkan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah Yang Selaras Dengan Rencana/Strategi Nasional Penanggulangan Bencana		0	PM	PM	PM	BPBD
Target 11. c Memberikan Dukungan Kepada Negara-Negara Kurang Berkembang, Melalui Bantuan Keuangan Dan Teknis, Dalam Membangun Bangunan Yang Berkelanjutan Dan Tangguh, Dengan Memanfaatkan Bahan Lokal							
11.c.1.(a)	Persentase Daerah Yang Memiliki Perda Bangunan Gedung Yang Berkelanjutan, Berketahanan, Dan Menggunakan Material Lokal		100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
		2018	2019	2020	2021	
Target 12.1 Melaksanakan <i>The 10-Year Framework Of Programmes On Sustainable Consumption And Production Patterns</i> , Dengan Semua Negara Mengambil Tindakan, Dipimpin Negara Maju, Dengan Mempertimbangkan Pembangunan Dan Kapasitas Negara Berkembang						
12.1.1*	Rencana Dan Implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan	PM	PM	PM	PM	DLHK
Target 12.2 Pada Tahun 2030, Mencapai Pengelolaan Berkelanjutan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Efisien						
12.2.1	Jejak Material (<i>Material Footprint</i>)					



Kode Indikator	Nama Indikator	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
		2018	2019	2020	2021	
12.2.2	Konsumsi Material Domestik (<i>Domestic Material Consumption</i>)	PM	PM	PM	PM	
Target 12.3 Pada Tahun 2030, Mengurangi Separuh Jumlah Dari Sampah Pangan Global Perkapita Pada Tingkat Retail Dan Konsumen Dan Mengurangi Kerugian Makanan Sepanjang Produksi Dan Rantai Penawaran, Termasuk Kerugian Pasca Panen						
12.3.1.(a)	Persentase Sisa Makanan	PM	PM	PM	PM	DLHK
Target 12.4 Pada Tahun 2020, Mencapai Pengelolaan Berwawasan Lingkungan, Atas Bahan Kimia Dan Semua Jenis Limbah Lainnya Di Sepanjang Siklus Hidupnya, Sesuai Dengan Kerangka Kerja Internasional Yang Telah Disepakati, Dan Secara Signifikan Mengurangi Pelepasan Bahan-Bahan Kimia Dan Limbah Tersebut Ke Udara, Air Dan Tanah Untuk Meminimalkan Dampak Buruk Terhadap Kesehatan Manusia Dan Lingkungan						
12.4.1*	Peran Aktif Dalam Mengikuti Kesepakatan Multilateral Internasional Tentang Bahan Kimia Dan Limbah Berbahaya	PM	PM	PM	PM	
12.4.1.(a)	Persentase Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Dari <i>Baseline</i> 50 Ton Penggunaan Merkuri	PM	PM	PM	PM	DLHK
12.4.1.(b)	Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon Dari <i>Baseline</i>	PM	PM	PM	PM	DLHK
12.4.2*(a)	Limbah B3 Yang Dihasilkan Per Kapita; Dan (b) Proporsi Limbah B3 Yang Ditangani/Diolah Berdasarkan Jenis Penanganannya/ Pengelolaannya	PM	PM	PM	PM	DLHK
Target 12.5 Pada Tahun 2030, Secara Substansial Mengurangi Produksi Limbah Melalui Pencegahan, Pengurangan, Daur Ulang, Dan Penggunaan Kembali						
12.5.1.(a)	Jumlah Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang	0	10.470	4.810	17.889	DLHK
Target 12.6 Mendorong Perusahaan, Terutama Perusahaan Besar Dan Trans Nasional, Untuk Mengadopsi Praktek-Praktek Berkelanjutan Dan Mengintegrasikan Informasi Keberlanjutan Dalam Siklus Pelaporan Mereka						
12.6.1*	Jumlah Perusahaan Yang Mempublikasi Laporan Keberlanjutannya	PM	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan/ OJK



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
		2018	2019	2020	2021	
12.6.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	30	29	29	31	DLHK
Target 12.7 Meningkatkan Praktek Pengadaan Publik Yang Berkelanjutan, Sesuai Dengan Kebijakan Dan Prioritas Nasional						
12.7.1*	Tingkatan (<i>Degree</i>) Kebijakan Pengadaan Publik Dan Implementasi Rencana Aksi	PM	PM	PM	PM	BPBJ
12.7.1.(a)	Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister Dan Masuk Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	PM	PM	PM	PM	BPBJ/DLHK
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa	PM	PM	PM	PM	BPBJ/DLHK
Target 12.8 Pada Tahun 2030, Menjamin Bahwa Masyarakat Di Mana Pun Memiliki Informasi Yang Relevan Dan Kesadaran Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dan Gaya Hidup Yang Selaras Dengan Alam						
12.8.1.(a)	Jumlah Satuan Pendidikan Formal Dan Lembaga/ Komunitas Masyarakat Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup	26	37	4	127	DLHK
12.8.1.(a)	Jumlah Fasilitas Publik Yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Dan Teregister	PM	PM	PM	PM	DLHK
Target 12.a Mendukung Negara-Negara Berkembang Untuk Memperkuat Kapasitas Ilmiah Dan Teknologi Mereka Untuk Bergerak Ke Arah Pola Konsumsi Dan Produksi Yang Lebih Berkelanjutan						
12.a.1*	Kapasitas Pembangkit Energi Terbarukan Yang Terpasang (Dalam Watt Per Kapita)	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM
Target 12.b Mengembangkan Dan Menerapkan Perangkat Untuk Memantau Dampak Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Pariwisata Berkelanjutan Yang Menciptakan Lapangan Kerja Dan Mempromosikan Budaya Dan Produk Lokal						
12.b.1	Mengimplementasikan Perangkat Akuntansi Dasar Untuk Memantau Aspek Ekonomi Dan Lingkungan Dari Pariwisata Keberlanjutan	PM	PM	PM	PM	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-201



Kode Indikator	Nama Indikator	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
		2018	2019	2020	2021	
12.b.1.(a)	Jumlah Lokasi Penerapan <i>Sustainable Tourism Development</i>	PM	PM	PM	PM	Dinas Pariwisata
Target 12.c Merasionalisasi Subsidi Bahan Bakar Fosil Tidak Efisien Yang Mendorong Pemborosan Konsumsi Dengan Menghilangkan Distorsi Pasar, Sesuai Dengan Keadaan Nasional, Termasuk Dengan Restrukturisasi Pajak Dan Penghapusan Secara Bertahap Jika Ada Subsidi Berbahaya , Yang Dicerminkan Oleh Dampak Lingkungannya, Dengan Sepenuhnya Memperhitungkan Kebutuhan Dan Kondisi Khusus Negara-Negara Berkembang Dan Meminimalkan Dampak Negatif Yang Bisa Terjadi Pada Pembangunannya Dengan Cara Yang Melindungi Rakyat Miskin Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak						
12.c.1*.(a)	Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil Sebagai Persentase Dari PDB; Dan (b) Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil Sebagai Proporsi Dari Total Pengeluaran Nasional Untuk Bahan Bakar Fosil	PM	PM	PM	PM	Dinas ESDM

Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 13.1 Memperkuat Kapasitas Ketahanan Dan Adaptasi Terhadap Bahaya Terkait Iklim Dan Bencana Alam Di Semua Negara							
13.1.1*	Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang		34,97	4,97	2,18	30,22	BPBD
13.1.2*	Rencana Dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Bencana Yang Selaras Dengan <i>The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> 2015–2030		PM	PM	PM	PM	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
13.1.3*	Persentase Pemerintah Daerah Yang Mengadopsi Dan Menerapkan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah Yang Selaras Dengan Rencana/ Strategi Nasional Penanggulangan Bencana		0	PM	PM	PM	BPBD
Target 13.2 Mengintegrasikan Tindakan Antisipasi Perubahan Iklim Ke Dalam Kebijakan, Strategi Dan Perencanaan Nasional							
13.2.1*	Terwujudnya Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), Serta Monitoring, Pelaporan Dan Verifikasi Emisi GRK Yang Dilaporkan Dalam Dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) Dan <i>National Communications</i>		PM	PM	PM	PM	Barenlitbang/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.2.2*	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Per Tahun		8.469.458,15	9.270.184,31	10.071.608,70	10.891.994,06	Barenlitbang/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		267.095,16	267.252,51	267.404,12	267.483,59	Barenlitbang/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		4,3	4,4	4,58	4,65	Barenlitbang/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 13.a Meningkatkan Pendidikan, Penumbuhan Kesadaran, Serta Kapasitas Manusia Dan Kelembagaan Terkait Mitigasi, Adaptasi, Pengurangan Dampak Dan Peringatan Dini Perubahan Iklim							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-203



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
13.3.1.(a)	Jumlah Satuan Pendidikan Formal Dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup		26	37	4	127	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 13.a Melaksanakan Komitmen Negara Maju Pada <i>The United Nations Framework Convention On Climate Change</i> Untuk Tujuan Mobilisasi Dana Bersama Sebesar 100 Miliar Dolar Amerika Per Tahun Pada Tahun 2020 Dari Semua Sumber Untuk Mengatasi Kebutuhan Negara Berkembang Dalam Konteks Aksi Mitigasi Yang Bermanfaat Dan Transparansi Dalam Pelaksanaannya Dan Mengoperasionalisasi Secara Penuh <i>The Green Climate Fund</i> Melalui Kapitalisasi Dana Tersebut Sesegera Mungkin							
13.a.1.(a)	Jumlah Dana Publik (<i>Budget Tagging</i>) Untuk Pendanaan Perubahan Iklim		PM	PM	PM	PM	Barenlitbang/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 14 : Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 14.1 Mencegah Dan Secara Signifikan Mengurangi Semua Jenis Pencemaran Laut, Khususnya Dari Kegiatan Berbasis Lahan, Termasuk Sampah Laut Dan Polusi Nutrisi Pada Tahun 2025							
14.1.1	(a) Indeks Eutrofikasi Pesisir Dan (b) Kepadatan Sampah Plastik Terapung		PM	PM	PM	PM	
14.1.1.(a)	Persentase Penurunan Sampah Terbuang Ke Laut		PM	PM	PM	PM	DLHK
Target 14.2 Mengelola Dan Melindungi Ekosistem Laut Dan Pesisir Secara Berkelanjutan Untuk Menghindari Dampak Buruk Yang Signifikan, Termasuk Dengan Memperkuat Ketahanannya, Dan Melakukan Restorasi Untuk Mewujudkan Lautan Yang Sehat Dan Produktif Pada Tahun 2020							
14.2.1*	Penerapan Pendekatan Berbasis Ekosistem Dalam Pengelolaan Areal Lautan		1	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Secara Berkelanjutan		PM	PM	PM	PM	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.3 Meminimalisasi Dan Mengatasi Dampak Pengasaaan Laut, Termasuk Melalui Kerjasama Ilmiah Yang Lebih Baik Di Semua Tingkatan							
14.3.1	Rata-Rata Keasaman Laut (pH) Yang Diukur Pada Jaringan Stasiun Sampling Yang Disetujui Dan Memadai		PM	PM	PM	PM	
Target 14.4 Pada Tahun 2020, Secara Efektif Mengatur Pemanenan Dan Menghentikan Penangkapan Ikan Yang Berlebihan, Penangkapan Ikan Ilegal Dan Praktek Penangkapan Ikan Yang Merusak, Serta Melaksanakan Rencana Pengelolaan Berbasis Ilmu Pengetahuan, Untuk Memulihkan Persediaan Ikan Secara Layak Dalam Waktu Yang Paling Singkat Yang Memungkinkan, Setidaknya Ke Tingkat Yang Dapat Memproduksi Hasil Maksimum Yang Berkelanjutan Sesuai Karakteristik Biologisnya							
14.4.1*	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Laut Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman		PM	PM	PM	PM	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.5 Pada Tahun 2020, Melestarikan Setidaknya 10 Persen Dari Wilayah Pesisir Dan Laut, Konsisten Dengan Hukum Nasional Dan Internasional Dan Berdasarkan Informasi Ilmiah Terbaik Yang Tersedia							
14.5.1*	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut		PM	PM	PM	PM	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.6 Pada tahun 2020 Melarang Bentuk-Bentuk Subsidi Perikanan Tertentu Yang Berkontribusi Terhadap Kelebihan Kapasitas Dan Penangkapan Ikan Berlebihan, Menghilangkan Subsidi Yang Berkontribusi Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal, Yang Tidak Dilaporkan & Tidak Diatur Dan Menahan Jenis Subsidi Baru, Dengan Mengakui Bahwa Perlakuan Khusus Dan Berbeda Yang Tepat Dan Efektif Untuk Negara Berkembang & Negara Kurang Berkembang Harus Menjadi Bagian Integral Dari Negosiasi Subsidi Perikanan Pada The World Trade Organization (WTO)							
14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	%	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 14.7 Pada Tahun 2030, Meningkatkan Manfaat Ekonomi Dari Pemanfaatan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Laut, Termasuk Melalui Pengelolaan Perikanan, Budidaya Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan							
14.7.1	Perikanan Berkelanjutan Sebagai Presentase Dari Produk Domestik Bruto (PDB)		PM	PM	PM	PM	
Target 14.b Menyediakan Akses Untuk Nelayan Skala Kecil (Small-Scale Artisanal Fishers) Terhadap Sumber Daya Laut Dan Pasar							
14.b.1*	Tingkat Penerapan Kerangka Hukum/Regulasi/ Kebijakan/Kelembagaan Yang Mengakui Dan Melindungi Hak Akses Untuk Perikanan Skala Kecil		1	1	1	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(a)	Jumlah Provinsi Dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan		PM	PM	PM	PM	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.b.1.(b)	Jumlah Nelayan Yang Terlindungi		PM	PM	PM	12.830	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.c Meningkatkan Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Lautan Dan Sumber Dayanya Dengan Menerapkan Hukum Internasional Yang Tercermin Dalam The United Nations Convention On The Law Of The Sea, Yang Menyediakan Kerangka Hukum Untuk Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Lautan Dan Sumber Dayanya, Seperti Yang Tercantum Dalam Ayat 158 Dari “The Future We Want”							
14.c.1*	Tersedianya Kerangka Kebijakan Dan Instrumen Terkait Pelaksanaan UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea)		PM	PM	PM	PM	



Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 15.1 Pada Tahun 2020, Menjamin Pelestarian, Restorasi Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Dari Ekosistem Daratan Dan Perairan Darat Serta Jasa Lingkungannya, Khususnya Ekosistem Hutan, Lahan Basah, Pegunungan Dan Lahan Kering, Sejalan Dengan Kewajiban Berdasarkan Perjanjian Internasional							
15.1.1*	Proporsi Kawasan Hutan Terhadap Total Luas Lahan		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.1.2	Proporsi Situs Penting Keanekaragaman Hayati Daratan Dan Perairan Darat Dalam Kawasan Konservasi, Berdasarkan Jenis Ekosistemnya		PM	PM	PM	PM	
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.2 Pada Tahun 2020, Meningkatkan Pelaksanaan Pengelolaan Semua Jenis Hutan Secara Berkelanjutan, Menghentikan Deforestasi, Merestorasi Hutan Yang Terdegradasi Dan Meningkatkan Secara Signifikan Aforestasi Dan Reforestasi Secara Global							
15.2.1	Kemajuan Menuju Pengelolaan Hutan Lestari		PM	PM	PM	PM	
15.2.1.(a)	Jumlah KPH Yang Masuk Kategori Maju		1 KPHL	1 KPHL	1 KPHL	1 KPHL	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	
Target 15.3 Pada Tahun 2020, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Lahan Dan Tanah Kritis, Termasuk Lahan Yang Terkena Penggurunan, Kekeringan Dan Banjir, Dan Berusaha Mencapai Dunia Yang Bebas Dari Lahan Terdegradasi							



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
15.3.1*	Proporsi Lahan Yang Terdegradasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.4 Pada Tahun 2030, Menjamin Pelestarian Ekosistem Pegunungan, Termasuk Keanekaragaman Hayatinya, Untuk Meningkatkan Kapasitasnya Memberikan Manfaat Yang Sangat Penting Bagi Pembangunan Berkelanjutan							
15.4.1*	Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan Dalam Kawasan Konservasi		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.4.2*	Indeks Tutupan Hijau Pegunungan		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.5 Melakukan Tindakan Cepat Dan Signifikan Untuk Mengurangi Degradasi Habitat Alami, Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, Dan, Pada Tahun 2020, Melindungi Dan Mencegah Lenyapnya Spesies Yang Terancam Punah							
15.5.1*	Indeks Daftar Merah (<i>Red-List Index</i>)		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.6 Meningkatkan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata Dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, Dan Meningkatkan Akses Yang Tepat Terhadap Sumber Daya Tersebut, Sesuai Kesepakatan Internasional							
15.6.1*	Kerangka Kerja Legislasi, Administratif Dan Kebijakan Untuk Memastikan Pembagian Manfaat Yang Adil Dan Merata		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.7 Melakukan Tindakan Cepat Untuk Mengakhiri Perburuan Dan Perdagangan Jenis Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Serta Mengatasi Permintaan Dan Pasokan Produk Hidupan Liar Secara Ilegal							
15.7.1.(a)	Jumlah Kasus Perburuan Atau Perdagangan Illegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 15.8 Pada Tahun 2020, Memperkenalkan Langkah-Langkah Untuk Mencegah Masuknya Dan Secara Signifikan Mengurangi Dampak Dari Jenis Asing Invasif Pada Ekosistem Darat Dan Air, Serta Mengendalikan Atau Memberantas Jenis Asing Invasif Prioritas							
15.8.1*	Kerangka Legislasi Nasional Yang Relevan Dan Memadai Dalam Pencegahan Atau Pengendalian Jenis Asing Invasive (JAI)		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.9 Pada Tahun 2020, Mengintegrasikan Nilai-Nilai Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati Kedalam Perencanaan Nasional Dan Daerah, Proses Pembangunan, Strategi Dan Penganggaran Pengurangan Kemiskinan							
15.9.1.(a)	Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 Dari Rencana Strategis		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.a Memobilisasi Sumber Daya Penting Dari Semua Sumber Dan Pada Semua Tingkatan Untuk Membiayai Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan Dan Emberikan Insentif Yang Memadai Bagi Negara Berkembang Untuk Memajukan Pengelolaannya, Termasuk Untuk Pelestarian Dan Reforestasi							
15.a.1.(a)	Bantuan Pembangunan Resmi Untuk Konservasi Dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.b Memobilisasi Sumber Daya Penting Dari Semua Sumber Dan Pada Semua Tingkatan Untuk Membiayai Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan Dan Memberikan Insentif Yang Memadai Bagi Negara Berkembang Untuk Memajukan Pengelolaannya, Termasuk Untuk Pelestarian Dan Reforestasi							
15.b.1.(a)	Bantuan Pembangunan Resmi Untuk Konservasi Dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 15.c Meningkatkan Dukungan Global Dalam Upaya Memerangi Perburuan Dan Perdagangan Jenis Yang Dilindungi, Termasuk Dengan Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Lokal Mengejar Peluang Mata Pencaharian Yang Berkelanjutan							
15.c.1.(a)	Jumlah Kasus Perburuan Atau Perdagangan Ilegal TSL		PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 16.1 Secara Signifikan Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan Dan Terkait Angka Kematian Dimana Pun							
16.1.1	Angka Korban Kejahatan Pembunuhan Per 100.000 Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin		PM	PM	PM	PM	
16.1.1.(a)	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir		5	2	5	16	Polda Kepulauan Riau
16.1.2	Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur Dan Penyebab Kematian		PM	PM	PM	PM	
16.1.2.(a)	Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk		0	0	0	0	Polda Kepulauan Riau/ Kesbangpol
16.1.3	Proporsi Penduduk Yang Mengalami (a) Kekerasan Secara Fisik, (b) Kekerasan Psikologi Atau (c) Kekerasan Seksual Dalam 12 Bulan Terakhir		PM	PM	PM	PM	
16.1.3.(a)	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir		PM	0,06	PM	PM	BPS/Polda
16.1.4*	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya		PM	PM	PM	PM	BPS/Polda



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 16.2 Menghentikan Perlakuan Kejam, Eksploitasi, Perdagangan, Dan Segala Bentuk Kekerasan Dan Penyiksaan Terhadap Anak							
16.2.1	Proporsi Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Sebulan Terakhir		PM	PM	PM	PM	
16.2.1.(a)	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir		PM	PM	PM	PM	DP3AP2KB
16.2.1.(b)	Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun Yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya		5	127	132	155	DP3AP2KB
16.2.2*	Angka Korban Perdagangan Manusia Per 100.000 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Dan Jenis Eksploitasi		6,68	1,37	7,46	1,32	DP3AP2KB
16.2.3	Proporsi Perempuan Dan Laki-Laki Umur 18-29 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun		PM	PM	PM	PM	
16.2.3.(a)	Proporsi Perempuan Dan Laki-Laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun		PM	PM	PM	PM	DP3AP2KB
Target 16.3 Menggalakkan Negara Berdasarkan Hukum Di Tingkat Nasional Dan Internasional Dan Menjamin Akses Yang Sama Terhadap Keadilan Bagi Semua							
16.3.1	Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Lalu Yang Melaporkan Kepada Pihak Berwajib Atau Pihak Berwenang Yang Diakui Dalam Mekanisme Resolusi Konflik		PM	PM	PM	PM	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
16.3.1.(a)	Proporsi Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi		437	423	329	358	POLDA
16.3.1.(b)	Persentase Orang Miskin Yang Menerima Bantuan Hukum Litigasi (Orang)		54	147	102	74	Kanwil Hukum dan Ham
	Persentase Orang Miskin Yang Menerima Bantuan Hukum Nonlitigasi (Kegiatan)		6	37	32	49	
16.3.1.(c)	Persentase Orang Tidak Mampu Yang Menerima Layanan Hukum berupa Pos Bantuan Hukum, Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, Dan Pembebasan Biaya Perkara		PM	PM	PM	PM	Kajati
16.3.2	Proporsi Tahanan Terhadap Seluruh Tahanan Dan Narapidana		PM	PM	PM	PM	
16.3.2.(a)	Proporsi Tahanan Yang Melebihi Masa Penahanan Terhadap Seluruh Jumlah Tahanan		0	0	0	0,88	Kanwil Hukum dan Ham/Divisi Pemasyarakatan
16.3.3	Proporsi Penduduk Yang Mengalami Perselisihan Dalam 2 Tahun Terakhir Dan Mengakses Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Secara Formal Maupun Informal, Berdasarkan Jenis Mekanisme Penyelesaian		PM	PM	PM	PM	
16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)		PM	PM	PM	PM	Barenlitbang
Target 16.5 Secara Substansial Mengurangi Korupsi Dan Penyuapan Dalam Segala Bentuknya							
16.5.1	Proporsi Penduduk Yang Memiliki Paling Tidak Satu Kontak Hubungan Dengan Petugas, Yang Membayar Suap Kepada Petugas Atau Diminta Untuk Menyuap Petugas Tersebut Dalam 12 Bulan Terakhir		PM	PM	PM	PM	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-212



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		PM	PM	PM	PM	BPS
16.5.2	Proporsi Pelaku Usaha Yang Paling Tidak Memiliki Kontak Dengan Petugas Pemerintah Dan Membayar Suap Kepada Seorang Petugas, Atau Diminta Untuk Membayar Suap Oleh Petugas-Petugas Selama 12 Bulan Terakhir		PM	PM	PM	PM	
Target 16.6 Mengembangkan Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, Dan Transparan Di Semua Tingkat							
16.6.1*	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran Yang Disetujui	%	94,74	94,6	97,76	94,52	BKAD
16.6.1.(a)	Persentase Instansi Pemerintah Yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
16.6.1.(b)	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	%	100	100	100	100	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	%	65,83	67,98	68,57	68,66	Biro Ortal
16.6.2	Proporsi Penduduk Yang Puas Terhadap Pengalaman Terakhir Atas Layanan Publik		PM	PM	PM	PM	
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi Pemerintah Dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	Unit	3	2	0	9	Ombudsman RI
Target 16.7 Menjamin Pengambilan Keputusan Yang Responsif, Inklusif, Partisipatif Dan Representatif Di Setiap Tingkatan							
16.7.1	Proporsi Jabatan Di Lembaga Nasional Dan Daerah, Meliputi (a) Lembaga Legislatif, (b) Lembaga Pelayanan Publik, (c) Lembaga Peradilan, Dibanding Distribusi Nasional, Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Orang Dengan Disabilitas Dan Kelompok Masyarakat		PM	PM	PM	PM	



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
16.7.1.(a)	Persentase Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)		17,78	11,11	11,11	11,11	DP3AP2KB
16.7.1.(b)	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan Di Lembaga Eksekutif (Eselon I Dan II)		9,09	10,75	10,75	9,62	BKPSDM
16.7.2	Proporsi Penduduk Yang Percaya Pada Pengambilan Keputusan Yang Inklusif Dan Responsif Menurut Jenis Kelamin, Umur, Disabilitas Dan Kelompok Masyarakat		PM	PM	PM	PM	
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	%	66,9	73,1	69,47		BPS
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	%	91,05	92,66	92,66		KESBANGPOL
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	%	77,54	78,3	68,57		KESBANGPOL
Target 16.8 Memperluas Dan Meningkatkan Partisipasi Negara Berkembang Di Dalam Lembaga Tata Kelola Global							
16.8.1.(a)	Jumlah Keanggotaan Dan Kontribusi Dalam Forum Dan Organisasi Internasional		PM	PM	PM	PM	
Target 16.9 Pada Tahun 2030, Memberikan Identitas Yang Syah Bagi Semua, Termasuk Pencatatan Kelahiran							
16.9.1*	Proporsi Anak Umur Di Bawah 5 Tahun Yang Kelahirannya Dicatat Oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur	%	0	88,64	96,61	93,81	BPS/ DPMD DUKCAPIL
16.9.1.(a)	Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 0-17 Tahun Pada 40% Berpendapatan Bawah	%	94,4	93,53	94,71	94,2	BPS/ DPMD DUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Penduduk 0-17 Tahun	%	84,36	88,91	96,14	92,44	BPS/ DPMD DUKCAPIL
Target 16.10 Menjamin Akses Publik Terhadap Informasi Dan Melindungi Kebebasan Mendasar, Sesuai Dengan Peraturan Nasional Dan Kesepakatan Internasional							



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
16.10.1.(a)	Kebebasan Dari Kekerasan Bagi Jurnalis Dan Awak Media		PM	PM	PM	PM	Dewan Pers
16.10.1.(b)	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Laporan	PM	0	8	1	Kanwil Hukum dan Ham
16.10.1.(c)	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Terutama Kekerasan Terhadap Perempuan		SIMPONI PPA	153	172	144	DP3AP2KB
16.10.2*	Jumlah Negara Yang Mengadopsi Dan Melaksanakan Konstitusi, Statutori, Dan/Atau Jaminan Kebijakan Untuk Akses Publik Pada Informasi		SIMPONI PPA	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Informasi
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik Yang Berkualifikasi Informatif	%	SIMPONI PPA	1	PM	14	Dinas Komunikasi dan Informasi
16.10.2.(b)	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi Dan/ Atau Ajudikasi Non Litigasi	%	5	4	4	2	Dinas Komunikasi dan Informasi
Target 16.a Menjamin Akses Publik Terhadap Informasi Dan Melindungi Kebebasan Mendasar, Sesuai Dengan Peraturan Nasional Dan Kesepakatan Internasional							
16.a.1*	Tersedianya Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional Yang Independen Yang Sejalan Dengan Paris Principles		PM	PM	PM	PM	Kanwil KOMNAS HAM/Kanwil Hukum dan Ham
Target 16.b Menggalakkan Dan Menegakkan Undang-Undang Dan Kebijakan Yang Tidak Diskriminatif Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
16.b.1.(a)	Jumlah Kebijakan Yang Diskriminatif Dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM Internasional		PM	PM	PM	PM	DP3AP2KB



Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 17.1 Memperkuat Mobilisasi Sumber Daya Domestik, Termasuk Melalui Dukungan Internasional Kepada Negara Berkembang, Untuk Meningkatkan Kapasitas Lokal Bagi Pengumpulan Pajak Dan Pendapatan Lainnya							
17.1.1*	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDRB Menurut Sumbernya		PM	PM	PM	PM	BAPENDA
17.1.1.(a)	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	BAPENDA
17.1.2*	Proporsi Anggaran Domestik Yang Didanai Oleh Pajak Domestik		PM	PM	PM	PM	BAPENDA
Target 17.2 Negara-Negara Maju Melaksanakan Secara Penuh Komitmen Atas Bantuan Pembangunan (Official Development Assistance ODA) Termasuk Komitmen Dari Banyak Negara Maju Untuk Mencapat Target 0,7% Dari Pendapatan Nasional Bruto Untuk Pembangunan (ODA/GNI) Bagi Negara Berkembang Dan 0,15 - 0,2% ODA/GNI Kepada Negara Kurang Berkembang Penyedia ODA Didorong Untuk Mempertimbangkan Penetapan Target Untuk Memberikan Paling Tidak 0,20% Dari ODA/ GNI Untuk Negara Kurang Berkembang							
17.2.1.(a)	Proporsi ODA Terhadap PDB Dan PNB		PM	PM	PM	PM	BKAD
Target 17.3 Memobilisasi Tambahan Sumber Daya Keuangan Untuk Negara Berkembang Dari Berbagai Macam Sumber							
17.3.2.(a)	Proporsi Volume Remitansi PMI (Dalam US Dollars) Terhadap PDB		PM	PM	PM	PM	Bank Indonesia
Target 17.4 Membantu Negara Berkembang Untuk Mendapatkan Keberlanjutan Utang Jangka Panjang Melalui Kebijakan- Kebijakan Yang Terkoordinasi Yang Ditujukan Untuk Membantu Pembiayaan Utang, Keringanan Utang Dan Restrukturisasi Utang, Yang Sesuai, Dan Menyelesaikan Utang Luar Negeri Dari Negara Miskin Yang Berutang Besar Untuk Mengurangi Tekanan Utang							
17.4.1*	Proporsi Pembayaran Utang Dan Bunga (Debt Service) Terhadap Ekspor Barang Dan Jasa		PM	PM	PM	PM	



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan Dan Kerjasama Triangular Secara Regional Dan Internasional Terkait Dan Akses Terhadap Sains, Teknologi Dan Inovasi, Dan Meningkatkan Berbagi Pengetahuan Berdasar Kesepakatan Timbal Balik, Termasuk Melalui Koordinasi Yang Lebih Baik Antara Mekanisme Yang Telah Ada, Khususnya Di Tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dan Melalui Mekanisme Fasilitas Teknologi Global							
17.6.1.(a)	Persentase Pelanggan Terlayani Jaringan Internet Akses Tetap Pitalebar (<i>Fixed Broadband</i>) Terhadap Total Rumah Tangga		PM	27,62	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Inforansi
17.6.1.(b)	Persentase Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik (Kumulatif)		PM	7,175	PM	PM	Dinas Komunikasi dan Inforansi
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan Secara Penuh Bank Teknologi Dan Sains, Mekanisme Pembangunan Kapasitas Teknologi Dan Inovasi Untuk Negara Kurang Berkembang Pada Tahun 2017 Dan Meningkatkan Penggunaan Teknologi Yang Memampukan, Khususnya Teknologi Informasi Dan Komunikasi							
17.8.1*	Persentase Pengguna Internet		37,02	65,02	67,72	81,03	Dinas Komunikasi dan Inforansi
Target 17.9 Meningkatkan Dukungan Internasional Untuk Melaksanakan Pembangunan Kapasitas Yang Efektif Dan Sesuai Target Di Negara Berkembang Untuk Mendukung Rencana Nasional Untuk Melaksanakan Seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Termasuk Melalui Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan Dan Triangular							
17.9.1.(a)	Jumlah Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional termasuk KSST		PM	PM	PM	PM	
17.9.1.(b)	Jumlah Program/Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Dan Triangular		PM	PM	PM	PM	
Target 17.10 Menggalakkan Sistem Perdagangan Multilateral Yang Universal, Berbasis Aturan, Terbuka, Tidak Diskriminatif Dan Adil Di Bawah The World Trade Organization Termasuk Melalui Kesimpulan Dari Kesepakatan Di Bawah Doha Development Agenda							
17.10.1.(a)	Jumlah PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati		PM	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Target 17.11 Secara Signifikan Meningkatkan Ekspor Dari Negara Berkembang, Khususnya Dengan Tujuan Meningkatkan Dua Kali Lipat Proporsi Negara Kurang Berkembang Dalam Ekspor Global Pada Tahun 2020							
17.11.1.(a)	Pertumbuhan Ekspor Produk Nonmigas		PM	PM	PM	PM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Target 17.13 Meningkatkan Stabilitas Makroekonomi Global, Termasuk Melalui Koordinasi Kebijakan Dan Keterpaduan Kebijakan							
17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makro Ekonomi		PM	PM	PM	PM	
Target 17.17 Mendorong Dan Meningkatkan Kerjasama Pemerintah-Swasta Dan Masyarakat Sipil Yang Efektif, Berdasarkan Pengalaman Dan Bersumber Pada Strategi Kerjasama							
17.17.1	Jumlah Komitmen Untuk Kemitraan Publik-Swasta Untuk Infrastruktur (Dalam US Dollars)		PM	PM	PM	PM	
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) Yang Diterbitkan Setiap Tahun		0	0	0	1	BKAD/Dinas PU/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Perhubungan, DESDM, Penanaman Modal/Bappeda
17.17.1.(b)	Jumlah Proyek Yang Ditawarkan Untuk Dilaksanakan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU)		0	0	0	1	BKAD/Dinas PU/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Perhubungan, DESDM, Penanaman Modal/Bappeda
17.17.1.(c)	Jumlah Nilai Investasi Proyek KPBU Berdasarkan Tahap Perencanaan, Penyiapan Dan Transaksi		0	0	0	0	BKAD/Dinas PU/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Perhubungan, DESDM, Penanaman Modal/Bappeda
Target 17.18 Pada Tahun 2020, Meningkatkan Dukungan Pengembangan Kapasitas untuk Negara Berkembang, Termasuk Negara Kurang Berkembang Dan Negara Berkembang Pulau Kecil, Untuk Meningkatkan Secara Signifikan Ketersediaan Data							



Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
Berkualitas Tinggi, Tepat Waktu Dan Dapat Dipercaya, Yang Terpilah Berdasarkan Pendapatan, Gender, Umur, Ras, Etnis, Status Migrasi, Difabilitas, Lokasi Geografis Dan Karakteristik Lainnya Yang Relevan Dengan Konteks Nasional							
17.18.1.(a)	Persentase Pengguna Data Yang Menggunakan Data BPS Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Nasional		PM	PM	PM	PM	BPS
17.18.1.(b)	Persentase Publikasi Statistik Yang Menerapkan Standar Akurasi Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Nasional		PM	PM	PM	PM	BPS
17.18.2*	Jumlah Negara Yang Memiliki Undang-Undang Statistik Nasional Yang Tunduk Pada Prinsip-Prinsip Fundamental Statistik Resmi		PM	PM	PM	PM	BPS
17.18.3*	Jumlah Negara Dengan Perencanaan Statistik Nasional Yang Didanai Dan Melaksanakan Rencananya Berdasar Sumber Pendanaan		PM	PM	PM	PM	BPS
Target 17.19 Pada Tahun 2030, Mengandalkan Inisiatif Yang Sudah Ada, Untuk Mengembangkan Pengukuran Atas Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Melengkapi Produk Domestik Bruto, Dan Mendukung Pengembangan Kapasitas Statistik Di Negara Berkembang							
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I Yang Melaksanakan Rekomendasi Kegiatan Statistik		PM	PM	PM	PM	BPS
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I Yang Menyampaikan Metadata Sektorial Dan Khusus Sesuai Standar		PM	PM	PM	PM	BPS



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Satuan	Tahun Capaian				Instansi Penanggungjawab
			2018	2019	2020	2021	
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk Dan Perumahan Pada Tahun 2020		PM	PM	PM	PM	BPS
17.19.2.(b)	Tersedianya Data Registrasi Terkait Kelahiran Dan Kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)		PM	PM	PM	PM	DPMD Dukcapil



Tabel 2.103
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2022
(Meta Data 2)

Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan								
Target 1.1 : Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim		BPS	%	1,74	PM	1,2	
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		BPS	%	5,75	6,01	6,03	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional		BPS	%	PM	PM	PM	
Target 1.3 : Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(b)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		BPBPJS KetenagakerjaanS	%	67,29	95,5	84,56	
Target 1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,lingkungan, dan bencana.								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.1*		Jumlah korban meninggal per 100.000 orang	BPBD	Orang	84,6	0.69	0.69	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban hilang per 100.000 orang		Orang	PM	PM	PM	
		Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Orang	0,1	6,65	6,65	
		Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Orang	5,95	21,42	21,42	
Target 1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan		BKAD	%	PM	PM	1,9	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Persentase pengeluaran / belanja pemerintah untuk pendidikan	BKAD	%	20,69	20-25	22,06	
		Persentase pengeluaran / belanja pemerintah untuk kesehatan	BKAD	%	8,53	8-12	10,42	
		Persentase pengeluaran / belanja pemerintah untuk perlindungan sosial	BKAD	%	0.79	≤ 10	1,05	

Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan								
Target 2.1 : Pada Tahun 2030, Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses Bagi Semua Orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		BPS	%	6.07	4-8%	11,30	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-222



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

2.1.2*	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	BPS	%	6.07	10,07	6,60	
Target 2.2 : Pada Tahun 2030, Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara Internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusul serta manula							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	11	15,8	15,4	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	13,4	10,8	3,7	
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Dinas Kesehatan	%	82	85	PM	
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian	%	91,1	86,9	89,00	
Target 2.3 : Pada Tahun 2030, Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan pelusng nilai tambah dan pekerjaan non-pertanian							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	BPS	%	72,165	PM	PM	
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	BPJS Ketenagakerjaan	%	PM	PM	PM	
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor	BPS	%	88.571.947	PM	PM	
Target 2.4 : Pada Tahun 2030, Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktifitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	%	PM	PM	PM	

Target 2.5 : Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang	Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian di setiap provinsi	%	PM	PM	PM	
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	PM	PM	PM	

Target 2.a : Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	BPS	%	PM	PM	PM	
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian	Kementerian Keuangan: Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Settlement	%	PM	PM	PM	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-224



Target 2.b : Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian	Kementerian Keuangan: Direktorat Anggaran Politik, Hukum, dan Keamanan dan Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran	%	PM	PM	PM	

Target 2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.c.1*	Anomali harga pangan	BPS	%	PM	PM	PM	

Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.1*	(a) Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%	241,3	125	78	
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	%	15	14	10	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	90,7	91,2	89,9	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Target 3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Dinas Kesehatan	%	0,6	0,18	0,4	
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	195	231	243	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	%	0,01	0,01	0,02	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	%	4	4	4	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	%	85	90	90	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis	Dinas Kesehatan	%	75	100	100	
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (b) Kusta	Dinas Kesehatan	%	81	89	92	
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Dinas Kesehatan	%	7	7	7	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi	Dinas Kesehatan	%	2	1	1	

Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Dinas Kesehatan	%	17,2	17	10,2	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	26,35	26,25	21,77	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan	%	26,65	26,5	24,25	

Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data		Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(<i>Baseline</i>)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	BKKBN		%	26,3	77	28,6	
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	umur 15-19 tahun	BKKBN	%	11,4	12	12,75	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN		%	2,53	2,3	2,15	
Target 3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data		Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(<i>Baseline</i>)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Kesehatan		%	18,35	18	14,83	
Target 3.b : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data		Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(<i>Baseline</i>)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.b.1*	Cakupan vaksin yang mengandung DPT (dosis ke -3)	Dinas Kesehatan		%	80,3	90	89,1	
	Cakupan campak (dosis kedua)	Dinas Kesehatan		%	70,5	90	78,3	
	Cakupan vaksin konjugat pneumokus/PCV2	Dinas Kesehatan		%	PM	-	2,8	
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Dinas Kesehatan		%	93	94	95,7	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-227



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Target 3.c : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Dinas Kesehatan	%	0,21	PM	0,17	●
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Dinas Kesehatan	%	0,61	PM	0,51	●
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Dinas Kesehatan	%	0,13	PM	0,10	●
	Kepadatan dan distribusi perawat	Dinas Kesehatan	%	2,37	PM	2,05	●
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Dinas Kesehatan	%	0,04	PM	0,04	●
	Kepadatan dan distribusi bidan	Dinas Kesehatan	%	1,21	PM	1,07	●
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Dinas Kesehatan	%	0,10	PM	0,09	●
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan	%	0,13	PM	0,13	●
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Dinas Kesehatan	%	0,04	PM	0,04	●
	Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisian medis	Dinas Kesehatan	%	0,13	PM	0,12	●
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	%	0,14	PM	0,04	●

Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

Target 4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	Dinas Pendidikan	%	81,07	100	84,54	
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang	BPS	%	18,93	Menurun	Menurun	
Target 4.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	%	97,33	97,4	96,52	
4.4.1.(a)	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	%	89,06	89,15	91,14	
Target 4.5 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5.1*	Rasio antara APK siswa disabilitas dan siswa tanpa disabilitas di jenjang pendidikan SMA/ sederajat	BPS	%	91,82	85,71	70,05	
	Rasio antara APK perempuan dan laki-laki jenjang pendidikan SMA/ sederajat	BPS	%	111,9	112,4	101,43	
	Rasio antara APK Pedesaan dan Perkotaan jenjang pendidikan SMA/ sederajat	BPS	%	54,09	54,59	48,23	
Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	%	99,09	99,19	99,10	
Target 4.a : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-229



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik	Kemdikbud	%	99,31	99,51	100	●
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Kemdikbud	%	99,31	99,51	99,34	▼
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (c)komputer untuk tujuan pengajaran	Kemdikbud	%	94	95	97,06	●
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak	Kemdikbud	%	88,00	88,50	91,2	●
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Kemdikbud	%	95	96	97,72	●
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Kemdikbud	%	98	98,5	99,02	●
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	Kemdikbud	%	2,8	2,7	2,79	●
Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.c.1*	1.Persentase Guru SMA yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	BPS	%	94,39	94,79	99,25	●
	1. Persentase Guru SMK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	BPS	%	89,29	89,79	96,99	●
	1. Persentase Guru SLB yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	BPS	%	93,78	94,08	97,46	●



Tujuan 5 Kesetaraan Gender								
Target 5.1 : Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(<i>Baseline</i>)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Perhitungan Kekerasan Fisik	Simfoni PPA	orang	71	PM	54	
		Perhitungan Kekerasan Seksual:	Simfoni PPA	orang	16	PM	15	
		Perhitungan Kekerasan Emosional	Simfoni PPA	orang	49	PM	38	
		Perhitungan Kekerasan Total (Fisik, Seksual, atau Emosional)	Simfoni PPA	orang	136	PM	107	
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>Baseline</i>)	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Eselon II)		APBD	%	PM	11,63	11,63	

Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak Air							
Target 6.1 : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Dinas PUPP	%	93.76	96,15	90,83	▼



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Dinas Kesehatan	%	87,76	86	91,24	
	jumlah status SBS /Stop Buang Air Besar desa/kelurahan Sembarangan	Dinas Kesehatan	%	23,02	30	33,09	

Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DLHK	%	100	100	100	
6.3.2(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	DLHK	Kelas	Kelas 2	Kelas 2	Kelas 2	

Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua							
Target 7.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	93,5	100	95,5	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Kwh	609,97	PM	PM	
Target 7.2 : Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	12	13	14,17	

Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target 8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	%	-2,32	1,50	0,23	

Target 8.3 : Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.3.1.	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	%	0,30	29,45	0,36	
8.3.1(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi dan UKM	%	27,99	12,86	35,27	

Target 8.5 : Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.5.1	Upah rata-rata per jam kerja	DISNAKER	Rp	21247,00	21459,00	21787,00	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-233



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	10,12	10,10	8,23	
8.5.2 (a)	Persentase Setengah Pengangguran	BPS	%	5,10	5,05	4,95	
Target 8.6 : Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau tidak mengikuti pelatihan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.6.1*	Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	DISNAKER	%	22,61	22,38	16,42	
Target 8.7 : Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.7.1*	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	DISNAKER	%	PM	PM	PM	
Target 8.8 : Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.8.1*	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	DISNAKER	%	10,8	11,8	10,03	
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	%	-13,53			



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS, RPJMD	orang	3.103	370.500	758.154	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	KEMENPAR/ DISPAR	orang	719.206	1.988.600	817.282	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS/ KEMENPAR/ DISPAR	miliar rupiah	27,21	4.184,10	4.919,85	
Target 8.b : Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.b	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	DISNAKER	%	Ada	Ada	Ada	

**Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,
Serta Mendorong Inovasi**

Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	Dinas PUPP	%	61.75	63,25	76,55	
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	BPS	%	PM	PM	PM	
9.1.2.(a)	Jumlah Bandara	Dishub	Unit	8	8	8	
9.1.2.(b)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Dishub	Unit	10	10	10	
9.1.2.(c)	Jumlah Pelabuhan Strategis	Dishub	Unit	31	31	31	



Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(9)	(10)
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita	BPS	%	41,96	38,5	40,81	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	5,6	5,8	8,79	

Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	5,75	6,01	6,03	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal	IDM	Desa	28	8	8	
10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri	IDM	Desa	1	13	13	

Target 10.2 : Pada Tahun 2030, Memberdayakan Dan Meningkatkan Inklusi Sosial, Ekonomi Dan Politik Bagi Semua, Terlepas Dari Usia, Jenis Kelamin, Difabilitas, Ras, Suku, Asal, Agama Atau Kemampuan Ekonomi Atau Status Lainnya

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.2.1*	Proporsi Penduduk Yang Hidup Di Bawah 50 Persen Dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin Dan Penyandang Difabilitas	BPS	%	PM	PM	PM	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Target 10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	PM	PM	PM	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Simfoni PPA	orang	144	312	206	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional	DP3AP2KB	REGULASI	1	1	1	

Target 10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.4.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Badan Pusat Statistik (BPS)	%	67,29	95,5	84,56	

Target 10.5 : Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan Lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	BP2PMI	%	PM	PM	PM	
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	BP2PMI	Desa	PM	PM	PM	



Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan							
Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	APBD	Ha	-	25,27	23,30	
Target 11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.6.2.(a)	Indeks Kualitas Udara	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Angka	73,19	69,73	74,13	
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	BPBD	%	12,5	25	25	



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab							
Target 12.6: Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Perusahaan	31	31	31	
Target 12.7 : Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	PERPRES NO. 16 TAHUN 2018	Score	57,51	85	85	
Target 12.8 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.8.1.(a)	Jumlah komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan	Unit	127	127	127	

Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang	Jumlah korban meninggal per 100.000 orang	BPBD	Orang	84,6	0.69	0.69	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-239



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

	dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban hilang per 100.000 orang		Orang	PM	PM	PM	
		Jumlah korban terluka per 100.000 orang		Orang	0,1	6,65	6,65	
		Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		Orang	5,95	21,42	21,42	
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	%	12,5	25	25		
Target 13.a : Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.								
Kode Indikator	Nama Indikator		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.3.1.(a)	Jumlah komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan	Unit	127	127	127	

Tujuan 14 : Ekosistem Lautan							
Target 14.2 : Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif pada tahun 2020.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Dokumen	1	1	1	...
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Skor	PM	PM		...
Target 14.4 : Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya							

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-240



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan.	PM	PM	...	...	...
Target 14.5 : Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	SK KEPRI NO. 1050 TAHUN 2020	Ha	PM	138561,42	138561,42	
Target 14.6 : Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO) pada tahun 2020.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.6.1.(a)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	Kementerian Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	
Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	DKP, PERGUB NO. 83 TAHUN 2019	Dokumen	1	1	1	●
14.b.1.(a)	peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (jumlah kelompok nelayan yang meningkat dalam pendanaan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	%	PM	PM	0	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Orang	12830	12830	12830	●

Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Target 16.5 : Secara Substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya

Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan disemua tingkat

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs Tahun Berjalan	Capaian SDGs Tahun Berjalan	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS	Nilai	PM	PM	PM	
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK	%	100	100	100	●
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	KEMENPAN RB	%	100	100	100	●
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Biro Organisasi	%	68,66	69,77	74,42	●

Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan disemua tingkat

16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	BKAD	%	85,39	PM	83,01	●

Target 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	11,10	11,10	8,89	▼
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BPS	%	PM	9,62	11,63	●
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	BPS	%	PM	65,82	PM	

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-242



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	BPS	%	PM	90,84	PM	
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan	BPS	%	PM	71,45	PM	
Target 16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	BPS	%	93,81	95	95	●
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS	%	94,20	94,3	94,3	●
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	92,44	92,5	92,5	●
Target 16.10 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Komisi Informasi Pusat (KIP): Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.	Badan Publik	1	1	1	●
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat.		2	PM	5	●



Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1 Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status (10)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Badan Pusat Statistik.	%	1,88	0,48	1,81	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Dalam Negeri	%	1,63	PM	1,80	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan untuk tingkat nasional dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) atau Bappeda untuk tingkat daerah.	%	43,98	29,97	47,42	
Target 17.11 : Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(9)	(10)



17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	BPS	%	3,5	3,5	24,33	
Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Tahun 2021(Baseline)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil Kemendagri		Ada	Ada	Ada	



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan perbaikan menjadi sebuah sinyal bahwa konstelasi dalam rangka pembangunan sudah dapat dikembalikan sebelum terjadi pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut, upaya penyesuaian kembali kebijakan perekonomian dan keuangan diperlukan untuk memastikan tantangan dan dinamika paska pandemi dapat ditanggulangi dengan baik. Penyelenggaraan pembangunan daerah tentunya tidak terlepas dari bagaimana keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pengoptimalkan berbagai sumber dan potensi daerah yang dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang memadai dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bab ini akan menyajikan gambaran kinerja keuangan masa lalu yang dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu sempat terlaksana dari RPJMD Tahun 2021-2026, serta berbagai perubahan kebijakan dan proyeksi kerangka pendanaan periode yang akan datang berdasarkan dari hasil analisis kebijakan pengelolaan keuangan RPJMD Tahun 2021-2026.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu harus diperhatikan. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang-kurangnya dalam jangka 5 (lima) tahun ke belakang yang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan untuk dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan selanjutnya.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan, sedangkan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.



Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah masa lalu, perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana ketersediaan kemandirian pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuatnya kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami fluktuasi. DOFD Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2018 mencapai 34.88 % kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 33.30%, kemudian mulai mengalami kenaikan pada Tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 34.02 % dan 36.11 %, hingga mencapai 42.77% pada Tahun 2022. Penurunan sempat terjadi pada Tahun 2019 dikarenakan penurunan dari 2 (dua) sumber Pendapatan yaitu Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Jika ditinjau secara spesifik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sejak Tahun 2019, namun rasio pada menjadi berkurang dikarenakan peningkatan Pendapatan secara keseluruhan juga terjadi secara signifikan kurang lebih mencapai 400 Miliar. Meskipun demikian, Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi sumber utama bagi Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan



klasifikasinya, nilai rata-rata DOFD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 36.22 % masih masuk kategori " **Cukup** " karena berada di antara 30,01 % - 40,00 %. Agar dapat meningkatkan tingkat kemandirian fiskal dan masuk ke baik bahkan sangat baik, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menggali sumber - sumber keuangan daerah dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Adapun perkembangan DOFD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2018 - 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kepulauan Riau , Tahun 2018-2019

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi
2018	Rp 3.500.007.224.302,10	Rp 1.220.768.246.945,10	34.88 %
2019	Rp 3.939.451.004.378,32	Rp 1.311.704.305.173,32	33.30 %
2020	Rp 3.514.310.183.325,26	Rp 1.195.637.693.103,26	34.02 %
2021	Rp 3.809.875.862.443,47	Rp 1.375.770.280.701,47	36.11 %
2022	Rp 3.918.136.426.613,95	Rp 1.675.729.889.079,95	42.77 %
		Rata-Rata	36.22 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2024

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

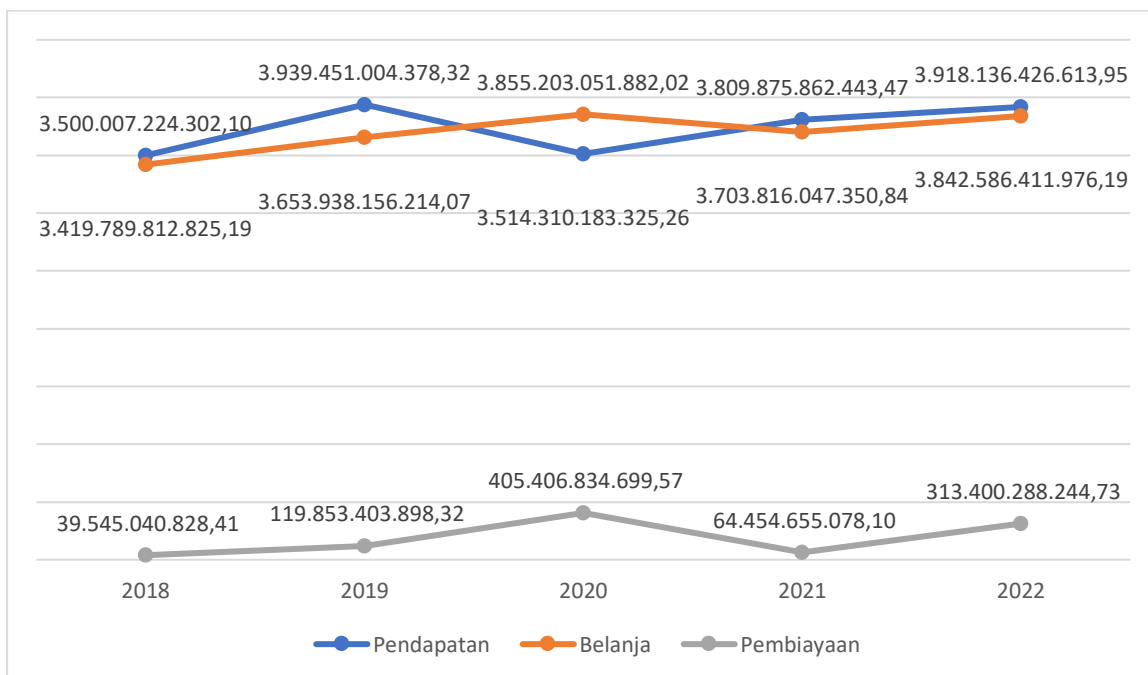
Kinerja keuangan merupakan prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Informasi kinerja keuangan diperlukan dalam menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kinerja pelaksanaan APBD menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi

tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Perkembangan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang 2018-2022 mengalami tren fluktuatif dan mengalami kecenderungan kenaikan pendapatan daerah Tahun 2018 sebesar Rp 3.500.007.224.302,10-, menjadi Rp 3.918.136.426.613,95,- pada Tahun 2022. Secara umum kenaikan tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan belanja daerah yang realisasinya mengalami kenaikan dari Rp. 3.419.789.812.825,19,- pada Tahun 2018 menjadi Rp. 3.842.586.411.976,19 pada Tahun 2022. Adapun pada komponen Pembiayaan, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tren fluktuatif akibat dinamika SiLPA yang naik pada Tahun 2020. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah pada gambar berikut.

Gambar III. 1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)

3.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-4**

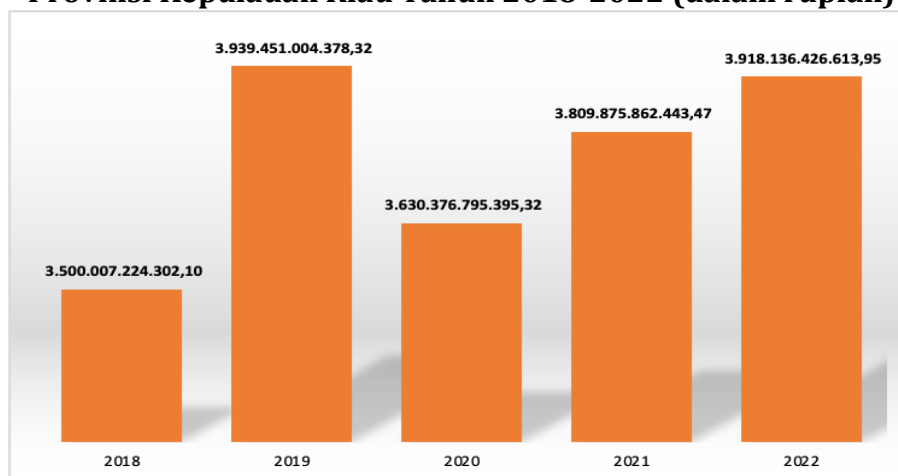
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu kebijakan pendapatan daerah harus mampu menciptakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 1% per tahun dari Rp. 3.5 Milyar di Tahun 2018 menjadi Rp. 3.9 Milyar di Tahun 2022.

Gambar III. 2
Perkembangan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Jika dilihat lebih dalam, hampir semua komponen pendapatan nilainya naik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 8,87 % pertahun dari Rp.1.220 Milyar di Tahun 2018 menjadi Rp. 1.675 Milyar di Tahun 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah mencapai 13,93 %, sedangkan pada pendapatan transfer dalam periode rata - rata 5 (lima) tahun kebelakang cenderung stabil yaitu 0,13%.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan secara signifikan terjadi pada sub komponen Lain - Lain PAD yang sah mencapai 13,93%, kenaikan yang ada dipengaruhi kenaikan deviden atas penyertaan saham pada PT. Bank Riau Kepri. Sub komponen pajak daerah juga mengalami kenaikan sebesar 8,90%, kenaikan hingga mencapai Rp. 200 Miliar terjadi pada Tahun 2022 hal tersebut dipengaruhi pada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikarenakan pulihnya kondisi perekonomian di Kepulauan Riau semenjak terkena Pandemi Covid-19.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari dana perimbangan yang terdiri atas dana transfer umum (DBH dan DAU) dan dana transfer khusus (DAK). Untuk DBH bersumber dari pajak dan penerimaan sumber daya alam. Sumber pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Untuk DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap keseluruhan pendapatan masih mendominasi keseluruhan sumber pendapatan, dimana rata-ratanya mencapai 63 % pertahun. Secara agregat nilai pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan cenderung fluktuasi, namun jika dihitung secara rata-rata tidak mengalami pertumbuhan atau 0,13%. Hampir



keseluruhan sub komponen mengalami kontraksi yaitu pada Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Dana Penyesuaian yang mengalami kontraksi sebesar 34 %.

Untuk Lain - Lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sejak Tahun 2020 sebesar Rp. 1,483 Milyar menjadi Rp. 1.265 Milyar ditahun 2022, meskipun Tahun 2021 sempat mengalami kenaikan signifikan dikarenakan kenaikan sub komponen pendapatan lainnya. Adapun Lain-Lain pendapatan yang sah lainnya tercatat hanya masuk pada pos pendapatan lainnya pada Tahun 2018, 2019 dan 2021 sampai dengan tahun 2022 kedua sumber tersebut merupakan pendapatan yang didapatkan atas 2 (dua) BLUD yaitu RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang dan RSUD Engku Haji Daud. Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Uraian	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	PENDAPATAN	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26	3.809.875.862.443,47	3.918.136.426.613,95	3,25 %
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.220.768.246.945	1.311.704.305.173,32	1.195.637.693.103	1.375.770.280.701,47	1.675.729.889.079	8,87 %
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.099.143.753.068	1.185.272.259.756	1.033.430.812.844	1.191.202.760.957	1.492.764.323.921	8,90 %
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	13.542.397.410	7.164.633.160	5.734.867.917	12.274.391.358	6.856.067.413	0,71 %
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.095.498.858	2.840.763.340	2.064.418.255	3.035.620.811	2.490.319.871	- 1,62 %
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.986.597.609	116.426.648.917	154.407.594.087	169.257.507.575,47	173.619.177.874	13,93 %
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.278.002.977.357	2.626.462.699.205	2.317.188.590.222	2.406.531.963.533	2.241.141.497.534	0,13 %
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.278.002.977.357	2.626.462.699.205	2.317.188.590.222	2.406.531.963.533	2.241.141.497.534	0,13 %
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.278.002.977.357	2.573.155.268.205	2.282.262.140.222	2.362.094.641.533	2.190.992.844.534	- 0,52 %
1.2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	157.690.034.739	103.447.118.023	196.946.330.649	0	0	- 11%
1.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	379.767.968.007	633.999.917.557	262.818.832.929	0	0	- 22,90 %
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	1.150.516.796.000	1.190.057.596.000	1.099.291.405.000	0	0	- 26,05 %



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Uraian	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	590.028.178.611	645.650.636.625	723.205.571.644	0	0	- 19,64 %
1.2.1.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-		0	0	0	0%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah			0	44.437.322.000	50.148.653.000	3,21 %
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	53.307.431.000	34.926.450.000	0	0	- 33,62 %
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	0	0	0	0%
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	53.307.431.000	34.926.450.000	0	0	- 33,62 %
1.2.1.3	Dana Desa	-	-	0	0	0	0%
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.236.000.000	1.284.000.000	1.483.900.000	27.573.618.209	1.265.040.000	420.56 %
01.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	1.483.900.000	1.201.000.000	1.265.040.000	-3,43%
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	0	0	0	0%
01.03.03	Pendapatan Lainnya	1.236.000.000	1.284.000.000	0	26.372.618.209	0	-49,03%

Keterangan:

Data 2018-2022 Menggunakan Data Laporan Keuangan Audited



3.1.3 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir Tahun 2018-2022 realisasi belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8% pertahun dari Rp. 3.419 miliar di Tahun 2018 menjadi Rp. 4.524 miliar di Tahun 2022. Kenaikan belanja tersebut dinilai signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan rata-rata pendapatan yang hanya menyentuh angka 1%. hal tersebut perlu menjadikan perhatian kedepan untuk secara berhati-hati menentukan setiap pagu belanja untuk tetap memperhatikan kemampuan pendapatan yang dimiliki dan/atau alternatif



strategi lain juga disiapkan melalui pembiayaan sehingga keduanya bisa seimbang. Secara umum hampir seluruh jenis belanja daerah mengalami peningkatan.

Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan mencapai 3% pertahun dari Rp. 2.327 miliar di Tahun 2018 menjadi Rp. 2.630 miliar di Tahun 2022. Peningkatan belanja operasi sangat dipengaruhi oleh meningkatnya belanja barang dan jasa sebesar 7% pertahun dari Rp. 1.077 miliar di Tahun 2018 menjadi Rp. 1.360 miliar di Tahun 2022. Sedangkan belanja hibah mengalami fluktuasi namun cenderung menurun pada sejak Tahun 2020 dari Rp. 607 miliar menjadi Rp. 249 miliar di Tahun 2022. Peningkatan sangat signifikan terjadi pada belanja bunga yang terjadi pada Tahun 2022 sebesar Rp.664 Miliar, dimana hal tersebut merupakan belanja peruntukan bagi ketahanan sosial masyarakat yang terkena dampak dari pandemi *covid 19*.

Belanja Tak Terduga mengalami lonjakan signifikan pada Tahun 2021, dimana pada tahun tersebut sesuai dengan mandat dari Pemerintah Pusat, Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran mencapai Rp 28 Miliar yang diperuntukan bagi pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi *covid-19*. Seiring dengan mulai terkendalanya pandemi, maka belanja tersebut tidak lagi dianggarkan, hal tersebut juga terkonfirmasi dari pengalokasian yang dimulai pada Tahun 2018 hanya Rp. 200 juta dan Tahun 2020 hanya sebesar Rp 2 Miliar.

Belanja Transfer secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 32% pertahun dari Rp. 471 miliar di Tahun 2018 menjadi Rp. 675 miliar di Tahun 2022. Peningkatan belanja transfer tersebut selain disebabkan oleh meningkatkan belanja transfer bagi hasil pajak daerah yang meningkat 11 % pertahun dan transfer bantuan keuangan yang meningkat 14%. .

Belanja Modal secara agregat juga mengalami kenaikan dengan rata-rata penurunan dari Rp. 586 miliar (2018) menjadi Rp. 580 miliar (2022) sebesar 3%. Hampir keseluruhan sub komponen belanja mengalami kenaikan secara rata-rata hanya pada belanja modal tanah dan belanja modal peralatan dan mesin yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -38% dan -1%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata Pertumbuhan
I.	Belanja	3.419.789.812.825,19	3.653.938.156.214,07	3.855.203.051.882,02	3.873.887.812.503,60	4.524.665.588.331,17	8%
1.	Belanja Operasi	2.327.980.492.005,54	2.519.909.082.654,73	2.721.582.440.515,50	2.941.257.466.381,00	2.630.733.896.259,12	3%
a.	Belanja pegawai	900.881.257.498,00	998.150.649.443,40	1.004.932.687.935,00	974.785.005.540,00	1.016.168.582.813,00	3%
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.077.427.074.675,54	1.142.425.276.118,33	1.082.661.190.360,50	1.444.382.422.048,00	1.360.825.303.379,12	7%
c.	Belanja Bunga	-	-	-	-	664.047.335,00	25%
d.	Belanja Hibah	345.516.286.200,00	376.030.275.000,00	607.947.459.750,00	519.604.760.476,00	249.256.546.869,00	1%
e.	Belanja Biaya Provisi	-	-	-	1.040.760.000,00		0%
f.	Belanja Bantuan Keuangan	1.645.873.632,00	1.683.762.093,00	-	-	-	-24%
g.	Belanja Bantuan Sosial	2.510.000.000,00	1.619.120.000,00	26.041.102.470,00	1.444.518.317,00	3.819.415.863,00	370%
2.	Belanja Modal	620.056.564.203,65	633.107.634.788,34	586.608.798.242,52	377.456.745.376,00	580.852.219.430,00	3%
a.	Belanja Modal Tanah	3.246.612.000,00	1.005.059.089,00	-	49.100.000.000,00	8.763.084.747,00	-38%
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.978.638.614,00	155.140.414.801,06	145.686.505.598,24	152.756.458.532,00	171.942.131.257,00	-1%
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.886.781.458,89	175.673.914.230,17	94.399.837.108,63	73.348.419.053,00	191.452.039.739,00	21%
d.	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	223.489.584.106,01	298.731.464.403,11	345.331.139.944,13	100.439.987.801,00	204.485.248.669,00	20%
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.454.948.024,75	2.556.782.265,00	1.191.315.591,52	1.581.879.990,00	3.609.715.018,00	7%
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	230.000.000,00	600.000.000,00	65%
g.	Belanja Modal BLUD						



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata Pertumbuhan
		-	-	-	-		
h.	Belanja Modal BOS				-		
3.	Belanja Tak Terduga	255.375.000,00	-	2.297.329.972,00	28.454.560.448,00	709.200.000	854%
a.	Belanja Tak Terduga	255.375.000,00	-	2.297.329.972,00	28.454.560.448,00	709.200.000	25%
4.	Transfer	471.497.381.616,00	500.921.438.771,00	544.714.483.152,00	572.568.004.567,00	675.990.607.983,00	32%
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-		-	-	
b.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	471.497.381.616,00	500.921.438.771,00	518.464.483.152,00	553.868.004.567,00	654.199.807.983,00	11%
c.	Transfer Bantuan Keuangan	-		26.250.000.000,00	18.700.000.000,00	21.790.800.000,00	14%
d.	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	0%
e.	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-				-	0%
f.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-				-	0%



3.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lima tahun terakhir dari Tahun 2018-2022 perkembangan pembiayaan (netto) daerah Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi, dimana kenaikan terjadi pada Tahun 2019, 2020, dan 2022, keduanya dipengaruhi karena menurunnya penerima SiLPA. Secara rata-rata penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan drastis sebesar 193% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 39 miliar meningkat hingga menjadi Rp 332 miliar di Tahun 2022. Pinjaman dalam negeri hanya diterima di tahun 2021 sebesar Rp. 162 miliar.

Adapun Pengeluaran pembiayaan berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok pinjaman selama 5 tahun kebelakang realisasinya Rp. 0. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 berikut:



Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata Pertumbuhan
I.	Pembiayaan	39.545.040.828,41	119.853.403.898,32	405.406.834.699,57	64.513.966.143,00	332.601.648.530,73	193%
1.	Penerimaan Pembiayaan	39.545.040.828,41	119.853.403.898,32	405.406.834.699,57	64.513.966.143,00	332.601.648.530,73	193%
a.	Penggunaan SILPA	39.427.248.919,41	119.762.452.305,00	405.366.252.062,57	64.513.966.143,00	170.514.470.170,73	131%
b.	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	162.087.178.360,00	25%
c.	Penerimaan Kembali Piutang	117.791.909,00	90.951.593,32	40.582.637,00	-	-	25%
2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	0%
a.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	0%
b.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0%



3.1.5 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau berupa kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.



3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Secara keseluruhan Neraca Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada Tabel berikut ini:



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tabel 3.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022	Rarat-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	108.847.425.125,02	389.441.607.426,37	14.196.216.711,13	118.146.530.888,45	355.056.558.695,06	274%
Kas di Bendahara Pengeluaran	424.772,00	9.302.500,00	1.158.064.650,00	1.241.227.074,00	5.000.000,00	3587%
Kas di Bendahara Penerimaan	-	4.000.000,00	-	4.931.300,00	150.000,00	-24%
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	7.980.869.655,95	13.087.038.428,54	42.566.785.780,58	50.097.398.930,44	31.109.504.559,44	67%
Kas di Bendahara BOS	2.206.124.760,06	2.437.710.124,61	6.504.941.018,75	1.063.528.221,87	2.778.825.823,99	64%
Kas Lainnya	4.985.510,29	4.030.685,00	190.402.875,30	10.470.734.995,99	14.879.532.443,47	2512%
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0%
Piutang Pajak	99.644.251.838,94	83.711.031.371,00	81.457.876.419,00	100.375.568.424,00	85.442.310.262,00	-3%
Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	-	-	-15%
	60.346.976.065,97	51.530.769.143,75	23.186.483.595,05	48.264.839.983,68		
Piutang Retribusi	-	-	-	18.710.000,00	152.413.788,00	179%
Piutang Pajak Netto	39.297.275.772,97	32.180.262.227,25	58.271.392.823,95			-9%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			23.802.888.375,29	53.518.951.369,00	27.530.452.987,54	44%
Piutang Denda Pajak		18.006.398.969,54	18.539.541.566,12	-	-	1%
Penyisihan Piutang Denda Pajak		-	-	-	-	-15%
		10.156.389.539,77	3.999.203.623,48			
Piutang BLUD		19.988.198.404,97	4.681.471.016,97	-	-	-19%
Penyisihan Piutang BLUD		-	-	-	-	-22%
		10.353.222.061,77	1.380.542.889,36			
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Lainnya			581.875.792,20	-	-	0%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		17.484.985.772,97	18.423.141.862,45			1%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana		69.712.731.231,00	1.198.115.464,00	-	-	-25%



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022	Rarat-Rata Pertumbuhan
Perimbangan						
Piutang Lainnya	54.587.342.751,76	29.134.166.147,59	665.074.856,52	1.155.481.652,41	101.044.156,32	-40%
Piutang BLUD	9.869.508.902,97				-	-25%
Penyisihan Piutang Lainnya	- 5.027.762.924,77		-		- 41.932.122.425,48	0%
Piutang Lainnya Netto	59.429.088.729,96	29.134.166.147,59	665.074.856,52			-62%
Persediaan	377.028.466.181,33	156.338.770.487,90	131.416.830.861,43	151.832.846.264,76	193.115.309.407,55	-8%
JUMLAH ASET LANCAR	594.794.660.507,58	709.834.605.031,23	274.590.966.904,11	439.656.630.967,96	669.474.380.115,72	18%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen				386.050.254,50	456.389.216,50	30%
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara						0%
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-				0%
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya						0%
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-				0%
Investasi Non Permanen Lainnya	34.949.633.119,52	34.858.681.526,52	34.818.098.889,52			-25%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	- 34.412.993.292,27	- 34.436.816.537,02	- 34.361.709.253,02			-25%
JUMLAH Investasi Non Permanen	536.639.827,25	421.864.989,50	456.389.636,50	386.050.254,50	456.389.216,50	-3%
Investasi Permanen						0%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	63.246.500.707,20	66.679.308.921,46	62.768.568.668,55	91.814.650.977,48	147.086.024.641,00	27%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-				0%
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-				0%
Invertasi Permanen Lainnya	-	-				0%

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-19



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022	Rarat-Rata Pertumbuhan
JUMLAH Investasi Permanen	63.246.500.707,20	66.679.308.921,46	62.768.568.668,55	91.814.650.977,48	147.086.024.641,00	27%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	63.783.140.534,45	67.101.173.910,96	63.224.958.305,05	92.271.040.193,98	147.472.074.895,50	26%
ASET TETAP						
Tanah	852.537.966.681,68	888.960.902.578,68	1.039.992.209.851,50	1.067.966.804.976,35	1.072.473.535.610,35	6%
Peralatan dan Mesin	1.284.168.952.536,58	1.427.125.056.199,64	1.599.404.985.847,43	1.694.395.488.011,66	1.839.866.302.822,97	9%
Gedung dan Bangunan	1.917.304.687.500,52	2.096.413.257.748,06	2.151.903.305.019,96	2.266.074.140.053,40	2.476.127.859.483,36	7%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.732.670.274.875,83	2.881.062.579.882,25	3.479.604.242.833,27	3.495.909.382.709,49	3.704.121.952.730,23	8%
Aset Tetap Lainnya	163.959.211.629,72	214.969.692.104,82	221.016.675.554,34	265.606.777.573,68	239.632.094.496,33	11%
Konstruksi dalam Pengerjaan	47.907.990.800,23	249.193.843.631,97	53.044.713.285,76	48.115.144.176,09	108.884.323.617,55	115%
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	13%
	2.230.361.044.537,73	2.561.173.260.969,73	2.933.735.924.811,87	3.266.103.423.574,39	3.653.109.457.588,40	
JUMLAH ASET TETAP	4.768.188.039.486,83	5.196.552.071.175,69	5.611.230.207.580,39	5.571.964.313.926,28	5.787.996.711.172,39	5%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-			-	0%
JUMLAH DANA CADANGAN					-	0%
ASET LAINNYA						0%
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran						0%
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.048.503.950,00	998.508.950,00	996.008.950,00	996.008.950,00	996.008.950,00	-1%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-				0%
Aset Tidak Berwujud	43.550.075.497,06	9.022.871.087,06	18.576.994.567,06	22.669.806.887,06	23.491.446.987,06	13%
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	203.047.071.180,00	225.394.622.019,00	280.780.194.136,00			-16%
Aset Lain-lain	252.457.578.324,75	256.265.998.069,75	252.398.986.069,75	518.304.280.766,41	570.720.512.278,53	29%
Akumulasi Penyusutan - Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	8592%
	9.892.777.145,88	9.744.541.145,88	9.446.780.185,88	3.266.103.423.574,39	3.507.471.320,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	490.210.451.805,93	481.937.458.979,93	543.305.403.536,93	538.802.825.283,47	591.500.496.895,59	5%
JUMLAH ASET	5.916.976.292.334,79	6.455.425.309.097,81	6.492.351.536.326,48	6.642.694.810.371,69	7.196.443.553.079,20	5%



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022	Rarat-Rata Pertumbuhan
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.332.363,00	3.702.135,00	226.471.952,00	37.999.885,00	21.741.560,00	1465%
Utang Bunga	-	-	-	-	712.340.901,00	25%
Utang Pajak	-	-	-	-	-	0%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	61.191.939.177,00	25%
Utang Beban	47.298.446.795,31	168.275.441.057,75	159.309.589.936,92	193.229.008.324,15	203.152.822.582,61	69%
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-		1.235.370.307,83	25%
Utang Pengadaan Aset Tetap		10.583.964.224,77	6.140.476.825,88	-		-10%
Utang Jangka Pendek Lainnya	52.651.070.053,04	12.883.026.663,13	12.969.238.598,25	25.268.893.928,16	14.434.349.414,49	-6%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	99.954.849.211,35	191.746.134.080,65	178.645.777.313,05	218.535.902.137,31	279.513.193.635,10	34%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	0%
Utang Dalam Negeri- Obligasi	-	-				0%
Utang Pemerintah Pusat	-	-		294.315.103.342,00	291.416.018.100,00	25%
Utang Pemerintah Provinsi	-	-				0%
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-				0%
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	-	-				0%
Utang Lembaga Bukan Bank				-	81.589.255.092,00	25%
Utang Jangka Panjang Lainnya	203.047.071.180,00	225.394.622.019,00	280.780.194.136,00		-	-16%

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | III-21



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022	Rarat-Rata Pertumbuhan
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	203.047.071.180,00	225.394.622.019,00	280.780.194.136,00	294.315.103.342,00	373.005.273.192,00	17%
JUMLAH KEWAJIBAN	303.001.920.391,35	417.140.756.099,65	459.425.971.449,05	512.851.005.479,31	652.518.466.627,10	22%
JUMLAH EKUITAS	5.613.974.371.943,44	6.038.284.552.998,16	6.032.925.564.877,43	6.129.843.804.892,38	6.543.925.196.252,10	4%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.916.976.292.334,79	6.455.425.309.097,81	6.492.351.536.326,48	6.642.694.810.371,69	7.196.443.663.079,20	5%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



4. Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2022 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2019-2028 rasio lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat fluktuatif namun mempunyai tren yang cenderung menurun. Rasio lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2018 adalah nilai rasio tertinggi yaitu sebesar 1,96. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2018 mempunyai kemampuan untuk menutup hutang jangka pendeknya 1,96 dari total kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 rasio lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 1,70 dan 0,60. Namun demikian pada dua tahun terakhir rasio



kembali meningkat menjadi 1,03. Peningkatan tersebut memberikan gambaran bahwa perbaikan tata kelola keuangan telah dilakukan meskipun belum sebaik tahun 2018. Sebagai perhatian, rasio perlu dijaga untuk tetap di atas angka 1. Jika rasio berada di bawah angka 1 perlu diwaspadai karena jumlah kewajiban telah melebihi aset lancar. Berikut ini penjabaran fluktuatif dari rasio lancar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam rupiah).

Tabel 3.7
Rasio Lancar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
ASET LANCAR	594.794.660.507,58	709.834.605.031,23	274.590.966.904,11	439.656.630.967,96	669.474.380.115,72
KEWAJIBAN LANCAR	303.001.920.391,35	417.140.756.099,65	459.425.971.449,05	512.851.005.479,31	652.518.466.627,10
RASIO LANCAR	1,96	1,70	0,60	0,86	1,03

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui karena terkait dengan proses identifikasi kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman berdasarkan jumlah aktiva yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai sebagai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang tahun 2018-2022 cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun Tahun 2018 sebesar 0,06 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 0,10 serta sempat mengalami stagnasi pada Tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,8. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Provinsi Kepulauan Riau cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Meskipun secara keseluruhan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Provinsi Kepulauan Riau cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada namun melihat trennya yang sempat mengalami peningkatan sperlu diwaspadai. Jangan sampai rasionya mencapai 1 (100%) atau bahkan lebih. Untuk itu ke depannya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu mengkalkulasi dan merencanakan besaran kewajiban-kewajiban yang ada agar rasionya semakin mengecil.

Tabel 3.8
Rasio Hutang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022
(dalam Jutaan)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
KEWAJIBAN	303.001.920.391,35	417.140.756.099,65	459.425.971.449,05	512.851.005.479,31	652.518.466.627,10
EKUITAS	5.613.974.371.943,44	6.038.284.552.998,16	6.032.925.564.877,43	6.129.843.804.892,38	6.543.925.196.252,10
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,05	0,07	0,08	0,08	0,10

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi, rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya, rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana tahun 2018 sebesar 0,05 menjadi 0,09 di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban dalam kurun waktu 2018-2022 tidak pernah lebih dari 1% dari total aset yang dimiliki pada tahun 2022. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun begitu perlu diwaspadai tren peningkatan setiap tahunnya tersebut agar kemudian bisa ditekan atau bahkan terus diturunkan.

Tabel 3.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
KEWAJIBAN	303.001.920.391,35	417.140.756.099,65	459.425.971.449,05	512.851.005.479,31	652.518.466.627,10
AKTIVA	5.916.976.292.334,79	6.455.425.309.097,81	6.492.351.536.326,48	6.642.694.810.371,69	7.196.443.553.079,20
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



c. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan aktiva tetap yang dimiliki seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami tren meningkat. Adapun rasio di tahun 2018 mencapai 0,08 kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,25 di Tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset yang dimiliki memberikan kontribusi yang besar hingga mencapai 1.444 Miliar di Tahun 2022, kinerja meningkat ini perlu dipertahankan melalui pemantapan pendayagunaan aset yang efektif sehingga menunjang pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022
(dalam Jutaan)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	1.220.768.246.945	1.311.704.305.173	1.311.704.305.173	1.436.072.735.262	1.444.560.169.951
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	4.768.188.039.486,83	5.196.552.071.175,69	5.611.230.207.580,39	5.571.964.313.926,28	5.787.996.711.172,39
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,08	0,16	0,23	0,26	0,25

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2018-2022 relatif fluktuatif dan cenderung menurun. Rasio di Tahun 2018 mencapai 0,21 sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 0,22 namun kembali menurun pada Tahun 2022 menjadi 0.20

Secara keseluruhan dari Tahun 2018-2022 rata-rata nilai total aset daerah terbilang masih cukup rendah efektivitasnya sehingga perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Begitu pula, optimalisasi juga masih diperlukan pada potensi-potensi penerimaan PAD daerah ke depannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	1.220.768.246.945	1.311.704.305.173	1.311.704.305.173	1.436.072.735.262	1.444.560.169.951
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	5.916.976.292.334,79	6.455.425.309.097,81	6.492.351.536.326,48	6.642.694.810.371,69	7.196.443.553.079,20



URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,21	0,20	0,20	0,22	0,20

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran, baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau 2018-2022 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan, baik berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun meningkat dengan rasio rata-rata sebesar 25,20% pertahun. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2018 sebesar 26,34% dari total pengeluaran daerah dengan fluktuasi rasio hingga mencapai 22,27% di Tahun 2022, Rasio tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 26,07%. Rasio belanja pegawai masih perlu ditekan untuk meningkatkan ruang fiskal belanja publik. Berikut adalah rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Kepulauan Riau:



Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022 (Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2018	900.881.257.498,00	3.419.789.812.852,18	26,34%
2	2019	998.150.649.443,40	3.653.938.156.214,07	27,32%
3	2020	1.004.932.687.935,00	3.855.203.051.882,02	26,07%
4	2021	971.785.005.540,00	3.703.816.057.350,84	24,79%
6	2022	1.016.168.582.813,00	3.824.586.411.976,19	22,27%
Rata-Rata		4.894.918.193.229,40	18.475.333.490.248,30	25,20%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2018-2022 cenderung meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 4% pertahun dari Rp3.891 miliar di tahun 2018 menjadi Rp4.513 miliar di tahun 2022. Peningkatan tersebut sangat



dipengaruhi oleh naiknya belanja operasi yaitu belanja pegawai dalam kurun waktu 2018-2022 rata-rata meningkat 3% pertahun dan belanja bantuan sosial rata-rata meningkat 368, hal ini dikarenakan peningkatan bantuan sosial saat *Pandemi Covid-19*. Masih disebabkan pada hal yang sama Belanja Tak Terduga juga mengalami peningkatan sebesar 25%, peningkatan signifikan terjadi pada Tahun 2021 hingga menjadi Rp19 Miliar.

Peningkatan Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas perlu disikapi mengingat peningkatan tersebut dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja publik. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut:



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Tabel 3.13
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.891.542.569.441,19	4.154.859.594.985,07	4.402.214.865.006,02	4.298.114.164.503,84	4.513.471.376.828,19	4%
	Belanja Operasi	2.327.980.492.005,54	2.519.909.082.654,73	2.721.582.440.515,50	2.771.185.711.228,24	2.619.539.684.756,14	3%
	Belanja pegawai	900.881.257.498,00	998.150.649.443,40	1.004.932.687.935,00	932.136.664.952,00	1.016.168.582.813,00	3%
	Belanja Bunga	-	-	-	-	664.047.335,00	25%
	Belanja Hibah	345.516.286.200,00	376.030.275.000,00	607.947.459.750,00	509.651.418.436,00	238.079.765.086,02	0%
	Belanja Biaya Provisi	-	-	-	1.040.760.000,00		0%
	Belanja Bantuan Sosial	2.510.000.000,00	1.619.120.000,00	26.041.102.470,00	-	3.801.986.143,00	368%
	Belanja Bantuan Keuangan	1.645.873.632,00	1.683.762.093,00	-	-		-24%
	Belanja Tak Terduga						
	Belanja Tak Terduga	255.375.000,00	-	2.297.329.972,00	19.134.022.250,00	-	25%
	Transfer						



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Uraian	REALISASI					Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-	-	-
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	471.497.381.616,00	500.921.438.771,00	518.464.483.152,00	561.664.084.903,00	652.632.186.014,00	11%
	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	26.250.000.000,00	13.500.000.000,00	18.252.778.838,00	5%
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (59 s.d. 60)	-	-	26.250.000.000,00	13.500.000.000,00	18.252.778.838,00	5%
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2022) perkembangan defisit riil anggaran relatif mengalami tren negatif. Realisasi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan jumlah Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang harus dibayarkan. Jumlah Belanja daerah mulai pada Tahun 2018 sebesar 3.319 Miliar menjadi 4.563 Miliar di Tahun 2022.

Tabel 3.14
Defisit Riil Anggaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.630.376.795.395,32	3.854.182.050.629,00	3.644.669.780.605,00
2	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	39.545.040.828,41	119.853.403.898,32	405.406.834.699,57	64.454.655.078,10	332.601.648.530,73
	dikurangi realisasi:					
3	Belanja Daerah	3.419.789.812.825,19	3.653.938.156.214,07	3.855.203.051.882,02	3.919.736.776.772,00	4.563.567.331.655,12
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit Riil	119.762.452.305,32	405.366.252.062,57	180.580.578.212,87	- 1.040.760.000,00	- 586.295.902.519,39

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Jika melihat pada SILPA, selama ini sumber SILPA Provinsi Kepulauan Riau merupakan Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya dan Penerimaan Kembali Piutang dan juga penggunaan SILPa taun lalu. Secara lebih rinci berikut disajikan data sumber dari SILPA.

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	119.762		405,366		64.513		170.514		388.950	
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	80.217	66,98%	285.512	70,43%	0		106.509	62,20%	75.000	19,42%
Pinjaman Dalam Negeri	0		0	-	-		0		142.781	36,71%
Penggunaan SILPa taun lalu	39.427	32,92%	119.762	29,55	64.673	99,94%	64.412	37,78%	170.514	43,84%
Penerimaan Kembali Piutang	117	0,10%	90.951	0,02%	40	0,06%	41.733	0,02%	104	0,03%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah



yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2026. Pandemi *Covid-19* telah berhasil dilalui, sehingga ruang fiskal yang diprediksi menyempit pada RPJMD 2021-2026, oleh karena itu dalam perubahan RPJMD ini ruang fiskal diprediksi lebih leluasa dikarenakan penerimaan daerah baik dari usaha sendiri maupun transfer dari pemerintah Pusat, namun yang menjadi titik perhatian adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dalam kedua regulasi tersebut memberikan mandat bahwa transfer yang diberikan Pemerintah Pusat difokuskan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi prioritas nasional dan tentunya tidak meninggalkan prinsip akuntabilitas dalam kinerja pembangunan.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2023 hingga 2026.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Sejak tahun 2021, penyusunan RKPD dan APBD tahun 2021 telah memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:



1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan di bidang keuangan negara terutama dalam kaitannya pemantapan pemulihan ekonomi.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2018 hingga 2023 (APBD) yang disesuaikan dengan mempertimbangkan target-target keuangan lainnya. Selain itu skenario proyeksi juga dibuat berdasarkan skenario moderat. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau ini bisa mendekati proyeksi yang logis dan tidak over expenditure dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai. Selain itu proyeksi yang dilakukan juga memperhatikan target keuangan daerah sebagaimana telah ditetapkan pada APBD 2023.

Dalam penyajian masing-masing proyeksi akan tetap disajikan penetapan proyeksi yang telah ditetapkan dalam RPJMD, namun pada Perubahan RPJMD yaitu pada tahun 2021-2022 menggunakan hasil realisasi APBD, dan tahun 2023 menggunakan penetapan dalam APBD sedangkan 2024-2026 merupakan hasil analisa dan proyeksi dengan tetap memperhatikan penetapan asumsi dalam RKPD tahun 2024.



1. Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksikan pendapatan, fokus akan diberikan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan memerhatikan bahwa kondisi keuangan lokal secara umum pada tahun 2022, tren yang terjadi adalah peningkatan dalam beberapa komponen PAD yang sebelumnya pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis (berdasarkan tahun 2018). Komponen yang mengalami kenaikan ini adalah Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, meskipun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah belum dapat tumbuh secara baik di tahun 2022 seluruh komponen diprediksi kembali pada posisi sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar, baik dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditargetkan secara relatif tetap (flat) mengingat kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih, sehingga berpotensi mengganggu kapasitas dana transfer pemerintah pusat yang dapat disalurkan ke daerah. Adapun proyeksi secara umum menggunakan tahun dasar realisasi tahun 2022 dengan melihat target APBD tahun 2023 dan APBD tahun 2024.

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan menjadi Rp.4.233.144.570.880,- yang didongkrak oleh pertumbuhan PAD dan Transfer Pemerintah Pusat. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, pencapaian tersebut akan didongkrak dengan cukup signifikan dari pendapatan pajak daerah yang ditargetkan mampu tumbuh signifikan mencapai Rp.1.545.813.725.463,- di Tahun 2024, dan menjadi Rp.1.528.465.507.557,- pada Tahun 2026. Pada sub komponen lain yaitu retribusi daerah peningkatan terjadi pada tahun 2026 menjadi Rp.148.166.139.448,- dari yang sebelumnya mengalami penurunan menjadi Rp. 140.904.656.617,- di tahun 2025. Sub komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami kondisi yang sama mengalami peningkatan di Tahun 2025, sedangkan pada lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan di Tahun 2025 dan 2026.



Mempertimbangan beberapa faktor seperti perkembangan geopolitik internasional yang belum stabil akibat perang Ukraina dengan Rusia, kegiatan lobi internasional Indonesia kepada perusahaan global yang belum membuahkan kesepakatan FDI di Indonesia, dan akan digelarnya Pemilu dan Pilukada Tahun 2024, maka perekonomian nasional berpotensi mengalami perlambatan hingga beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu, skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2026 mengalami peningkatan menjadi Rp.2.460.415.837.264,- setelah mengalami penurunan pada Tahun 2025 menjadi Rp.2.374.073.357.801,- hal ini mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pilukada Tahun 2024 sudah selesai sehingga iklim investasi semakin membaik dan pertumbuhan ekonomi juga akan berimbah positif.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (dalam jutaan)

No	Uraian	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target RPJMD Murni			Proyeksi Pertumbu- han	Proyeksi Perubahan RPJMD		
					2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	PENDAPATAN	3.854.182	3.644.669	4.046.077	3.862.826	4.062.465	4.279.016	2%	4.216.352	4.113.774	4,233,144
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.436.072	1.444.560	1.640.587	1.379.722	1.455.993	1.542.009	3%	1.791.866	1.738.364	1.799.878
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.074.270	1.285.015	1.498.733	1.225.458	1.289.550	1.357.130	1%	1.545.813	1.501.432	1.528.465
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	207.569	10.461	1.498.733	18.900	20.676	25.012	275%	18.658	140.904	148.166
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	53.035	2.490	14.909	12.400	15.500	22.700	205%	26.500	41.745	52.100
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.197	146.592	8.300	122.963	140.255	137.166	78%	200.894	69.281	71.146
01.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.390.535	2.198.844	2.404.210	2.481.714	2.605.003	2.735.474	2%	2.423.162	2.374.073	2.460.415
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.390.535	2.198.844	2.446.978	2.481.714	2.605.003	2.735.474	1%	2.423.162	2.359.073	2.460.415
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.390.535	2.198.844	2.446.978	2.428.793	2.457.848	2.673.747	1%	2.423.162	2.359.073	2.460.415
1.2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-	-	769.027	-	-



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

No	Uraian	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target RPJMD Murni			Proyeksi Pertumbu- han	Proyeksi Perubahan RPJMD		
					2024	2025	2026		2024	2025	2026
1.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	1.177.919	-	-
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-	-	-	160.607	-	-
1.2.1.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	-	-	-	-	307.296	-	-
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	52.920	57.154	61.726	-	8.311	-	-
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Dana Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.573	1.265	1.278	1.390	1.459	1.532	2%	1.324	1.337	1.350



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Uraian	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target RPJMD Murni			Proyeksi Pertumbu- han	Proyeksi Perubahan RPJMD		
					2024	2025	2026		2024	2025	2026
01.03.01	Pendapatan Hibah	1.201	1.265	1.278	1.390	1.459	1.532	2%	1.324	1.337	1.350
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	Pendapatan Lainnya	26.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Seperti yang terlihat pada tabel III.17 di atas, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan diantaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan, disisi lain yang perlu dilakukan adalah penyusunan kebutuhan regulasi daerah yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan sumber dan objek pajak dan retribusi daerah;
- b. Optimalisasi modernisasi berbasis teknologi dan sistem informasi pada kantor SAMSAT sebagai salah satu upaya menyesuaikan kebutuhan dan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di daerah;
- c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
- d. Pemberian Reward dan Punishment.
 - 1) Pemberian Reward dapat berupa:
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah Terbaik;
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;
 - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemerintah Provinsi.
 - 2) Pemberian Punishment, berupa sanksi bagi WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.



- e. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- f. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka;
- g. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak;
- h. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi;
- i. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- j. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan peningkatan upaya penyesuaian kinerja dan akuntabilitas kinerja pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- k. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya;
- l. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.



2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban dalam penggunaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari urusan



wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Belanja daerah diupayakan untuk mencapai prioritas nasional sebagai bagian dari bentuk dukungan atas kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
- d. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi.

Rencana anggaran belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai



dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun anggaran 2022, anggaran belanja Provinsi Kepulauan Riau terealisasi sebesar Rp. 3,9 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,7 triliun, belanja modal sebesar Rp.580 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp675 miliar. Pada tahun anggaran 2024-2026, anggaran belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau diproyeksikan mengalami perubahan dari penargetan yang ditentukan dalam RPJMD murni, di mana pada Tahun 2024 total belanja diproyeksikan sebesar Rp.4,3 triliun kemudian Tahun 2025 sebesar Rp.4,2 triliun dan Tahun 2026 menjadi Rp.4,4 triliun.



Tabel 3.17
Proyeksi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Prognosis 2023	Target RPJMD Murni			Proyeksi Pertumbuh an	Proyeksi Perubahan RPJMD		
					2024	2025	2026		2024	2025	2026
5	Belanja	3.918.696	3.977.271	4.459.353	3.099.532	3.305.146	3.491.504	-0,15%	4.344.939	4.263.774	4.413.144
5.1	Belanja Operasi	2.940.216	2.719.719	3.000.922	2.515.228	2.693.065	2.849.968	4%	3.251.525	3.177.626	3.356.124
5.1.1	Belanja pegawai	974.785	1.033.407	1.139.198	1.352.399	1.449.366	1.553.285	2%	1.286.421	1.325.014	1.364.764
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.444.382	1.430.736	1.453.538	695.366	749.016	797.624	15%	1.565.078	1.460.047	1.503.849
5.1.3	Belanja Bunga		2.500	13.141				-23%	4.680	2.000	2,000
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	5.139				12%	3.374	5.000	5.000
5.1.5	Belanja Hibah	519.604	249.256	381.623				-16%	386.541	378.004	471.088
	Belanja Biaya Provisi	1.040						-			
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.444	3.819	8.280	462.779	489.675	493.725	-14%	5.428	7.560	9.421
5.2	Belanja Modal	377.456	580.852	662.270				4%	342.537	747.165	717.043
5.2.1	Belanja Modal Tanah	49.100	8.763	3.950				83%	1.194	5.000	5,000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.756	171.942	209.210				-25%	104.269	120.000	123.566



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Prognosis	Target RPJMD Murni			Proyeksi Pertumbuh an	Proyeksi Perubahan RPJMD		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.348	191.452	260.877				11%	169.792	316.155	282.468
5.2.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	100.439	204.485	185.411				51%	46.679	300.000	300,000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.581	3.609	535				62%	18.601	3.009	3.009
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	230	600	2.284				-12%	2.000	3.000	3.000
	Belanja Modal BLUD			-	-	-	-	-			
	Belanja Modal BOS	-		-	-	-	-	-			
5.3	Belanja Tak Terduga	28.454	709	7.185	2.696	2.697	2.699	29%	20.000	2.000	2.000
5.3.1	Belanja Tak Terduga	28.454	709	7.185	2.696	2.697	2.699	29%	20.000	2.000	2.000
5.4	Transfer	572.568	675.990	788.975	581.608	609.382	638.837	-20%	730.876	336.983	337.977
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	553.868	654.199	780.575	572.439	601.323	631.753	-21%	728.676	334.783	335.777
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah			-							
	Transfer Bantuan Keuangan	18.700	21.790	8.400	9.168	8.059	7.083	313%	2.200	2.200	2.200
	Transfer Bantuan Keuangan Ke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Prognosis 2023	Target RPJMD Murni			Proyeksi Pertumbuh an	Proyeksi Perubahan RPJMD		
					2024	2025	2026		2024	2025	2026
	Pemerintah Daerah										
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan: * disamakan dengan realisasi anggaran Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi komponen Belanja Operasi, khususnya belanja pegawai telah ditargetkan naik 3% per tahun. Kenaikan belanja pegawai tersebut bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai.

Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.18
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI	Proyeksi	Proyeksi			
		2022	Pertumbuhan	2023	2024	2025	2026
	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.396.419	-1%	3.863.235	4.002.402	3.516.610	3.696.101
	Belanja Operasi	2.719.719	4%	3.000.922	3.251.526	3.177.626	3.356.124
	Belanja pegawai	1.033.407	2%	1.139.198	1.286.421	1.325.014	1.364.764
	Belanja Barang dan Jasa		15%	1.453.538	1.565.078	1.460.047	1.503.849
	Belanja Bunga	1.430.736	-23%	13.141	4.680	2.000	2.000
	Belanja Subsidi	2.500	12%	5.139	3.374	5.000	5.000
	Belanja Hibah		-16%	381.623	386.541	378.004	471.088
	Belanja Biaya Provisi	249.256	0%	-	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial	3.819	-14%	8.280	5.428	7.560	9.421



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

No	Uraian	REALISASI	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi			
		2022		2023	2024	2025	2026
	Belanja Tak Terduga	709	29%	7.185	20.000	2.000	2.000
	Belanja Tak Terduga	709	29%	7.185	20.000	2000	2000
	Transfer	675.990	-20%	788.975	730.876	336.983	337.977
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	654.199	-3%	780.575	728.676	334.783	335.777
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	21.790	-	-	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan	675.990	313%	8.400	2.200	2.200	2.200
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	0	0	0



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

No	Uraian	REALISASI	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi			
		2022		2023	2024	2025	2026
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-		0	0	0
	Pengeluaran Pembiayaan	-	0%	66.152	92.053	0	0
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	0%	66.152	92.053	0	0

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Sedangkan arah kebijakan pada belanja daerah pada tahun 2021-2026 terutama pada kaitannya pelaksanaan belanja 2024-2026, meliputi:

- a. Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju kondisi sebelum Pandemi *Covid-19*;
- b. Pemenuhan SPM dan SDG's;
- c. Dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- d. Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian berkelanjutan;
- e. Prioritas belanja untuk mendukung visi, misi dan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur;
- f. Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
- g. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
- h. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
- i. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
- j. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.



3. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, pengembalian investasi non permanen, maupun pencairan dana cadangan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah penyertaan modal, pengembalian pokok hutang dan Pembentukan Dana Cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah diproyeksikan berbeda dengan RPJMD sebelum perubahan di mana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp 220,639 miliar kemudian direncanakan akan memiliki kenaikan SILPa pada Tahun 2025 dan Tahun 2026 yaitu masing-masing sebesar 150 miliar dan 180 miliar.

Dalam hal terjadinya defisit anggaran, maka harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito.
- b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit serta penekanan efisiensi belanja program.



Sehingga untuk menutup defisit maka akan dilakukan pertama adalah efisiensi dan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.19
Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Uraian	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target RPJMD Murni			Proyeksi Pertumbu- han	Proyeksi Perubahan RPJMD		
					2024	2025	2026		2024	2025	2026
6	Pembiayaan	64.513	332.601	339.353	83.224	88.350	94.635	48%	128.586	150.000	180.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	64.513	332.601	405.506	83.224	88.350	94.635	7%	220.639	150.000	180.000
6.1.1	Penggunaan SILPA	64.513	170.514	388.950	83.224	88.350	94.635	7%	220.639	150.000	180.000
6.1.2	Pinjaman Dalam Negeri	-	162.087	16.556	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	66.152	-	-	-	0%	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	66.152	-	-	-	49%	92.053	-	-
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	339.353	-	-	-	0%	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	405.506	-	-	-	0%	92.053	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021 hingga 2026 diproyeksi mengalami tren fluktuasi yang relatif meningkat. Untuk itu prioritas belanja harus diefektivkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 3.20
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	APBD 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.633.344	4.086.494	4.216.352	4.113.774	4,233,145
2	Penerimaan Pembiayaan	332.601	405.506	220.639	150.000	180.000
	TOTAL PENERIMAAN	3.965.935	4.492.000	4.436.991	4.263.774	4.413.144
	<i>(Dikurangi):</i>					
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.385.082	3.831.496	4.094.454	3.516.610	3.696.101
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	580.853	660.504	342.537	747.164	717.043

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Perlu dipahami bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda.

Sebelum diterbitkannya beberapa aturan di atas, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda. Untuk itu agar tidak terjadi bias, maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagai dasar penentuan plafon anggaran program seluruh OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:



Tabel 3.21
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023-2026

No.	Uraian	APBD 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.633.334.360.605	4.086.494.146.918	4.216.352.903.217	4.113.774.996.035	4.233.144.570.878
2	Penerimaan Pembiayaan	332.601.648.531	405.506.594.892	220.639.929.487	150.000.000.000	180.000.000.000
	Kapasitas Riil Pagu OPD	3.965.936.009.136	4.424.848.141.271	4.436.992.832.704	4.263.774.996.035	4.413.144.570.878

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dengan pencapaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau saat ini, permasalahan dan tantangan pembangunan akan selalu muncul. Sementara itu, dari hasil capaian pembangunan yang masih belum maksimal menunjukkan adanya kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan itu, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang kemudian disimpulkan menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Selain permasalahan, dalam pembangunan perlu memperhatikan berbagai kajian dan penelaahan sebagai dasar dalam perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan adalah isu regional, nasional, maupun internasional yang menjadi suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat.

Setiap peluang yang memungkinkan timbulnya akselerasi dalam capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sebagai perwujudan misi atau upaya yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis



adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program pembangunan daerah. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, yakni: **“Belum optimalnya pemerataan pembangunan Kepulauan Riau yang berkelanjutan”**.

Permasalahan utama pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kemaritiman untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan;
2. Belum optimalnya kinerja tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing
5. Belum optimalnya pelestarian budaya yang terimplementasi dalam kehidupan masyarakat dan identitas pembangunan; serta
6. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kepulauan Riau dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar IV.1
Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Provinsi Kepulauan Riau



Berikut penjabaran keenam permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Kemaritiman Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut dipahami oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah, terkhusus dalam mengembangkan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.



Melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau pada tahun 2022 merupakan tahun dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Tingginya capaian perekonomian ini merupakan titik balik dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga mencapai -3,80 persen. Adapun industri pengolahan sebagai kategori yang memiliki dominasi struktur ekonomi juga mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di angka 4,55 persen. Memahami tabel IV.1 terlihat bahwa pada kategori pertambangan dan penggalian, terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sektoral hingga -7,00 hal ini sebagai dampak kondisi global yang belum menentu, khususnya dampak geopolitik pada krisis Rusia-Ukraina. Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga relatif menurun menjadi -0,02 di tahun 2022.

Tabel IV.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

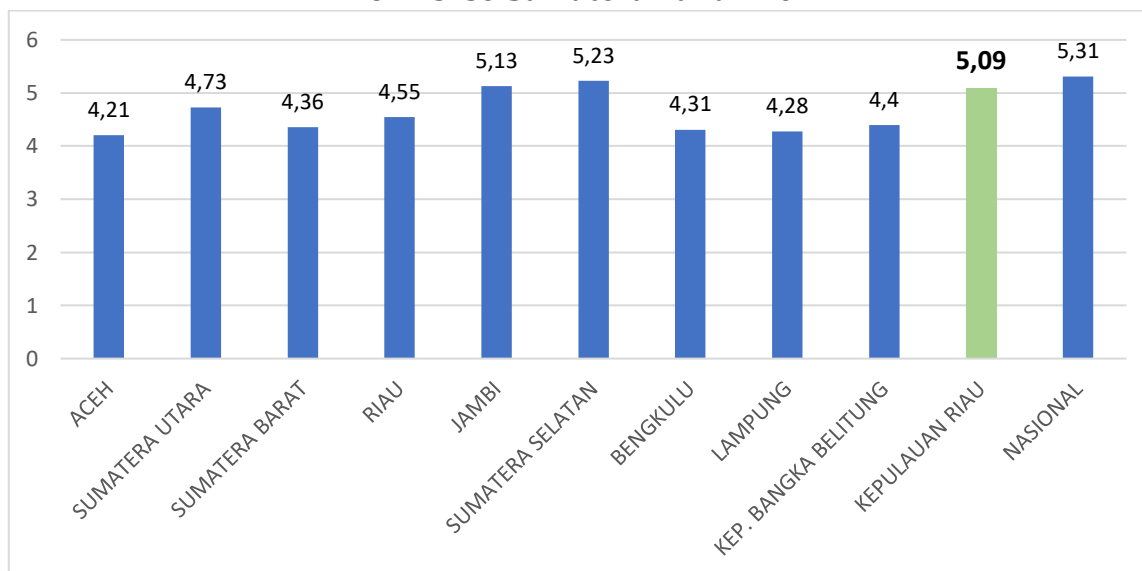
Kategori	Uraian	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3,16	-0,7	-4,39	-2,65	3,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1,35	0,09	-4,17	-0,74	-7,00
C	Industri Pengolahan	4,14	6,25	3,25	6,45	4,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,32	3,3	-4,38	4,32	16,38
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,07	-0,06	-2,78	0,01	8,82
F	Konstruksi	7,93	8,23	-6,4	4,74	5,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6,28	6,1	-12,72	1,07	13,59
H	Transportasi dan Pergudangan	0,91	-8,87	-40,23	-1,7	38,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,17	9,95	-41,01	-6,69	49,71
J	Informasi dan Komunikasi	10,71	11,84	16,55	959	8,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,77	4,82	-3,1	0,73	4,17
L	Real Estate	-0,27	0,12	-8,33	-3,56	4,64
M,N	Jasa Perusahaan	6,84	-8,82	-41,88	14,14	10,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7	1,52	7,97	-8,42	3,36
P	Jasa Pendidikan	1,32	0,44	-8,2	-3,38	3,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,04	2,78	-2,05	12,3	-0,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	18,4	0,86	-68,83	-3,4	69,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,47	4,83	-3,80	3,43	5,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi daerah akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan pembangunan ekonomi daerah juga memberikan dampak yang positif bagi daerah tetangga, dikarenakan hal ini berkaitan dengan adanya besarnya peluang investasi yang akan tercipta. Dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2020 dan 2021, namun jika kita melihat angka LPE nasional sebesar 5,31 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. Kemudian jika kita melihat capaian dari beberapa daerah tetangga selevel Provinsi, maka capaian ekonomi Kepulauan Riau masih dibawah dari Provinsi Jambi sebesar 5,13 dan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini, perlu adanya peningkatan pada sektor-sektor unggulan dan sector yang belum optimal pertumbuhannya di Kepulauan Riau.

Gambar IV.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi se-Sumatera Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya investasi yang masuk, investasi sangat berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Investasi juga mampu memberikan “angin segar” kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya dan kesejahteraanya. Memahami hal tersebut, perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Riau kian menggeliat, hal ini terlihat pada triwulan IV tahun 2022 realisasi investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.1,061 triliun dengan 914 proyek. Sedangkan dari Penanaman Modal Asing (PMA) terealisasi sebesar USD 273,9 juta dengan 576 proyek. Dengan realiasasi investasi PMDN dan PMA pada triwulan IV tersebut, total realisasi investasi di Kepulauan Riau sepanjang tahun 2022 dalam bentuk PMDN sebesar Rp4,817 triliun dengan 3.343 proyek dan dalam bentuk PMA mencapai USD 934 juta dengan 2.144 proyek dan jika ditotal mencapai Rp.18,220 triliun dengan 5.487 proyek.

Berdasarkan dari catatan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bahwa Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat 13 realisasi investasi PMA dari 34 Provinsi Indonesia dan peringkat 20 untuk realisasi investasi PMDN. Dengan ini terlihat bahwa ada penurunan peringkat realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau, ini artinya ada kecenderungan investor mulai melirik daerah lain selain Provinsi Kepulauan Riau atau secara daya Tarik Kepulauan Riau dianggap sudah tidak begitu menarik lagi di mata investor. Salah satu kendala dalam berinvestasi di Kepulauan Riau adalah adanya masalah lahan yang masih dirasa sulit didapat oleh investor, dengan masih adanya persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan. Begitu pula adanya aturan yang masih berubah-ubah dan tumpang tindih, serta ego sektoral lembaga yang mengurus perizinan sehingga masih membuat investor kesulitan dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonominya saja, namun harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Seringnya pembangunan dilaksanakan tanpa memperhatikan kondisi dampak lingkungannya. Memahami bahwa Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dengan dominasi wilayah kelautan, maka pembangunan industri yang memiliki limbah ataupun limbah-limbah domestik akan sangat berbahaya jika tidak diolah dengan semestinya seperti langsung dilarung ke ke laut atau ke sungai. Dengan tingginya kapasitas industri pengolahan yang ada, pemerintah daerah harus mengetatkan pengawasan terkait limbah-limbah industri yang berbahaya. Berdasarkan indeks kualitas air yang mencapai angka 56,79 di tahun 2022, Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi dengan capaian 40 persen, dan penanganan sampah dengan capaian 72,42, terindikasi adanya potensi ancaman dan kerusakan kualitas lingkungan hidup yang jika perencanaan, penjagaan, dan pengawasan tidak dilakukan dengan baik dalam pembangunan di masa mendatang.

Tabel IV.2.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	n/a	100	50
2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	n/a	76,1	85,56
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	54	56,6	56,79
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	90,59	88,14	90,27



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,06	59,07	58
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0	0	0
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	20	26,67	40
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	100	100
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	0	28,57	42,85
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	83,33	57,14	100
12	Persentase Pengurangan Sampah	%	22	24	14,82
13	Persentase Penanganan Sampah	%	75	74	72,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

2. Belum Optimalnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat empat indikator pengukuran yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Kinerja **“tata kelola pemerintahan yang baik”** di lingkungan Pemerintahan Kepulauan Riau belum sepenuhnya terwujud berdasarkan indikator pengukur pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kepulauan Riau di tahun 2022 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,66, indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik dengan predikat A-, kemudian nilai sakin dengan predikat BB. Seluruh indikator yang telah disebutkan ini menunjukkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan Kepulauan Riau masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam akuntabilitas kinerja pelayanan publik dan kualitas perencanaan serta integrasinya. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan kinerja Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dapat meningkat melalui kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pelayanan publik pada dasarnya tidak hanya pada bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan saja namun juga dalam urusan kebencanaan. Capaian Indeks Kapasitas Daerah terkait bencana di Kepulauan Riau pada tahun 2022 adalah sebesar 0,4 dengan Skor Nilai Prioritas Pencegahan sebesar 2,36, Skor Nilai Prioritas penguatan sistem pemulihan bencana sebesar 0,31, sementara itu Skor Nilai Prioritas Penguatan



Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan capaian sebesar 0,27 ditahun 2022. Dengan data tersebut perlu adanya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang besar melanda Kepulauan Riau.

3. Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan penyelenggaraan pembangunan, baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Tingkat capaian kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angka kemiskinan, indeks gini dan pengangguran. Angka kemiskinan pada suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran baik makanan maupun non makanan di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu untuk dapat melihat penduduk masyarakat yang sejahtera, persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan atau dianggap penduduk tidak miskin dapat dijadikan acuan.

Berdasarkan data angka kemiskinan, ditemukan peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai angka 151,68 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,24 persen. Jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,12 persen, terjadi peningkatan dalam jumlah penduduk miskin. Kondisi yang menjadi perhatian pemerintah ini, kemudian ditambah dengan fluktuatifnya indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan dengan angka masing-masing pada tahun 2022 adalah sebesar 1,05 dan 0,25, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

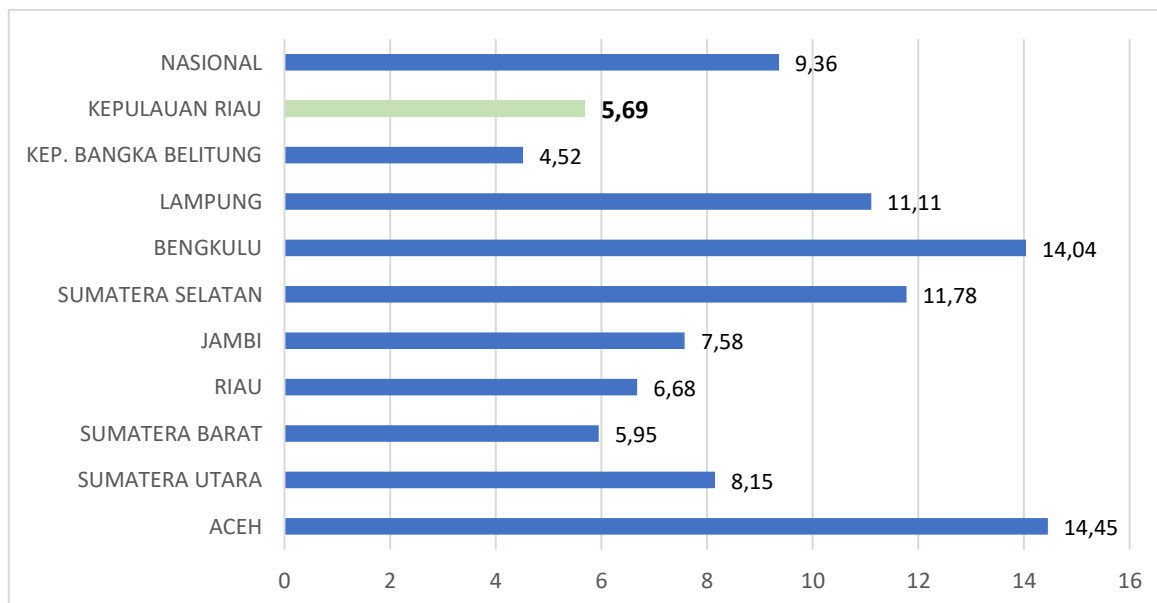
Tabel IV.3.
Karakteristik Kemiskinan Kepulauan Riau
Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	131,68	128,46	131,97	144,46	151,68
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,2	5,9	5,92	6,12	6,03 (September)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,00	0,69	1,11	1,07	1,05
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,24	0,12	0,28	0,28	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Jika dibandingkan, angka kemiskinan di Kepulauan Riau lebih rendah daripada Nasional (9,36). Begitu pula pada tahun 2023, angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini menunjukkan indikasi bahwa Provinsi Kepulauan Riau masih dapat meningkatkan kinerja terutama dalam pengentasan kemiskinan.

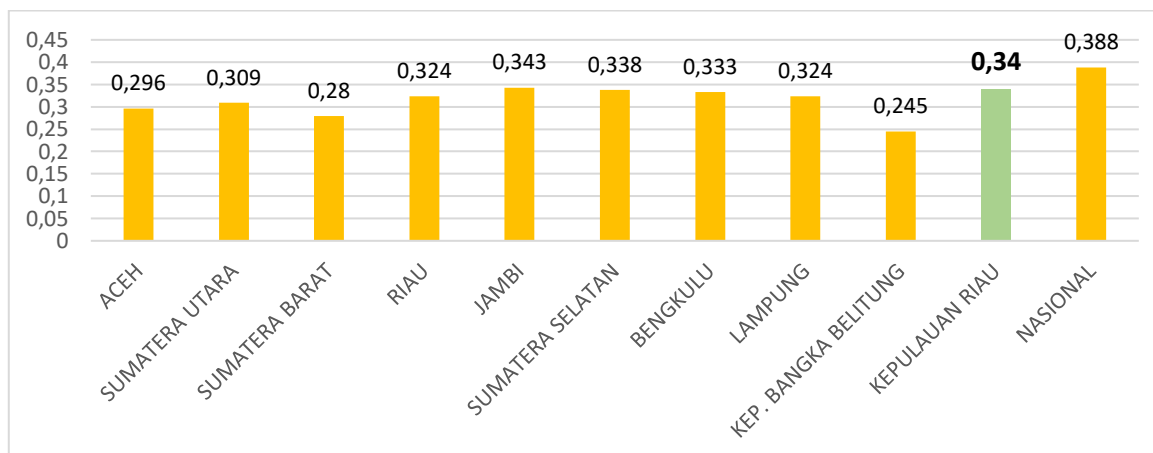
Gambar IV.3
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Provinsi Terdekat Kepulauan Riau Tahun 2023 (bulan Maret)



Kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan. Secara umum, kondisi indeks gini di Kepulauan Riau mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa pemerataan kehidupan kesejahteraan masyarakat telah lebih baik. Kesenjangan sosial ekonomi sempat meningkat pada tahun 2021 di mana indeks gini mencapai angka 0,339. Meski demikian pada tahun pada tahun 2022 kembali menurun hingga 0,325 dengan kategori moderat. Pola fluktuasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena menjadi salah satu *early warning* bahwa masyarakat mengalami kerentanan dalam kesenjangan kehidupan, khususnya terkait kesejahteraan.

Pemahaman lebih mendalam bisa diperoleh melalui cara membandingkan capaian indeks gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi daerah sekitar. Upaya ini memperlihatkan bahwa capaian indeks gini Kepulauan Riau masih berada di bawah Provinsi Riau dengan capaian sebesar 0,324 dan Provinsi Kepulauan Belitung dengan capaian sebesar 0,245. Dengan begitu, capaian ini perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan strategis dan mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan, sekaligus mencegah melebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

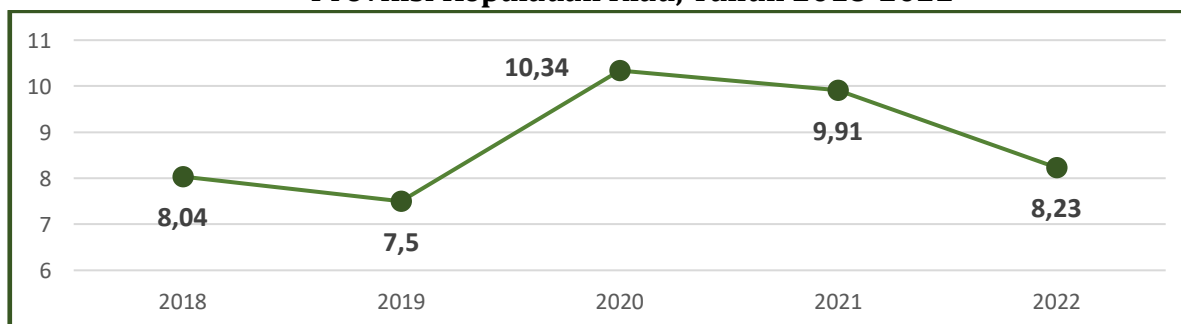
Gambar IV.4
Perbandingan Indeks Gini
Provinsi Terdekat Kepulauan Riau Tahun 2023 (Bulan Maret)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat ataupun besarnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Secara umum, pembangunan ketenagakerjaan Kepulauan Riau memiliki progress yang positif yang terlihat dari beberapa capaian kinerja, khususnya angka pengangguran yang menurun pada tahun 2022 menjadi 8,23 persen jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,91 persen. Adapun dari potensi tenaga kerja yang juga meningkat di mana partisipasi angkatan kerja menanjak menjadi 68,94 yang menunjukkan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Gambar IV.5
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022

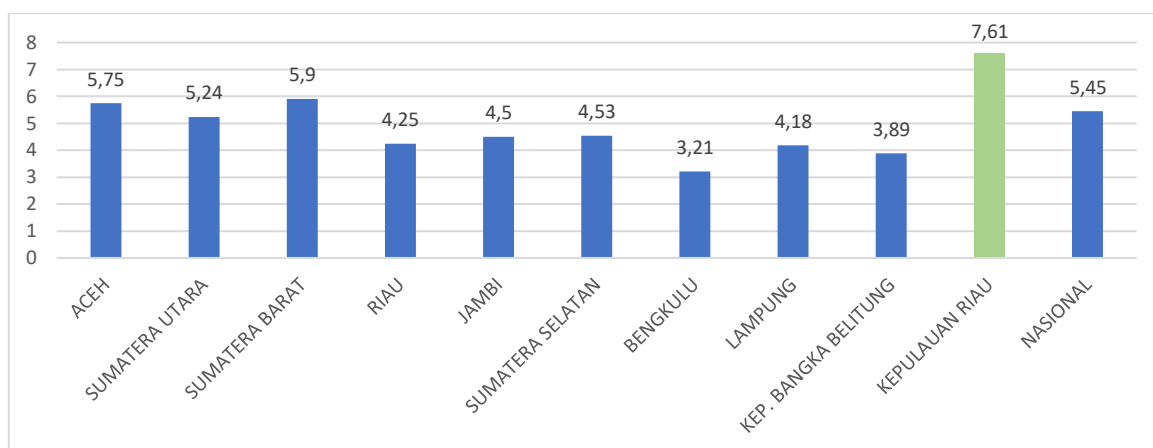


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai data di atas, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kepulauan Riau terlihat mempunyai progres yang positif. Meskipun capaian tingkat pengangguran di

Kepulauan Riau masih berada di bawah angka Nasional yaitu 5,45 persen di tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan beberapa daerah sekitar selevel Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian 3,89, Provinsi Riau sebesar 4,25, Provinsi Jambi dengan capaian 4,5. Mengetahui hal tersebut, Provinsi Kepulauan Riau perlu menyusun kebijakan yang mampu mempercepat dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Gambar IV.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumsatera Tahun 2023 (Bulan Februari)

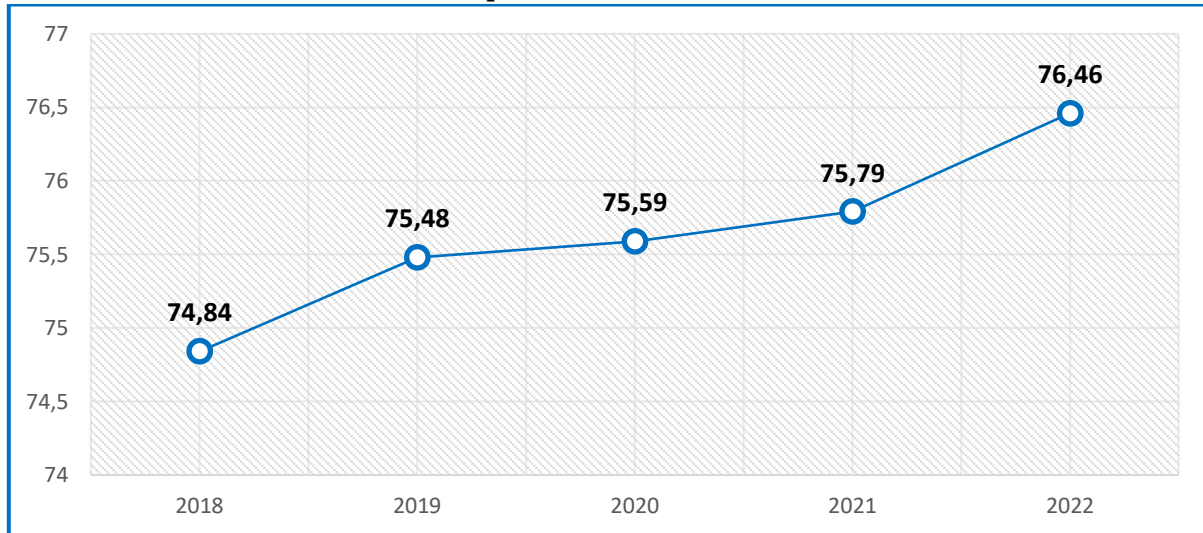


4. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber daya Manusia yang berdaya saing merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi atau kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas daya saing SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM mengandung komponen/elemen penting yang digunakan sebagai tolok ukur pembangunan manusia yaitu terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat.

Secara umum, pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau meningkat cukup signifikan semenjak tahun 2018 dengan capaian IPM sebesar 74,84 hingga tahun 2022 menjadi sebesar 76,46 sebagaimana yang ditunjukkan melalui gambar berikut ini.

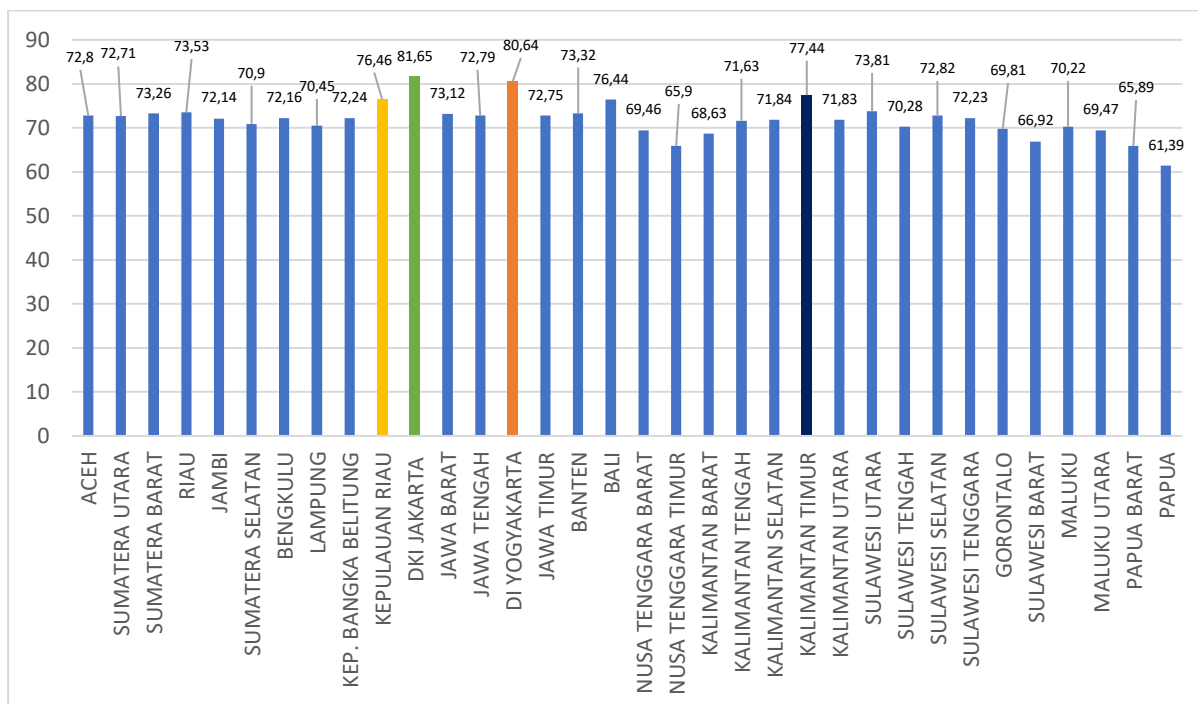
Gambar IV.7
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Capaian pembangunan IPM Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 76,46 tersebut melebihi capaian IPM Nasional yaitu 72,91. Jika dilihat pada lingkup Provinsi sepulau Sumatera capaian IPM Kepulauan Riau berada di peringkat pertama. Meski demikian, jika dibandingkan dengan seluruh Provinsi di Indonesia, nilai IPM Kepulauan Riau masih berada di bawah capaian IPM Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai sebesar 80,64, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IPM sebesar 81,65 dan Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 77,44. Melihat kondisi ini masih perlu adanya peningkatan pembangunan dalam berdasarkan capaian IPM.

Gambar IV.8
Perbandingan IPM
Provinsi se-Indonesia Tahun 2022

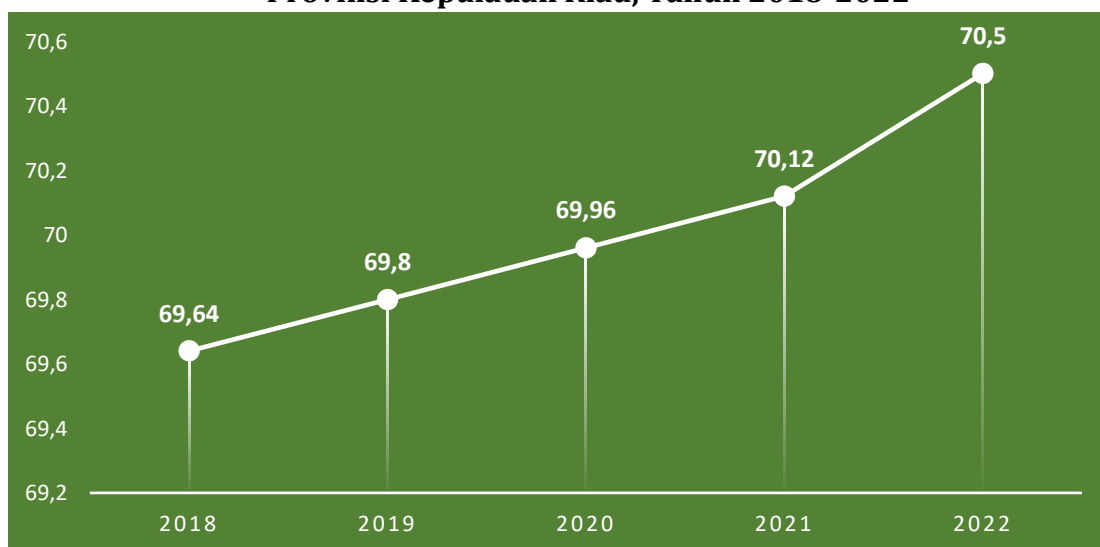


Berdasarkan data yang ada, capaian pembangunan terkait APS SMK/SMA Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sebesar 84,54 dan rasio guru SMA/SMK mencapai nilai 88,89. Kondisi ini masih membutuhkan optimalisasi dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan pelayanan dan pengembangan bidang Pendidikan agar mampu mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Selain itu, juga masih dibutuhkan oleh para pendidik dan pelajar di luar kewenangan Provinsi berupa pembinaan dalam bentuk insentif dan bantuan pendidikan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan di Kepulauan Riau terlihat pada indikator capaian pembangunan Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari capaian angka harapan hidup Kepulauan Riau terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki kendala dalam aksesibilitas wilayah, peningkatan ini merupakan prestasi dan kondisi ini harus terus diupayakan melalui program strategis pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal cakupan dan pemerataan layanan kesehatan. Angka harapan hidup Kepulauan Riau meningkat hingga mencapai 70,50 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2022, akan memiliki kesempatan hidup hingga berumur 70-71 tahun.

Gambar IV.9
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2018-2022



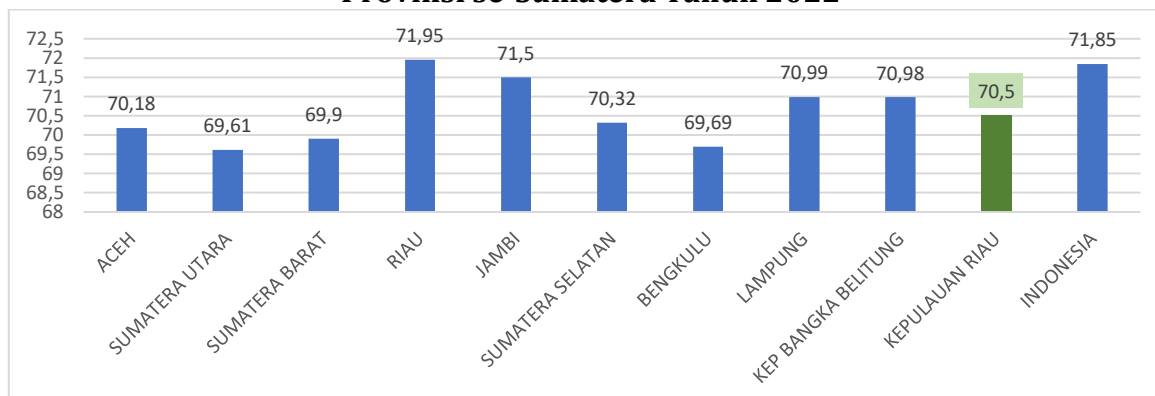
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Capaian angka harapan hidup Kepulauan Riau tahun 2018-2022, menunjukkan peningkatan yang progresif pada tiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan capaian Angka Harapan Hidup Provinsi pulau Sumatera terlihat capaian AHH Kepulauan Riau masih di bawah nasional dan beberapa daerah lain seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Riau. Mengetahui hal ini perlu perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, salah satunya yaitu melalui ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan. Ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan para medis termasuk tenaga pengajar yang berasal dari SDM kesehatan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan capaian Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau.



Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat juga membutuhkan kolaborasi antar bidang, kepada masyarakat merupakan salah satu upaya preventif dalam mengejar ketercapaian Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih baik. Disadari bahwa pemahaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan belum merata, karenanya upaya yang telah dilakukan saat ini di tingkat desa dan kelurahan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Provinsi. Upaya mendorong dan memfasilitasi kolaborasi kerja pemerintah bersama masyarakat dapat membangun kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri dilakukan fasilitasi terhadap pendamping keluarga.

Gambar IV.10
Perbandingan Angka Harapan Hidup
Provinsi se-Sumatera Tahun 2022



5. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya yang Terimplementasi dalam Kehidupan Masyarakat dan Identitas Pembangunan

Masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia cenderung memiliki etika dan perilaku yang baik terhadap sesama. Hal ini sangat mendukung dalam hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial yang ada dalam masyarakat jika tidak memahami budaya dan agama akan memicu konflik sosial. Dengan hal ini perlu adanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka pelestarian kebudayaan Melayu dan stabilitas sosial. Hal ini diperkuat dengan nilai-nilai budaya yang mulai terkikis dan tergeser dengan adanya budaya dari luar yang mampu merubah cara pandang masyarakat. Dengan melihat beberapa aspek penilaian dari ekonomi budaya dengan capaian 28,11 dan nilai budaya literasi sebesar 66,78 terlihat bahwa nilai tersebut cenderung masih lemah, selain itu Indeks Kerukunan Umat Beragama juga masih berada pada angka 85,78 di tahun 2022. Mengingat bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun politik dengan potensi ketegangan sosial yang tinggi. Menindaklanjuti hal tersebut maka perlu adanya penciptaan kondisi suasana yang aman, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan tentram. Dengan demikian harmonisasi masyarakat dalam rangka pelestarian kebudayaan Melayu dan stabilitas sosial perlu selalu dijaga. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengupayakan kebijakan yang mampu menggiring masyarakat menjaga kelestarian budaya lokal serta mempunyai kehidupan yang aman, nyaman dan tentram sehingga stabilitas sosial masyarakat dapat terjaga.

6. Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah

Infrastruktur adalah salah satu pendukung yang penting dalam pembangunan. Dengan infrastruktur pemukiman yang layak, masyarakat dapat hidup lebih sehat dan berkualitas. Dengan merujuk pada data terkait permukiman dari bab II, persentase RTLH yang dibenahi masih 0 persen. Selanjutnya persentase luas kawasan kumuh atas luas 10-15 ha yang ditangani baru terealisasi sebanyak 23,30 persen dari target 27,45 persen. Realisasi Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi juga masih 0 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan infrastruktur masih belum optimal.

Selanjutnya terkait dengan konektivitas, pembangunan jalan di Kepulauan Riau juga masih memiliki progress yang lambat. Hal ini terlihat pada capaian persentase jalan kondisi baik di tahun 2021 sebesar 61,75 persen dan pada tahun 2022 sebesar 76,55 persen. Hal ini perlu ditingkatkan, mengingat konektivitas yang baik akan mampu menarik investasi secara lebih cepat. Selain itu, pemerataan konektivitas di seluruh wilayah akan memperlancar arus barang dan orang. Dengan demikian produktivitas masyarakat akan meningkat, sehingga akan berdampak pada kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan penjabaran permasalahan pokok di atas, maka disimpulkan permasalahan daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4.
Permasalahan Pokok dan Permasalahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Belum optimalnya pemanfaatan potensi kemaritiman untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan	Tingginya potensi ancaman dan kerusakan kualitas lingkungan hidup
	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah dalam menopang perekonomian
	Belum pulihnya kondusivitas iklim investasi skala nasional dan internasional
Belum optimalnya kinerja tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan implementasinya
	Belum optimalnya akuntabilitas dan pelayanan publik terhadap masyarakat
	Belum optimalnya kapasitas tanggap bencana dan kondusivitas keamanan wilayah



PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan
	Belum optimalnya kapasitas angkatan kerja dan kualitas tenaga kerja dalam memenuhi pasar kerja
Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing	Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan kesehatan
	Belum optimalnya peningkatan kualitas Pendidikan
Belum optimalnya pelestarian budaya yang terimplementasi dalam kehidupan masyarakat dan identitas pembangunan	Belum optimalnya peningkatan daya saing masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia
Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah	Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
	Belum optimalnya konektivitas wilayah di seluruh Kepulauan Riau

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merujuk pada sejumlah masalah yang mendapat perhatian luas baik di tingkat internasional, nasional, maupun regional karena dampak yang krusial terhadap perkembangan daerah, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dalam konteks ini, penting bagi isu-isu strategis untuk menjadi dasar utama dalam penyusunan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat berlangsung secara terstruktur, tepat sasaran, dan efisien.

Penentuan isu-isu strategis yang menjadi prioritas untuk ditangani dan diantisipasi, akan memberikan keunggulan dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sebaliknya, mengabaikan isu-isu strategis dapat berpotensi menyebabkan kegagalan dalam berbagai tahap pembangunan daerah. Untuk merumuskan isu-isu strategis, langkah awal adalah mengidentifikasi beragam permasalahan pembangunan daerah yang memiliki dampak strategis dalam berbagai bidang, serta berpotensi memengaruhi agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan isu-isu strategis ini dapat mencakup masalah yang bersifat internasional, nasional dan regional, serta menggambarkan interkoneksi di antara isu-isu tersebut.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Masih berlanjutnya pandemi COVID-19 merupakan salah satu isu strategis global yang harus terus mendapatkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan, meskipun terdapat peningkatan dalam tingkat ketahanan kesehatan dan indikasi terkendalinya COVID-19, hingga saat ini, status endemi nasional belum ditetapkan oleh Pemerintah.

Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi ini. Namun, seiring dengan pelonggaran mobilitas yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah, sektor ekonomi mulai menunjukkan peningkatan kinerja. Di sisi lain, masyarakat telah mulai beradaptasi dengan gaya hidup baru dan penggunaan teknologi informasi semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan sektor-sektor pelayanan publik dan swasta untuk bertransisi dengan lebih cepat dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai hasilnya, perputaran ekonomi diharapkan akan semakin mendapatkan dorongan dari dampak penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas.

Selain isu strategis seputar pandemi COVID-19, terdapat pula isu-isu strategis internasional lain yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kepulauan Riau, yaitu:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan yang dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs) bukan merupakan kebijakan yang berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs melibatkan pengembangan konsep yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu perbedaan signifikan antara MDGs dan SDGs adalah peningkatan penekanan dan prioritas pada isu-isu lingkungan global dalam SDGs. Oleh karena itu, program SDGs merupakan hasil dari evaluasi atas perkembangan selama 15 tahun pelaksanaan program MDGs.

Konsep SDGs sangat penting sebagai kerangka pembangunan yang baru dan dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi pasca 2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi global. Perubahan ini mencakup isu-isu seperti penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin mendesak, perlindungan sosial, keamanan pangan dan energi, serta pembangunan yang lebih inklusif bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Dalam konsep pengembangan SDGs, ada tiga pilar utama yang menjadi indikator: pertama, indikator yang berkaitan dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan; kedua, indikator yang terkait dengan aspek sosial-ekonomi, seperti ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi; ketiga, indikator yang menyangkut aspek lingkungan yang lebih luas, termasuk ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator untuk SDGs, penting untuk mempertimbangkan standar global dalam menciptakan konsep pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua aspek dapat diukur, dan mematuhi prinsip-prinsip Keberlanjutan Lingkungan, Keberlanjutan Ekonomi, dan Keberlanjutan Sosial.

Secara global, ada 17 Tujuan (*Goals*) yang harus dicapai hingga tahun 2030 dalam kerangka SDGs, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumber daya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;

- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Perkembangan situasi ekonomi dan geopolitik dunia menunjukkan adanya tantangan yang serius. Pemulihan pasca Covid-19 masih berlangsung, sementara adanya konflik global, perubahan iklim, penurunan pasokan pangan dan energi di pasar global, inflasi tinggi di beberapa negara maju, serta peningkatan tingkat bunga dan penurunan nilai tukar rupiah menjadi indikasi kompleksitas tantangan global saat ini. Jika tantangan-tantangan ini berlanjut, mereka berpotensi memicu krisis ekonomi global pada tahun 2023.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak Pandemi Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi global, diperlukan kebijakan yang hati-hati, terutama yang dapat berdampak langsung pada kenaikan harga produk. Organisasi seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan perlambatan ekonomi yang signifikan di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara maju lainnya, bahkan mungkin menuju resesi pada tahun 2023. Meskipun negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia, diperkirakan tidak akan mengalami perlambatan ekonomi yang serius, penting untuk diingat bahwa perlambatan ekonomi di negara-negara besar dapat memiliki efek domino pada negara-negara berkembang. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah antisipasi harus diambil untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang dipercepat, sehingga tidak terpengaruh atau terhambat oleh situasi global yang tidak pasti.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat

kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Dampak dari *global warming* adalah konsekuensi dari degradasi ekosistem alam akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. *Global warming* dapat menyebabkan berbagai masalah serius seperti kekeringan, kelangkaan pangan, banjir, dan bencana alam lainnya. Karena dampak terhadap manusia dan lingkungan yang signifikan, sehingga penting bagi pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mengambil tindakan antisipatif terhadap isu global warming. Salah satu cara melakukannya adalah melalui perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Tujuannya adalah menjaga kelestarian alam sambil mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret yang telah diambil dalam menjaga kualitas lingkungan adalah melalui Persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang merupakan perjanjian internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau berpartisipasi dalam perdagangan emisi jika mereka mempertahankan atau meningkatkan emisi gas-gas tersebut, yang berkontribusi pada pemanasan global. Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)

Selain Protokol Kyoto, negara-negara di seluruh dunia yang merupakan anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) telah sepakat pada Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) pada pertemuan ke-21 pada bulan Desember 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celsius dan berusaha untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius di atas suhu pra-industri. Perjanjian Paris mencakup lima poin penting, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut terhadap Perjanjian Paris, Indonesia telah melakukan ratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Perjanjian Paris ini telah dijabarkan lebih lanjut melalui "*Katowice Climate Package*" yang memberikan panduan operasionalisasi perjanjian Paris. Implementasi perjanjian ini memerlukan tindak lanjut yang dilakukan secara global dan pada tingkat nasional, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, serta di tingkat kabupaten/kota hingga desa.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Pertumbuhan yang positif dalam industri teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sangat signifikan. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti perkembangan globalisasi, dengan

harapan dapat menghasilkan produk teknologi informasi dan komunikasi yang unggul.

Kedepannya, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk bersaing secara sehat di tingkat internasional. Jika hal ini tercapai, Indonesia tidak hanya akan mengandalkan teknologi dari luar negeri, tetapi juga mampu mengekspor teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan standar internasional. Untuk mencapai hal ini, berbagai infrastruktur IT perlu dipersiapkan dengan matang, termasuk pengembangan jaringan 4.0 yang telah mulai merata di seluruh wilayah Indonesia dan persiapan untuk pengembangan jaringan 5.0.

Pandemi COVID-19 juga telah secara tidak langsung meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu dampak signifikan adalah penggunaan video konferensi untuk menggantikan pertemuan tatap muka, sesuai dengan kebijakan *physical distancing*. Selain itu, kebijakan bekerja dan belajar dari rumah juga telah meningkatkan permintaan akan infrastruktur telekomunikasi yang lebih kuat, memengaruhi peningkatan penggunaan sarana dan prasarana IT, terutama dalam bidang telekomunikasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merujuk pada masalah-masalah yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu, diperlukan tindakan antisipatif yang khusus untuk menghadapinya. Masih ada beberapa isu strategis nasional yang belum terselesaikan, dan hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memfokuskan upaya penyelesaiannya. Namun, tantangan yang lebih besar timbul ketika isu-isu strategis baru muncul di tengah-tengah isu-isu yang belum terselesaikan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus untuk mengantisipasi dan menangani berbagai isu ini.

Selain mempertimbangkan isu-isu pada tingkat internasional, dalam merumuskan isu-isu strategis nasional juga diperlukan perhatian pada isu-isu dan kebijakan yang berdampak secara langsung pada tingkat nasional. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis ini termasuk pelaksanaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan dampak dari pandemi COVID-19.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan ini merupakan langkah terakhir dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. RPJMN ini diarahkan untuk mencapai komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden, serta didasarkan pada kajian dan analisis permasalahan serta isu-isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, RPJMN juga disusun dengan mempertimbangkan penyelarasan dengan sasaran-sasaran utama pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPN.

Dalam rangka memajukan Indonesia ke depan, visi RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan



- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;



- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sesuai dengan arahan dalam RPJMN khususnya pengembangan Kawasan Strategis pada wilayah Sumatera dengan proyek strategis yang akan dilaksanakan Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai serta Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong,

serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam-Bintan-Karimun, dan KPBPB Sabang;

2. Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba, DPP Baru Padang-Bukittinggi, DPP Baru Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang.
3. Pengembangan industri kedirgantaraan di Batam dan Bintan;
4. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera, Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Lintas Penghubung Timur dan Barat Sumatera, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Lintas Tengah Aceh, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Reaktivasi Jalur KA Pariaman – Naras – Sungai Limau, Pembangunan KA Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (potensi), Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri – Pekanbaru), Pembangunan KA Lahan – Tarahan, Bandara Bukit Malintang, Bandara Rokot;
5. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
6. Pemantapan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
7. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - a. pengembangan 816 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
 - b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 91 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (kimia di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, manufaktur di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, otomotif di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung, makanan dan minuman di

Sumatera Utara dan Riau, ekonomi kreatif di Riau, migas di Aceh, dan tambang di Sumatera Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian.

- c. pengembangan 87 unit BLK di wilayah Sumatera mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.
- d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi Wilayah Sumatera.

b. Pertumbuhan Perekonomian Nasional Menuju Endemi Covid-19

Indonesia saat ini menghadapi proses menuju kondisi endemi Covid-19, yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian dan menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 2,6%. Perbaikan ini sebagian besar dipicu oleh pembukaan ekonomi Tiongkok setelah pandemi Covid-19, terutama dalam sektor jasa. Dampak positif dari pembukaan ekonomi Tiongkok ini tidak terjadi secepat yang sebelumnya diperkirakan, tetapi tetap berkontribusi pada pemulihan ekonomi global.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga diprediksi akan lebih baik, didorong oleh kinerja ekonomi yang kuat pada kuartal pertama tahun 2023. Meskipun demikian, perbaikan ekonomi global terjadi dalam konteks ketatnya pasar tenaga kerja di AS dan Eropa, yang mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat. Hal ini mendorong kelanjutan pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju.

Dampak dari pengetatan kebijakan moneter ini, pada gilirannya, berkontribusi pada aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan penguatan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk nilai tukar rupiah Indonesia.

Dalam konteks domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan didorong oleh peningkatan permintaan domestik serta kinerja ekspor yang positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 berkisar antara 4,5 hingga 5,3 persen. Pencapaian ini juga didukung oleh kondisi positif Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), yang berkontribusi pada ketahanan eksternal negara. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2023 terus mengalami peningkatan dan mencapai 145,2 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan pembiayaan untuk 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan

pembayaran utang luar negeri Pemerintah, dan melebihi standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor. Selain itu, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan, dan tingkat inflasi terus menurun, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara.

c. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan amanat bahwa Pemilihan Umum Serentak akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Seiring dengan hal tersebut, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang didasarkan pada prinsip asal luber jurdil sangat penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah terciptanya stabilitas sosial di masyarakat selama pelaksanaan tahapan pemilu. Dalam rangka menanggapi hal ini, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa isu strategis sebagai persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yaitu:

- Netralitas Penyelenggara Pemilu, dimana pada isu ini netralitas penyelenggara menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan pemilu didukung oleh para penyelenggara yang profesionalitas dan mandiri dan bebas nilai kepentingan dari pihak manapun;
- Potensi Polarisasi Masyarakat, isu berkaitan dengan bagaimana penciptaan stabilitas dan kondusifitas seluruh tahapan pemilu;
- Mitigasi Dampak Penggunaan Sosial Media, peningkatan aktivitas masyarakat secara virtual dalam sosial media merupakan implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terutama media internet akan menjadi komoditas politik yang cukup potensial dalam hal penggunaannya untuk membentuk opini publik ketika pelaksanaan kampanye, langkah *preventif* perlu diambil untuk tetap membatasi segala tindakan dalam sosial media melalui peningkatan literasi digital masyarakat serta membatasi konten digital berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat;



- Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih, setiap warga negara telah dijamin haknya untuk memilih dan mengikuti kontestasi politik sebagai orang yang dipilih telah dijamin dalam Undang-Undang maka sudah wajib bagi pemerintah untuk ikut mendukung pemenuhan hak publik tersebut.
- Pengalokasian berbagai program dan kegiatan untuk menyikapi berbagai isu strategis diatas menjadi salah satu kunci kesuksesan bagi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau

Perencanaan pembangunan jangka panjang **Provinsi Kepulauan Riau** sudah memasuki periode pamungkas pencapaian visi pembangunan jangka panjang yakni perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 selain memuat tujuan, sasaran dan program prioritas **Provinsi Kepulauan Riau**, juga berpedoman pada RPJPD **Provinsi Kepulauan Riau** Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi: “Kepulauan Riau Berbudaya, Maju, dan Sejahtera 2025”.

Dari Visi tersebut terdapat tiga kata utama yang membangun visi tersebut adalah “*Berbudaya, Maju dan Sejahtera*”, yang mempunyai makna **Berbudaya** diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang mencerminkan sikap, perilaku, tindakan, moral, akhlak dan etika baik perseorangan maupun kolektif masyarakat Kepulauan Riau yang dilandasi oleh nilai agama dan nilai luhur yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian **maju**, ditandai dengan terwujudnya sumber daya manusia Kepulauan Riau yang berkualitas di bidang pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi. Kepulauan Riau yang **maju** adalah saat dimana sumberdaya manusia aparaturnya memiliki keterampilan dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta tertanam budaya disiplin baik dilingkungan pemerintah maupun masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian Kepulauan Riau **sejahtera** ditandai dengan penduduk Kepulauan Riau yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak, kondisi ini ditunjukkan dengan adanya jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan terutama bagi penduduk lokal. Sehingga, Kepulauan Riau yang **sejahtera** adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.



Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata
4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak
5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Pada tahap pembangunan ini diarahkan untuk melanjutkan dan perbaikan atau penyempurnaan dari pembangunan tahap sebelumnya (Tahap ke 3). Beberapa hal yang terus diupayakan adalah tatakelola dan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik sudah berjalan dengan efisien dan efektif mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi dan menganut prinsip manajemen modern. Karakter dan budaya masyarakat di Kepulauan Riau terus semakin berkembang dan peningkatan pemahaman dan pengalaman nilai agama terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan pada seluruh bidang seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, seni budaya, lingkungan, dan pemerintahan agar terjadi pemerataan dan percepatan pembangunan, sehingga mampu mencapai visi dan misi jangka panjang Kepulauan Riau.

4.2.3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037

Sesuai telaahan dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, dijelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terdiri atas

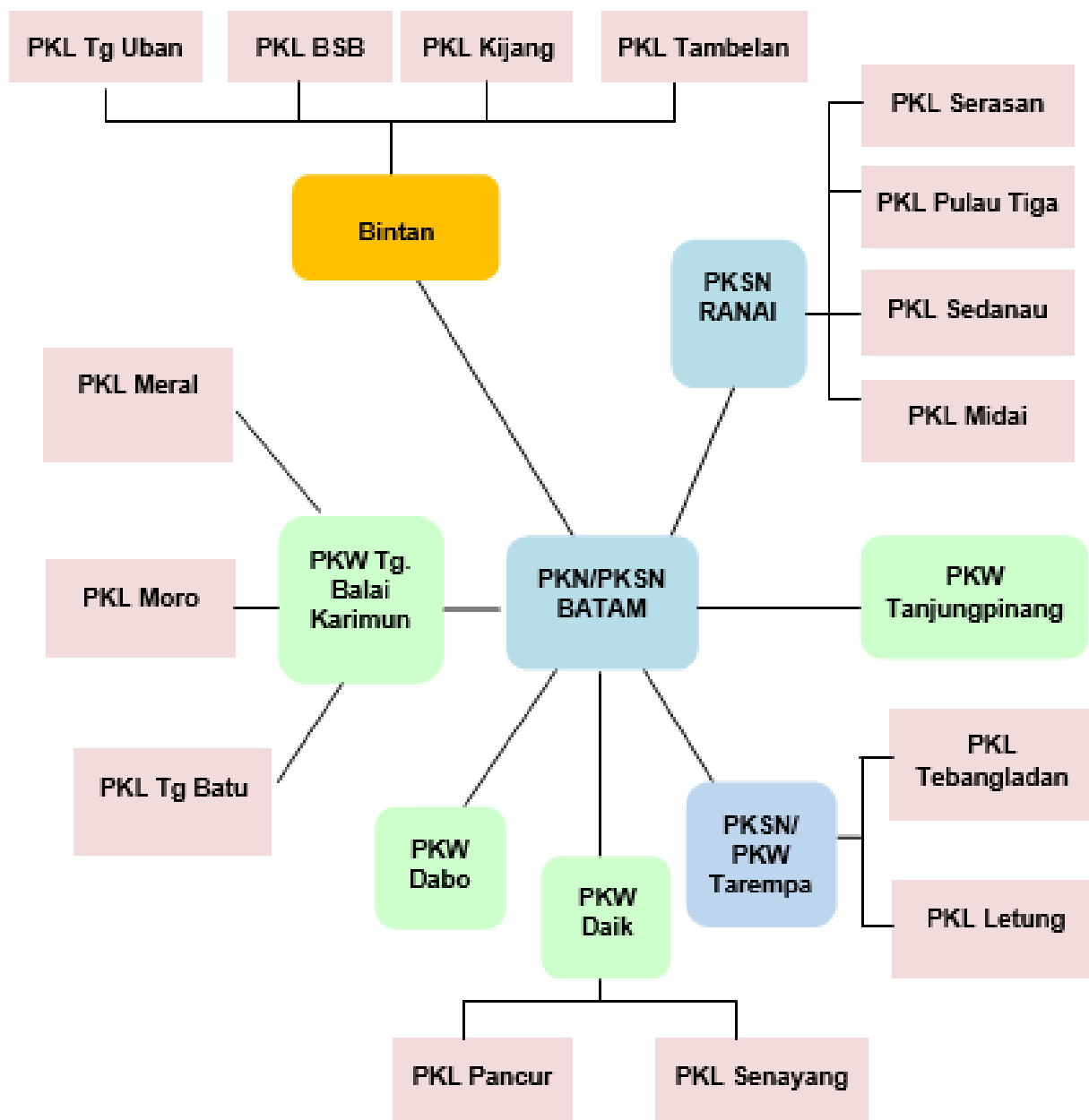


gugusan-gugusan pulau yang letaknya saling berjauhan, sehingga perlu adanya keterkaitan antar pulau untuk menjadikan provinsi ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam membentuk keterkaitan tersebut perlu adanya pusat-pusat kegiatan yang hierarkis dan saling berkesinambungan antara pusat kegiatan dengan wilayah *hinterlandnya*, sehingga terwujud pemerataan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Perwujudan dari pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan tersebut antara lain melalui pemantapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKN merupakan Kawasan perkotaan Batam, PKW meliputi Kawasan perkotaan Tanjungpinang, Daik Lingga, Dabo – Pulau Singkep, Tarempa, dan Tanjung Balai Karimun. Kemudian PKSN meliputi Kawasan Perkotaan Tanjung Batu, Moro, Meral, Bandar Seri Bintan, Tanjung Uban, Kijang, Letung, Tebangladan, Sedanau, Serasan, Senayang, Pancur, Tambelan, Midai, dan Pulau Tiga.

Selain itu kawasan-kawasan perkotaan di pulau-pulau kecil didorong pengembangannya sebagai kota pesisir dengan menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai *leading sector* dalam pengembangan ekonomi wilayahnya, serta menjadikan laut sebagai halaman depan dan orientasi pembangunan. Pengembangan pusat kegiatan Kepulauan Riau digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.11
Pusat-Pusat Kegiatan di Kepulauan Riau



Tabel IV.5.
Pusat-Pusat Kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau

No.	Kota	Fungsi	Arahan
1.	Batam	PKN / PSN	a. Pusat pemerintahan Kota Batam. b. Kawasan investasi internasional. c. “Pusat keunggulan” (<i>center of excellent</i>) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.



No.	Kota	Fungsi	Arahan
			d. Pusat kawasan industri, perdagangan dan jasa Provinsi Kepulauan Riau. e. Simpul utama (<i>main outlet</i>) transportasi laut dan udara skala nasional dan internasional. f. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah perbatasan. g. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. h. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. i. Kawasan alih muat kapal (<i>transshipment point</i>). j. Kawasan pariwisata.
2.	Ranai	PKSN	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Natuna b. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. c. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. d. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. e. Pusat pelayanan, ekspor serta akses ke pasar global. f. Simpul transportasi laut nasional dan internasional. g. Simpul transportasi udara nasional. h. Pusat koleksi dan distribusi skala regional dan nasional. i. Kawasan pengembangan industri pendukung perikanan dan kelautan. j. Pusat perdagangan dan jasa skala regional.
3.	Tarempa	PKSN/PKW	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. b. Pusat pertumbuhan kawasan perbatasan negara. c. Pintu gerbang Indonesia ke wilayah internasional. d. Kawasan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional serta integrasi nasional. e. Simpul transportasi laut skala nasional. f. Pusat koleksi dan distribusi skala regional.



No.	Kota	Fungsi	Arahan
			g. Pusat kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal dan regional. h. Sentra produksi perikanan dan kelautan. i. Pengembangan industri pendukung dan pengolahan perikanan. j. Kawasan pariwisata. k. Kota transit lalu lintas pelayaran.
4.	Tanjungpinang	PKW	a. Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. b. Pusat pemerintahan Kota Tanjungpinang. c. Pusat koleksi dan distribusi barang skala provinsi. d. Pusat kegiatan industri pendukung PKN Batam. e. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun. f. Simpul transportasi laut nasional dan simpul transportasi udara nasional. g. Pusat perdagangan dan jasa skala provinsi. h. Pendukung kegiatan pariwisata. i. Kawasan pendidikan.
5.	Daik Lingga	PKW	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Lingga. b. Pusat perdagangan dan jasa skala regional. c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. d. Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian. e. Sentra pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, dan kehutanan f. Kawasan pariwisata. g. Pusat pelayanan transportasi laut skala regional dan lokal.
6.	Dabo-Pulau Singkep	PKW	a. Pusat pelayanan untuk Pulau Singkep dan sekitarnya. b. Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional. c. Pusat koleksi dan distribusi skala regional. d. Kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. e. Pusat pelayanan transportasi udara skala regional.



No.	Kota	Fungsi	Arahan
			f. Simpul transportasi laut skala nasional.
7.	Tanjungbalai Karimun	PKW	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Karimun. b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. c. Kawasan perdagangan dan pelayanan jasa serta pariwisata. d. Pusat koleksi dan distribusi tingkat regional. e. Simpul transportasi laut nasional dan transportasi udara regional. f. Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan, perikanan dan kelautan.
8.	Bandar Seri Bintan	PKL	a. Pusat pemerintahan Kabupaten Bintan. b. Pusat kegiatan utama dengan skala pelayanan kabupaten. c. Kawasan pariwisata. d. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. e. Simpul transportasi laut.
9.	Tanjung Uban	PKL	a. Kawasan industri pendukung Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. b. Pusat koleksi dan distribusi. c. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. d. Simpul penghubung PKN Batam dengan wilayah Kabupaten Bintan. e. Kawasan pariwisata. f. Kawasan industri dan jasa.
10.	Kijang	PKL	a. Kawasan perdagangan dan jasa lokal. b. Kawasan industri maritim. c. Kawasan pertanian dan perikanan. d. Pusat koleksi dan distribusi lokal. e. Simpul pelayanan transportasi skala nasional. f. Kawasan pertambangan. g. Pengembangan kawasan pariwisata.
11.	Letung	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. b. Kawasan perdagangan dengan lingkup pelayanan lokal. c. Kawasan pertanian. d. Kawasan industri perikanan dan kelautan. e. Kawasan pariwisata. f. Simpul pelayanan transportasi laut regional.



No.	Kota	Fungsi	Arahan
12.	Tebangladan	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan dan kelautan. b. Pusat industri pengolahan perikanan dan kelautan . c. Kawasan perdagangan lokal. d. Kawasan pariwisata. e. Pusat pengolahan minyak dan gas. f. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. g. Simpul transportasi udara skala regional.
13.	Pancur	PKL	a. Pengembangan kegiatan pertanian. b. Kawasan perikanan dan kelautan. c. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian. d. Simpul pelayanan transportasi laut lokal.
14.	Senayang	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta kelautan. b. Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan. c. Simpul pelayanan transportasi laut lokal. d. Kawasan pengembangan wisata bahari.
15.	Meral	PKL	a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. b. Kawasan industri maritim. c. Kawasan perdagangan dan jasa lokal. d. Kawasan pertambangan.
16.	Tanjung Batu	PKL	a. Simpul transit skala regional dan antar pulau. b. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. c. Kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan. d. Pusat koleksi dan distribusi lokal. e. Kawasan pendukung pengembangan industri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
17.	Moro	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi lokal. b. Pusat kegiatan perikanan. c. Pengembangan kawasan pertambangan. d. Simpul transportasi laut nasional.
18.	Sedanau	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. b. Pusat perdagangan skala lokal. c. Simpul pelayanan transportasi skala regional.
19.	Serasan	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan kelautan.

No.	Kota	Fungsi	Arahan
			b. Simpul pelayanan transportasi laut skala regional.
20	Midai	PKL	a. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh) b. Simpul pelayanan transportasi laut regional c. Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari
21	Pulau Tiga	PKL	a. Pusat pengembangan sentra perikanan b. Kawasan pendukung pengembangan wisata bahari c. Simpul pelayanan transportasi laut regional
22	Tambelan	PKL	a. Pusat pengembangan sentra perikanan dan pertanian b. Simpul pelayanan transportasi laut dan udara regional c. Pusat konservasi penyu (habitat penyu bertelur)

4.2.4. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat di pembangunan untuk masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Provinsi Kepulauan Riau yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan. Isu-isu strategis Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1) Pembangunan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkualitas dan ramah lingkungan

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah kepulauan yang terletak di Indonesia. Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritimnya memiliki dampak besar pada pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam maritim dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Provinsi Kepulauan Riau memiliki beragam potensi sumber daya maritim, termasuk perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut, dan energi laut. Selain itu, provinsi ini memiliki garis pantai yang panjang dan berbagai lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alam yang eksotis. Potensi ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sektor pariwisata bahari yang dapat mendukung ekonomi maritim.

Peningkatan sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap, perlu diperhatikan dengan serius. Jumlah produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018, produksi perikanan tangkap mencapai 304.975,02 ton, kemudian meningkat menjadi 309.287,15 ton pada tahun 2019. Pada tahun 2020, produksi mencapai 319.196,89 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 306.463,7 ton, dan tahun 2022 menurun lagi menjadi 304.489,16 ton. Jenis sumber daya ikan yang ada di perairan laut Kepulauan Riau mencakup kelompok sumber daya ikan pelagis (seperti tongkol, tenggiri, kembung, layang, dan teri), kelompok sumber daya ikan demersal (seperti kakap merah, kurisi, beloso, dan bawal), kelompok sumber daya ikan karang (seperti kerapu, baronang, napoleon), kelompok sumber daya moluska (seperti cumi-cumi dan sotong), serta kelompok sumber daya krustase (seperti kepiting dan rajungan), dan kelompok sumber daya udang.

Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan pada sektor perikanan budidaya sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah. Produksi perikanan budidaya mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, produksi mencapai 34.399,86 ton, kemudian mengalami penurunan menjadi 33.003,11 ton pada tahun 2019. Tahun 2020 mengalami penurunan yang lebih signifikan, mencapai 21.421 ton. Namun, pada tahun 2021, produksi kembali meningkat menjadi 33.920,5 ton, meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 27.436,03 ton.

Potensi perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumber daya laut-dalam, pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari, dan potensi mangrove serta terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan adalah komoditas unggulan, seperti rumput laut (seaweed), ikan, dan biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan.



Keuntungan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau adalah potensi kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan komitmen dalam memanfaatkan potensi ini. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam, pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari, serta potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan adalah komoditas unggulan, termasuk rumput laut (*seaweed*), ikan, dan biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Dengan kekayaan alam yang melimpah, Kepulauan Riau perlu menerapkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk menjaga kelestarian rantai ekosistem alam. Hal ini penting untuk meminimalisir ancaman degradasi lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan harus memiliki dampak positif tidak hanya pada perekonomian saat ini, tetapi juga harus mampu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

2) Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai penggerak perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Salah satu wisata yang dapat dioptimalkan adalah wisata bahari. Kawasan-kawasan wisata bahari akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional. Upaya ini menjadi hal yang penting agar kunjungan wisatawan yang tinggi dapat menciptakan *multiplier effect* bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal dapat tumbuh serta mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal. Pembangunan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berorientasi pada ekonomi kerakyatan, yang mana ekonomi kerakyatan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat Kepulauan Riau akan memiliki produktivitas yang tinggi, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kehidupan social masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM.

Perhatian terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sangat penting agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja ekonomi.

Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam pada tahun 2020 sebesar 6,34 persen, dan pada tahun 2021 tetap pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 12,86 persen. Persentase UMKM yang telah dikembangkan juga memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020, persentase UMKM mencapai 22,3 persen, dan pada tahun 2021 tetap pada tingkat yang sama dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, persentase UMKM meningkat menjadi 23,65 persen. Keaktifan koperasi dan UMKM ini perlu berkolaborasi secara sinergis untuk menjadi bagian integral dalam optimalisasi sektor kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, industri kecil, konstruksi, perdagangan, dan sektor lainnya. Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan wilayah adalah kolaborasi yang sinergis antara Provinsi, Kabupaten/Kota, serta lembaga lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Identifikasi dan kompetensi Birokrasi secara profesional dan proposional

Reformasi birokrasi merupakan usaha untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan dapat mengatur ulang struktur birokrasi sehingga menciptakan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan optimal. Reformasi birokrasi menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terkait dengan penyelenggaraan dan pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan (Menteri PANRB) Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Dengan isu strategis hulu dan hilir. Isu strategis tingkat hulu terdiri dari (i) birokrasi yang belum kolaboratif, (ii) Transformasi digital yang belum optimal, (iii) Penyederhanaan struktural dan mekanisme kerja baru, yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala, (v) Budaya birokrasi: berAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik, kemudian isu strategis tingkat hilir yaitu: (i) hasil pelaksanaan program-program, pengentasan kemiskinan, belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan, (ii) tantangan resesi global dan pentingnya investasi, (iii) tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public, (iv) dampak inflasi yang tidak terkendali.

Road Map Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Salah satu factor yang perlu diperhatikan dalam Reformasi Birokrasi adalah kualitas Sumber Daya Aparatur. Dalam penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan professional diperlukan *“the right man in the right place”*, dapat dikatakan posisi menentukan prestasi. Dengan ini berarti perlu adanya identifikasi terhadap kompetensi ASN dan peningkatan kapasitas ASN untuk memaksimalkan kinerja birokrasi. Sehingga kapasitas sumber daya aparatur yang mumpuni dan penempatannya sesuai bidang kompetensi, maka akan menciptakan ekosistem kinerja pemerintah daerah yang terpadu, harmonis, dan akuntabel.

4) Penataan Kawasan Kumuh Pesisir dan Pengentasan Kemiskinan

Memahami dengan kondisi geografis Kepulauan Riau adalah berupa kepulauan yang cenderung memiliki wilayah kelautan dan pesisir pantai. Pada kondisi saat ini terdapat sebagian masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir, dengan kondisi permukiman di Kawasan pesisir belum layak yang menyebabkan adanya permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan kelompok rumah tidak layak huni dengan keterbatasan/minimnya layanan sarana prasarana pendukung seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dengan kondisi tempat tinggal di pesisir, yang mana masyarakat tinggal di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga masyarakat sangat terbatas untuk membangun rumah dengan standar rumah sehat seperti di darat. Hal ini berdampak pada penyediaan prasarana penunjang kawasan permukiman yang tidak optimal seperti penyediaan air bersih, akses sanitasi dan persampahan. Kurang optimalnya penyediaan prasarana permukiman ini menimbulkan titik-titik kawasan kumuh di wilayah pesisir, yang berimbas pada rendahnya kualitas hidup masyarakat Kepulauan Riau, sehingga berpotensi menjadikan kehidupan masyarakat tidak sejahtera (miskin).

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menjadi hal yang terus diperhatikan dalam pembangunan daerah. Sebagai permasalahan



pembangunan yang multidimensional, kemiskinan akan selalu menjadi salah satu isu strategis daerah yang perlu diperhatikan dalam pengentasan dan penanggulangannya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kecenderungan kualitas pendidikan yang masih belum merata dan kurangnya keterampilan/kompetensi masyarakat untuk memenuhi profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memperkuat pemerataan kualitas pendidikan dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Selain itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan yang diupayakan untuk dapat meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas rumah, dimana 6 dari 14 variabel penentu rumah tangga miskin berada pada kualitas rumah yang memenuhi standar atau tidak.

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin per bulan September pada tahun 2018 adalah sebesar 125,36 ribu, meningkat pada tahun 2019 sebesar 127,76 ribu, pada tahun 2020 sebesar 142,61 ribu, tahun 2021 menurun hingga 137,75 ribu, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali hingga 148,89 ribu. Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

5) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Pembangunan Sumber Daya Manusia dapat dicerminkan dari capaian nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Secara umum, dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2018-2022), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai IPM adalah sebesar 74,84 dan pada

tahun 2022 adalah sebesar 76,46. IPM untuk kabupaten/kota, pada tahun 2022, nilai tertinggi terdapat di Kota Batam dan terendah di Kabupaten Lingga. Pada tahun 2018 nilai IPM Kota Batam adalah sebesar 80,54 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 81,67. Pada tahun 2018 nilai IPM Kabupaten Lingga adalah sebesar 64,06 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 66,57. Dengan kondisi saat ini walaupun perkembangan IPM menunjukkan agregat yang positif namun masih perlu ditingkatkan kualitas daya saingnya. Peningkatan kualitas Pendidikan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Dengan sarana dan prasarana yang mumpuni diharapkan akan mampu memberikan fasilitas dalam menunjang kegiatan belajar di sekolah dengan lebih optimal. Terlebih, saat ini perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga sarana dan prasarana pembelajaran harus adaptif dalam penggunaan IT. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan serta pemetaan sarana prasarana pendidikan diharapkan mendukung kegiatan belajar dan mengajar dengan maksimal.

Selain pendidikan, kesehatan juga salah satu faktor penting dalam pembangunan SDM. Kemudahan masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana yang merata akan memberikan dampak yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Memahami hal tersebut, perlu adanya pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mumpuni, sehingga masyarakat mendapat kemudahan akses dalam pelayanan Pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pemerataan kualitas sumber daya manusia Kepulauan Riau dapat ditingkatkan secara optimal.

6) Peningkatan dan Optimalisasi SDM yang Berdaya Saing dan Profesional

Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam pembangunan manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada hakikatnya kedua unsur ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalani kehidupan. Pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam meningkatkan kualitas daya saing dan produktivitas masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset yang krusial dalam pembangunan dan memiliki dampak signifikan pada kemajuan serta pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk membentuk generasi SDM yang unggul dan profesional sehingga diharapkan mampu mendukung kemajuan dalam pembangunan daerah. Provinsi Kepulauan Riau



mempunyai komitmen untuk Pendidikan Berkualitas dalam rangka mendukung tujuan keempat SDGs/TPB terutama perihal Menghilangkan Disparitas Gender Dalam Pendidikan, Dan Menjamin Akses Yang Sama Untuk Semua Tingkat Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan, Bagi Masyarakat Rentan Termasuk Penyandang Cacat, Masyarakat Penduduk Asli, Dan Anak-Anak Dalam Kondisi Rentan. Isu terkait Perempuan dan anak menjadi perhatian bagi Provinsi Kepulauan Riau. Pemenuhan partisipasi politik dan ekonomi perempuan, pencegahan diskriminasi, kekerasan, dan perkawinan anak, merupakan upaya pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan. Sedangkan pemenuhan pendidikan dan pencegahan kekerasan merupakan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

7) Peningkatan dan Pengembangan Budaya Melayu dalam Implementasi Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau

Kebudayaan merupakan segala hal yang terkait dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) yang mampu membentuk peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan dalam warisan budaya, baik yang bersifat nyata (aset budaya yang dapat dilihat) maupun abstrak (aset budaya yang tidak terlihat). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah dan adat istiadat Melayu yang unik dan memukau. Keberagaman budaya Melayu di Kepulauan Riau adalah harta berharga dan identitas bangsa yang sangat penting untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah perubahan dunia yang dinamis. Ekspresi Budaya Melayu mencakup semua aktivitas yang mendukung proses pembuatan karya budaya Melayu yang dihasilkan oleh masyarakat. Ini dapat dilihat dari partisipasi penduduk dalam pertunjukan seni Melayu sebagai pelaku atau pendukung. Selanjutnya, Budaya Literasi merupakan aktivitas dan infrastruktur pendukung dalam memperoleh, menguji keabsahan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan melestarikan dan menjaga budaya Melayu, diharapkan dapat mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya yang relevan, yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat sesuai dengan konteks ketahanan sosial budaya di Provinsi Kepulauan Riau.

8) Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan untuk Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | IV-47**



Disparitas atau ketimpangan/kesenjangan wilayah merupakan salah satu fokus pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara berbagai wilayah. Sasaran utama dalam tujuan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dalam hal ini adalah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penurunan koefisien Gini, dan penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 hingga bulan September tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu sebesar 0,325. Apabila melihat tren Indeks Gini untuk setiap Kabupaten/Kota, Kota Tanjungpinang memiliki indeks tertinggi pada tahun 2022, mencapai 0,347, sementara yang terendah terdapat di Kabupaten Lingga dengan nilai 0,277.

Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisi pembangunan infrastruktur di tiap kabupaten/kota. Kondisi geografis di Provinsi Kepulauan Riau menjadi sebuah tantangan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menggambarkan cita-cita yang hendak dicapai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021-2026. Visi RPJMD merupakan cita-cita yang ingin dicapai Provinsi Kepulauan Riau di akhir periode dalam perencanaan lima tahun. Usaha untuk mengupayakan visi adalah dengan menentukan misi-misi dalam RPJMD. Melihat kondisi saat ini, terdapat pembaruan regulasi dan peningkatan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu diadakan perubahan kebijakan pemerintah daerah untuk menangani dan memperbaiki kondisi melalui kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan dan perkembangan kondisi daerah, dimana evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD merekomendasikan untuk dilakukan adanya perubahan dokumen RPJMD dalam rangka mengoptimalkan kinerja pembangunan hingga akhir periode.

Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna dengan posisi wilayah yang strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Daerah ini juga kaya akan potensi sumber daya alam di bidang minyak dan gas, serta maritim. Pembangunan di sisa masa pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau perlu memerhatikan pengembangan Sumber daya alam Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa menjadi salah satu sumber perekonomian unggulan. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Pengembangan ini juga harus memerhatikan fasilitas sarana prasarana yang saling terintegrasi sebagai daya dukung dalam pembangunan. Berdasarkan kebutuhan dan struktur pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, maka dirumuskanlah visi misi jangka menengah lima tahun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut.



5.1. VISI DAN MISI

Secara historis, Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu semenjak zaman kesultanan Riau Lingga. Dari awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur dan selalu diingat dengan istilah "zaman dolar". Dua masa tersebut menjadi bukti sejarah bahwa Kepulauan Riau pernah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur.

Saat ini, kondisi dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau sangatlah besar. Kondisi ini diperparah dengan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak cukup besar terhadap berbagai sektor termasuk sektor perekonomian yang di tahun 2020 hingga mencapai angka negatif. Hal ini juga berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta melemahnya penggerak perekonomian dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemajuan terhadap kemakmuran masyarakat menjadi suatu cita-cita penting yang harus diwujudkan saat ini.

Selain itu, Kepulauan Riau yang berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Pada dasarnya, posisi ini menempatkan Kepulauan Riau pada posisi strategis dalam perdagangan dunia. Selain itu, kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kepulauan Riau. Kesiapan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjawab tantangan tersebut menjadi pilar penting yang harus dibenahi dan ditingkatkan untuk mampu membuat Provinsi Kepulauan Riau bersaing tidak hanya pada level nasional tetapi juga internasional.

Letak wilayah Kepulauan Riau yang strategis tersebut tidak hanya menuntut agar Provinsi Kepulauan Riau mampu bersaing tetapi juga mengundang munculnya potensi ancaman yang berasal dari budaya global ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Budaya global yang masuk dalam kehidupan bermasyarakat memiliki potensi mereduksi nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini menjadi karakter dan pilar penting dalam perekat kehidupan masyarakat Kepulauan Riau.



Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai kondisi yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera;
- **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional;
- **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat menurun akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara geografis merupakan daerah maritim yang memiliki potensi laut yang besar tentu merupakan suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi seperti perindustrian, pariwisata, pertanian, dan lain-lain dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan ini



akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh untuk mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Upaya untuk memastikan tercapainya dua poin tersebut adalah melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan antisipatif, transparansi informasi, pemerintahan yang bebas KKN, serta pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Untuk merelisasikan hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam birokrasi didalamnya sehingga kualitas dan penempatan pegawai perlu untuk mendapatkan pembenahan.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang kuat agar mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dan mampu memberikan peningkatan partisipasi masyarakat desa yang tangguh. Pembangunan SDM di Kepulauan Riau ini juga dimaksudkan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berkarakter agar mampu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu akses layanan pendidikan, hingga mampu meningkatkan kualitas pemuda di Kepulauan Riau.



4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau agar tetap terjaga dan tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam kehidupan beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang kurang baik. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Gambar 5.1.

Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026



5.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir untuk jangka waktu tertentu. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kepulauan Riau dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas dan dilakukan evaluasi, maka ditarik kesimpulan, secara kebijakan rumusan tujuan dan sasaran masih relevan dengan kondisi saat ini, sehingga hanya dilakukan perubahan pada nomenklatur beberapa tujuan dan sasaran serta penyesuaian indikator dan target sasaran agar lebih mudah tergambar kondisi sesuai dengan sasaran yang ditentukan.



Sehingga jumlah tujuan dan sasaran daerah dalam perubahan RPJMD masih tetap sama setelah dilakukan perubahan yaitu 7 (tujuh) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran daerah.

5.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021-2026 ditunjukkan lebih lanjut pada Tabel 5.1 berikut:



Tabel 5.1.
Misi, Tujuan dan Perubahan Sasaran Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

MISI DAN TUJUAN		SASARAN MURNI	PERUBAHAN SASARAN
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT			
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Optimalisasi Sektor Perikanan	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan
		Peningkatan sektor pariwisata	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata
		Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
		Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari
2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan



MISI DAN TUJUAN		SASARAN MURNI	PERUBAHAN SASARAN
		Peningkatan PAD	Pertumbuhan PAD
		Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN			
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan, dan Akurat
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
		Managemen ASN yang Profesional	Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional
		Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap,



MISI DAN TUJUAN		SASARAN MURNI	PERUBAHAN SASARAN
			Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana
		Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA			
4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran
		Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif, dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan



MISI DAN TUJUAN		SASARAN MURNI	PERUBAHAN SASARAN
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			
6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu
		Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama
MISI 5 MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN			
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar
		Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir



5.2.2. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017

Di dalam Pasal 167 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan tentang syarat minimal yang harus termuat di dalam tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada pasal 167 ayat ke 2 disebutkan bahwa bahwa Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut maka paling tidak terdapat 7 kriteria utama yang harus termuat di Tujuan dan Sasaran RPJMD. Adapun hubungan antara ketujuh kriteria tersebut dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021-2026, sebagai berikut:



Tabel 5.2.

Kesesuaian Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Permendagri 86 Tahun 2017

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Pada Tujuan 1 dan 2 menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Pada sasaran tersebut berfokus pada dukungan pemerintah terhadap sektor- sektor penggerak ekonomi masyarakat yang dapat menstimulus pendapatan ekonomi masyarakat. Sektor- sektor tersebut antara lain sektor UMKM, industri, pertanian, pariwisata, perikanan



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
			pendapatan masyarakat		
Lapangan Berusaha			Lapangan berusaha merupakan suatu kondisi ketersediaan dan kemudahan berusaha yang diciptakan pemerintah bagi para pelaku usaha. Hal ini merupakan bagian dari Tujuan	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata	Fokus pemerintah pada perbaikan dan peningkatan sektor ekonomi tidak hanya akan didukung dengan kemudahan investasi. Penciptaan lapangan berusaha bagi masyarakat juga

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-14



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
			yang hendak dicapai dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.		menjadi fokus penting yang akan ditingkatkan dan dikembangkan pada sasaran-sasaran ini. Misalnya hal tersebut ditunjukkan pada sektor pariwisata, peluang pada sektor tersebut diupayakan semaksimal mungkin agar dapat diperankan dengan optimal pada berbagai lapisan masyarakat, baik dari hulu sampai ke hilir.



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
Kualitas Lingkungan Hidup			Selain pembangunan manusia dan ekonomi, pembangunan lingkungan merupakan salah satu tujuan penting dalam RPJMD ini. Hal ini tercermin dari Tujuan 1.1 yang hendak dicapai dimana pengelolaan potensi daerah yang ada di Kepulauan Riau secara keseluruhan dilakukan dengan tetap ikut menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan pembangunan yang ekspansif dan eksploitatif yang jika tidak diikuti dengan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan maka hal tersebut akan

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-16



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
			bagian dari pembangunan yang kolektif dan seimbang di Kepulauan Riau.		berdampak negatif terhadap Kepulauan Riausecara jangka panjang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk memastikan pengawasan dan pengendalian keberlangsungan lingkungan hidup tetap terjaga secara holistik melalui perwujudan pada sasaran ini.



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
Pemerataan Pendapatan Masyarakat	2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pada kedua tujuan tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah menjadi 2 syarat penting yang harus dibangun sebelum pendapatan	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Sasaran pada sektor- sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendapatan. Fokus pemerintah tidak hanya diarahkan pada sektor-sektor unggulan tetapi juga pada berbagai sektor yang perlu terus ditingkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-18



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
			masyarakat dapat bertumbuh secara merata.		
Kesempatan Kerja			Kesempatan kerja dapat diwujudkan jika suatu daerah terus bertumbuh secara ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja serta menurunnya angka	Pertumbuhan PAD	Fokus pemerintah di dalam RPJMD ini diarahkan pada peningkatan pembangunan di berbagai sektor-sektor ekonomi terutama pada sektor-sektor unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pengelolaan berbagai sektor unggulan yang
				Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Pternakan, dan Perkebunan)	



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
			kemisikinandan tingkat pengangguran terbuka. tujuan ini berfokus pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat diProvinsi Kepulauan Riau		dilakukan secara optimal akan berdampak peningkatan daya tarik investasi yang akan berbanding lurus dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Pemerintahan yang berbasis pada pelayanan masyarakat dapat terwujud dengan	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi,	Meningkatnya akses pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilihat dari



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
			tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif. Terlaksananya tujuan tersebut secara maksimal akan mampu mempertemukan antara kualitas pelayanan yang dihasilkan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.	Transparan, dan Akurat Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	seberapa baik keterbukaan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bermaksud meningkatkan

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-21



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
				Optimalisasi Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	keterbukaan informasi ini untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan daya saing daerah	4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Daya saing daerah dapat diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Sumber daya manusia yang	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Secara keseluruhan sasaran yang ada di dalam tujuan ini diarahkan untuk membangun manusia yang unggul dan berkarakter. Manusia



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
	5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	unggul akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan daerah.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	yang unggul tercermin dari terwujudnya manusia yang sehat, terdidik, dan terlatih dengan baik. Sementara itu, manusia yang berkarakter adalah manusia yang kuat secara mental dan psikis.
				Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	
				Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	
				Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	
	6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian		Peningkatan Implementasi	



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
		Budaya, dan Harmoni Masyarakat		Pelestarian Budaya Melayu	
				Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama	
	7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Infrastruktur menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat. Dimana pembangunan dan konektivitas infrastruktur yang baik



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
					akan mempermudah investasi masuk ke berbagai daerah dan akan ikut mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di berbagai daerah khususnya pada masyarakat yang berada pada daerah pesisir
				Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar	



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

KRITERIA DALAM PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017	TUJUAN		ANALISIS TUJUAN	PERUBAHAN SASARAN	ANALISIS SASARAN
				Pulau dan Kawasan Pesisir	

5.2.3. Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Agar visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi tersebut secara operasional harus dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran berdasar visi dan misi dimaksud dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Tujuan Pertama: Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 1: Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan;
- Sasaran 2: Peningkatan Pembangunan Sektor Pariwisata;
- Sasaran 3: Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup; dan
- Sasaran 4: Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari.

2. Tujuan Kedua: Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 5: Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan;
- Sasaran 6: Pertumbuhan PAD; dan
- Sasaran 7: Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan).



3. Tujuan Ketiga: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 8: Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan, dan Akurat;
- Sasaran 9: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- Sasaran 10: Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional;
- Sasaran 11: Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana; dan
- Sasaran 12: Optimalisasi Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

4. Tujuan Keempat: Penguatan Jaring Pengaman Sosial.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 13: Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran; dan
- Sasaran 14: Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif, dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa;

5. Tujuan Kelima: Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 15: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
- Sasaran 16: Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan;
- Sasaran 17: Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; dan
- Sasaran 18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda.



6. Tujuan Keenam: Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 19: Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu; dan
- Sasaran 20: Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama;

7. Tujuan Ketujuh: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai:

- Sasaran 21: Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar; dan
- Sasaran 22: Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir;

Setelah penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 maka indikator yang digunakan pada masing-masing Tujuan dan Sasaran di dalam RPJMD tersebut dilihat lebih lanjut pada Tabel 5.3 berikut:



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 5.3.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

PERUBAHAN			SATUAN	KONDISI TAHUN DASAR 2020	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TARGET RPJMD MURNI					REALISASI RPJMD	PROGNOSIS	TARGET PERUBAHAN RPJMD			
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
VISI: TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA																
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT																
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.280	3.289	3.297	3.305	3.313	3.322	3.330	5.209,54	3.305	3.313	3.322	3.330
	1	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Nilai Tukar Nelayan/NTN	%								112,58	115,50	116,00	116,10	116,30
	2	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.391	2.170	2.387	2.626	2.888	3.177	3.495	4.874,87	5.021,12	5.171,75	5.326,90	5.486,71
	3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	67	69,47	69,73	69,95	70,18	70,28	70,38	74,13	69,95	70,18	70,28	70,38
	4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	25,31	27	27,1	27,2	27,3	27,4	27,5	27,13	27,22	27,32	27,41	27,50
2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan		PDRB perkapita ADHK	Juta Rp	78,04	78,96	80,07	81,91	83,9	86,02	88,27	87,24	87,50	87,76	88,01	88,27
			PDRB perkapita ADHB	Juta Rp								141,68	142,51	143,34	144,17	145,00
			Indeks Gini	%	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,325	0,324	0,323	0,321	0,318
			Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,8	1.5 - 3.5	4.8 - 5.6	4.9 - 5.8	5.0 - 5.9	5.1 - 6.1	5.2 - 6.3	5,09	4.9 - 5.8	5.0 - 5.9	5.1 - 6.1	5.2 - 6.3
	5	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	49.317	52.493	55.744	59.334	63.154	67.221	71.550	59.316,27	60.020,915	62.650,51	65.280,105	67.909,7



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN				SATUAN	KONDISI TAHUN DASAR 2020	PROYEKSI TAUN BERJALAN 2021	TARGET RPJMD MURNI					REALISASI RPJMD	PROGNOSIS	TARGET PERUBAHAN RPJMD		
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	41,7	38,5	39,77	40,2	40,61	41,03	41,45	40,81	40,97	41,13	41,29	41,45
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,5	8,52	8,54	8,56	8,58	8,6	8,62	8,83	8,56	8,58	8,6	8,62
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	5,1	5,6	5,8	6	6,2	6,4	6,6	4,93	5,35	5,77	6,18	6,60
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-11,32	2,4	3	3,4	3,8	4	4,2	15,45	6,50	7,00	7,50	8,00
			Persentase Koperasi yang berkualitas	%	51,04	51,04	52,04	53,04	54,04	55,04	56,04	46,55	47,55	48,55	49,55	50,55
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	29,87	29,87	30,21	30,55	30,89	31,23	31,57	29,95	30,21	30,55	30,89	31,23
			Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN.	Miliar Rupiah	23.751	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500	18.220	18.914	19.609	20.305	21.000
	6	Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	%	-8,85	-1,22	5,59	5,24	5,53	5,53	5,91	21,80	1,99	9,22	-2,15	2,65
	7	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2168	2.173	2.177	2.181	2.186	2.191	2.196	3.989,22	3.989,22	3.996,25	4.003,45	4.010,84
Indeks Ketahanan Pangan			Indeks	62,7	62,75	62,8	62,81	62,82	62,83	62,84	63,26	63,26	63,27	63,28	63,29	
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN																
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,57	69,17	69,77	70,37	70,97	71,57	72,17	69,77	70,37	70,97	71,57	72,17

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-31



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN			SATUAN	KONDISI TAHUN DASAR 2020	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TARGET RPJMD MURNI					REALISASI RPJMD	PROGNOSIS	TARGET PERUBAHAN RPJMD		
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
8	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan dan Akurat	Indeks SPBE	Indeks	2,8	2,8	2,85	2,9	2,95	3	3,18	2,68	2,71	2,74	2,77	2,80
9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Indeks Manajemen Risiko	Indeks								3	3	3	3	3
		Level Maturitas SPIP	Level								3	3	3	3	3
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	B	B	B	B	B	B	A-	A-	A-	A-	A-
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (281)	Baik (283)	Baik (286)	Baik (294)	Baik (304)	Baik (314)	Sangat Baik (325)	314	316	330,5	332	332
11	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,22	0,25	0,37	0,46	0,53	0,64	0,73	0,4	0,43	0,44	0,49	0,54
12	Optimalisasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	NA	1,09	1,13	1,25	1,33	1,20	1,25	76,98	79,31	82,86	85,75	88,82
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA															
4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan	%	6,13	6,07	6,01	5,74	5,69	5,63	5,57	6,03	5,74	5,69	5,63	5,57
13	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Pengeluaran Perkapita	Rp.								1.831.700,00	1.960.394,43	2.027.526,71	2.094.659,00	2.161.791,29



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN			SATUAN	KONDISI TAHUN DASAR 2020	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TARGET RPJMD MURNI					REALISASI RPJMD	PROGNOSIS	TARGET PERUBAHAN RPJMD		
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,34	10,22	10,1	9,5	8,7	8,1	7,5	8,23	8,05	7,54	6,91
14	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6562 (Desa Berkembang)	0.6697 (Desa Berkembang)	0.6779 (Desa Berkembang)	0.6861 (Desa Berkembang)	0.6901 (Desa Berkembang)	0.6895 (Desa Berkembang)	0.7101 (Desa Mandiri)	0.6914 (Desa berkembang)	0,7101(Desa Maju)	0,7281(Desa Maju)	0,7461(Desa Maju)	0,7661(Desa Maju)
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,59	76,26	76,7	77,14	77,58	78,03	78,47	76,46	76,69	77,04	77,39	77,74
15	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,96	70,13	70,27	70,41	70,56	70,7	70,85	70,50	70,62	70,82	71,02	71,23
		Prevalensi Stunting	%	16,82	16,3	15,8	15,3	14	13,3	12,8	15,40	15,3	14	13,3	12,8
16	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	12,9	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,99	13,05	13,09	13,14	13,19
		Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,12	10,13	10,14	10,15	10,16	10,17	10,18	10,37	10,49	10,62	10,75	10,88
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,62	84,72	100	100	100	100	100	84,54	100	100	100	100
17	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,1	93,1	93,2	93,3	93,4	94,5	93,6	93,49	93,52	93,55	93,57	93,60
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73,44	74,3	75,5	76,03	77,78	78,21	79,36	64,24	64,77	66,52	66,95	68,10
18	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	n/a	0,315	0,504	0,58	0,672	0,672	0,672	58,17	58,22	58,33	59,03	60,05
		SDI (Sport Development Index)	Indeks	35,37	12,5	6,84	20,29	24,91	32,47	7,67	0,398	0,408	0,413	0,421	0,426
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN															
6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n/a	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	52,12	54,60	55,60	56,60	57,60

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-33



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN				SATUAN	KONDISI TAHUN DASAR 2020	PROYEKSI TAHUN BERJALAN 2021	TARGET RPJMD MURNI					REALISASI RPJMD	PROGNOSIS	TARGET PERUBAHAN RPJMD		
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	19	Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	n/a	28,09	28,11	28,16	28,21	28,24	28,27	28,11	28,16	28,21	28,24	28,27
			Nilai Warisan Budaya	Nilai	n/a	48,24	48,84	49,64	50,44	51,24	52,04	49,30	49,64	50,44	51,24	52,04
			Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	n/a	1,46	1,49	1,55	1,61	1,65	1,69	1,50	1,61	1,73	1,77	1,81
			Nilai Budaya Literasi	Nilai	n/a	72,13	64,73	64,78	64,83	64,88	73,5	66,78	67,00	67,53	67,78	68,03
	20	Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	n/a	73	74,46	75,95	77,43	79,02	80,6	85,78	81,62	81,62	82,93	84,26
			Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,77	2,79	2,81	2,83	2,85	2,87	2,89	2,95	2,85	2,85	2,87	2,89
MISI 5 MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN																
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Rasio Konektivitas	Rasio	38,42	38,42	41,33	44,25	47,17	50,08	65	0,51	0,53	0,55	0,56	0,65
	21	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	Rasio	93,72	94,50	95,5	96	96,2	96,4	96,6	96,32	97,30	98,10	98,80	99,20
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,68	93,76	96,15	97,03	97,82	98,01	98,63	91,82	91,85	91,88	92,00	92,12
			Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	83,84	87,06	91,32	93,06	95,8	97	100	91,62	90,51	90,51	90,68	90,91
			Cakupan Pelayanan Drainase	%	45,1	45,1	48,1	51,3	54,3	57,3	60,3	50,79	51,30	54,30	57,30	60,30
			Persentase Penanganan Sampah									72,42	72,00	71,00	70,00	70,00
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	n/a	170,54	145,27	123,73	75,36	37,28	0	147,24	374,68	369,68	364,68	359,68
	22	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase jalan kondisi mantap	%			63,25	64,75	66,25	67,75	69,25	80,62	80,78	80,94	81,10	81,26
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	18	18	18	18	18	18	30	0,24	0,23	0,23	0,23	0,3
			Rasio Konektivitas Anekutan Perairan									0,32	0,32	0,32	0,33	0,35

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-34



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN				SATUAN	KONDISI TAHUN DASAR 2020	PROYEKSI TAUN BERJALAN 2021	TARGET RPJMD MURNI					REALISASI RPJMD	PROGNOSIS	TARGET PERUBAHAN RPJMD		
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan									49,47	45	55	60	65



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.

Tabel 5.4.

Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan subsektor perikanan.
	1 Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I b) dinyatakan dalam persentase.
	2 Peningkatan pembangunan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pariwisata .



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
	3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan subsector Kehutanan dan Penebangan Kayu .
2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	PDRB perkapita ADHK		$\frac{PDRB \text{ (adh Konstan)}}{Jumlah \text{ Penduduk}}$
		PDRB perkapita ADHB		$\frac{PDRB \text{ (adh Berlaku)}}{Jumlah \text{ Penduduk}}$
		Indeks Gini		$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	
		Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
5	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh Kategori Konstruksi
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
			terhadap PDRB harga berlaku	
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	$\frac{PDRB_{t\text{sektor industri pengolahan non migas}} - PDRB_{t\text{sektor industri pengolahan non migas}-1}}{PDRB_{t\text{sektor industri pengolahan non migas}-1}}$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan sektor industri pengolahan non migas t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	$\frac{PDRB_{t\text{sektor perdagangan}} - PDRB_{t\text{sektor perdagangan}-1}}{PDRB_{t\text{sektor perdagangan}-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan <i>sektor perdagangan</i> t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		
			Persentase Koperasi yang berkualitas	$\frac{Koperasi\ berkualitas_n - Koperasi\ berkualitas_{n-1}}{Koperasi\ berkualitas_{n-1}} \times 100\%$
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	$\frac{UMKM\ naik\ kelas_n - UMKM\ naik\ kelas_{n-1}}{UMKM\ naik\ kelas_{n-1}} \times 100\%$
			Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Makna Indikator : Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Cara Menghitung Indikator : Untuk mengetahui persentase capaian kerja kinerja pertahun, yaitu : Peningkatan Realisasi Investasi dibagi target peningkatan investasi X 100%
6	Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	$\frac{PAD\ t - PAD\ t - 1}{PAD\ t - 1} \times 100\%$ Ket: t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		
	7	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{PDRB_{(Pertanian)t} - PDRB_{(Pertanian)t-1}}{PDRB_{(Pertanian)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sub kategori pertanian
			Indeks Ketahanan Pangan	$Y(f) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Dimana : i : Indikator ke-1,2,3,...,7,8 dan 9 j : Kabupaten ke-1,2,3,...,414,415 dan 416; kota ke-1,2,3,...,96,97 dan 98



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL																																																
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR																																																	
			Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j a_i : Bobot masing – masing indikator ke-i X_{ij} : Nilai standarisasi masing – masing indikator ke-I pada kabupaten/kota ke-j Tabel 1. Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan <i>Expert Judgement</i> <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Bobot</th></tr><tr><td colspan="3">ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN</td></tr><tr><td>1.</td><td>Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari</td><td>0,30</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Total</td><td>0,30</td></tr><tr><td colspan="3">ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN</td></tr><tr><td>2.</td><td>Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan</td><td>0,15</td></tr><tr><td>3.</td><td>Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran</td><td>0,075</td></tr><tr><td>4.</td><td>Persentase rumah tangga tanpa akses listrik</td><td>0,075</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Total</td><td>0,30</td></tr><tr><td colspan="3">ASPEK PEMANFAATAN PANGAN</td></tr><tr><td>5.</td><td>Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun</td><td>0,05</td></tr><tr><td>6.</td><td>Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih</td><td>0,15</td></tr><tr><td>7.</td><td>Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk</td><td>0,05</td></tr><tr><td>8.</td><td>Prevalensi balita stunting</td><td>0,05</td></tr><tr><td>9.</td><td>Angka harapan hidup pada saat lahir</td><td>0,10</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Total</td><td>0,40</td></tr></table>	No	Indikator	Bobot	ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN			1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30	Sub Total		0,30	ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN			2.	Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan	0,15	3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075	4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	Sub Total		0,30	ASPEK PEMANFAATAN PANGAN			5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05	6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05	8.	Prevalensi balita stunting	0,05	9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10	Sub Total		0,40
No	Indikator	Bobot																																																	
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN																																																			
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	0,30																																																	
Sub Total		0,30																																																	
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN																																																			
2.	Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan	0,15																																																	
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075																																																	
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075																																																	
Sub Total		0,30																																																	
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN																																																			
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05																																																	
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15																																																	
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05																																																	
8.	Prevalensi balita stunting	0,05																																																	
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10																																																	
Sub Total		0,40																																																	



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	RB GENERAL CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN RB GENERAL TINGKAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Output dan Immediate Outcome) Kebijakan Percepatan SASARAN 1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Ucinah, dan Kolaboratif SASARAN 2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (Intermediate dan Ultimate Outcome) SS 1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Ucinah, dan Kolaboratif SS 2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional RB TEMATIK Kementerian/Lembaga Capaian Program dan Kegiatan yang Berkaitan dengan Tema Utama RB Tematik Fokus Pada: • Penurunan Tingkat Kemiskinan • Peningkatan Realisasi Investasi • Tingkat Inflasi • Tingkat Penggunaan PDN • Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya Pemerintah Daerah STRATEGI MEMBANGUN RB TEMATIK CAPAIAN DAMPAK RB TEMATIK Fokus Pada: • Penurunan Tingkat Kemiskinan • Peningkatan Realisasi Investasi • Tingkat Inflasi • Tingkat Penggunaan PDN • Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL																				
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR																					
	8	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan dan Akurat	Indeks SPBE	<table><tr><th>Nomor Domain</th><th>Nama Domain</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Domain 1</td><td>Kebijakan Internal SPBE</td><td>13,00</td></tr><tr><td>Domain 2</td><td>Tata Kelola SPBE</td><td>25,00</td></tr><tr><td>Domain 3</td><td>Manajemen SPBE</td><td>16,50</td></tr><tr><td>Domain 4</td><td>Layanan SPBE</td><td>45,50</td></tr><tr><td></td><td>Total Bobot</td><td>100,00</td></tr></table>			Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)	Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00	Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00	Domain 3	Manajemen SPBE	16,50	Domain 4	Layanan SPBE	45,50		Total Bobot	100,00
				Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)																		
				Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00																		
				Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00																		
				Domain 3	Manajemen SPBE	16,50																		
				Domain 4	Layanan SPBE	45,50																		
					Total Bobot	100,00																		
				<table><tr><th>No.</th><th>Nilai Indeks</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>			No.	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
				No.	Nilai Indeks	Predikat																		
				1	4,2 – 5,0	Memuaskan																		
				2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																		
				3	2,6 – < 3,5	Baik																		
				4	1,8 – < 2,6	Cukup																		
				5	< 1,8	Kurang																		



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL																																						
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR																																							
9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub-komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub-komponen 1 Efektivitas</th><th>Sub-komponen 2 Kualitas</th><th>Sub-komponen 3 Penguasaan</th></tr><tr><td></td><td>20%</td><td>30%</td><td>50%</td><td></td></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>3</td><td>7,5</td><td>15,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Jumlah Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	Komponen	Sub-komponen			Total Bobot	Sub-komponen 1 Efektivitas	Sub-komponen 2 Kualitas	Sub-komponen 3 Penguasaan		20%	30%	50%		Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	7,5	15,5	25	Jumlah Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100
		Komponen	Sub-komponen			Total Bobot																																			
			Sub-komponen 1 Efektivitas	Sub-komponen 2 Kualitas	Sub-komponen 3 Penguasaan																																				
	20%	30%	50%																																						
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																					
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																					
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																					
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	7,5	15,5	25																																					
Jumlah Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																					
Indeks Manajemen Risiko	Sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, komponen Indeks Manajemen Resiko sebagai berikut: <table><tr><th>Komponen/Area</th><th>Bobot Area</th><th>Bobot Komponen</th></tr><tr><td>PERENCANAAN</td><td></td><td>40.00%</td></tr><tr><td>Kualitas Perencanaan</td><td>40.00%</td><td></td></tr><tr><td>KAPABILITAS</td><td></td><td>30.00%</td></tr><tr><td>Kepemimpinan</td><td>5.00%</td><td></td></tr><tr><td>Kebijakan Manajemen Risiko</td><td>5.00%</td><td></td></tr><tr><td>Sumber Daya Manusia</td><td>5.00%</td><td></td></tr><tr><td>Kemitraan</td><td>2.50%</td><td></td></tr><tr><td>Proses Manajemen Risiko</td><td>12.50%</td><td></td></tr><tr><td>HASIL</td><td></td><td>30.00%</td></tr><tr><td>Aktivitas Penanganan Risiko</td><td>18.75%</td><td></td></tr><tr><td>Outcomes</td><td>11.25%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL BOBOT</td><td></td><td>100.00%</td></tr></table>	Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen	PERENCANAAN		40.00%	Kualitas Perencanaan	40.00%		KAPABILITAS		30.00%	Kepemimpinan	5.00%		Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%		Sumber Daya Manusia	5.00%		Kemitraan	2.50%		Proses Manajemen Risiko	12.50%		HASIL		30.00%	Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%		Outcomes	11.25%		TOTAL BOBOT		100.00%	
Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen																																							
PERENCANAAN		40.00%																																							
Kualitas Perencanaan	40.00%																																								
KAPABILITAS		30.00%																																							
Kepemimpinan	5.00%																																								
Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%																																								
Sumber Daya Manusia	5.00%																																								
Kemitraan	2.50%																																								
Proses Manajemen Risiko	12.50%																																								
HASIL		30.00%																																							
Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%																																								
Outcomes	11.25%																																								
TOTAL BOBOT		100.00%																																							
Level Maturitas SPIP	BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan																																								



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		
				pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.
		Indeks Pelayanan Publik		$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$
		Opini Laporan Keuangan		Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
	10	Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskrimintaif

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-46



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
	11	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Penilaian 3 Indeks Ketahanan Daerah, 7 Indeks Prioritas, 71 nilai Indikator yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	12	Optimalisasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$I_{IPKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ dimana: I_{IPKKU} : Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) WD^i : Nilai bobot pada dimensi ke-i WS_n^i : Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i S_n^i : Nilai rerata skala likert pada indicator di subdimensi ke- n dimensi ke-i Kepmendagri No. 100.4.3-669 tahun 2022
4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial		Angka Kemiskinan	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Miskin}{Jumlah\ Penduduk} \times 100\%$



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
	13	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	Pengeluaran perkapita	Pengeluaran per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan $y = \frac{p}{q}$ dimana: y = pengeluaran per kapita p = pengeluaran rumah tangga sebulan q = jumlah anggota rumah tangga
			Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$
	14	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif, dan Mandiri dalam	Indeks Desa Membangun	$\text{Indeks Varibel} = (\sum \text{Indikator} X) / (\text{Nilai Maksimum } (X))$ Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM). $IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	
	Pengelolaan Potensi Desa		Keterangan: IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan Desa Sangat Tertinggal: < 0,491 Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599 Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707 Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815 Desa Mandiri: > 0,815
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		
	15	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
			Prevalensi Stunting	Angka prevalensi periode = jumlah penderita lama dan baru ÷ jumlah penduduk pertengahan x 100% (1000)
	16	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$
			Rata-rata lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	$APS \text{ SMA/SMK} = \frac{Jumlah \text{ murid usia } 16-18 \text{ thn}}{Jumlah \text{ penduduk usia } 16-18 \text{ thn}} \times 1.000$
	17	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - laki} \times 100$
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persamaan yang digunakan untuk penghitungan IPA adalah sebagai berikut: $IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks \ K_j)$

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	
18	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Nilai Indikator X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 Nilai Transformasi X1' X2' X3' X4' X5' X6' X7' X8' X9' X10' X11' X12' X13' X14' X15' Nilai Indeks Domain Domain 1 Pendidikan Domain 2 Kesehatan dan Kesejahteraan Domain 3 Kesempatan dan Lapangan Kerja Domain 4 Partisipasi dan Kepemimpinan Domain 5 Gender dan Diskriminasi Nilai IPP NILAI IPP Keterangan : X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja yang sedang hamil),



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
				X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).
			SDI (Sport Development Index)	Indeks Ruangan Terbuka Luas ruang terbuka dalam meter persegi (m2) yang ada di kecamatan sampel tadi dan jumlah penduduk dari usia 7 tahun ke atas di kecamatan tersebut. Indeks SDM Seluruh jumlah pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur yang ada di kecamatan sampel dan jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas di kecamatan sampel



PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		
				Indeks Partisipasi Partisipasi diukur berdasarkan jumlah responden yang berolahraga 3 kali seminggu atau lebih dan jumlah sampel responden. Indeks Kebugaran Indeks kebugaran diperoleh dari tes MFT masing-masing individu peserta tes MFT. Metode penentuan indeks Indeks ditentukan untuk tiap dimensi yaitu dari 0 hingga 1. Skala tersebut diperoleh dengan perhitungan: $indeks\ dimensi = \frac{nilai\ aktual - nilai\ minimum}{nilai\ maksimum - nilai\ minimum}$ Kemudian dihitung rata-rata dari keempat indeks tersebut $SDI = \frac{1}{4} \times indeks\ partisipasi + \frac{1}{4} \times indeks\ ruang\ terbuka + \frac{1}{4} \times indeks\ kebugaran + \frac{1}{4} \times indeks\ SDM$



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN			DEFINISI OPERASIONAL																		
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR																			
6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dimensi penghitungan: Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Dimensi <table><tr><th>Kode</th><th>Nama Dimensi</th></tr><tr><td>D1</td><td>Ekonomi Budaya</td></tr><tr><td>D2</td><td>Pendidikan</td></tr><tr><td>D3</td><td>Ketahanan Sosial Budaya</td></tr><tr><td>D4</td><td>Warisan Budaya</td></tr><tr><td>D5</td><td>Ekspresi Budaya</td></tr><tr><td>D6</td><td>Budaya Literasi</td></tr><tr><td>D7</td><td>Gender</td></tr><tr><td colspan="2">IPK Provinsi</td></tr></table>	Kode	Nama Dimensi	D1	Ekonomi Budaya	D2	Pendidikan	D3	Ketahanan Sosial Budaya	D4	Warisan Budaya	D5	Ekspresi Budaya	D6	Budaya Literasi	D7	Gender	IPK Provinsi	
	Kode	Nama Dimensi																			
D1	Ekonomi Budaya																				
D2	Pendidikan																				
D3	Ketahanan Sosial Budaya																				
D4	Warisan Budaya																				
D5	Ekspresi Budaya																				
D6	Budaya Literasi																				
D7	Gender																				
IPK Provinsi																					
19	Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Definisi Operasional: Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Nilai Pada Dimensi Ekonomi Budaya (D1) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut																		



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
				$D_1 = S_{1.1}$ $S_{1.1} = \frac{X_{1.1} - \min(X_{1.1})}{\max(X_{1.1}) - \min(X_{1.1})}$
			Nilai Warisan Budaya	Definisi Operasional: Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Nilai Pada Dimensi Warisan Budaya (D4) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4.i} = \frac{S_{4.1} + S_{4.2} + S_{4.3} + S_{4.4} + S_{4.5} + S_{4.6}}{6}$ $S_{4.i} = \frac{X_{4.i} - \min(X_{4.i})}{\max(X_{4.i}) - \min(X_{4.i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
			Nilai Ekspresi Budaya	Definisi Operasional: Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat. Nilai Pada Dimensi Ekspresi Budaya (D4) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5.i} = \frac{S_{5.1} + S_{5.2} + S_{5.3} + S_{5.4}}{4}$ $S_{5.i} = \frac{X_{5.i} - \min(X_{5.i})}{\max(X_{5.i}) - \min(X_{5.i})}, i = 1, 2, 3, 4$
			Nilai Budaya Literasi	Aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Nilai Pada Dimensi Budaya Literasi (D6) dapat diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		
				$D_6 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 S_{6.i} = \frac{S_{6.1} + S_{6.2} + S_{6.3}}{3}$ $S_{6.i} = \frac{X_{6.i} - \min(X_{6.i})}{\max(X_{6.i}) - \min(X_{6.i})}, i = 1, 2, 3$
20	Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama		Mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan model : Pengukuran variabel Pola Pendidikan Keluarga (X1); Peran Kementerian Agama (X2); dan Implementasi Kearifan Lokal (X3)
		Indeks Ketahanan Nasional		Indeks Ketahanan Nasional dihitung indeks dari delapan gatra, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Delapan gatra terdiri dari 108 variabel dan 821 indikator. Pengolahan data terdiri dari dua, yakni data kualitatif (diambil dari data kebijakan), dan data kuantitatif (data kinerja). Data tersebut kemudian digabungkan sehingga menghasilkan indeks komposit yang



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
				menunjukkan ketahanan nasional. Indeks komposit terdiri dari angka 1 hingga 5. Indeks 1 menunjukkan ketahanan nasional berada pada posisi rawan, indeks 2 kurang tangguh, indeks 3 cukup tangguh, indeks 4 tangguh, dan indeks 5 sangat tangguh.
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Rasio Konektivitas	Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
	21	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	$\frac{\text{Sambungan listrik}}{\text{Jumlah rumah kepala keluarga}} \times 100$
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	$\frac{\text{Jumlah RT dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas}}{\text{Jumlah RT seluruhnya pada periode yang sama}} \times 100$
			Cakupan Pelayanan Air Limbah	$\frac{\text{Total Volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPAL domestik Regional}} \times 100$



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
			Cakupan Pelayanan Drainase	$\frac{\text{Luas drainase kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan drainase yg dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi}}{\text{Luas daerah drainase kewenangan provinsi}} \times 100$
			Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Luas Volume sampah yang tertangani}}{\text{Total volume timbunan sampah}} \times 100$
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan kumuh yang tertangani (ha) di wilayah Kepulauan Riau
22	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase jalan kondisi mantap		$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang seluruh jalan di wilayah provinsi}} \times 100$
		Rasio Konektivitas Angkutan Darat	IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu	



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
			Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	K2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyebe rangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayali yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
				3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan - 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
			Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan	$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan dan kerjasama perbatasan yang diimplementasikan}}{\text{jumlah total rencana aksi dan usulan kerjasama perbatasan}} \times 100\%$

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-61



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

PERUBAHAN				DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	
			Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	



Tabel 5.5.

Sandingan Sasaran RPJMD Murni Tahun 2021-2026 dan RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau

MURNI			PERUBAHAN		
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT					
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku
	1	Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku		
	2	Peningkatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku
	1	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku		
	2	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
	3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi		3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
	4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku		4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku
2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		PDRB perkapita ADHK	2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		PDRB perkapita ADHK
			Indeks Gini				PDRB perkapita ADHB
			Pertumbuhan Ekonomi				Indeks Gini
							Pertumbuhan Ekonomi
	5	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku		5	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-64



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
		Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku			Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku				Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
			Persentase Koperasi yang berkualitas				Persentase Koperasi yang berkualitas
			Persentase UMKM yang Naik Kelas				Persentase UMKM yang Naik Kelas
			Nilai Realisasi Investasi PMA				Persentase peningkatan nilai realisasi dan investasi PMA dan PMDN
			Nilai Realisasi Investasi PMDN				
	6	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	6	Pertumbuhan PAD		Persentase Pertumbuhan PAD



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
	7	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku		7	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku
			Indeks Ketahanan Pangan				Indeks Ketahanan Pangan
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN							
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif		Indeks Reformasi Birokrasi	3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif		Indeks Reformasi Birokrasi



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
	8	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE		8	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan, dan Akurat	Indeks SPBE
	9	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	
			Indeks Pelayanan Publik			Indeks Manajemen Risiko	
			Opini Laporan Keuangan			Level Maturitas SPIP	
						Indeks Pelayanan Publik	
						Opini Laporan Keuangan	



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
	10	Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)		10	Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)
	11	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah		11	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
	12	Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12	Optimalisasi Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA							
4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial		Angka Kemiskinan	4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial		Angka Kemiskinan
	13	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka		13	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
	14	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif	Indeks Desa Membangun		14	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif, dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa	Indeks Desa Membangun
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia
	15	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		15	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Prevalensi Stunting				Prevalensi Stunting
	16		Harapan Lama Sekolah		16	Meningkatnya Pemerataan Mutu	Harapan Lama Sekolah



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
		Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah			dan Akses Layanan Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
	17	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		17	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)				Indeks Perlindungan Anak (IPA)
	18	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)		18	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)
			SDI (Sport Development Index)				SDI (Sport Development Index)



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI			PERUBAHAN				
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR		
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
6	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat		Indeks Pembangunan Kebudayaan	6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	
	19	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya		19	Peningkatan Implementasi Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya
			Nilai Warisan Budaya				Nilai Warisan Budaya
			Nilai Ekspresi Budaya				Nilai Ekspresi Budaya
			Nilai Budaya Literasi				Nilai Budaya Literasi
20		Indeks Kerukunan Umat Beragama	20	Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan	Indeks Kerukunan Umat Beragama		
					Indeks Ketahanan Nasional		



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
		Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Ketahanan Nasional			pembinaan kerukunan Umat Beragama	
MISI 5 Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan							
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Rasio Konektivitas	7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Rasio Konektivitas
	21	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi		21	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
			Cakupan Pelayanan Air Limbah				Cakupan Pelayanan Air Limbah
			Cakupan Pelayanan Drainase				Cakupan Pelayanan Drainase
			Cakupan Pelayanan Persampahan				Persentase penanganan Persampahan
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh				Pengurangan Luas Kawasan Kumuh
	22	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Persentase jalan kondisi baik		22	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase jalan kondisi mantap
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat				Rasio Konektivitas Angkutan Darat
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan				



MURNI				PERUBAHAN			
TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR	TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut				
							Rasio Konektivitas Angkutan Perairan
							Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

5.3. KESELARASAN RPJMD 2021-2026 DAN RPJPD 2005-2025

5.3.1. Kesesuaian Misi RPJMD 2021-2026 dan Misi RPJPD 2005-2025

RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi acuan penting dalam penyusunan RPJMD di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan terintegrasinya pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan telah terintegrasinya perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025, analisis terhadap kesamaan upaya pembangunan yang ditunjukkan oleh misi perlu dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keseluruhan misi yang ada di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 telah sesuai dan selaras dengan misi yang ada di dalam RPJPD Provinsi



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Adapun analisis terhadap keselarasan Misi Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026 dan Misi Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025 dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6.

Keselarasan Misi RPJMD 2021-2026 dan RPJPD 2005-2025 Provinsi Kepulauan Riau

Misi RPJPD 2005-2025	Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Pembahasan	Kesimpulan
Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJPD adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah adanya kesamaan upaya dalam pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau	Semua Misi dalam RPJMD telah sesuai dengan Misi dalam RPJPD
Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJPD dimana salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing daerah di dalam RPJPD dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan di	



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Misi RPJPD 2005-2025	Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Pembahasan	Kesimpulan
		bidang Pemerintahan yang sesuai dengan Misi 3 RPJMD	
Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa	Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 2 dan Misi 4 RPJPD adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini yaitu adanya kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM/Masyarakat Kepulauan Riau	
Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 1 RPJPD dimana hubungan tersebut terlihat dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan berakhlak mulia di dalam RPJPD dilakukan	



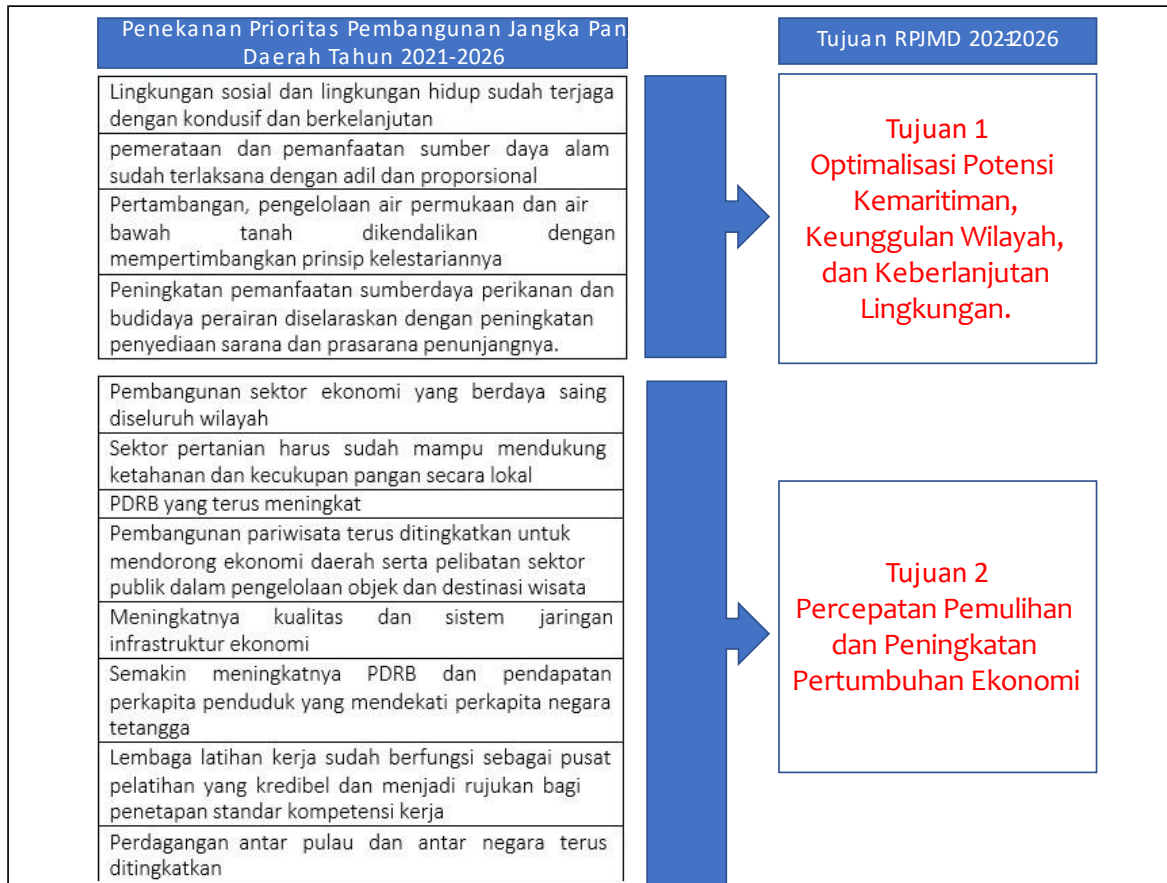
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

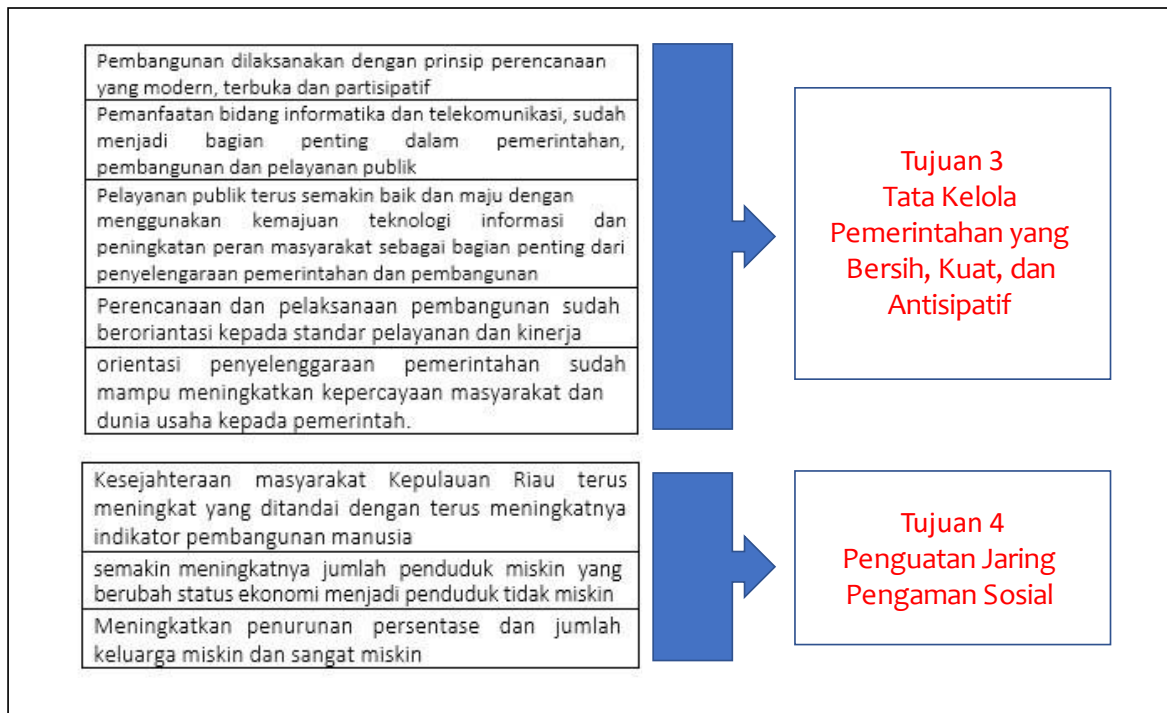
Misi RPJPD 2005-2025	Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Pembahasan	Kesimpulan
		dengan penanaman dan pengimplementasian nilai-nilai budaya yang sesuai dengan upaya yang akan dilakukan dalam misi 4 RPJMD	
Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta pariwisata	Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJPD dimana salah satu upaya yang dilakukan di dalam RPJPD yaitu mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan serta sarana dan prasarana antar pulau di seluruh wilayah yang sesuai dengan upaya yang akan dilakukan dalam Misi 5 RPJMD	

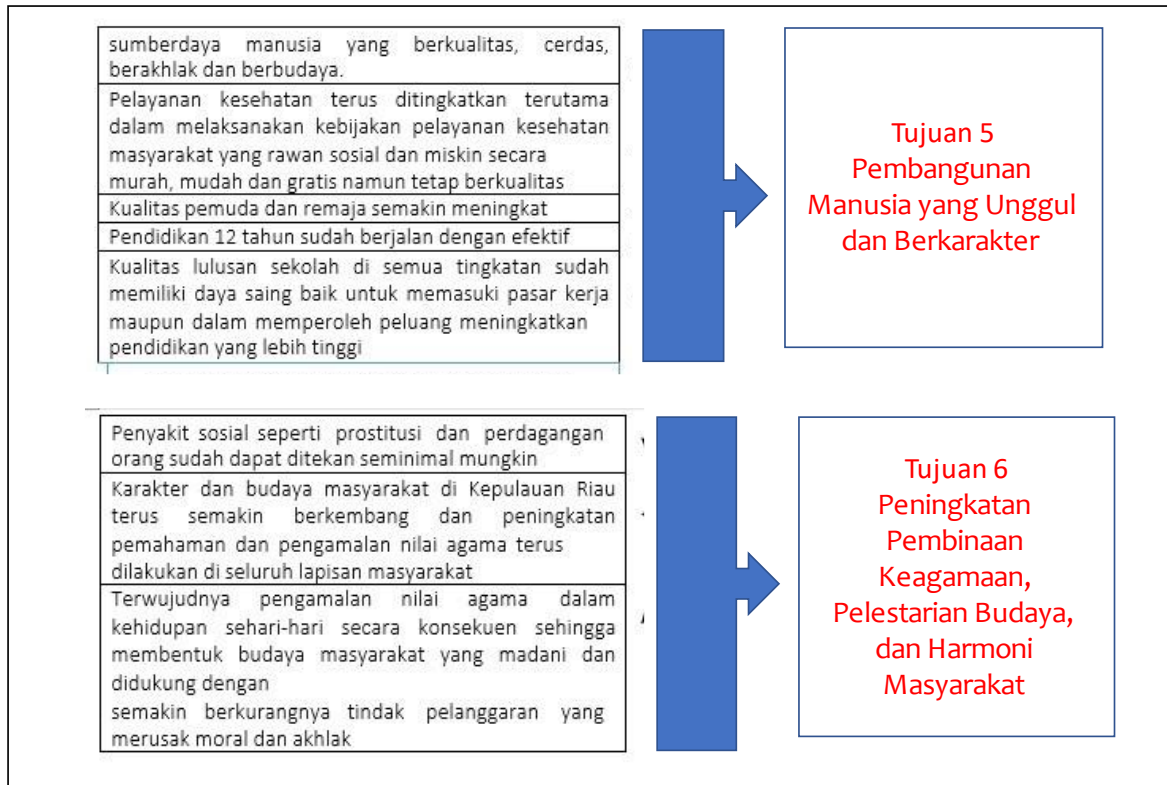


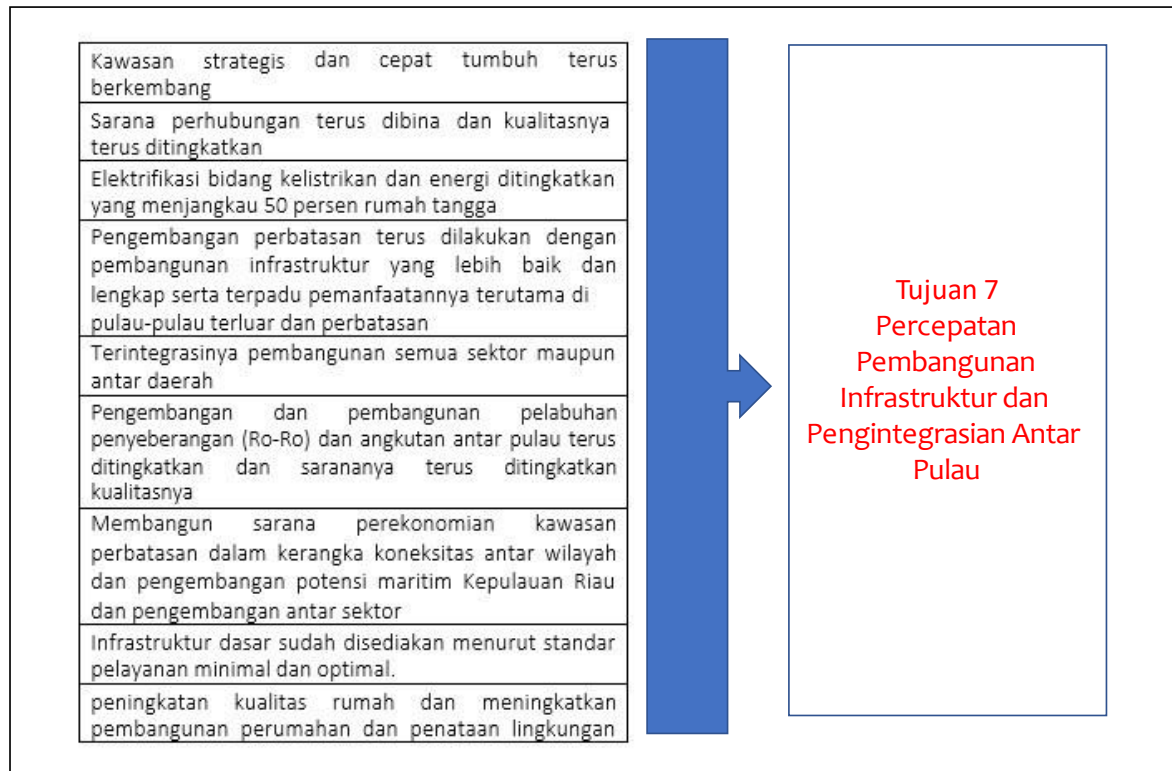
5.3.2. Kesesuaian Tujuan Pembangunan RPJMD 2021-2026 dan Penekanan Prioritas Pembangunan RPJPD 2005-2025

Tujuan jangka panjang pembangunan daerah 2005-2025 adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang berbudaya, maju dan sejahtera. Tujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam upaya mewujudkan tujuan jangka panjang nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Nasional dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana yang diarahkan dan ingin diwujudkan, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda bagi pembangunan lima tahun sesuai periode pembangunan jangka menengah. Penekanan prioritas pembangunan pada setiap tahapan akan berbeda dan berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya hingga tujuan jangka panjang tercapai. Untuk memastikan ketercapaian tersebut, penilaian terhadap kesesuaian antara Tujuan di dalam RPJMD 2021-2026 dan penekanan prioritas pembangunan jangka panjang untuk tahun 2021-2025 pada RPJPD perlu dilakukan. Adapun penilaian kesesuaian tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada Skema berikut:









Skema tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan jangka panjang untuk tahun 2021-2025 telah terakomodir dan selaras dalam setiap tujuan yang hendak dicapai dalam RPJMD 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD Provinsi Kepulauan Riau telah mendukung upaya untuk mencapai cita-cita jangka panjang daerah.



5.4. KESELARASAN RPJMD 2021-2026 DAN RPJMN 2020-2024

Selain RPJPD, penyusunan RPJMD juga harus memerhatikan RPJMN. Keselarasan antara RPJMN dan RPJMD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kunci penilaian keselarasan antara RPJMN tahun 2020–2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari upaya yang dilakukan di dalam RPJMD. Adanya kesamaan upaya di dalam RPJMD dan RPJMN menunjukkan adanya usaha yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa upaya/misi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah selaras dengan misi/upaya yang dilakukan di dalam RPJMN 2020-2024. Adapun penilaian keselarasan antara target makro, misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat lebih lanjut sebagai berikut:



Tabel 5.7.

Penyelarasan Target Indiator Makro Provinsi dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					No	Indikator Pembangunan	Target Perubahan RPJMD Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021-2026			
		Target							Prognosis	Target		
		2020	2021	2022	2023	2024				2023	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.9 - 5.8	5.0 - 5.9	5.1 - 6.1	5.2 - 6.3
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,81	9,43	9	8,55	8,15	2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,74	5,69	5,63	5,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2	4	3,8	3,4	3,1	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,05	7,54	7,21	6,91
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					74,60-84,23	4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,69	77,04	77,39	77,74
5	Rasio Gini					0,360-0,474	5	Rasio Gini	0,324	0,323	0,321	0,318



Tabel 5.8.

Keselarasan Misi RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026	Pembahasan	Kesimpulan
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 RPJMD sesuai dengan Misi 2 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan, pemerataan dan penguatan di Bidang Ekonomi	Semua Misi dalam RPJMD telah sesuai dengan Misi dalam RPJMN
Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 8 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan	
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat	Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 1 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar	



Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026	Pembahasan	Kesimpulan
	dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa	kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dalam pembangunan	
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur	
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya			



Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026	Pembahasan	Kesimpulan
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan rasa aman pada seluruh warga			
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan terpercaya			
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan			

Selain penilaian terhadap kesamaan upaya antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, penilaian terhadap keselarasan tujuan dan sasaran juga harus diperhatikan secara baik. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang ada di dalam RPJMD Provinsi telah selaras dengan apa yang hendak dicapai dalam RPJMN. Adapun keselarasan tujuan antara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2026 dan RPJMN 2020–2024 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:



Tabel 5.9.
Penyelarasan Tujuan RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026			RPJMN	
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	INDIKATOR SASARAN	SASARAN RPJMN
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT				
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Berbagai indikator sektor perikanan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB per Kapita		
		PDRB perkapita ADHK		
		PDRB perkapita ADHB	PDB Rill per Kapita	
		Indeks Gini	Rasio Gini	
		Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026			RPJMN	
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	INDIKATOR SASARAN	SASARAN RPJMN
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN				
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA				
4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN				



RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026			RPJMN	
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	INDIKATOR SASARAN	SASARAN RPJMN
NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
MISI 5 MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN				
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	Rasio-rasio Konektivitas	Meningkatnya konektivitas wilayah



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan strategis tidak hanya mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, yang dilaksanakan oleh program pembangunan daerah. Dengan ini diharapkan Provinsi Kepulauan Riau mampu melaksanakan pembangunan dengan lebih efektif, efisien dan optimal.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Strategi juga memberikan gambaran pelaksanaan sasaran dengan pendekatan spesifik, sehingga mampu meningkatkan efektifitas implementasi program pembangunan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran – sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut:



Tabel 6.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan
Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

VISI: "TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"		
MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
MISI 1. PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT		
Tujuan 1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	
	1	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan
	2	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata
	3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
	4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari
Tujuan 2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	
	5	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan
	6	Pertumbuhan PAD
	7	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN		
Tujuan 3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	
	8	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan, dan Akurat
	9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
	10	Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional
	11	Optimalisasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	12	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-2



VISI: “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”		
MISI/TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
Tujuan 4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	
	13	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran
	14	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif, dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa
Tujuan 5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	
	15	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	16	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan
	17	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
	18	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
Tujuan 6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	
	19	Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu
	20	Peningkatan harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan umat beragama
MISI 5 MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN		
Tujuan 7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	
	21	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar
	22	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir

Dari rumusan strategi pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut.



1. Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pembangunan perekonomian daerah, berdaya saing dan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pembangunan pada sektor-sektor ekonomi yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya dinikmati masa sekarang, namun dapat menunjang kelangsungan hidup generasi masa yang akan datang. Dalam pembangunan ekonomi daerah harus ada proses kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola potensi sumberdaya-sumberdaya yang ada. Kemudian akan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Dengan ini, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Strategi pembangunan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan diupayakan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau memanfaatkan potensi laut, perikanan sebagai nilai tambah inklusif dan berkelanjutan karena potensi laut dapat mencakup pengolahan ikan, industri galangan kapal, konektivitas logistik laut, pariwisata serta aktivitas perekonomian lainnya. Kemudian meningkatkan daya saing UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, perlu adanya investasi untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kondusivitas iklim investasi daerah. Mengimbangi langkah-langkah strategis terkait ekonomi maka, selanjutnya perlu diperhatikan terkait sector lingkungan perlu diupayakan dengan pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan.

2. Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara terus menerus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan era digital yang berkembang pesat, informasi sangat cepat dapat diterima oleh masyarakat. Secara umum, masyarakat selalu menuntut pemerintah daerah mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, dan menjadi salah satu strategi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabilitas dan berintegritas.



Dengan strategi ini diupayakan dengan memaksimalkan penerapan *e-government* guna memperkuat kelembagaan, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian dilakukan peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel. Selanjutnya dengan pengembangan kualitas dan pemberdayaan SDM (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan kinerja aparatur. Dengan demikian diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dan akan tercipta budaya kerja yang professional, melayani dan akuntabel.

3. Penguatan Ketahanan Bencana Daerah

Memahami bahwa kondisi geografis Kepulauan Riau memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, maka kapasitas ketahanan bencana daerah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala kemungkinan bencana yang dapat terjadi. Dalam mewujudkan ketahanan bencana, penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana harus terus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana. Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural. Peningkatan kerangka berpikir sadar bencana juga sangat diperlukan yang tidak kalah lebih penting adalah menegakkan aturan kebencanaan yang meliputi wilayah rawan bencana. Dengan ini, diperlukan komitmen dari semua unsur dalam menegakkan aturan di bidang kebencanaan. Dalam penanggulangan bencana pemerintah daerah perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana. Dengan demikian peningkatan pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan bencana yang tanggap dan terintegrasi dapat diupayakan dengan dengan optimal.

4. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat

kesejahteraan merupakan tujuan dalam pembangunan daerah, kesejahteraan berkaitan erat dengan tingkat produktifitas masyarakat. Dengan produktivitas yang tinggi diharapkan mampu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya produktifitas masyarakat, menjadi keberhasilan dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat, selain itu masyarakat mempunyai kehidupan sosial yang cenderung lebih positif. Implikasi produktifitas masyarakat, diharapkan masyarakat mampu berdaya dan mempunyai penghasilan dalam menyejahterakan hidupnya. Pentingnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan



tantangan yang harus dihadapi dan perlu langkah-langkah untuk mewujudkannya. Hal ini harus diupayakan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata keseluruh wilayah, dan diperkuat dengan kualitas skill/kompetensi tenaga kerja dan terbukanya kesempatan kerja yang merata. Pemerataan pembangunan artinya pembangunan tidak hanya dilaksanakan didaerah perkotaan, namun juga pedesaan. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju desa yang maju dan mandiri. Dengan adanya strategi ini, diharapkan Provinsi Kepulauan Riau mampu mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman dan persaingan global. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM merupakan tugas bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menciptakan daerah yang berdaya saing dan unggul. Melalui SDM yang unggul, berdaya saing dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif dalam pembangunan daerah. Pembangunan kualitas SDM difokuskan pada peningkatan akses dan pelayanan dalam bidang Pendidikan dan kesehatan. Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang didukung dengan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat, peningkatan status gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, pembangunan terkait dengan kepemudaan dan olahraga juga perlu dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan kualitas generasi muda dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

6. Peningkatan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat dalam Berbudaya dan Menjaga Kondusivitas Daerah

Harmonisasi dalam keberagaman bermakna keserasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Harmonisasi dalam keberagaman ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan kesadaran solidaritas toleransi guna melestarikan keberagaman itu sendiri. Keberagaman sosial pada masyarakat Kepulauan Riau melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Kepulauan Riau sebagai



pusat Kebudayaan Melayu dan letaknya yang strategis membuat kebudayaan yang berciri khas Melayu sangat beragam. Menindaklanjuti hal tersebut perlu upaya untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan kekhasan budaya Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga dapat dijaga adanya rasa saling menjaga dan menghormati satu sama lain.

Dengan ini, strategi dalam peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat dalam berbudaya dan menjaga kondusivitas daerah diupayakan dengan meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek budaya lokal. Dengan demikian pemerintah daerah maupun masyarakat harus menciptakan kehidupan yang harmonis dan kondusif di kehidupan masyarakat.

7. Optimalisasi Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, karena infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja serta terwujudnya stabilitas perekonomian.

Sebagai wilayah Kepulauan, pembangunan infrastruktur dalam pembangunan wilayah di Kepulauan Riau harus disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Melihat Kondisi Kepulauan Riau saat ini, masih adanya keterbatasan aksesibilitas serta sarana dan prasarana di wilayah Kepulauan Riau. Sehingga perlu adanya langkah upaya untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan upaya optimalisasi pemerataan pembangunan infrastruktur daerah diupayakan dengan pembangunan Infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah baik darat, laut maupun pesisir. Kemudian dilanjutkan dengan percepatan pemerataan layanan kelistrikan air bersih/minum layak untuk setiap wilayah, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang

sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan, agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6.1
Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026



Dengan gambar diatas, maka setiap tahun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai agenda yang berbeda-beda. Mengingat bahwa RPJMD Periode 2021-2026 ini sudah dilaksanakan 2 tahun yaitu didalam RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 dan segera akan dilaksanakan didalam RKPD Tahun 2024. Maka sesuai dengan tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

I. Agenda Pembangunan Tahun I (2022)

Pembangunan Tahun 2022 menjadi *starting poin* bagi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tahap I RPJMD. Pembangunan tahun 2022 ini, dengan tema pembangunan, “**Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu Dan Nasional**”. Pada tahun ini focus pada penguatan sector perekonomian yang



didukung oleh tata kelola pemerintahan. Dengan ini agenda pembangunan dilaksanakan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata
- 2) Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 3) Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal
- 4) Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya

II. Agenda Pembangunan Tahun II (2023)

Pembangunan Tahun 2023 menjadi estafet pembangunan tahun 2022, berbagai capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau telah dicapai di 2022. Pembangunan Tahun 2023 ini Provinsi Kepulauan Riau akan berfokus pada sector pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian tema pembangunan, **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta tata kelola Pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”**. Sesuai dengan focus dan tema pembangunan tahun 2023, maka agenda pembangunan tahun dilaksanakan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi perekonomian daerah
- 2) Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya
- 3) Pembangunan Infrastruktur Wilayah

III. Agenda Pembangunan Tahun III (2024)

Agenda pembangunan tahun ketiga (2024) menjadi middle dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan, **“Pemerataan pembangunan berkelanjutan guna peningkatan daya saing SDM yang berbudaya”**. Merujuk tema pembangunan ini, Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Agenda pembangunan tahun 2024 ini dilaksanakan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah
2. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya



3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah

IV. Agenda Pembangunan Tahun III (2025)

Kebijakan pembangunan tahun keempat (2025) dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, tahun ini mengusung tema pembangunan, **“Optimalisasi potensi Sumber Daya Alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan”**. Merujuk tema pembangunan ini, Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk membangun infrastruktur demi memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada daerah pinggiran. Dengan ini, diharapkan pembangunan yang merata dapat mulai dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Provinsi Kepulauan Riau mampu bertumbuh menjadi Kepulauan Riau yang unggul dan terdepan. Agenda pembangunan tahun 2025 ini dilaksanakan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah
2. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah

V. Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Kebijakan pembangunan tahun kelima (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan, **“Perwujudan kesejahteraan masyarakat Menuju Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**. Merujuk tema pembangunan ini, Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Dengan ini, diharapkan pembangunan yang merata dapat mulai dirasakan oleh seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Provinsi Kepulauan Riau mampu bertumbuh menjadi Kepulauan Riau yang unggul dan terdepan. Agenda pembangunan tahun 2026 ini dilaksanakan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah
2. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya



3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Sesuai rumusan strategi dan arah pembangunan serta agenda pembangunan diatas, diketahui bahwa RPJMD ini telah dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023, sehingga arahkebijakan/focus pembangunan pada perubahan RPJMD digunakan pada Tahun 2024 hingga Tahun 2026. Berikut disajikan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.2.
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Fokus Pembangunan

VISI: "TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"				Tahapan Pembangunan				
TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT								
1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Pembangunan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Optimalisasi pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya					
1	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan		Peningkatan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan sektor perikanan					
			Pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan kelautan dan perikanan					
			Peningkatan nilai tambah produksi pertanian berbasis industri dan pemasarannya melalui Teknologi Tepat guna					
2	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata		Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi.					



VISI: "TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"				Tahapan Pembangunan				
TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
			Peningkatan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan tourism linkage networking maupun diversifikasi objek wisata					
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan.					
			Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata					
			Optimalisasi potensi perekonomian daerah					
	3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan					
	4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari.					
			Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan					
2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan							
	5	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah.					
			Meningkatkan daya saing UMKM melalui pemanfaatan					



VISI: “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”				Tahapan Pembangunan					
TUJUAN/SASARAN			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
				teknologi informasi					
				Meningkatkan kondusivitas iklim investasi daerah					
	6	Pertumbuhan PAD		Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.					
	7	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)		Peningkatan kualitas petani dan sarana prasarana pertanian di Kepulauan Riau					
				Optimalisasi potensi perekonomian daerah					
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN									
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif		Optimalisasi implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik					
	8	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan, dan Akurat							
	9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah					
	10	Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional		Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia					
	11	Optimalisasi Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Optimalisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah					
Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal									



VISI: "TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"				Tahapan Pembangunan				
TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
12	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Peningkatan pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan bencana yang tanggap dan terintegrasi.					
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA								
4	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	Integrasi program pengentasan kemiskinan pusat dan daerah berbasis DTKS yang berkualitas					
13	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran		Peningkatan kualitas skill/kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja					
14	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif, dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa		Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju desa yang maju dan mandiri					
			Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata					
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat					
			Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya					
15	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan status gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan					
16	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan		Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang berbudaya dan berkeadilan					



VISI: “TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”				Tahapan Pembangunan					
TUJUAN/SASARAN			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
	17	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga					
		Menjamin perlindungan perempuan dan anak bebas dari kekerasan dan TPPPO							
		Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembangunan keluarga yang holistik integratif							
	18	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda		Peningkatan aktivitas positif kepemudaan dan pengembangan keolahragaan daerah					
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
6	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat		Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat dalam berbudaya dan menjaga kondusivitas daerah	Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek budaya lokal.					
	19	Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu		Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya					
	20	Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama		Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama					
MISI 5 MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN									
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Optimalisasi pemerataan pembangunan infrastruktur daerah	Percepatan pemerataan layanan kelistrikan, air bersih/minum layak untuk setiap wilayah.					
	21	Percepatan Pemerataan		Meningkatkan Akses terhadap					



VISI: "TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA"				Tahapan Pembangunan				
TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
		Pembangunan Infrastruktur Dasar	Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh					
			Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana yang ramah lingkungan					
	22	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.					



6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini, program pembangunan daerah merupakan program unggulan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut disampaikan keterkaitam antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan beserta target kinerja Tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel terpisah yang tertuang pada tabel 6.3 (program prioritas 2022-2023) dan 6.4 (program prioritas 2024-2026) dibawah ini. Dalam penyajian program pembangunan daerah tahun 2022-2026 disajikan dalam tabel terpisah dikarenakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dalam 2 tahun yakni tahun 2022 dan 2023, sehingga tabel ini berisikan realisasi kinerja dan anggaran. Selanjutnya pada tabel 6.4, berdasarkan perumusan RPJMD perubahan ini, kebijakan dan indikator program mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga tabel program prioritas RPJMD tahun 2022-2026 disajikan secara terpisah.



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

Tabel 6.3.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah beserta realisasi dan Pagu Tahun 2022-2023

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
1.1	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	3,28	5.209,54		3.305		
1.1.1	Optimalisasi Sektor Perikanan dan Kelautan		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	3,28	5.209,54		3.305		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	34.145.926.506	100	33.210.484.324	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	319.196,89	304.489,16	20.121.596.778,19	317.042,57	16.453.730.925	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	103,56	112,58		104,14		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	21.421,10	27.436,03	8.300.570.172,17	31.250,00	6.480.031.537,70	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	101,63	110,3		96,08		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	6205,9	8.392	2.753.529.763	18.099,33	671.265.394	Dinas Kelautan dan Perikanan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil	Kawasan Konservasi yang Dikelola	0	1	179.373.598	4	2.318.034.046	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	100	100	1.378.262.669	100	3.848.130.796	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.1. 2	Peningkatan sektor pariwisata		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3391	4874,87		2,626		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	12.024.511.006	100	11.708.777.745	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	408.005	569.610	10.693.590.044	1.530.899	13.319.419.434	Dinas Pariwisata
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	7.152.725	817.282		1.511.354		Dinas Pariwisata
			Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	14.399	12.215		9.740,75		Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,73	2,31	1.626.685.235	2,37	687.998.700	Dinas Pariwisata



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	1,66	1,91		2,1		Dinas Pariwisata
			Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	22,76	45,67		53,45		Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	7,75	1,63	352.571.600	3,95	208.094.400	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	0	2,05	324.887.102	2,3	98.805.350	Dinas Pariwisata
1.1.3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	67	74,13		69,95		
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	26.918.484.354	100	29.443.438.543	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	N/A	50	395.423.224	100	399.828.064	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Indeks Kualitas Air Laut	N/A	85,56	370.455.645	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Indeks Kualitas Air	54	56,79		0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara Ambien	90,59	90,27		0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,06	58		0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100	100	132.325.948	100	228.935.899	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	83,33	100		71,43	43.960.694	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	22	14,82	70.946.600	15,62	227.572.050	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase Penanganan Sampah	75	72,42		72		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1.4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	25,31	27,13		27,2		
		Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	25,31	27,12	386.757.600	27,13	478.637.035	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rehabilitasi Lahan Kritis	5 ha	330		5 ha		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	88	500		1.411	636.152.259



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	n/a	2	0	2	28.948.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		PDRB per Kapita ADHK	78,04	87,24		81,91		
			Indeks Gini	0,334	0,325		0,329		
			Pertumbuhan Ekonomi	-3.8	5,09		4,9 - 5,8		
1.2.1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.		Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	49317	59,316		59,334		
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	41,7	41,84		40,2		
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	8,5	8,77		8,56		
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5,1	4,93		6		
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-11.32	15,45		3,4		
			Persentase Koperasi yang berkualitas	51,04	46,55		53,04		



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	29,87	29,95		30,55		
			Nilai Realisasi Investasi PMA	23.751	13.402		23.000		
			Nilai Realisasi Investasi PMDN	14.249	4.816		13.500		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	11.422.187.778	100	13.202.956.620	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang dikembangkan	22,3	23,65	4.222.508.831	26,82	1.192.907.055	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	27,52	28,66	1.050.993.790	32,73	2.741.607.058	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	29,18	31,45	394.915.565	46,43	401.748.758	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Penerimaan Izin Usaha Simpan Pinjam	6,34	12,86	98.143.287	15,33	301.781.680	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	8,8	12,27	2.621.740.156	17,7	1.245.876.679	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	0,24	0,44		1,28		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	1,53	2,69	98.411.500	6,86	98.651.899	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	3,67	5,79	39.716.300	6,78	38.829.600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	13.590.153.515	100	14.167.963.647	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	41,7	40,81	4.550.486.053	40,07	5.073.017.109	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Izin Usaha Industri	0	60	52.739.670			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	6,5	24,33	110.797.647	4,88	410.591.568	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	0	100		55%	461.441.260	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	0	74,38	1.398.987.970	74,38	852.522.007	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	<20	8	883.443.200	8,3	1.157.228.947	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha industri	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri	n/a	0	0	1	35.978.796	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Inflasi	n/a	5,83	2.622.806.873	2,76	4.316.625.258	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	13.192.280.931	100	13.902.452.992	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	0	0	234.076.261	95	357.487.761	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	n/a	100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	95,21	80	856.200.597	98	925.691.741	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	81,93	85,86		85,58		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	100	80	748.070.892	100	878.675.988	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	0	85,86	328.240.254	8	495.215.254	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	n/a	100	119.857.879	100	84.391.162	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2. 2	Peningkatan PAD		Persentase Peningkatan PAD	-8.85	21,71		5,24		
		Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	0	0	102.322.429.757	126,73	104.792.487.525	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100		Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandungkan	98,3	102	692.044.565	9,29	409.976.884	Badan Pendapatan Daerah



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Target Tahun Berjalan						
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	-12.81	25,32	11.180.441.359	4,99	13.257.563.806	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	1	1		1		Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	14200	49.090		21.033		Badan Pendapatan Daerah
			Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	29,69	0,4121		37,83		Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan/Pe ningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	0	20	64.693.358.607,10	40	50.935.070.146	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	12	18		21		Dinas Perhubungan
		1.2.3	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura,		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	2168	3.989,22		2.181
Indeks Ketahanan Pangan	62,7				63,26		62,81		



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
	Pernakan, dan Perkebunan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	19.768.035.057	100	21.106.968.560	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	-4.5	1,56	1.818.464.005	1,56	8.531.562.454	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	-2.60	0,86		0,86		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	1,4	2,92		2,92		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	1,1	2,35	5.755.560.902	3,4	5.791.162.204	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	55,21	89,98		89,98		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
		Program Penyuluhan Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,84	103,34	292.500.000	104,16	1.116.075.834	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	40	49,02		43		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	37,5	62,5	0	40,14	10.549.600	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	52,23	84,43		74,32		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	15	98,88		23,81		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	111	1,24	934.840.588	117,44	968.908.820	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	11,7	0,066		7,71		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,4	0,89		89,9		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan terhadap	10	6,6	31.407.900	6,6	11.611.350	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Kerawanan Pangan						
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	94	98	193.724.900	94	55.829.700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	60	64,75	217.389.688	68,84	595.861.774	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
			Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	67,5	79,75		58,8		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan
2.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif		Indeks Reformasi Birokrasi	68,57	68,66		70,37		
2.1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi		Indeks SPBE	2,8	2,68		2,9		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	12.295.469.258	100	12.188.820.563	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	74,18	96,03	28.834.142.995	96,05	32.253.307.232	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	99,38	20,09		25		Dinas Komunikasi dan Informatika



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			pemerintah daerah provinsi						
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	132.360.772	100	119.231.343	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	n/a	20	6.876.411.406	26,23	8.595.766.906	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang	n/a	81,4		86,05		Dinas Komunikasi dan Informatika



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			disediakan oleh Dinas Kominfo						
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	n/a	73,41	181.402.024	60,31	314.644.408	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	100	100	319.729.609	100	465.973.163	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	100	0	0	100	34.685.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	100	100	681.170.582	100	637.509.275	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	25	75	246.297.445	30	145.886.301	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
2.1.2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		Akuntabilitas Kinerja	BB	BB		BB		
			Indeks Pelayanan Publik	B	A-		B		
			Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	43.381.168.161	100	45.596.953.390	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	n/a	100	683.402.034.161	100	792.458.277.068	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	n/a	100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	56	81	2.864.577.481	85	4.142.178.031	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100	1.741.091.051	Biro Organisasi
		Program Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan	N/A	45,17	692.491.646	45,17	828.647.066	Biro Organisasi



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Perangkat Daerah						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100	1.640.487.214	Biro Hukum
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	100	108	2.194.950.162	96,5	1.918.531.659	Biro Hukum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100	14.918.387.802	Biro Administrasi Pimpinan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100	2.911.009.951	Biro Pengadaan Barang/Jasa
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	8	8,2	813.337.418	8,3	325.357.284	Biro Pengadaan Barang/Jasa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100		100	203.635.546.231	Biro Umum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan	100	100		100	2.676.448.976	Biro Perekonomian dan Pembangunan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Administrasi Kantor						
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi dan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100	100		100	2.404.261.830	Biro Perekonomian dan Pembangunan
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	100	100		100	1.188.987.608	Biro Perekonomian dan Pembangunan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	3.504.717.561	100	7.704.241.094	Badan Penghubung Daerah
		Program Pelayanan Penghubung	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	85	86,55	1.792.227.584	87,03	10.093.879.201	Badan Penghubung Daerah
		Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	25.395.705.849	100	25.938.254.804	Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	n/a	100	2.398.046.160	157,14	5.723.996.143	Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan
		Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	100	98,98	3.859.584.373	100	2.288.816.888	Badan Perencanaan, Pnelitian dan pengembangan
			Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	100	95,95		95		Badan Perencanaan, Pnelitian dan pengembangan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	65	75	1.403.397.562	100	789.676.114	Badan Perencanaan, Pnelitian dan pengembangan
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	20	48,78		72,72		Badan Perencanaan, Pnelitian dan pengembangan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	100	100	1.960.025.291	100	1.949.143.748	Inspektorat
			Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	97	100		100		Inspektorat
			Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Hijau	Hijau		Hijau		Inspektorat



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	n/a	6		14		Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<10	11	4.970.520.193	<1	5.101.660.625	Inspektorat
			Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	84	85		84		Inspektorat
			Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	50	63		100		Inspektorat
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	65	88		88		Inspektorat
			Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban	n/a	80		86		Inspektorat
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	58,5		39		27.407.762.404,56



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	41185	90		98		Inspektorat
			Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	100	100		100		Inspektorat
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	n/a	n/a	2.917.066.314	100	83.416.433.932	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	100	100		0		
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	84,21	97,86	5.466.202.296	85	3.373.525.332	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	95,83	25.395.705.849	0	0	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	68	72	63.715.676.623	0	0	Sekretariat DPRD



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	n/a	100		0	0	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100		100	2,119,560,963	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Sangat Tinggi	3,42	1.092.788.435	3,42	2,280,365,178	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	6.401.319.978	100	7.311.620.876	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
		Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelola Perbatasan Yang Terealisasi	n/a	49,47	528.570.158	76,68	966.292.894	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
2.1.3	Managemen ASN yang Profesional		Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit) I	Baik (281)	314		Baik (294)		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	14.526.849.017	100	14.443.326.214	Badan Kepegawaian dan Korpri



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	57,36	47,97	1.969.306.624	52,75	2.272.740.800	Badan Kepegawaian dan Korpri
			Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	98,47	96,37		98,26		Badan Kepegawaian dan Korpri
			Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	100	98,08		98,9		Badan Kepegawaian dan Korpri
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	10.298.094.367	100	15.420.661.528	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	15,9	28,4	443.804.437	34,34	1.659.230.088	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.1.4	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana		Indeks Kapasitas Daerah	0,22	0,4		0,43		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	8.556.182.975,49	100	8.172.382.283	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana	1,15	2,36	6.559.982.425,68	2,66	4.526.801.104,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	0,2	0,31		0,64		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	100	0,27		0,48		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	25	100	785.208.340	100	1.105.000.000	Dinas sosial
2.1. 5	Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	0,22		1,25		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	19.146.000.838	100	22.919.703.639	Satpol PP
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	n/a	50	2.029.694.254	53,33	3.977.699.700	Satpol PP
			Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	n/a	41,67		50	Satpol PP	
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100		100	Satpol PP	



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	42,85	60	242.295.331	70	1.189.106.528	Satpol PP
3.1	Penguatan Jaring Pengaman Sosial		Angka Kemiskinan	6,13	6,03		5,74		
3.1.1	Menurunnya angka kemiskinan		Angka Kemiskinan	6,13	6,03		5,74		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34	8,23		9,5		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelnacaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	11.563.006.752	100	11.846.651.633	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	2,98	35,71	2.973.692.964	3,27	3.400.300.000	Dinas Sosial
			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	24	44,8		46		Dinas Sosial



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100	100	3.736.695.202	100	4.235.950.000	Dinas Sosial
			Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100	100		100		Dinas Sosial
			Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	100	25		25		Dinas Sosial
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100	100		100		Dinas Sosial
			Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	0	100		100		Dinas Sosial
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	100	100		100		Dinas Sosial



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	0,16	0,42	5.596.350.933	0,15	5.791.746.320	Dinas Sosial
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	8,1	9,2		0,71		Dinas Sosial
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	30,79	36,92		31,63		Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	n/a	11,11	507.473.900	11,11	1.433.671.921	Dinas Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor urusan Tenaga Kerja	100	100	23.925.048.551	100	23.979.851.080	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	11,82	54,3	5.045.297.449	56,41	15.200.000.000	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			berbasis kompetensi						
			Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	1,5	7,69		8	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi	
			Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	29,17	26,06		45,45	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	64,31	0	51.285.368	62	2.077.000.000	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,5	68,94		67,57	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	n/a	25,29	365.809.100	40	1.143.034.602	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi
			Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	n/a	98,07		100	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi	



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	3,65	10,03	670.463.918	12,8	1.689.756.648	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi
			Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	94,8	84,56		95,5	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi	
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	74,17	83,78		76	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi	
		Program Perencanaan Tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	n/a	100	51.311.377	100	273.280.295	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	n/a	0	0	6,25	19.269.418	Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi
3.1. 2	Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif		Indeks Desa Membangun	0.6562 (desa berkembang)	0,6914 (Desa berkembang)		0.6928 (Desa Berkembang)		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	11.020.209.748	100	11.129.423.441	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penataan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan	100	0	0	100	80.815.367	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			desanya sesuai standar						
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	0	0	0	2,91	220.873.496	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	14,05	27,79	44.805.396	34,74	725.393.424	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	26,66	66,67	20.625.606.711	52,64	23.139.835.113	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	75,59	76,46		77,14		
3.2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	69,96	70,5		70,41		Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting	16,82	15,4		15,3		Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	23.081.416.097	100	23.406.373.363,30	Dinas Kesehatan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	92	78,24	43.162.025.665	124	82.548.319.266	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	11,1	10,04		13		Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7,2	15,4		15,3		Dinas Kesehatan
			Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100		100		Dinas Kesehatan
			Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100		100		Dinas Kesehatan
			Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	7	6		5		Dinas Kesehatan
			Angka Keberhasilan Pengobatan	90,46	83,38		92		Dinas Kesehatan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Tuberkulosis (Success Rate)						
			Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	63,78	72		68		Dinas Kesehatan
			Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	42,86	57		43		Dinas Kesehatan
			Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	89,63	92		94,1		Dinas Kesehatan
			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	5	100		71		Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	89,65	92,71		90		Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas terakreditasi	96,51	82,86		97		Dinas Kesehatan
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	82,86	89,25		90		Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94,18	95,7		94		Dinas Kesehatan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	49,43	59,14	13.159.976.396	54	18.875.784.605	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	57,14	71,43	1.025.545.180	71,43	5.026.238.550	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar		100	27.866.000	88	260.901.875	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		100	220.798.669.151	1	207.912.834.188	RSUD Raja Ahmad Tabib
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib		Paripurna	12.671.692.943,68	Paripurna	67.136.838.721	RSUD Raja Ahmad Tabib
			Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib		Utama		Utama		RSUD Raja Ahmad Tabib



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib		93,85		86		RSUD Raja Ahmad Tabib
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib		54	10.876.401.920	64	6.701.417.929	RSUD Raja Ahmad Tabib
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100	66.011.774.649		72.852.131.398	RSUD Engku Haji Daud
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud		Paripurna	5.176.242.207	Paripurna	45.988.777.169	RSUD Engku Haji Daud
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud		87		85,44		RSUD Engku Haji Daud
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud		66,75	14.818.648.522	35,15	6.025.219.403	RSUD Engku Haji Daud
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	63,27	73,11	351.737.021	59,7	900.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	94	98	193.724.900	82	364.226.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.2. 2	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan		Harapan Lama Sekolah	12,87	12,99		12,93		
			Rata-rata lama Sekolah	10,12	10,37		10,15		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,62	84,54		100		
		Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		100	465.693.246.093	100	521.323.145.138,50	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	n/a	67,28	9.663.102	70,58	298.440.180	Dinas Pendidikan
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	n/a	40,68		54,34		Dinas Pendidikan
			Jumlah SMK yang Terevitalisasi	17	97,22		97,3		Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,62	84,54	330.797.920.707,36	84,97	333.291.569.465	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	96,02	107,72		115		Dinas Pendidikan
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	82,49	82,35		97,74		Dinas Pendidikan



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	77,2	85,43		92,29		Dinas Pendidikan
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,4	0,08		0,06		Dinas Pendidikan
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	95,61	99,97		95,43		Dinas Pendidikan
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	93,31	99,93		100,88		Dinas Pendidikan
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	29,3	33,16		35,91		Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	653,51	644,92	766.615.950	672	337.798.946	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	100	100	7.831.336	100	62.805.140	Dinas Pendidikan
3.2. 3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,1	93,49		93,3		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,58	58,97		66		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	73,44	64,24		76,03		



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Dukungan administrasi kesekretariatan sesuai SOP	100	100	13.013.602.426	100	13.092.593.031	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	5,34	16,46	3.326.787.432	5,5	2.830.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	28,61	28,71		28,9		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	11,11	8,89		11,1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	33,42	29,46	758.974.586	43,88	950.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	28,61	28,71	2.579.093.315	28,9	1.950.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	15,38	72,1	11.808.676	51,28	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	71,24	65,52	1.139.351.687	74,6	1.200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	83,08	73,11	874.917.772	86,94	270.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate	44,2	42,26	359.989.801	49,5	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan		28,71	2.579.093.315			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)				64,81	811.711.605	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Unmetneed	10,14	26,3		9,25	550.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.2.4	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda		IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	n/a	56,83		0,58		
			SDI (Sport Development Index)	35,37	6,84		20,29		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100	100	12.654.609.388	100	14.617.200.454	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	n/a	0,65	2.354.930.077	0,6	5.364.701.500	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	n/a	8,84		5,05		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	n/a	16	22.544.364.791	17	30.845.604.570	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda	n/a	0,64		0,73		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Cakupan Pembinaan Olahraga	n/a	19,23		21,15		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	n/a	38,09		40,98		Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	n/a	8,43	924.095.900	9,63 (8 Kwartir)	1.332.040.541	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4.1.	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat		Indeks Pembangunan Kebudayaan	n/a	52,12		63,9		
4.1. 1	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu		Nilai Ekonomi Budaya	n/a	28,11		28,16		
			Nilai Warisan Budaya	n/a	49,3		49,64		
			Nilai Ekspresi Budaya	n/a	1,5		1,55		
			Nilai Budaya Literasi	n/a	66,78		70		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	10.809.823.331	100	11.299.195.785	Dinas Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	n/a	28,11	1.305.722.740	28,19	2.346.728.046	Dinas Kebudayaan



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	n/a	13,89	344.962.381	14,36	461.279.391	Dinas Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	n/a	18,43	2.161.302.970	18,43	2.644.030.659	Dinas Kebudayaan
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	n/a	1,61		1,79		Dinas Kebudayaan
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	n/a	51,01		56,39		Dinas Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	n/a	20	1.534.216.768	40	393.855.398	Dinas Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	n/a	30,97	528.904.311	33,69	797.159.794	Dinas Kebudayaan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		100	16.003.603.875	100	17.612.766.766	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	56,36	62,02	2.088.815.236	65,8	1.285.986.771	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14,45	15,31	591.855.893	13,33	289.466.893	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	1,01	49	508.399.907	18,55	397.554.519	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	18,33	27,6	95.731.538	60,83	15.324.730	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.1.2	Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama	n/a	85,78		75,95		
			Indeks Ketahanan Nasional	2,77	n/a		2,83		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	n/a	100	9.846.318.007	100	12.783.660.539	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	0	0	307.042.737	0	1.784.019.703	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	0	0	432.037.327	0	1.305.940.109	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	100	15.710.226.114	100	18.492.560.703	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	n/a	n/a		87	2.713.203.372	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	n/a	20	97.974.995.353	40	128.016.434.462	Biro Kesejahteraan Rakyat
5.1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau		Rasio Konektivitas	38,42	44,25		44,25		
5.1.1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar		Rasio Elektrifikasi	93,72	96,32		97,99		
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	92,68	93,76		91,82		



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
			Cakupan Pelayanan Air Limbah	83,84	87,06		87,74		
			Cakupan Pelayanan Drainase	45,1	45,1		0		
			Cakupan Pelayanan Persampahan	59,99	72,42		0		
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	n/a	147,24		123,73		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	n/a	100	12.544.985.200	100	12.647.415.980	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	82,11	100	8.051.613.329	100	5.522.252.106	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	91,35	100		100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	0,13	14,17	3.014.180.641	14,77	1.656.799.050	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	43,33	36	135.626.500	54,55	1.038.102.478	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	n/a	100	14.537.023.390	100	14.618.192.618	Dinas Perumahan dan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase RTLH yang dibenahi	n/a	0	1.822.700.097	15,23	8.058.738.161	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	0	23,3		51,27		Dinas Perumahan dan Pemukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	100	671.599.994	100	316.408.630	Dinas Perumahan dan Pemukiman
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100		100		Dinas Perumahan dan Pemukiman



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	n/a	12.000	198.894.965.261,54	13.000	481.822.446.406	Dinas Perumahan dan Pemukiman
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	n/a	100	25.163.754.057	100	27.415.821.840,04	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah Titik Rawan Banjir	20	15	20.799.234.908,24	12	22.381.905.307,67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	n/a	7,54		10,26		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	n/a	51,59		55,62		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	92,68	90,83	1.130.553.186	91,82	15.202.333.537	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	45,1	50,79	322.315.820,23	0	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	23	100	17.114.234.382,58	100	37.126.543.589	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perd a (%)	13	85	2.135.671.126	90	1.114.464.751	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	100	66,67	79.507.311.760,54	100	94.084.126.370	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	83,84	91,62	92.095.756	87,74	890.505.264	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	59,99	66	17.781.940	0	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik (%)	n/a	76,55	238.803.576.437,37	70,37	159.182.972.675	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Rasio Konektivitas Angkutan Darat	18	18		18		
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan	20,42	26,25		26,25		
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut	27,27	39,77		36,36		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100	100	17.220.198.205,48	100	20.021.534.452,68	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	6	6 trayek	1.610.878.002,93	6	7.320.814.459,95	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	n/a	20	64.693.358.607,10	40	50.935.070.146,34	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Lintas Angkutan Penvebrangan	n/a	18		21		Dinas Perhubungan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	REALISASI				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	100	100	91.384.131	100	2.227.204.218	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang danPertanahan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	n/a	23,76	1.331.681.949	15,54	957.556.294	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang danPertanahan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 6.4.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah beserta target kinerja dan Pagu Tahun 2024-2026

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
1				MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT											
1	1			OPTIMALISASI POTENSI KEMARITIMAN, KEUNGGULAN WILAYAH, DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	5.209,54	3.313		3.322		3.330		3.330		
1	1	1		OPTIMALISASI KUALITAS PEREKONOMIAN SEKTOR PERIKANAN	Nilai Tukar Nelayan/NTN	112,58	116		116,1		116,3		116,3		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	39.092.777.046	100	42.135.144.422	100	42.923.776.762	100	124.151.698.230	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	322.107	308.305,6	24.439.063.436	308.921,6	25.796.372.755	309.538,6	26.296.372.756	309.538,6	76.53.808.947	Dinas Kelautan dan Perikanan
					-Nilai Nelayan/Tukar NTN (Dengan Satuan:%)	112,58	116		116,1		116,3		116,3		Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	27.436,03	30.614,37	6.552.228.919	32.955,78	16.284.889.169	35.288,63	17.504.778.162	35.288,63	40.341.896.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
					-Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (Dengan Satuan:Ton)	110,3	111,2		111,76		112,32		112,32		Dinas Kelautan dan Perikanan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	90	1.646.021.862	90	6.353.194.741	90	7.028.976.399	90	15.028.193.002	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020) (satuan : Kawasan)	1	4	403.976.012	4	6.647.507.205	4	5.325.601.363	4	12.377.084.580	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	8.391,68	13.200		13.400		13.500		13.500		Dinas Kelautan dan Perikanan
				-Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Dengan Satuan:Kg/perkapita)	0	65,17	1.162.345.748	65,36	3.578.387.429	65,62	4.756.624.684	65,62	9.497.357.861	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan (Dengan Satuan:USD)	0	31.817.850		31.824.214		31.830.578		0		Dinas Kelautan dan Perikanan
1	1	2	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4.874,87	5.171,75		5.326,9		5.486,71		5.486,71		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	13.791.909.163	100	13.326.843.452	100	13.726.648.755	100	40.845.401.370	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan:Orang)	758.154	1.474.269	12.559.590.000	1.621.695	4.280.995.275	1.783.864	4.467.706.520	1.783.864	21.308.291.795	Dinas Pariwisata
				Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara. (Dengan Satuan:Orang)	817.282	1.722.943		1.964.155		2.239.136		2.239.136		Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Dengan Satuan:Daya Tarik/Kawasan/Destinasi)	3	2	923.310.100	2	19.821.644.418	2	23.743.948.691	2	44.488.903.209	Dinas Pariwisata



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan. (Dengan Satuan:%)	1,63	2	2	129.750.000	2	2.100.541.682	2	2.180.525.198	4.410.816.880	Dinas Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:Sub Sektor)	3	7	7	434.454.100	7	2.100.541.682	7	2.180.525.198	4.715.520.980	Dinas Pariwisata
1	1	3		PENURUNAN PENCEMARAN DAN PENGUSIRAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	74,13	70,18	70,28		70,38		70,38			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100	30.939.348.898	100	31.797.512.393	100	32.751.437.764	95.488.299.055	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	438.173.000	100	6.309.469.978	100	7.327.119.247	14.074.762.225	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawas (Dengan Satuan:%)	50	40,00	40,00	379.506.000	40,00	845.756.090	46,67	850.580.770	2.075.842.860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut (Dengan Satuan:indeks)	85,56	78,04	0	78.04	554.859.756	78.04	571.188.703	78.04	1.126.048.459	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks kualitas Air (Dengan Satuan:indeks)	56,79	56,9		56.9		56.9		56.9		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks kualitas Udara Ambien (Dengan Satuan:indeks)	90,27	88,46		88.46		88.46		88.46		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
					Indeks kualitas Tutupan Lahan (Dengan Satuan:indeks)	58	59,10		59.10		59.10		59.10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragam an Hayati di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	28,57	28,57	0	42.58	591.327.899	57.14	518.506.804	57.14	1.109.834.703	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat kepatuhan terhadap regulasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	100	315.363.626	100	316.983.620	100	632.347.246	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan (Dengan Satuan:Persentase)	71,43	71,43	379.532.000	71,43	359.823.824	71,43	365.909.526	71,43	1.105.265.350	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	100	342.576.861	100	347.066.312	100	689.643.173	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	80.220.000	100	237.475.201	100	241.426.715	100	559.121.916	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	14,82	28	1.923.204.000	30	4.990.000.000	30	4.990.000.000	30	11.903.204.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase Penanganan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	71	71		70		70		70		
1	1	4	OPTIMALISASI PEMANFAATAN HUTAN LESTARI	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	27,13	27,32		27,41		27,5		27,5		
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) (Dengan Satuan:Milyar)	27,13	27,30	211.450.800	27,40	1.277.782.030	27,50	1.307.072.326	27,50	2.796.305.156	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Rehabilitasi Lahan Kritis (Dengan Satuan:Hektar)	5	5		5		5		5		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab	
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok yang mengelola Perhutanan Sosial (Dengan Satuan:Kelompok)	30	30	154.850.000	30	1.195.387.819	30	1.215.990.185	30	2.566.228.004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSITEMNYA	Persentase Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang terkelola	0	0	0	50	300.000.000	60	350.000.000	60	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (Dengan Satuan:DAS)	2	2	0	2	302.743.887	2	371.104.083	2	673.847.970	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
1	2		PERCEPATAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN	PDRB perkapita ADHK	87,24	87,76		88,01		88,27		88,27				
				PDRB perkapita ADHB	141,68	143,34		144,17		145		145				
				Indeks Gini	0,325	0,323		0,321		0,318		0,318				
				Pertumbuhan Ekonomi	5,09	5.0 , 5.9		5.1 , 6.1		5.2 , 6.3		5.2 , 6.3				
1	2	1	PENINGKATAN PDRB PADA SEKTOR KONSTRUKSI, INDUSTRI PENGOLAHAN, DAN SEKTOR PERDAGANGAN	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	40,81	41,13		41,29		41,45		41,45				
				Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	8,83	8,58		8,6		8,62		8,62				
				Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	59.316,27	62.650,51		65.280,105		67.909,7		67.909,7				
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	4,93	5,77		6,18		6,6		6,6				
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	15,45	7		7,5		8		8				
				Persentase Koperasi yang berkualitas	46,55	48,55		49,55		50,55		50,55				
				Persentase UMKM yang Naik Kelas	29,95	30,55		30,89		31,23		31,23				
				Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	18.220	19.609		20.305		21.000		21.000				



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	16.222.353.501	100	16.678.772.849	100	17.179.136.035	100	50.080.262.385	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	4.074.031.444	6	5.000.000.000	6	5.000.000.000	18	14.074.031.444	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izi Usaha yang di terbitkan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	0	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	0	2.000.000.000	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	50	100	459.524.400	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	10.959.524.400	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Fluktuasi Harga Bahan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	34,8	<10	2.824.597.500	<10	5.000.000.000	<10	5.522.978.071	<10	13.347.575.571	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri (Dengan Satuan:Persen)	24,33	8	130.783.328	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	8	6.130.783.328	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	50	60	994.416.150	65	2.148.861.517	70	2.148.861.517	70	5.292.139.184	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (Dengan Satuan:Persen)	65	70	232.152.200	70	1.500.000.000	70	1.500.000.000	70	3.232.152.200	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri (Dengan Satuan :Dokumen)	1	1	251.289.600	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	2.251.289.600	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	28.513.700	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	2.028.513.700	Dinas Perindustrian & Perdagangan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.067.639.029	100	14.213.084.754	100	15.505.582.319	100	41.786.306.102	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha	12,86	21,34	87.676.000	26,34	180.000.000	31,34	180.000.000	31,34	447.676.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-72



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				Simpan Pinjam (Dengan Satuan:%)										
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi (Dengan Satuan:%)	2,69	4,53	143.520.000	5,53	371.239.811	6,53	377.760.206	6,53	892.520.017	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (Dengan Satuan:%)	5,79	9,97	35.930.000	12,07	214.159.874	14,17	218.506.804	14,17	468.596.678	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	12,27	23,8	510.000.000	28,8	1.849.569.683	33,8	1.874.303.716	33,8	4.233.873.399	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	31,45	35,18	1.018.619.000	37,18	6.059.805.930	39,18	7.100.160.761	39,18	14.178.585.691	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	23,65	32,86	1.351.779.649	36,36	6.905.461.252	39,86	6.717.198.519	39,86	14.974.439.420	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha (Dengan Satuan:%)	29,66	29,02	7.298.906.121	29,52	8.448.249.593	30,02	8.518.182.421	30,02	24.265.338.135	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	0,95	0,84		1,04		1,24		1,24		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.409.458.533	100	13.683.194.291	100	13.887.590.119	100	39.980.242.943	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani (Dengan Satuan:%)	80	100	630.936.788	100	2.200.812.523	100	1.680.525.198	100	4.512.274.509	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi (Dengan Satuan:%)	100	100	324.217.927	100	719.207.206	100	462.176.537	100	1.505.601.670	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal (Dengan Satuan:100)	100	100	99.979.900	100	1.926.396.719	100	3.043.600.638	100	5.069.977.257	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	100	100	45.396.000	100	205.487.773	100	203.312.247	100	454.196.020	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)	100	100	1.388.207.000	100	1.056.199.055	100	1.002.534.021	100	3.446.940.076	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	2	2		Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	21,71	9,22		2,15		2,65		2,65		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	113.917.486.017	100	123.272.886.377	100	126.971.072.968	100	364.161.445.362	Badan Pendapatan Daerah
					Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (Dengan Satuan:Persentase)	10,49	13,73		14,37		15,08		15,08		Badan Pendapatan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda (Dengan Satuan:%)	19,62	3,14	13.877.950.579	2,87	19.049.643.606	1,80	22.243.108.524	1,80	55.170.702.709	Badan Pendapatan Daerah
					Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah. (Dengan Satuan:Pengguna Layanan)	15.300	18.883		20.772		22.849		22.849		Badan Pendapatan Daerah
					Peningkatan pelayanan prima. (Dengan Satuan:Angka)	81	83		84		85		85		Badan Pendapatan Daerah
					Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih. (Dengan Satuan:%)	22	25		27		30		30		Badan Pendapatan Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab		
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan (Dengan Satuan:%)	91	92	808.301.011	92	859.823.824	93	865.909.526	93	2.534.034.361	Badan Pendapatan Daerah
1	2	3		PENINGKATAN PEMANFAATAN SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, DAN PERKEBUNAN)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	3.989,22	3.996,25	4.003,45		4.010,84		4.010,84			
					Indeks Ketahanan Pangan	63,26	63,27		63,28		63,29		63,29		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	21.676.445.359	100	22.439.953.031	100	23.113.151.622	100	67.229.550.012	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Dengan Satuan:Persen)	2,91	3,20		3,50		3,80		3,80		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
					Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dengan Satuan:Persen)	1,20	1,21		1,23		1,26		1,26		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
					Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	1,33	2,58	7.461.970.905	3,14	8.037.245.420	3,66	9.118.509.514	3,66	24.617.725.839	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Produktivitas Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	62,08	24,73		25,75		26,76		26,76		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
					Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak. (Dengan Satuan:Persen)	2,35	1,30		1,35		1,40		1,40		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan	6,60	≤10	142.101.210	≤10	1.387.347.490	≤10	1.278.669.732	≤10	2.808.118.432	Dinas Ketahanan Pangan.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-75



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab		
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
				Pangan (Dengan Satuan : Persen)										Pertanian dan Kesehatan Hewan	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (Dengan Satuan:Persen)	98	83	53.579.787	84	1.370.635.092	85	1.261.153.440	85	2.685.368.319	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan (Dengan Satuan:Persen)	124	115	2.927.422.979	115,5	3.477.836.452	116	3.577.836.452	116	9.983.095.883	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Dengan Satuan:Persen)	89	88.50		89,30		90,10		90,10		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
					Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen (Dengan Satuan:Persen)	6.6	≤11		≤11		≤11		≤11		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya (Dengan Satuan:Persen)	49,02	50,00	1.855.176.928	51,00	1.828.550.612	56,00	2.228.550.612	56,00	5.912.278.152	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
					Nilai Tukar Petani (NTP) (Dengan Satuan:Rasio)	103,34	100,17		100,20		100,22		100,22		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit (Dengan Satuan:PERSEN)	64,75	64	425.677.823	65	1.071.961.217	66	1.065.553.955	66	2.563.192.995	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
				Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (Dengan Satuan:PERSEN)	79,75	60	61		62		62		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-76



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
														Kesehatan Hewan
2			MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN											
2	1		TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, KUAT, DAN ANTISIPATIF	Indeks Reformasi Birokrasi	69,77	70,97		71,57		72,17		72,17		
2	1	1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, TRANSPARAN DAN AKURAT	Indeks SPBE	2,68	2,74		2,77		2,8		2,8		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	13.330.429.549	100	14.122.637.042	100	14.546.316.153	100	41.999.382.744	Dinas Komunikasi & Informatika
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (Dengan Satuan:Persentase)	20,09	30	18.851.191.426	35	16.744.217.131	40	20.766.587.088	40	56.361.995.645	Dinas Komunikasi & Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	147.746.448	100	319.647.647	100	343.669.732	100	811.063.827	Dinas Komunikasi & Informatika



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Dengan Satuan:Persentase)	81.4	81.4	6.753.825.879	81.4	4.943.293.082	81.4	5.765.249.901	81.4	17.462.368.862	Dinas Komunikasi & Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	267.355.498	100	420.934.048	100	468.174.048	100	1.156.463.594	Dinas Komunikasi & Informatika
2	1	2	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Akuntabilitas Kinerja	BB	BB		BB		BB		BB		
				Indeks Manajemen Risiko	3	3		3		3		3		
				Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		
				Level Maturitas SPIP	3	3		3		3		3		
				Indeks Pelayanan Publik	A-	A-		A-		A-		A-		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	93	100	219.203.891.143	100	307.758.078.097	100	325.108.147.602	100	852.070.116.842	Sekretaris Daerah
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan%)	38,60	41,60	558.000.000	43,60	2.118.546.545	44,60	2.385.344.542	44,60	5.061.891.087	Sekretaris Daerah
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:skor)	3,03	3,04	2.146.178.300	3,05	2.103.603.168	3,06	2.361.085.302	3,06	6.610.866.770	Sekretaris Daerah
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	3.123.732.980	100	2.113.137.990	100	2.375.417.181	100	7.612.288.151	Sekretaris Daerah
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Dengan Satuan:Persentase)	n/a	90	783.784.088	90	1.414.963.139	100	1.445.994.952	100	3.644.742.179	Sekretaris Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (Dengan Satuan:Persentase)	8,2	70	327.096.554	70,5	2.165.715.206	71	2.302.676.237	71	4.795.487.997	Sekretaris Daerah
				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	90	95	245.393.633	97	633.587.301	100	893.264.805	100	1.772.245.739	Sekretaris Daerah
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan (Dengan Satuan:%)	20	60	167.738.457.305	80	166.186.720.139	100	172.730.595.687	100	506.655.773.131	Sekretaris Daerah
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	87.289.363.979	100	75.787.439.711	100	78.061.062.902	100	241.137.866.592	Sekretariat DPRD
					Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	69.537.717.526	100	69.434.074.648	100	73.174.076.926	100	212.145.869.100	Sekretariat DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	52.267.079.501	100	57.352.243.643	100	59.162.653.709	100	168.781.976.853	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	100	100	770.499.327.652	100	354.898.485.196	100	357.527.411.422	100	1.482.925.224.270	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	90		91		92		92		Badan Keuangan dan Aset Daerah

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-79



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan (Dengan Satuan:Persen)	68	70,98	3.688.953.370	71,84	4.950.000.000	74,66	5.500.000.000	74,66	14.138.953.370	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	27.348.756.087	100	34.372.138.582	100	33.935.988.805	100	95.656.883.474	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program/Kegiatan RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90	4.436.075.805	93	7.592.736.661	95	5.808.584.648	95	17.837.397.114	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90		90		90		90		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90	2.566.331.650	93	6.525.952.007	95	7.430.724.359	95	16.523.008.016	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan (Dengan Satuan:Persen)	n.a	100	994.485.800	100	1.450.000.000	100	1.925.000.000	100	4.369.485.800	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengawasan (Dengan Satuan:%)	39	50	35.886.030.240	60	38.389.729.083	70	40.101.420.956	70	114.377.180.279	Inspektorat Daerah
				Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Dengan Satuan:%)	90	90		90		90		90		Inspektorat Daerah
				Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (Dengan Satuan:Persentase)	10	10	5.302.019.780	20	3.826.557.984	30	5.596.108.868	30	14.724.686.632	Inspektorat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
				Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP (Dengan Satuan:Persentase)	90	90		90		90		90		Inspektorat Daerah
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK (Dengan Satuan:Persen)	88	88		89		90		90		Inspektorat Daerah
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI (Dengan Satuan:Jumlah)	,	2	1.918.588.920	2	1.684.959.244	3	1.761.040.826	3	5.364.588.990	Inspektorat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Tata Kelola Manajemen Risiko sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	n/a	12		14		16		16		Inspektorat Daerah
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Dengan Satuan:Jumlah)	4	2		2		2		2		Inspektorat Daerah
				Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA		PAGU
				Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.218.921.324	100	11.915.029.787	100	12.272.480.680	100	35.406.431.791	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk (Dengan Satuan:%)	100	100	88.933.700	100	2.561.150.116	100	2.606.962.803	100	5.257.046.619	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) (Dengan Satuan:%)	30	75	154.379.300	100	2.714.621.528	100	2.958.702.279	100	5.827.703.107	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri (Dengan Satuan:%)	100	100	281.943.000	100	2.175.096.090	100	2.330.796.090	100	4.787.835.180	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	161.748.520	100	182.136.883	100	383.885.403	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.575.936.607	100	12.084.292.584	100	12.446.821.361	100	36.107.050.552	Badan Penghubung Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Dengan Satuan:Persentase)	88	88	6.976.626.591	89	8.930.335.973	90	10.755.244.144	90	26.662.206.708	Badan Penghubung Daerah
					Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat (Dengan Satuan:Persentase)	88	88		89		90		90		Badan Penghubung Daerah
					Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Dengan Satuan:Persentase)	88	88		89		90		90		Badan Penghubung Daerah
2	1	3		OPTIMALISASI MANAJEMEN ASN YANG PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	314	330,5		332		332		332		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.877.287.007	100	14.084.514.111	100	14.507.049.535	100	41.468.850.653	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan. (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	2.047.052.858	100	5.933.258.764	100	7.080.219.269	100	15.060.530.891	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan (Dengan Satuan:Orang)	0	40		100		100		240		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Dengan Satuan:Orang)	555	762		944		660		2.366		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya (Dengan Satuan:Orang)	1.615	1.324		1.173		1.587		4.084		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang	100	100	14.730.122.878	100	15.530.518.520	100	15.996.434.075	100	46.257.075.473	Badan Kepegawaian

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-83



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab		
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
					Urusan (Dengan Satuan:Person)									Daerah dan Korpri	
					Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	100		100		100		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	52,57	65,53	66,40		67,15		67,15		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
					Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	97,04	98,47	98,55		98,63		98,40		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
					Persentase PNS yang mengikuti penilaian kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	12,45	9,26	11,54		14,00		14,00		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
					Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional (Dengan Satuan:Persentase)	13,54	4,43	6,53		12,98		12,98		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
					Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik (Dengan Satuan:Persentase)	98,08	99,01	99,02		99,03		99,03		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	
2	1	4		PENINGKATAN KAPABILITAS PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG TANGGAP, TANGKAS, DAN TANGGUH DALAM MENGHADAPI BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah	0,4	0,44	0,49		0,54		0,54			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Person)	100	100	8.844.126.351	100	9.391.459.285	100	9.673.203.064	100	27.908.788.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	2,36	2,60		2,80		3,00		3,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	0,27	0,32	2.962.102.309	0,33	12.216.319.564	0,35	14.188.094.771	0,35	29.366.516.644	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
					Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. (Dengan Satuan:Indeks)	0,31	0,42		0,43		0,45		0,45		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1	5		OPTIMALISASI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76,98	82,86		85,75		88,82		88,82		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	22.163.452.294	100	22.432.507.912	100	23.105.483.149	100	67.701.443.355	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	2.166.218.601	100	11.336.086.995	100	13.934.028.076	100	27.436.333.672	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
					Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persen)	41,67	67		83		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
					Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	100	10		10		10		30		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
					Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas (Dengan Satuan:Persentase)	16	23		27		32		32		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya (Dengan Satuan:Persentase)	71	86	289.598.000	100	3.036.274.813	100	3.041.467.332	100	6.367.340.145	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
3			MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASISKAN IMAN DAN TAQWA											
3	1		PENGUATAN JARING PENGAMAN SOSIAL	Angka Kemiskinan	6,03	5,69		5,63		5,57		5,57		
3	1	1	MENURUNNYA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	Pengeluaran Perkapita	1.960.394,43	2.027.526,71		2.094.659,00		2.161.791,29		2.161.791,29		
				Tingkat Pengangguran Terbuka	8,23	7,54		7,21		6,91		6,91		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.815.019.850	100	12.777.646.599	100	13.160.975.997	100	38.753.642.446	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	35,71	5,63	1.338.909.096	5,63	1.584.498.555	5,63	1.606.754.838	16,88	4.530.162.489	Dinas Sosial
				Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	44,8	32,61		32,61		32,61		50,93		Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial Dinas Sosial (Dengan Satuan:%)	0	0	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Sosial



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab	
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia (Dengan Satuan:%)	25	100	100		100		100		Dinas Sosial
					Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		Dinas Sosial
					Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		Dinas Sosial
					Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100	100	100	3.245.121.648	4.810.253.648	100	5.506.786.048	100	13.562.161.344
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		Dinas Sosial
					Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif (Dengan Satuan:%)	0,42	0,20	10.321.785.746	0,63	17.659.224.471	0,73	18.970.768.667	1,56	46.951.778.884
														Dinas Sosial



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							OPD Penanggung jawab	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:%)	9,20	13,02		13,05		13,05		39,13		Dinas Sosial
				Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (Dengan Satuan:%)	100	100	625.816.490	100	1.391.614.032	100	1.406.525.741	100	3.423.956.263	Dinas Sosial
				Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ditingkat provinsi (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100				Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial (Dengan Satuan:Unit)	11,11	11,11	1.378.519.000	11,11	1.462.480.000	11,11	1.462.480.000	11,11	4.303.479.000	Dinas Sosial
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	25.042.470.555	100	26.189.268.969	100	26.974.947.038	100	78.206.686.562	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)	100	100	20.000.000	100	702.743.887	100	871.104.083	100	1.593.847.970	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru (Dengan Satuan:persen)	7,69	9	3.160.000.000	10	18.703.883.148	12	16.763.368.930	12	38.627.252.078	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja (Dengan Satuan:persen)	34,12	66,67		66,67		71,79		71,79		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab		
						2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)	54,3	61,53		66,66		71,79		71,79		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:persen)	48,60	63	60.000.000	64	2.067.835.263	65	2.012.176.537	65	4.140.011.800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK- (Dengan Satuan:persen)	67,55	67,59		67,62		67,65		67,65		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Dengan Satuan:persen)	25,29	0	326.292.100	50	1.401.051.737	55	1.015.958.883	55	2.743.302.720	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam (Dengan Satuan:persen)	98,07	100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:persen)	84,56	95,75	349.600.000	96	3.336.671.642	96,25	3.175.212.285	96,25	6,861,483,927	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	83,78	76,50		77,00		77,50		77,50		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dengan Satuan:persen)	10,03	13,80		14,80		15,80		15,80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan (Dengan Satuan:persen)	25	33,3	20.000.000	33,3	3.498.186.945	33,3	2.557.672.727	33,33	6,075,859,672	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:persen)	21,23	34,4	0	40,2	1.067.835.263	45,9	1.012.176.537	45,9	2,080,011,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-89



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (Dengan Satuan:persen)	6,25	18,75	0	25	1.001.051.737	31,25	815.958.883	31,25	1.817.010.620	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	1	2	MENINGKATNYA MASYARAKAT DESA YANG TANGGUH, PARTISIPATIF, DAN MANDIRI DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA	Indeks Desa Membangun	0,6914 (Desa berkembang)	0,7281 (Desa Maju)		0,7461 (Desa Maju)		0,7661 (Desa Maju)		0,7661 (Desa Maju)		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	44,64	83,33	28.555.689.194	83,33	27.256.999.744	100	27.456.999.744	100	83.269.688.682	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes (Dengan Satuan:%)	25,68	34,74	2.690.901.500	43,81	2.382.000.000	52,87	2.482.000.000	52,87	7.554.901.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	131.908.000	100	576.540.000	100	576.540.000	100	1.284.988.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama (Dengan Satuan:%)	1,45	5,45	80.858.300	8	366.600.000	10,91	366.600.000	10,91	814.058.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	2		PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER	Indeks Pembangunan Manusia	76,46	77,04		77,39		77,74		77,74		
3	2	1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	70,5	70,82		71,02		71,23		71,23		
				Prevalensi Stunting	15,4	14		13,3		12,8		12,8		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-90



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab		
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	285.004.727.712	100	331.655.248.887	100	341.604.906.354	100	958.264.882.953	Dinas Kesehatan
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 100.000 Kelahiran Hidup)	125	123	64.505.034.898	122	85.000.720.198	121	95.500.720.198	121	245.006.475.294	Dinas Kesehatan
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 1000 Kelahiran Hidup)	14	12		11		10		10		Dinas Kesehatan
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	15,8	14		13,3		12,8		12,8		Dinas Kesehatan
					Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
					Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
					Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) (Dengan Satuan:Kab/Kota)	2	5		7		7		7		Dinas Kesehatan
					Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	90	92		93		93		93		Dinas Kesehatan
					Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	64	72		76		80		80		Dinas Kesehatan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				Eliminasi malaria (kabupaten/kota) (Dengan Satuan:%)	43	57,14		57,14		67		67		Dinas Kesehatan
				Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	93,60	94,60		95,50		95,50		95,50		Dinas Kesehatan
				Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (Dengan Satuan:%)	57	71		71		71		71		Dinas Kesehatan
				Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	89	95		96		97		97		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas terakreditasi (Dengan Satuan:%)	96	97		97,50		98		98		Dinas Kesehatan
				Persentase Rumah Sakit terakreditasi (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	85	95		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial (Dengan Satuan:%)	92	96		96		96		96		Dinas Kesehatan
				Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Dinas Kesehatan
				Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	Satelit	Utama		Utama		Utama		Utama		Dinas Kesehatan
				Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Status)	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Dinas Kesehatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Indeks)	78,5	80		80		80		80		Dinas Kesehatan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab	
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
					Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Indeks)	82	83	84		84		84		Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	52	56	28.939.333.045	58	36.146.493.488	60	37.706.819.010	60	102.792.645.543	Dinas Kesehatan
				Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	65	75		80		85				Dinas Kesehatan
				Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Persentase)	30	40		50		60				Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	71,43	85,71	856.072.800	85,71	2.207.877.061	100	2.219.265.427	100	5.283.215.288	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	86	88	31.603.200	89	550.000.000	90	600.000.000	90	1.181.603.200	Dinas Kesehatan
3	2	2	MENINGKATNYA PEMERATAAN MUTU DAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN	Harapan Lama Sekolah	12,99	13,09		13,14		13,19		13,19		
				Rata-rata lama Sekolah	10,37	10,62		10,75		10,88		10,88		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,54	100		100		100		100		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	NA	91,5	697.227.729.587	92,5	704.077.947.390	93,5	715.200.285.812	93,5	2.116.505.962.789	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	85,43	80,00	384.913.205.192	81,00	158.204.519.684	82,00	171.704.519.684	82	714.822.244.560	Dinas Pendidikan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab		
						2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	84,54	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
				- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	107,72	99,00		99,50		100		100		Dinas Pendidikan
				- Angka partisipasi kasar (APK) SLB (Dengan Satuan:%)	82,35	87,00		88,00		90		90		Dinas Pendidikan
				- Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	0,08	0,36		0,35		0,34		0,34		Dinas Pendidikan
				- Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	99,97	96,27		96,44		96,60		96,6		Dinas Pendidikan
				- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	99,93	100,00		100,00		100,00		100		Dinas Pendidikan
				- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Dengan Satuan:Ratio)	33,16	33,85		33,90		33,95		33,95		Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Dengan Satuan:Ratio)	644,92		728,07		400.000.000		729,7		2.449.976.174
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum (Dengan Satuan:%)	67,28	61	991.100.000	61,50	2.671.335.362	62,00	2.781.374.124	62,00	6.443.809.486	Dinas Pendidikan
				Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum. (Dengan Satuan:%)	40,68	31		31,50		32		32		Dinas Pendidikan
				Jumlah SMK yang Terevitalisasi (Dengan Satuan:%)	97,22	97,22		97,30		97,37		97,37		Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIJINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (Dengan Satuan:%)	100	100	80.000.000	100	776.826.363	100	881.606.726	100	1.738.433.089	Dinas Pendidikan
3	2	3	MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,49	93,55		93,57		93,6		93,6		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,24	66,52		66,95		68,1		68,1		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-94



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	13.385.402.257	100	13.628.100.643	100	14.036.943.662	100	41.050.446.562	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatann (Dengan Satuan:%)	28,71	29	3.967.427.213	29.50	1.270.851.939	30	1.326.209.680	30	6.564.488.832	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	93,43	1.526.926.884	100	1.293.221.407	100	1.338.649.880	100	4.158.798.171	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Dengan Satuan:Rasio)	29,46	43,70		43,51		43,33		43,33		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi (Dengan Satuan:%)	11,26	11,82	1.406.111.015	12,41	9.639.030.069	13,03	10.352.345.316	13,03	21.397.486.400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi (Dengan Satuan:%)	8,89	8		8		8		8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak (Dengan Satuan:%)	41,86	46,51	10.000.000	51,16	521.160.308	55,81	527.644.888	55,81	1.058.805.196	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya (Dengan Satuan:Persentase)	57,14	71,43	664.839.844	71,43	814.870.242	85,71	831.313.219	85,71	2.311.023.305	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:Rasio)	0	7,53	395.009.100	7,36	760.458.023	7,22	869.112.221	7,22	2.024.579.344	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (Dengan Satuan:%)	45,51	59	0	59,25	505.801.539	59,75	524.401.997	59,75	1.030.203.536	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (Dengan Satuan:%)	24,9	22	4.017.600.000	20	4.517.600.000	18	4.817.600.000	18	13.352.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) (Dengan Satuan:Indek)	56,83	62	223.284.548	62,5	803.465.671	63	821.159.105	63	1.847.909.324	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3	2	4		MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS PEMUDA	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	58,17	58,33		59,03		60,05		60,05		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-96



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab	
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
					SDI (Sport Development Index)	0,398	0,413		0,421		0,426		0,426			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Persen)	100	100	15.939.491.785	100	15.359.347.894	100	15.820.128.331	100	47.118.968.010	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Persentase)	0,10	1,30		1,48		1,50		1,50		Dinas Kepemudaan & Olahraga	
					Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi (Dengan Satuan:Persentase)	0,04	0,17	1.384.952.400	0,18	18.565.831.252	0,18	19.354.665.643	0,18	39.305.449.295	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan:Persentase)	0,64	0,77		0,82		0,86		0,86		Dinas Kepemudaan & Olahraga	
					Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	38,09	43,88	28.188.733.900	46,77	15.990.496.352	49,66	17.369.920.437	49,66	61.549.150.689	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
					Cakupan pembinaan olahraga (Dengan Satuan:persentase)	10,23	11,54		11,54		11,54		11,54		Dinas Kepemudaan & Olahraga	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (Dengan Satuan:Persentase)	8,43	9,63 (8 Kwartir)	1.194.692.500	9,63 (8 Kwartir)	1.563.537.084	9,63 (8 Kwartir)	1.778.669.632	9,63 (8 Kwartir)	4.536.899.216	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
4				MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN												
4	1			PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN, PELESTARIAN BUDAYA, DAN HARMONI MASYARAKAT	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,12	55,6		56,6		57,6		57,6			
4	1	1		PENINGKATAN IMPLEMENTASI PELESTARIAN BUDAYA MELAYU	Nilai Ekonomi Budaya	28,11	28,21		28,24		28,27		28,27			
					Nilai Warisan Budaya	49,3	50,44		51,24		52,04		52,04			
					Nilai Ekspresi Budaya	1,5	1,73		1,77		1,81		1,81			



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				Nilai Budaya Literasi	64,73	64,83		64,88		64,93		64,93		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.964.383.683	100	13.045.188.051	100	13.436.543.692	100	39.446.115.426	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:%)	18,43	20,81	3.389.615.748	21,52	12.548.743.377	22,23	15.548.743.377	22,23	31.487.102.502	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	30,51	35,39	933.479.326	37,20	2.262.425.363	39,02	2.252.397.540	39,02	5.448.302.229	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (Dengan Satuan:%)	28,11	28,21	5.429.861.844	28,24	5.564.661.144	28,27	5.664.661.144	28,27	16.659.184.132	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Keterlibatan SDM sejarahwan (Dengan Satuan:%)	33,33	45	192.348.600	60	503.436.888	80	515.690.636	80	1.211.476.124	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia (Dengan Satuan:Orang)	19.117	12,132	394.155.744	12.132	655.045.013	12.132	769.129.505	254.938	1.818.330.262	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	18.641.093.712	100	21.626.840.794	100	23.331.171.320	100	63.599.105.826	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Nilai)	62,02	63,00	707.517.618	63,50	2.735.237.004	64,00	3.586.923.536	64,00	7.029.678.158	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15,31	15,45	412.500.000	15,65	1.417.975.075	15,85	1.536.444.136	15,85	3.366.919.211	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-98

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI-99



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) (Dengan Satuan:%)	0	70	126.266.141.300	0	6.726.464.000	0	6.726.464.000	0	139.719.069.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks Demokrasi Indonesia (Dengan Satuan:%)	78,78	78,78		78,79		78,80		78,80		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis (Dengan Satuan:%)	0	0	2.440.843.260	0	9.830.619.382	0	10.391.735.609	0	22.663.198.251	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan (Dengan Satuan:%)	84,21	88	4.729.915.973	90	10.001.578.676	93	12.008.269.687	93	26.739.764.336	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5			MISI 5 MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN											
5	1		PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGINTEGRASIAN ANTAR PULAU	Rasio Konektivitas	0,51	0,55		0,56		0,65		0,65		
5	1	1	PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR	Cakupan Pelayanan Air Limbah	91,62	90,51		90,68		90,91		90,91		
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	91,82	91,88		92		92,12		92,12		
				Rasio Elektrifikasi	96,32	98,10		98,80		99,20		99,20		
				Cakupan Pelayanan Drainase	50,79	54,3		57,3		60,3		60,3		
				Persentase Penanganan Sampah	71	71		70		70		70		
				Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	339,21	334,21		329,21		324,21		324,21		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:%)	100	100	28.647.543.067	100	31.853.561.497	100	32.809.168.342	100	93.310.272.906	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir (Dengan Satuan:Ha)	0	75		150		150		150		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. (Dengan Satuan:%)	7,54	25,49	7.389.083.148	31,48	17.596.088.156	37,46	17.129.177.564	37,46	42.114.348.868	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk. (Dengan Satuan:%)	51,59	58,99		62,09		65,39		65,39		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (Dengan Satuan:%)	91,82	91,88	2.618.328.096	92	20.240.602.998	92,12	24.824.657.339	92,12	47.683.588.433	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan pelayanan drainase (Dengan Satuan:%)	50,79	54,30	198.820.000	57,30	7.729.708.866	60,30	7.714.163.005	60,30	15.642.691.871	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah.. (Dengan Satuan:%)	91,62	90,51	804.064.000	90,68	5.782.101.489	90,91	7.402.978.843	90,91	13.989.144.332	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. (Dengan Satuan:%)	68,75	100	54.353.897.240	100	5.137.420.432	100	6.033.496.835	100	65.524.814.507	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)	100	100	13.830.324.096	100	43.155.908.074	100	41.644.607.030	100	98.630.839.200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap.. (Dengan Satuan:%)	80,62	80,94	55.853.736.524	81,10	216.227.770.635	81,26	213.151.544.618	81,26	485.233.051.777	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan	23,76	26	665.000.000	28	2.400.000.000	30	2.400.000.000	30	5.465.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				sertifikat pelatihan ahli. (Dengan Satuan:%)										
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (Dengan Satuan:%)	85	85	626.395.048	93	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	7.126.395.048	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	100	1.119.120.048	100	150.000.000	100	150.000.000	100	1.419.120.048	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (Dengan Satuan:%)	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	20.287.961.038	100	14.980.731.451	100	15.400.153.395	100	50.668.845.884	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	100	100	690.934.720	100	8.000.000.000	100	4.000.000.000	100	12.690.934.720	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Jumlah Lokasi)	7	7	244.657.541.472	7	232.957.980.829	7	220.897.744.885	7	698.513.267.186	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun. (Dengan Satuan:Unit Rumah)	200	50	3.103.412.640	50	55.000.000.000	50	60.500.000.000	350	118.603.412.640	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
				Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. (Dengan Satuan:Ha)	339,21	334,21		329,21		324,21		324,21		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	100	100	13.566.012.825	100	13.416.668.361	100	13.819.168.412	100	40.801.849.598	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Wilayah Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dengan Satuan:%)	36,36	72.73	996.553.400	81,82	7.750.778.217	90,91	8.265.123.087	90,91	17.012.454.704	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	298,38	174.59	213.627.000	228,60	1.000.000.000	282,84	1.200.000.000	282,84	2.413.627.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				- Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis (Dengan Satuan:%)		40		45		50		50		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) (Dengan Satuan:%)	14,17	15.43	8.288.080.900	15.42	9.548.372.359	15,83	10.950.028.713	15,83	28.786.481.972	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	14.051.629.702	100	15.623.474.898	100	15.799.525.572	100	45.474.630.172	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
5	1	2	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ANTAR PULAU DAN KAWASAN PESISIR	Persentase Jalan Kondisi Mantap	80,62	80,94		81,10		81,26		81,26		
				Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,23	0,23		0,23		0,3		0,3		
				Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	0,29	0,32		0,33		0,35		0,35		



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab	
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA		PAGU
					Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	49,47	55	60		65		65		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:%)	200	100	16.616.912.125	100	18.674.560.824	100	19.234.797.649	500	54.526.270.598	Dinas Perhubungan
				Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		Dinas Perhubungan		
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		Dinas Perhubungan		
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		Dinas Perhubungan		
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		Dinas Perhubungan		
				Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		Dinas Perhubungan		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat (Dengan Satuan:%)	200	100	3.230.975.589	100	18.632.576.716	100	23.862.500.085	500	45.726.052.390	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan sarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	82,69	90,38	28.644.266.502	94,23	43.554.459.650	100	45.382.339.993	100	117.581.066.145	Dinas Perhubungan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab		
							2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
					Persentase layanan prasarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	37,50	75,00	87,50		100		100		Dinas Perhubungan	
					Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	114,2	252	282		302		1.033		Dinas Perhubungan	
					Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	62,5	144	161		173		601		Dinas Perhubungan	
					Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	453	863	967		1.036		3.877		Dinas Perhubungan	
					Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	210	612	685		734		2.669		Dinas Perhubungan	
					Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:Juta Rupiah)	143,7	629	705		755		2.520		Dinas Perhubungan	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	8.290.687.078	100	9.105.984.897	100	9.616.284.143	100	27.012.956.118	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	49,47	55	607.050.000	60	3.980.000.000	65	4.580.000.000	65	9.167.050.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Kode				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD Penanggung jawab
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Selain program pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki program prioritas yang saling mendukung antar Perangkat Daerah (*sharing outcome*). Program prioritas tersebut adalah:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui kebijakan *crosscutting*, yaitu upaya pembangunan yang dilakukan melalui kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Perangkat Daerah dan Program pengampu pelaksanaan penanggulngan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1) Dinas Sosial:

- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

Indikator:

- Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif;
- Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu.

2) Dinas Kesehatan:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Indikator:

- Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; dan
- Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS.

3) Dinas Pendidikan:

- Program Pengelolaan Pendidikan.

Indikator:

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK.

4) Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat):



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- Program Kesejahteraan Rakyat.

Indikator:

- Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan.

5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana:

- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Indikator:

- Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan.

6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Indikator:

- Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas.

7) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- Program Pengelolaan Persampahan.

Indikator:

- Persentase Penanganan Sampah.

8) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan:

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Indikator:

- Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian; dan
- Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak.

- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Indikator:

- Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan;
- Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura; dan
- Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan.

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Indikator:

- Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan;
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; dan



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan.
Indikator:
 - Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman.
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah:
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
Indikator:
 - Rasio Wirausaha.
- 10) Dinas Kelautan Dan Perikanan:
 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
Indikator:
 - Nilai Nelayan/Tukar NTN.
 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
Indikator:
 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi.
- 11) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi:
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Indikator:
 - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
- 12) Dinas Komunikasi Dan Informatika:
 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
Indikator:
 - Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
 - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Indikator:
 - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- 13) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman:



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- Program Kawasan Permukiman.

Indikator:

- Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun; dan
- Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha).

14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Indikator:

- Rasio Elektrifikasi; dan
- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik.

- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

Indikator:

- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed).

15) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan:

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Indikator:

- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak.

16) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan:

- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator:

- Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja PD dgn DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

b. Penurunan Prevalensi Stunting

Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui kebijakan *crosscutting* yaitu upaya pembangunan yang dilakukan melalui kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Adapun



Pemerintah Daerah

Provinsi Kepulauan Riau

Perangkat Daerah dan Program pengampu pelaksanaan penurunan prevalensi stunting adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kesehatan:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Indikator:

- Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; dan
- Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS.

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Indikator:

- Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas.

3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Indikator:

- Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya.

- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Indikator:

- Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).

- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Indikator:

- *Unmet Need*

4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman:

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Indikator:

- Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota.

5) Dinas Sosial:

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Indikator:



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif.

6) Dinas Komunikasi Dan Informatika:

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Indikator:

- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Indikator:

- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

7) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan:

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Indikator:

- Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan; dan
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

- Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Indikator:

- Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman

8) Dinas Kelautan Dan Perikanan:

- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Indikator:

- Angka Konsumsi Ikan (AKI).

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penganggaran program perangkat daerah, sangat penting untuk memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Tujuannya adalah agar kerangka pendanaan ini dapat digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendukung pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kerangka pendanaan memiliki peran strategis dalam menghitung alokasi dana untuk program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, perlu diingat bahwa kebutuhan pendanaan yang ditetapkan dalam RPJMD bersifat indikatif. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan pendanaan setiap tahun dapat disesuaikan dengan prioritas daerah. Oleh karena itu, penyesuaian anggaran sangatlah penting agar daerah dapat merespons dinamika yang terjadi.

7.1. Kerangka Pendanaan

Proses perhitungan kerangka pendanaan melibatkan analisis mendalam dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dengan demikian, tercapainya kebutuhan pembangunan yang sesuai dapat dijamin. Meskipun terjadi perubahan, RPJMD ini tetap mempunyai arah dan tujuan besar yang sama yaitu selain sebagai penjabaran visi dan misi kepada daerah terpilih, yang tentu juga tetap memedomani RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Program pembangunan dan program perangkat daerah, dalam perubahan ini ditujukan untuk mengakselerasi pencapaian target *outcomes* hingga dampak yang diharapkan. Selain itu, penting bagi program-program ini untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan menyelenggarakan urusan pemerintahan



daerah dengan baik. Dengan demikian, daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pagu indikatif mewakili manifestasi dari kebutuhan pendanaan, mencakup total dana yang tersedia untuk merencanakan program, kegiatan, serta sub-kegiatan tahunan. Di sini, termasuk program-program prioritas yang telah disertai dengan estimasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif yang sesuai. Pagu indikatif berperan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, meliputi rincian kegiatan prioritas beserta estimasi kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif mengartikan jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk merencanakan program dan kegiatan tahunan, termasuk program-program prioritas yang telah disertai dengan perkiraan pendanaan atau pagu indikatif yang sesuai. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 ini sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 secara rinci tercantum pada Tabel VII.1 dan Tabel VII. 2 berikut ini:



**Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026 (Jutaan Rupiah)

No	Uraian	REALISASI	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi			
		2022		2023	2024	2025	2026
	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.396.419	-1%	3.863.235	4.002.402	3.516.610	3.696.101
	Belanja Operasi	2.719.719	4%	3.000.922	3.251.526	3.177.626	3.356.124
	Belanja pegawai	1.033.407	2%	1.139.198	1.286.421	1.325.014	1.364.764
	Belanja Barang dan Jasa		15%	1.453.538	1.565.078	1.460.047	1.503.849
	Belanja Bunga	1.430.736	-23%	13.141	4.680	2.000	2.000
	Belanja Subsidi	2.500	12%	5.139	3.374	5.000	5.000
	Belanja Hibah		-16%	381.623	386.541	378.004	471.088
	Belanja Biaya Provisi	249.256	0%	-	0	0	0
	Belanja Bantuan Sosial	3.819	-14%	8.280	5.428	7.560	9.421



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	REALISASI	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi			
		2022		2023	2024	2025	2026
	Belanja Tak Terduga	709	29%	7.185	20.000	2.000	2.000
	Belanja Tak Terduga	709	29%	7.185	20.000	2000	2000
	Transfer	675.990	-20%	788.975	730.876	336.983	337.977
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	654.199	-3%	780.575	728.676	334.783	335.777
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	21.790	-	-	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan	675.990	313%	8.400	2.200	2.200	2.200
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan Ke	-	-	-	0	0	0



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	REALISASI	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi			
		2022		2023	2024	2025	2026
	Desa						
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-		0	0	0
	Pengeluaran Pembiayaan	-	0%	66.152	92.053	0	0
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	0%	66.152	92.053	0	0

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel VII.2
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	APBD 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.633.344	4.086.494	4.216.352	4.113.774	4,233,145
2	Penerimaan Pembiayaan	332.601	405.506	220.640	150.000	180.000
	TOTAL PENERIMAAN	3.965.935	4.492.000	4.436.991	4.263.774	4.413.144
	(Dikurangi):					
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	3.385.082	3.831.496	4.094.454	3.516.610	3.696.101
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	580.853	660.504	342.537	747.164	717.043

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan kembali secara berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:



**Tabel VII.3
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2026**

No.	Uraian	APBD 2022	Proyeksi			
			2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.633.334.360.605	4.086.494.146.918	4.216.352.903.217	4.113.774.996.035	4.233.144.570.878
2	Penerimaan Pembiayaan	332.601.648.531	405.506.594.892	220.639.929.487	150.000.000.000	180.000.000.000
	Kapasitas Riil Pagu OPD	3.965.936.009.136	4.424.848.141.271	4.436.992.832.704	4.263.774.996.035	4.413.144.570.878

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2023 (diolah)



7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada lampiran.

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 - 2026

2024-03-20

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS PENDIDIKAN			1.083.612.034.779		868.180.604.973		893.056.961.498		2.844.849.601.250		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	Na	91,5	697.227.729.587	92,5	704.077.947.390	93,5	715.200.285.812	93,5	2.116.505.962.789	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	85,43	80,00	384.913.205.192	81,00	158.204.519.684	82,00	171.704.519.684	82	714.822.244.560	Dinas Pendidikan
		- Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	84,54	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK (Dengan Satuan:%)	107,72	99,00		99,50		100		100		Dinas Pendidikan
		- Angka partisipasi kasar (APK) SLB (Dengan Satuan:%)	82,35	87,00		88,00		90		90		Dinas Pendidikan
		- Angka Putus Sekolah SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	0,08	0,36		0,35		0,34		0,34		Dinas Pendidikan
		- Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	99,97	96,27		96,44		96,60		96,6		Dinas Pendidikan
		- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK (Dengan Satuan:%)	99,93	100,00		100,00		100,00		100		Dinas Pendidikan
		- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Dengan Satuan:Ratio)	33,16	33,85		33,90		33,95		33,95		Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum (Dengan Satuan:%)	67,28	61	991.100.000	61,50	2.671.335.362	62,00	2.781.374.124	62,00	6.443.809.486	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum. (Dengan Satuan:%)	40,68	31		31,50		32		32		Dinas Pendidikan
		Jumlah SMK yang Terevitalisasi (Dengan Satuan:%)	97,22	97,22		97,30		97,37		97,37		Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah (Dengan Satuan:Ratio)	644,92	728,07	400.000.000	729,7	2.449.976.174	730,00	2.489.175.152	730,00	5.339.151.326	Dinas Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin (Dengan Satuan:%)	100	100	80.000.000	100	776.826.363	100	881.606.726	100	1.738.433.089	Dinas Pendidikan
	DINAS KESEHATAN			379.336.771.655		455.560.339.634		477.631.710.989		1.312.528.822.278		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	285.004.727.712	100	331.655.248.887	100	341.604.906.354	100	958.264.882.953	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 100.000 Kelahiran Hidup)	125	123	64.505.034.898	122	85.000.720.198	121	95.500.720.198	121	245.006.475.294	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Dinkes) (Dengan Satuan:per 1000 Kelahiran Hidup)	14	12		11		10		10		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	15.8	14		13.3		12.8		12.8		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) (Dengan Satuan:Kab/Kota)	2	5		7		7		7		Dinas Kesehatan
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	90	92		93		93		93		Dinas Kesehatan
		Capaian ODHA yang mendapatkan ARV (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	64	72		76		80		80		Dinas Kesehatan
		Eliminasi malaria (kabupaten/kota) (Dengan Satuan:%)	43	57.14		57.14		67		67		Dinas Kesehatan
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	93.60	94.60		95.50		95.50		95.50		Dinas Kesehatan
		Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas (Dengan Satuan:%)	57	71		71		71		71		Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	89	95		96		97		97		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas terakreditasi (Dengan Satuan:%)	96	97		97.50		98		98		Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi (Dinkes) (Dengan Satuan:%)	85	95		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial (Dengan Satuan:%)	92	96		96		96		96		Dinas Kesehatan
		Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Status)	Satelit	Utama		Utama		Utama		Utama		Dinas Kesehatan
		Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Status)	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dengan Satuan:Indeks)	78.5	80		80		80		80		Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Indeks)	82	83		84		84		84		Dinas Kesehatan
		Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80) (Dengan Satuan:%)	80	82		85		90		90		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	52	56	28.939.333.045	58	36.146.493.488	60	37.706.819.010	60	102.792.645.543	Dinas Kesehatan
		Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	65	75		80		85		85		Dinas Kesehatan
		Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud (Dengan Satuan:Persentase)	30	40		50		60		60		Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	86	88	31.603.200	89	550.000.000	90	600.000.000	90	1.181.603.200	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (Dinkes) (Dengan Satuan:Persentase)	71.43	85.71	856.072.800	85.71	2.207.877.061	100	2.219.265.427	100	5.283.215.288	Dinas Kesehatan
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN			166.106.311.267		353.373.162.147		356.859.793.576		876.339.266.990		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Dengan Satuan:%)	100	100	28.647.543.067	100	31.853.561.497	100	32.809.168.342	100	93.310.272.906	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir (Dengan Satuan:Ha)	0	75	7.389.083.148	150	17.596.088.156	150	17.129.177.564	150	42.114.348.868	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. (Dengan Satuan:%)	7.54	25.49		31.48		37.46		37.46		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk. (Dengan Satuan:%)	51.59	58.99		62.09		65.39		65.39		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak . (Dengan Satuan:%)	91.82	91.88	2.618.328.096	92	20.240.602.998	92.12	24.824.657.339	92.12	47.683.588.433	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah.. (Dengan Satuan:%)	91.62	90.51	804.064.000	90.68	5.782.101.489	90.91	7.402.978.843	90.91	13.989.144.332	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pelayanan Drainase. (Dengan Satuan:%)	50.79	54.30	198.820.000	57.30	7.729.708.866	60.30	7.714.163.005	60.30	15.642.691.871	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. (Dengan Satuan:%)	68.75	100	54.353.897.240	100	5.137.420.432	100	6.033.496.835	100	65.524.814.507	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)	100	100	13.830.324.096	100	43.155.908.074	100	41.644.607.030	100	98.630.839.200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap.. (Dengan Satuan:%)	80.62	80.94	55.853.736.524	81.10	216.227.770.635	81.26	213.151.544.618	81.26	485.233.051.777	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.. (Dengan Satuan:%)	23.76	26	665.000.000	28	2.400.000.000	30	2.400.000.000	30	5.465.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda (Dengan Satuan:%)	85	85	626.395.048	93	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	7.126.395.048	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	100	1.119.120.048	100	150.000.000	100	150.000.000	100	1.419.120.048	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Fasilitas Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan riau (Dengan Satuan:%)	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			268.739.849.870		310.938.712.280		300.797.898.280		880.476.460.430		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	20.287.961.038	100	14.980.731.451	100	15.400.153.395	100	50.668.845.884	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	100	100	690.934.720	100	8.000.000.000	100	4.000.000.000	100	12.690.934.720	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun. (Dengan Satuan:Unit Rumah)	200	50	3.103.412.640	50	55.000.000.000	50	60.500.000.000	350	118.603.412.640	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh. (Dengan Satuan:Ha)	339.21	334.21		329.21		324.21		324.21		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Jumlah Lokasi)	7	7	244.657.541.472	7	232.957.980.829	7	220.897.744.885	7	698.513.267.186	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			11.806.228.660		21.607.778.849		23.861.297.835		57.275.305.344		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan:Person)	100	100	8.844.126.351	100	9.391.459.285	100	9.673.203.064	100	27.908.788.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	2,36	2,60	2.962.102.309	2,80	12.216.319.564	3,00	14.188.094.771	3,00	29.366.516.644	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	0,27	0,32		0,33		0,35		0,35		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (Dengan Satuan:Indeks)	0,31	0,42		0,43		0,45		0,45		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU			24.619.268.895		36.804.869.720		40.080.978.557		101.505.117.172		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	22.163.452.294	100	22.432.507.912	100	23.105.483.149	100	67.701.443.355	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:Person)	100	100	2.166.218.601	100	11.336.086.995	100	13.934.028.076	100	27.436.333.672	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2024		2025		2026								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Persentase perda dan/atau perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:Person)	41,67	67		83		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau				
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	100	10		10		10		30		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau				
		Persentase SDM aparatur satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas (Dengan Satuan:Persentase)	16	23		27		32		32		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya (Dengan Satuan:Persentase)	71	86	289.598.000	100	3.036.274.813	100	3.041.467.332	100	6.367.340.145	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau				
	DINAS SOSIAL			29.725.171.830		40.185.717.305		42.614.291.291		112.525.180.426						
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	12.815.019.850	100	12.777.646.599	100	13.160.975.997	100	38.753.642.446	Dinas Sosial				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	35,71	5,63	1.338.909.096	5,63	1.584.498.555	5,63	1.606.754.838	16,88	4.530.162.489	Dinas Sosial				
		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi. (Dengan Satuan:%)	44,80	32,61		32,61		32,61		50,93		Dinas Sosial				
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial Dinas Sosial (Dengan Satuan:%)	0	0		0		100		500.000.000		100	500.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia (Dengan Satuan:%)	25	100		3.245.121.648		100		4.810.253.648		100	5.506.786.048	100	13.562.161.344	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial				
		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Sosial						
		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Sosial						
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Sosial						
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Sosial						
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif (Dengan Satuan:%)	0.42	0.20	10.321.785.746	0.63	17.659.224.471	0.73	18.970.768.667	1.56	46.951.778.884	Dinas Sosial				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:%)	9,20	13,02		13,05		13,05		39,13		Dinas Sosial
		Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (Dengan Satuan:%)	100	100	625.816.490	100	1.391.614.032	100	1.406.525.741	100	3.423.956.263	Dinas Sosial
		Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ditingkat provinsi (Dengan Satuan:%)	0	100		100	100	100		Dinas Sosial		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial (Dengan Satuan:Unit)	11,11	11,11	1.378.519.000	11,11	1.462.480.000	11,11	1.462.480.000	11,11	4.303.479.000	Dinas Sosial
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			28.978.362.655		57.968.528.591		55.198.575.903		142.145.467.149		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	25.042.470.555	100	26.189.268.969	100	26.974.947.038	100	78.206.686.562	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas (Dengan Satuan:persen)	100	100	20.000.000	100	702.743.887	100	871.104.083	100	1.593.847.970	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru (Dengan Satuan:persen)	7,69	9	3.160.000.000	10	18.703.883.148	12	16.763.368.930	12	38.627.252.078	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja (Dengan Satuan:persen)	34,12	66,67		66,67		71,79		71,79		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Dengan Satuan:persen)	54,3	61,53		66,66		71,79		71,79		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Dengan Satuan:persen)	48,60	63	60.000.000	64	2.067.835.263	65	2.012.176.537	65	4.140.011.800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK- (Dengan Satuan:persen)	67,55	67,59		67,62		67,65		67,65		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Dengan Satuan:persen)	25,29	0	326.292.100	50	1.401.051.737	55	1.015.958.883	55	2.743.302.720	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam (Dengan Satuan:pesrsen)	98,07	100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:persen)	84,56	95,75	349.600.000	96	3.336.671.642	96,25	3.175.212.285	96,25	6.861.483.927	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani (Dengan Satuan:persen)	83,78	76,50		77,00		77,50		77,50		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dengan Satuan:persen)	10,03	13,80		14,80		15,80		15,80		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan (Dengan Satuan:persen)	25	33,3	20.000.000	33,3	3.498.186.945	33,3	2.557.672.727	33,33	6.075.859.672	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:persen)	21,23	34,4	0	40,2	1.067.835.263	45,9	1.012.176.537	45,9	2.080.011.800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan (Dengan Satuan:persen)	6,25	18,75	0	25	1.001.051.737	31,25	815.958.883	31,25	1.817.010.620	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			25.596.600.861		33.754.559.841		35.445.379.968		94.796.540.670		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	13.385.402.257	100	13.628.100.643	100	14.036.943.662	100	41.050.446.562	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi (Dengan Satuan:%)	11,26	11,82	1.406.111.015	12,41	9.639.030.069	13,03	10.352.345.316	13,03	21.397.486.400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi (Dengan Satuan:%)	8,89	8		8		8		8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	93,43	1.526.926.884	100	1.293.221.407	100	1.338.649.880	100	4.158.798.171	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Dengan Satuan:Rasio)	29,46	43,70		43,51		43,33		43,33		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatann (Dengan Satuan:%)	28,71	29	3.967.427.213	29,50	1.270.851.939	30	1.326.209.680	30	6.564.488.832	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak (Dengan Satuan:%)	41,86	46,51	10.000.000	51,16	521.160.308	55,81	527.644.888	55,81	1.058.805.196	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya (Dengan Satuan:Persentase)	57,14	71,43	664.839.844	71,43	814.870.242	85,71	831.313.219	85,71	2.311.023.305	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:Rasio)	5,33	5,60	395.009.100	5,88	760.458.023	6,17	869.112.221	6,17	2.024.579.344	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (Dengan Satuan:%)	45,51	59	0	59,25	505.801.539	59,75	524.401.997	59,75	1.030.203.536	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (Dengan Satuan:%)	24,9	22	4.017.600.000	20	4.517.600.000	18	4.817.600.000	18	13.352.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) (Dengan Satuan:Indek)	56,83	62	223.284.548	62,5	803.465.671	63	821.159.105	63	1.847.909.324	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN			43.406.651.879		49.666.845.721		52.816.284.802		145.889.782.402		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	21.676.445.359	100	22.439.953.031	100	23.113.151.622	100	67.229.550.012	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan (Dengan Satuan:PERSEN)	124	115	2.927.422.979	115,5	3.477.836.452	116	3.577.836.452	116	9.983.095.883	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Dengan Satuan:PERSEN)	89	88,50		89,30		90,10		90,10		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen (Dengan Satuan:PERSEN)	6,6	≤11		≤11		≤11		≤11		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan (Dengan Satuan:PERSEN)	6,60	≤10	142.101.210	≤10	1.387.347.490	≤10	1.278.669.732	≤10	2.808.118.432	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (Dengan Satuan:PERSEN)	98	83	53.579.787	84	1.370.635.092	85	1.261.153.440	85	2.685.368.319	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	89,98	24,73	8.772.061.357	25,75	9.471.787.021	26,76	10.721.787.021	26,76	28.965.635.399	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Sarana Produktivitas Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	62,08	24,73		25,75		26,76		26,76		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak. (Dengan Satuan:PERSEN)	2,35	1,30		1,35		1,40		1,40		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Dengan Satuan:PERSEN)	2,91	3,20	7.461.970.905	3,50	8.037.245.420	3,80	9.118.509.514	3,80	24.617.725.839	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dengan Satuan:PERSEN)	1,20	1,21		1,23		1,26		1,26		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:PERSEN)	1,33	2,58		3,14		3,66		3,66		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit (Dengan Satuan:PERSEN)	64,75	64	425.677.823	65	1.071.961.217	66	1.065.553.955	66	2.563.192.995	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (Dengan Satuan:PERSEN)	79,75	60,00		61,00		62,00		62,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) (Dengan Satuan:PERSEN)	62,50	42	92.215.531	43,5	581.529.386	45	451.072.454	45	1.124.817.371	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) (Dengan Satuan:PERSEN)	84,43	73,90		74,60		74,80		74,80		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) (Dengan Satuan:PERSEN)	98,88	20		20		20		20		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya (Dengan Satuan:PERSEN)	49,02	50,00	1.855.176.928	51,00	1.828.550.612	56.00	2.228.550.612	56.00	5.912.278.152	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Nilai Tukar Petani (NTP) (Dengan Satuan:RASIO)	103,34	100,17		100,20	100,22	100,22		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			34.506.284.698		49.670.079.364		51.824.386.055		136.000.750.117		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	30.939.348.898	100	31.797.512.393	100	32.751.437.764	100	95.488.299.055	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	438.173.000	100	6.309.469.978	100	7.327.119.247	100	14.074.762.225	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut (Dengan Satuan:indeks)	85,56	78,04	0	78,04	554.859.756	78,04	571.188.703	78,04	1.126.048.459	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks kualitas Air (Dengan Satuan:indeks)	56,79	56,9		56,9		56,9		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
		Indeks kualitas Udara Ambien (Dengan Satuan:indeks)	90,27	88,46		88,46		88,46		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
		Indeks kualitas Tutupan Lahan (Dengan Satuan:indeks)	58	59.10		59.10		59.10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Persentase)	28,57	28,57	0	42,58	591.327.899	57,14	518.506.804	57,14	1.109.834.703	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawas (Dengan Satuan:Persentase)	50	40,00	379.506.000	40,00	845.756.090	46,67	850.580.770	46,67	2.075.842.860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat kepatuhan terhadap regulasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	100	315.363.626	100	316.983.620	100	632.347.246	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan (Dengan Satuan:Persentase)	71,43	71,43	379.532.000	71,43	359.823.824	71,43	365.909.526	71,43	1.105.265.350	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	100	342.576.861	100	347.066.312	100	689.643.173	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	80.220.000	100	237.475.201	100	241.426.715	100	559.121.916	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	14,82	28	1.923.204.000	30	4.990.000.000	30	4.990.000.000	30	11.903.204.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Penanganan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	71	71		70		70		70		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	27,13	27,30	211.450.800	27,41	1.527.782.030	27,50	1.607.072.326	27,50	3.346.305.156	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Rehabilitasi Lahan Kritis (Dengan Satuan:Hektar)	5	5		5		5		5		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang terkelola (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	50	300.000.000	60	350.000.000	60	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok yang mengelola Perhutanan Sosial (Dengan Satuan:Kelompok)	30	30	154.850.000	30	1.195.387.819	30	1.215.990.185	30	2.566.228.004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (Dengan Satuan:DAS)	2	2	0	2	302.743.887	2	371.104.083	2	673.847.970	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			43.243.534.318		50.109.785.785		51.233.218.479		144.586.538.582		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	11.218.921.324	100	11.915.029.787	100	12.272.480.680	100	35.406.431.791	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk (Dengan Satuan:%)	100	100	88.933.700	100	2.561.150.116	100	2.606.962.803	100	5.257.046.619	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) (Dengan Satuan:%)	30	75	154.379.300	100	2.714.621.528	100	2.958.702.279	100	5.827.703.107	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri (Dengan Satuan:%)	100	100	281.943.000	100	2.175.096.090	100	2.330.796.090	100	4.787.835.180	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman (Dengan Satuan:%)	100	100	40.000.000	100	161.748.520	100	182.136.883	100	383.885.403	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	131.908.000	100	576.540.000	100	576.540.000	100	1.284.988.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama (Dengan Satuan:@)	1,45	5,45	80.858.300	8	366.600.000	10,91	366.600.000	10,91	814.058.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes (Dengan Satuan:%)	25,68	34,74	2.690.901.500	43,81	2.382.000.000	52,87	2.482.000.000	52,87	7.554.901.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:%)	44,64	83,33	28.555.689.194	83,33	27.256.999.744	100	27.456.999.744	100	83.269.688.682	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	DINAS PERHUBUNGAN			48.492.154.216		80.861.597.190		88.479.637.727		217.833.389.133		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:%)	200	100	16.616.912.125	100	18.674.560.824	100	19.234.797.649	500	54.526.270.598	Dinas Perhubungan
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		500		Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		500		Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		500		Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:%)	200	100		100		100		500		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat (Dengan Satuan:%)	200	100	3.230.975.589	100	18.632.576.716	100	23.862.500.085	500	45.726.052.390	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan sarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	82,69	90,38	28.644.266.502	94,23	43.554.459.650	100	45.382.339.993	100	117.581.066.145	Dinas Perhubungan
		Persentase layanan prasarana angkutan perairan (Dengan Satuan:%)	37,50	75,00		87,50		100		100		Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:juta Rupiah)	114.2	252		282		302		1033		Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:juta Rupiah)	62.5	144		161		173		601		Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:juta Rupiah)	453	863		967		1036		3877		Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:juta Rupiah)	210	612		685		734		2669		Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:juta Rupiah)	143,7	629		705		755		2520		Dinas Perhubungan
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA			39.350.548.800		36.550.728.950		41.889.996.922		117.791.274.672		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	13.330.429.549	100	14.122.637.042	100	14.546.316.153	100	41.999.382.744	Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (Dengan Satuan:Persentase)	20,09	30	18.851.191.426	35	16.744.217.131	40	20.766.587.088	40	56.361.995.645	Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Dengan Satuan:Persentase)	81,4	81,4	6.753.825.879	81,4	4.943.293.082	81,4	5.765.249.901	81,4	17.462.368.862	Dinas Komunikasi & Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	147.746.448	100	319.647.647	100	343.669.732	100	811.063.827	Dinas Komunikasi & Informatika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	267.355.498	100	420.934.048	100	468.174.048	100	1.156.463.594	Dinas Komunikasi & Informatika
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			22.514.069.799		38.391.570.897		40.641.694.746		101.547.335.442		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.067.639.029	100	14.213.084.754	100	15.505.582.319	100	41.786.306.102	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (Dengan Satuan:%)	12,86	21,34	87.676.000	26,34	180.000.000	31,34	180.000.000	31,34	447.676.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi (Dengan Satuan:%)	2,69	4,53	143.520.000	5,53	371.239.811	6,53	377.760.206	6,53	892.520.017	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya (Dengan Satuan:%)	5,79	9,97	35.930.000	12,07	214.159.874	14,17	218.506.804	14,17	468.596.678	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	12,27	23,8	510.000.000	28,8	1.849.569.683	33,8	1.874.303.716	33,8	4.233.873.399	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	31,45	35,18	1.018.619.000	37,18	6.059.805.930	39,18	7.100.160.761	39,18	14.178.585.691	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha (Dengan Satuan:%)	29,66	29,02	7.298.906.121	29,52	8.448.249.593	30,02	8.518.182.421	30,02	24.265.338.135	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:%)	0,95	0,84		1,04		1,24		1,24		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	23,65	32,86	1.351.779.649	36,36	7.055.461.252	39,86	6.867.198.519	39,86	15.274.439.420	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			14.898.196.148		20.721.297.567		20.904.738.760		56.524.232.475		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	12.409.458.533	100	13.683.194.291	100	13.887.590.119	100	39.980.242.943	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi (Dengan Satuan:%)	100	100	324.217.927	100	1.049.207.206	100	887.176.537	100	2.260.601.670	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal (Dengan Satuan:100)	100	100	99.979.900	100	2.226.396.719	100	3.043.600.638	100	5.369.977.257	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani (Dengan Satuan:%)	80	100	630.936.788	100	2.500.812.523	100	1.880.525.198	100	5.012.274.509	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (Dengan Satuan:%)	100	100	1.388.207.000	100	1.056.199.055	100	1.002.534.021	100	3.446.940.076	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau (Dengan Satuan:%)	100	100	45.396.000	100	205.487.773	100	203.312.247	100	454.196.020	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA			46.707.870.585		51.479.212.582		54.323.384.043		152.510.467.210		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dengan Satuan:Person)	100	100	15.939.491.785	100	15.359.347.894	100	15.820.128.331	100	47.118.968.010	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan (Dengan Satuan:Persentase)	0,10	1,30	1.384.952.400	1,48	18.565.831.252	1,50	19.354.665.643	1,50	39.305.449.295	Dinas Kepemudaan & Olahraga
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan ,Kepemimpinan dan Organisasi (Dengan Satuan:Persentase)	0,041	0,17		0,18		0,18		Dinas Kepemudaan & Olahraga		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda (Dengan Satuan:Persentase)	0,64	0,77		28.188.733.900		0,82		15.990.496.352	0,86	17.369.920.437
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	38,09	43,88		46,77		49,66		49,66		Dinas Kepemudaan & Olahraga
		Cakupan Pembinaan Olahraga (Dengan Satuan:persentase)	10,23	11,54		11,54		11,54		11,54		Dinas Kepemudaan & Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dengan Satuan:Persentase)	8,43	9,63 (8 Kwartir)	1.194.692.500	9,63 (8 Kwartir)	1.563.537.084	9,63 (8 Kwartir)	1.778.669.632	9,63 (8 Kwartir)	4.536.899.216	Dinas Kepemudaan & Olahraga
	DINAS KEBUDAYAAN			23.303.844.945		34.579.499.836		38.187.165.894		96.070.510.675		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	12.964.383.683	100	13.045.188.051	100	13.436.543.692	100	39.446.115.426	Dinas Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan (Dengan Satuan:%)	18.43	20.81	3.389.615.748	21.52	12.548.743.377	22.23	15.548.743.377	22.23	31.487.102.502	Dinas Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) (Dengan Satuan:%)	28.11	28.21	5.429.861.844	28.24	5.564.661.144	28.27	5.664.661.144	28.27	16.659.184.132	Dinas Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Keterlibatan SDM sejarahwan (Dengan Satuan:%)	33,33	45	192.348.600	60	503.436.888	80	515.690.636	80	1.211.476.124	Dinas Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	30.51	35.39	933.479.326	37.20	2.262.425.363	39.02	2.252.397.540	39.02	5.448.302.229	Dinas Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia (Dengan Satuan:Orang)	19.117	12.132	394.155.744	12.132	655.045.013	12.132	769.129.505	254938	1.818.330.262	Dinas Kebudayaan
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			20.156.111.330		28.713.152.860		32.957.220.379		81.826.484.569		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	18.641.093.712	100	21.626.840.794	100	23.331.171.320	100	63.599.105.826	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Nilai)	62,02	63,00	707.517.618	63,50	2.735.237.004	64,00	3.586.923.536	64,00	7.029.678.158	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (DPK) (Dengan Satuan:Indeks)	15,31	15,45	412.500.000	15,65	1.417.975.075	15,85	1.536.444.136	15,85	3.366.919.211	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (dpk) (Dengan Satuan:%)	15,67	20,75	395.000.000	24,50	1.153.408.376	28,50	2.088.638.359	28,50	3.637.046.735	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:Nilai)	28,33	62,50	0	64,16	1.394.071.706	65,83	1.963.312.245	65,83	3.357.383.951	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Izin Penggunaan Arsip (Dengan Satuan:Skor)	0	5	0	5	385.619.905	5	450.730.783	5	836.350.688	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			73.296.413.023		100.795.495.721		103.836.130.126		277.928.038.870		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	39.092.777.046	100	42.135.144.422	100	42.923.776.762	100	124.151.698.230	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020) (Dengan Satuan:Kawasan)	1	4	403.976.012	4	6.647.507.205	4	5.325.601.363	4	12.377.084.580	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	322107	308305,6	24.439.063.436	308921,6	25.796.372.755	309538,6	26.296.372.756	309538,6	76.531.808.947	Dinas Kelautan dan Perikanan
		-Nilai Nelayan/Tukar NTN (Dengan Satuan:%)	112,58	116		116,1		116,3		116,3		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	27436,03	30614,37	6.552.228.919	32955,78	16.284.889.169	35288,63	17.504.778.162	35288,63	40.341.896.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
		-Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (Dengan Satuan:Ton)	110,3	111,2		111,76		112,32		112,32		Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (Dengan Satuan:%)	100	90	1.646.021.862	90	6.353.194.741	90	7.028.976.399	90	15.028.193.002	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	8391,68	13200	1.162.345.748	13400	3.578.387.429	13500	4.756.624.684	13500	9.497.357.861	Dinas Kelautan dan Perikanan
		-Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Dengan Satuan:Kg/perkapita)	0	65,17		65,36		65,62		65,62		Dinas Kelautan dan Perikanan
		-Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan (Dengan Satuan:USD)	0	31817850		31824214		31830578		0		Dinas Kelautan dan Perikanan
	DINAS PARIWISATA			27.839.013.363		41.630.566.509		46.299.354.362		115.768.934.234		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	13.791.909.163	100	13.326.843.452	100	13.726.648.755	100	40.845.401.370	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Dengan Satuan:Daya Tarik/Kawasan/Destinasi)	3	2	923.310.100	2	19.821.644.418	2	23.743.948.691	2	44.488.903.209	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan:Orang)	758154	1474269	12.559.590.000	1621695	4.280.995.275	1783864	4.467.706.520	1783864	21.308.291.795	Dinas Pariwisata
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara. (Dengan Satuan:Orang)	817282	1722943		1964155		2239136		2239136		Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:Sub Sektor)	3	7	434.454.100	7	2.100.541.682	7	2.180.525.198	7	4.715.520.980	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan. (Dengan Satuan:%)	1,63	2	129.750.000	2	2.100.541.682	2	2.180.525.198	2	4.410.816.880	Dinas Pariwisata
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			37.115.903.827		47.339.293.835		50.033.845.784		134.489.043.446		
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	100	100	13.566.012.825	100	13.416.668.361	100	13.819.168.412	100	40.801.849.598	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Wilayah Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dengan Satuan:%)	36,36	72,73	996.553.400	81,82	7.750.778.217	90,91	8.265.123.087	90,91	17.012.454.704	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:Milyar Rupiah)	298,38	174,59	213.627.000	228,60	1.000.000.000	282,84	1.200.000.000	282,84	2.413.627.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		- Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis (Dengan Satuan:%)		40		45		50		50		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) (Dengan Satuan:%)	14,17	15,43	8.288.080.900	15,42	9.548.372.359	15,83	10.950.028.713	15,83	28.786.481.972	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	100	14.051.629.702	100	15.623.474.898	100	15.799.525.572	100	45.474.630.172	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN			25.217.661.823		41.327.634.366		42.850.975.623		109.396.271.812		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	16.222.353.501	100	16.678.772.849	100	17.179.136.035	100	50.080.262.385	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izi Usaha yang di terbitkan (Dengan Satuan:Persen)	0	100	0	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	0	2.000.000.000	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	50	100	459.524.400	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	10.959.524.400	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Fluktuasi Harga Bahan Pokok (Dengan Satuan:Persen)	34,8	<10	2.824.597.500	<10	5.000.000.000	<10	5.522.978.071	<10	13.347.575.571	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri (Dengan Satuan:Persen)	24,33	8	130.783.328	8	3.000.000.000	8	3.000.000.000	8	6.130.783.328	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan (Dengan Satuan:Persen)	50	60	994.416.150	65	2.148.861.517	70	2.148.861.517	70	5.292.139.184	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (Dengan Satuan:Persen)	65	70	232.152.200	70	1.500.000.000	70	1.500.000.000	70	3.232.152.200	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	4.074.031.444	6	5.000.000.000	6	5.000.000.000	18	14.074.031.444	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	251.289.600	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	2.251.289.600	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	28.513.700	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	2.028.513.700	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	SEKRETARIS DAERAH			394.126.534.003		484.494.351.585		509.602.526.308		1.388.223.411.896		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	93	100	219.203.891.143	100	307.758.078.097	100	325.108.147.602	100	852.070.116.842	Sekretaris Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	38,60	41,60	558.000.000	43,60	2.118.546.545	44,60	2.385.344.542	44,60	5.061.891.087	Sekretaris Daerah
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau (Dengan Satuan:skor)	3,03	3,04	2.146.178.300	3,05	2.103.603.168	3,06	2.361.085.302	3,06	6.610.866.770	Sekretaris Daerah
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan (Dengan Satuan:Persen)	20	60	167.738.457.305	80	166.186.720.139	100	172.730.595.687	100	506.655.773.131	Sekretaris Daerah
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	3.123.732.980	100	2.113.137.990	100	2.375.417.181	100	7.612.288.151	Sekretaris Daerah
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah (Dengan Satuan:Persentase)	n/a	90	783.784.088	90	1.414.963.139	100	1.445.994.952	100	3.644.742.179	Sekretaris Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (Dengan Satuan:Persentase)	8.2	70	327.096.554	70.5	2.165.715.206	71	2.302.676.237	71	4.795.487.997	Sekretaris Daerah
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	90	95	245.393.633	97	633.587.301	100	893.264.805	100	1.772.245.739	Sekretaris Daerah
	SEKRETARIAT DPRD			156.827.081.505		145.221.514.359		151.235.139.828		453.283.735.692		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	87.289.363.979	100	75.787.439.711	100	78.061.062.902	100	241.137.866.592	Sekretariat DPRD
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100	100	100		Sekretariat DPRD		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	69.537.717.526	100	69.434.074.648	100	73.174.076.926	100	212.145.869.100	Sekretariat DPRD
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			35.345.649.342		49.940.827.250		49.100.297.812		134.386.774.404		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	27.348.756.087	100	34.372.138.582	100	33.935.988.805	100	95.656.883.474	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90	4.436.075.805	93	7.592.736.661	95	5.808.584.648	95	17.837.397.114	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90		90		90		90		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90	2.566.331.650	93	6.525.952.007	95	7.430.724.359	95	16.523.008.016	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90		93		95		95		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	n.a	90		93		95		95		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan. (Dengan Satuan:Persen)	n.a	100	994.485.800	100	1.450.000.000	100	1.925.000.000	100	4.369.485.800	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			826.455.360.523		417.200.728.839		422.190.065.131		1.665.846.154.493		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	52.267.079.501	100	57.352.243.643	100	59.162.653.709	100	168.781.976.853	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	100	100	770.499.327.652	100	354.898.485.196	100	357.527.411.422	100	1.482.925.224.270	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah (Dengan Satuan:Person)	90	90		91		92		92		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan (Dengan Satuan:Person)	68	70,98	3.688.953.370	71,84	4.950.000.000	74,66	5.500.000.000	74,66	14.138.953.370	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			128.603.737.607		143.182.353.807		150.080.091.018		421.866.182.432		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	113.917.486.017	100	123.272.886.377	100	126.971.072.968	100	364.161.445.362	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (Dengan Satuan:Persentase)	10.49	13.73		14.37		15.08		15.08		Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan (Dengan Satuan:%)	91	92	808.301.011	92	859.823.824	93	865.909.526	93	2.534.034.361	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda (Dengan Satuan:%)	25,32	3,14	13.877.950.579	-2,87	19.049.643.606	1,80	22.243.108.524	1,80	55.170.702.709	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah. (Dengan Satuan:Pengguna Layanan)	15300	18883		20772		22849		22849		Badan Pendapatan Daerah
		Peningkatan pelayanan prima. (Dengan Satuan:Angka)	81	83		84		85		85		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih. (Dengan Satuan:%)	22	25		27		30		30		Badan Pendapatan Daerah
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI			16.551.063.078		20.565.587.476		22.777.198.471		59.893.849.025		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	14.730.122.878	100	15.530.518.520	100	15.996.434.075	100	46.257.075.473	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100		100		100		100		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	52.57	65,53	1.820.940.200	66,40	5.035.068.956	67,15	6.780.764.396	67,15	13.636.773.552	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	97,04	98,47		98,55		98,63		98,40		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase PNS yang mengikuti penilaian kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	12.45	9.26		11.54		14.00		14.00		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional (Dengan Satuan:Persentase)	13.54	4,43		6,53		12,98		12,98		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik (Dengan Satuan:Persentase)	98,08	99,01		99,02		99,03		99.03		Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			14.924.339.865		20.017.772.875		21.587.268.804		56.529.381.544		
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	12.877.287.007	100	14.084.514.111	100	14.507.049.535	100	41.468.850.653	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	2.047.052.858	100	5.933.258.764	100	7.080.219.269	100	15.060.530.891	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan (Dengan Satuan:Orang)	0	40		100		100		240		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural (Dengan Satuan:Orang)	555	762		944		660		2366		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya (Dengan Satuan:Orang)	1615	1324		1173		1587		4084		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			8.897.737.078		13.085.984.897		14.196.284.143		36.180.006.118		
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	8.290.687.078	100	9.105.984.897	100	9.616.284.143	100	27.012.956.118	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	49,47	55	607.050.000	60	3.980.000.000	65	4.580.000.000	65	9.167.050.000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH			18.552.563.198		21.014.628.557		23.202.065.505		62.769.257.260		
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Person)	100	100	11.575.936.607	100	12.084.292.584	100	12.446.821.361	100	36.107.050.552	Badan Penghubung Daerah
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Dengan Satuan:Persentase)	88	88	6.976.626.591	89	8.930.335.973	90	10.755.244.144	90	26.662.206.708	Badan Penghubung Daerah
		Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat (Dengan Satuan:Persentase)	88	88		89		90		90		Badan Penghubung Daerah
		Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Dengan Satuan:Persentase)	88	88		89		90		90		Badan Penghubung Daerah
	INSPEKTORAT DAERAH			43.106.638.940		43.901.246.311		47.458.570.650		134.466.455.901		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengawasan (Dengan Satuan:%)	39	50	35.886.030.240	60	38.389.729.083	70	40.101.420.956	70	114.377.180.279	Inspektorat Daerah
		Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Dengan Satuan:%)	90	90		90		90		90		Inspektorat Daerah
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (Dengan Satuan:%)	10	10	5.302.019.780	20	3.826.557.984	30	5.596.108.868	30	14.724.686.632	Inspektorat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Inspektorat Daerah		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP (Dengan Satuan:%)	90	90		90		90		Inspektorat Daerah		
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK (Dengan Satuan:%)	88	88		89		90		90		Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI (Dengan Satuan:Jumlah)	-	2	1.918.588.920	2	1.684.959.244	3	1.761.040.826	3	5.364.588.990	Inspektorat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko (Dengan Satuan:%)	n/a	12		14		16		16		Inspektorat Daerah
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Dengan Satuan:Jumlah)	4	2		2		2		2		Inspektorat Daerah
		Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
		Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			182.980.124.304		54.938.965.556		59.890.141.609		297.809.231.469		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	12.245.081.494	100	11.170.581.576	100	11.505.699.023	100	34.921.362.093	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis (Dengan Satuan:%)	0	0	2.440.843.260	0	9.830.619.382	0	10.391.735.609	0	22.663.198.251	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) (Dengan Satuan:%)	0	70	126.266.141.300	0	6.726.464.000	0	6.726.464.000	0	139.719.069.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Demokrasi Indonesia (Dengan Satuan:%)	78,78	78,78		78,79		78,80		78,80		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan (Dengan Satuan:%)	84,21	88	4.729.915.973	90	10.001.578.676	93	12.008.269.687	93	26.739.764.336	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama (Dengan Satuan:%)	0	0	1.865.636.011	0	1.538.373.916	0	1.586.625.284	0	4.990.635.211	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	35.432.506.266	100	15.671.348.006	100	17.671.348.006	100	68.775.202.278	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			TOTAL:	4.344.939.688.669		4.263.774.996.035		4.413.144.570.878		13.021.859.255.582		

Tujuan dan Sasaran Semua Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 - 2026

2024-03-20

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Dinas Pendidikan							
Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,54	100	100	100	100
	Rata Rata Lama sekolah	Tahun	10.37	10,62	10,75	10,88	10,88
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,99	13,09	13,14	13,19	13,19
Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimum B	%	81,29	83	84	85	85
	Persentase Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	97,22	97,22	97,30	97,37	97,37
	Tingkat Lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan	%	Na	33	34	35	35
	Tingkat Penyerapan Lulusan yang di terima di Industri Dunia usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)	%	Na	35	40	45	45
	Persentase PTK mengikuti Diklat untuk Peningkatan Kompetensi	%	Na	12,58	12,60	12,63	12,63
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	106,72	99,00	99,50	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	85,43	80,00	81,00	82,00	82,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	82,35	87,00	88,00	90,00	90,00
	Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK	Ratio	1: 27	1 : 36	1 : 36	1 : 36	1 : 36
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan.	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Klnerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKU Dinas Pendidikan	%	N/A	91,5	92,5	93,5	93,5
Dinas Kesehatan							
Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,27	70,56	70,70	70,85	70,85
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	15,8	14	13,3	12,8	12,8

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	14	12	11	10	10
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	125	123	122	121	121
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.	Persentase	15,8	14	13,3	12,8	12,8
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	Persentase	90	92	93	93	93
	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	Persentase	64	72	76	80	80
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	Persentase	57	71	71	71	71
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase	93,60	94,60	95,00	95,50	95,50
	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	Persentase	89	95	96	97	97
	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Persentase	71,43	86	86	100	100
Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	52	56	58	60	60
	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Persentase	65	75	80	85	85
	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud (RSKJKO - EHD)	Persentase	30	40	50	60	60
Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Persentase Puskesmas terakreditasi	Persentase	96	97	97,50	98	98
	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Persentase	85	95	100	100	100
	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Tingkat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud (RSKJKO EHD)	Tingkat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi - Dinkes	%	82.23	84	85	86	86
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja - Dinkes	%	75.25	77	78	80	80
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan							
Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.	persentase pemenuhan kebutuhan domestik, produktivitas pertanian dan pengurangan risik/ kerentanan bencana alam yang ditangani pada tahun n	%	97.39	100	100	100	100

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir.	Ha	0	75	150	150	150
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	7.54	25.49	31.48	37.46	37.46
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	51.59	58.99	62.09	65.39	65.39
Peningkatan Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar Bidang Cipta Karya	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak.	%	91.82	91.88	92	92.12	92.12
	Persentase cakupan pelayanan sanitasi	%	67.46	73.23	74.97	77.43	77.43
	Cakupan Pelayanan drainase perkotaan	%	50.79	54.3	57.3	60.3	60.3
Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik	Cakupan pelayanan air limbah	%	91.62	90.51	90.68	90.91	90.91
Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan	Cakupan pelayanan drainase	%	50.79	54.3	57.3	60.3	60.3
Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak..	%	91.82	91.88	92	92.12	92.12
Penataan Infrastruktur bangunan lingkungan dan bangunan gedung untuk kepentingan Straregis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Infrastruktur bangunan lingkungan dan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	%	56.25	100	100	100	100
Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	68.75	100	100	100	100
Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap.	%	80.62	80.94	81.10	81.26	81.26
Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata	Persentase Jalan Kondisi Mantap.,	%	80.62	80.94	81.10	81.26	81.26
Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	85	85	93	100	100
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda.	%	85	85	93	100	100
Perwujudan pengadaan lahan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	0	0	100	100	100
Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi.	%	100	100	100	100	100
Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	%	0	0	100	100	100
Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang transparan dan akuntabel	Persentase Ketercapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	%	100	100	100	100	100
Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	23.76	26	28	30	30
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	23.76	26	28	30	30
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	339.21	334.21	329.21	324.21	324.21
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Korban Bencana yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Akibat Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Akses Terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit Rumah	200	200	50	50	300
	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	339.21	334.21	329.21	324.21	324.21
Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi	7	7	7	7	7
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Predikat Akuntabel Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Predikat	BB	BB	BB	A	A

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai	74,82	80	83	85	85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tanggap, Tangkas Dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,40	0,44	0,49	0,54	0,54
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40	0,44	0,49	0,54	0,54
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	71,05	76,00	78,00	80,00	80,00
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau							
Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepri	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	76,98	82,86	85,75	88,82	88,82
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemenuhan Dimensi Strategis dan SDM dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persen	100	100	100	100	100
Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan Dokumen Peta Rawan Kebakaran	Persen	60	86	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nilai	BB (71.85)	BB (73.00)	BB (74.00)	BB (75.00)	BB (75.00)
Meningkatnya Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100
Dinas Sosial							
Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase fakir miskin dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	7,36	9,75	10,09	10,16	29,62
Meningkatnya kemandirian keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	6,73	9,25	9,58	9,65	28,48
Meningkatnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS da	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100
	Persentase sarana-prasarana penyelenggara rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan	%	25	100	100	100	100
Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal	Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan	%	25	3,94	3,94	3,94	11,82
	Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	%	31,36	22,83	22,83	22,83	35,65
	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	0	0	0	0	0
Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100
Terwujudnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50
Meningkatnya ketercapaian IKU	Persentase ketercapaian IKU	%	100	100	100	100	100
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
Terwujudnya peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja sebagai upaya mengurangi pengangguran,	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.23	7.88	7.54	7.21	6.91
Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja.	persen	89..66	90	90.25	90.35	90.66
Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga Kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan kerja	persen	100	100	100	100	100
Optimalisasi Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	persen	4.80	5.00	5.25	5.50	6.00
Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya	Tingkat perselisihan hubungan industrial	persen	7.55	11	14	16	19.00
Peningkatan pelayanan ketransmigrasian di kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang terlayani	SKP	1	1	2	2	3
Meningkatkan kualitas dan pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang diberdayakan	persen	31	38	44	50	63
Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Disnaker	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SAKIP	nilai AA (>90), A (>80), BB (>70), B (>60), CC (>50), C (>30), D(>0)	BB	BB	BB	BB	BB
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB							

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,24	66,52	66,95	68,1	67,25
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,50	93,55	93,57	93,60	93,60
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,05	59,06	59,07	59,08	59,08
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Indeks perlindungan anak	Indek	64,24	66,52	66,95	68,1	67,25
Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari segala tindak kekerasan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	93,43	100,00	100,00	100
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Rasio	29,46	43,70	43,51	43,33	43,33
Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat	Total Fertility Rate	Indek	2,15	2,17	2,16	2,15	2,18
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	45,51	59,00	59,25	59,75	49,50
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas P3AP2KB	Nilai Sakip Dinas P3AP2KB	Nilai	75,30	76,00	76,50	77,00	77,00
Meningkatnya Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas P3AP2KB	Persentase Ketercapaian IKU Dinas P3AP2KB	%	100	90	95	100	100
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan							
Meningkatkan pemanfaatan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan & perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku.	Milyar Rp.	3989,22	3996,25	4003,45	4010,84	4010,84
Meningkatnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan)	Persentase Peningkatan Produktivitas pertanian	PERSEN	1,76	1,77	1,78	1,79	1,79
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	PERSEN	2,35	1,30	1,35	1,40	1,40
	Nilai tukar petani (NTP).	RASIO	103,34	100,17	100,20	100,22	100,22
	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit.	PERSEN	74,75	64	65	66	66
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	Indeks	63,26	63,27	63,28	63,29	63,29
Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Skor PPH Konsumsi	PERSEN	89	89,30	89,70	90,10	90,10
	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan.	PERSEN	124	115	115,5	116	116
	Persentase daerah rentan terhadap kerawanan pangan.	PERSEN	6,60	≤10	≤10	≤10	≤10
Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP.	Predikat	89,25	75	76	76	76
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan	Predikat	89,25	75	76	76	76

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74,13	70.18	70.28	70.38	70.38
Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks kualitas Air.	Indeks	56,79	56,90	56,90	56,90	56,90
	Indeks kualitas Udara.	Indeks	90,27	88,46	88,46	88,46	88,46
	Indeks kualitas Tutupan Lahan.	Indeks	58,00	59,10	59,10	59,10	59,10
	Indeks Kualitas Air Laut.	Indeks	85,56	78,04	78,04	78,04	78,04
	Presentase ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah	Presentase	100	100	100	100	100
	Presentase izin pengelolaan limbah B3 yang di awasi	Presentase	50	40	40	46,67	46,67
	Presentase tingkat kepatuhan terhadap regulasi	Presentase	100	100	100	100	100
	Presentase Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan	Presentase	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43
	Presentase perusahaan yang taat aturan	Presentase	100	100	100	100	100
	Presentase penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Presentase	100	100	100	100	100
	Presentase Pengurangan Sampah	Presentase	14,82	28	30	30	30
	Presentase penanganan sampah	Presentase	71	71,00	70	70	70
Meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku.	Milyar Rupiah	27.13	27.30	27.41	27.50	27.50
Meningkatnya pemanfaatan Hutan Lestari	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Hektar	5	5	5	5	5
	Jumlah akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Kelompok	30	30	30	30	30
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku..	Milyar (Rp)	27,13	27,32	27,41	27,50	27,50
	Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau.	DAS	1	2	2	2	2
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP DLHK	Predikat	BB	BB	B	B	B
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP DLHK.	Predikat	BB	BB	B	B	B
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	85	86	90	90

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan Smart Service	Persentase rata-rata capaian KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	82	84	85	86	86
Terwujudnya masyarakat desa yang tangguh dan partisipatif	Jumlah Desa Mandiri	Desa	2	4	5	6	6
Mempercepat Kemandirian BUM Desa/BUM Desa bersama	Jumlah BUMDesa Maju	BUMDesa	1	4	6	8	8
Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dpmd Dukcapil	Nilai SAKIP Dpmd Dukcapil	Nilai	0	0	0	0	0
Meningkatnya Capaian IKU Dpmd Dukcapil	Capaian IKU Dpmd Dukcapil	%	0	0	0	0	0
Dinas Perhubungan							
Terwujudnya pembangunan antar pulau dan pesisir	Rasio Konektivitas Provinsi (1)	Rasio	0,56	0,62	0,63	0,65	0,65
	Rasio Konektivitas Provinsi (2)	Rasio	0,56	0,62	0,63	0,65	0,65
Meningkatnya layanan transportasi angkutan darat	Rasio konektivitas angkutan darat	rasio	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30
Meningkatnya layanan transportasi angkutan perairan	Rasio konektivitas angkutan perairan	rasio	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35
Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	80.00	81.50	82.00	82.50	82.50
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	80.00	81.50	82.00	82.50	82.50
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan	Realisasi pendapatan asli daerah sektor perhubungan	Juta Rupiah	1.458	2.500	2.800	3.000	11.958
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan	Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Perhubungan	Juta Rupiah	1.458	2.500	2.800	3.000	11.958
Dinas Komunikasi & Informatika							
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,68	2,74	2,77	2,80	2,80
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96,03	96,03	96,04	96,05	96,05
Meningkatnya Layanan Publik dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	6,56	25	30	35	35
Terwujudnya Penyelenggaraan Satu Data Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAMI	60,31	64	68	72	72
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Diskominfo	NILAI	BB	BB	BB	BB	BB

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	persentase	100	100	100	100	100
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
Terwujudnya Internasionalisasi Produk- Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase UMKM Naik Kelas	%	29,95	30,55	30,89	31,23	31,23
	Persentase koperasi yang berkualitas	%	46,55	48,55	49,55	50,55	50,55
Meningkatnya skala usaha UMKM yang mampu melakukan ekspor produk	Persentase UMKM Yang Berdaya Saing	%	41,31	41,48	45,35	49,22	49,22
	Jumlah Produk UMKM yang diekspor	Produk/ Komuditas	226	234	239	244	244
	Nilai Ekspor UMKM	Milyar Rupiah	196,385	2,326.02	2,327.02	2,328.02	2,328.02
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	%	27,37	31.8	32.8	33.8	33.8
Meningkatnya Kualitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	%	24,02	23,6	24,6	25,6	25,6
Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya	%	4,5	4,6	5,6	6,6	6,6
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Nilai Sakip Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	%	-27	3,68	3,55	3,42	3,42
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	18.220	19.609	20.305	21.000	21.000
Meningkatnya Kualitas Layanan PTSP	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PTSP	Nilai	85.86	84.88	85.20	86.10	86.10
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Bersih, Kuat dan Antisipatif	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	%	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
Dinas Kepemudaan & Olahraga							
Kualitas Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	58,17	58,33	59,03	60,05	60,05
	Sport Development Indeks (SDI)	Indeks	0,398	0,413	0,421	0,426	0,426

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan Kualitas Pemuda	Persentase Pemuda yang Berdaya Saing	Persentase	0,074	0,22	0,23	0,24	0,24
Meningkatkan Prestasi Olahraga	Perolehan Medali	Medali	2	3	4	4	11
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai	B	B	B	B	B
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase Capaian IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga	nilai	0	0	0	0	0
Dinas Kebudayaan							
Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Melayu	Nilai Ekonomi Budaya - Dinas Kebudayaan	%	28.11	28.21	28.24	28.27	28.27
	Nilai Ekpresi budaya - Dinas Kebudayaan	%	1.61	1.73	1,77	1,81	1.81
	Nilai Warisan budaya - Dinas Kebudayaan	%	49.54	50.44	51.24	52.04	52.04
Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	28.11	28.21	28.24	28.27	28,27
Meningkatnya Potensi Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan Melayu	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	1.61	1.73	1.77	1.81	1.81
	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	18.43	20.81	21.52	22.23	22.23
	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi	%	33.33	45	60	80	80
	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	30.51	35.39	37.20	39.02	39.02
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	13.89	14,20	14,63	15,06	15,06
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kebudayaan	Nilai SAKIP -Dinas Kebudayaan	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Ketercapaian IKU Dinas Kebudayaan	%	100	100	100	100	100
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Nilai	64,73	64,83	64,88	64,93	64,93
Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,02	63,00	63,50	64,00	64,00
Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,31	15,45	15,65	15,85	15,85
Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai Prinsip, Kaidah dan Standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	15,67	16,20	16,70	17,20	17.20

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	15,67	20,75	24,50	28,50	28,50
Terwujudnya Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Nilai	28,33	62,50	64,16	65,83	65,83
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%	100	100	100	100	100
Dinas Kelautan dan Perikanan							
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	%	100	100	100	100	100
Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	5209,54	3.313,00	3.322,00	3.330,00	0
	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	112,58	116,00	116,10	116,30	
Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	322107	308305,60	308921,60	309538,60	309538,60
	Nilai Nelayan/Tukar NTN	%	112,58	116,00	116,10	116,30	116,30
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	27436,03	30614,37	32955,78	35288,63	35288,63
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI	%	110,30	111,20	111,76	112,32	112,32
Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	8391,68	13000	13200	13400	13500
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita	66,18	64,98	65,17	65,36	65,62
Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum sesuai regulasi	Kawasan	1	4	4	4	4
	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	90	90	90	90
Dinas Pariwisata							

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Bahari Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	Milyar Rupiah	4.874,87	5.171,75	5.326,9	5486,71	5486,71
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan.	Daya Tarik/Kawasan/Destinasi	3	2	2	2	2
Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	Orang	758.154	1.474.269	1.621.695	1.783.864	1.783.864
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	817.282	1.722.943	1.964.155	2.239.136	2.239.136
Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan.	Sub Sektor	3	7	7	7	7
Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	1,63	2	2	2	2
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata	%	100	100	100	100	100
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral							
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat	- Rasio Elektrifikasi	%	96,32	98,10	98,80	99,20	99,20
Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	96,32	98,10	98,80	99,20	99,20
	-Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100	100	100	100	100
Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	14,17	15,43	15,42	15,83	15,83
Pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan	Persentase Darah Aliran Sungai yang memiliki Potensi Cekungan Air Tanah dalam Wilayah Kab/Kota	%	36,36	72,73	81,82	90,91	90,91
Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	- Persentase Darah Aliran Sungai yang memiliki Potensi Cekungan Air Tanah dalam Wilayah Kab/Kota	%	36,36	72,73	81,82	90,91	90,91
Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice)	Persentase pelaku usaha yang pertambangan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice)	%		40	45	50	50
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%		40	45	50	50
Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	298,38	174,59	228,60	282,84	282,84
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP Dinas ESDM	Bobot	B	BB	BB	BB	BB

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	- Nilai SAKIP Dinas ESDM	Bobot	B	BB	BB	BB	BB
Dinas Perindustrian & Perdagangan							
Terwujudnya Penguatan Industri Dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	5,35	5,77	6,18	6,60	6,60
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Persen	15,45	7	7,50	8	8
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	Persen	40,81	41,13	41,29	41,45	41,45
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Persen	8,83	8,58	8,6	8,62	8,62
Peningkatan Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	40,20	41,13	41,29	41,45	41,45
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Persen	8,23	8,58	8,60	8,62	8,62
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Sakip Disperindag	Kategori Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	100	100	100	100	100
Sekretaris Daerah							
Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks	69,77	70,97	71,57	72,17	72,17
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang dihasilkan	%	n/a	92,3	93,5	100	100
Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi penyusunannya	%	n/a	95	98	100	100
Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase produk hukum daerah dan kasus hukum daerah yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	indeks	baik	baik	baik	baik	baik
Meningkatnya hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemprov Kepri	Persentase peningkatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah	%	74	86	93	100	100
Meningkatnya pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi	%	96	100	100	100	100

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan	Persentase layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi	%	96	98	99	100	100
Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	%	20	60	80	100	100
Sekretariat DPRD							
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD yang Optimal	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skor	72	76	78	80	80
Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan							
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Sakip dari aspek perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Skor	44,58	47	49	51	51
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik
Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	Persentase	n.a	100	100	100	100
	Indeks Inovasi Daerah	Kategori Indeks	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Rata-Rata Capaian IKU Bappeda	Persentase	116,20	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A
	IKM Bappeda	Skor	84,81	90	91	92	92
Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Terwujudnya peningkatan penatusahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks	2,0	2,05	2,10	2,15	2,15
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Persen	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi	Persen	90	90	91	92	92

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persen	100	100	100	100	100
Badan Pendapatan Daerah							
Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD.	%	21,80	9,22	-2,15	2,65	2,65
Meningkatnya PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD	%	89,49	93,62	93,67	93,15	93,15
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah	Nilai Sakip..	Nilai Sakip..	BB	A	A	A	A
Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah	%	0	0	0	0	0
Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri							
Mewujudkan Manajemen ASN yang Profesional	Penilaian Sistem Merit	Indeks	314	330,5	332	332	332
Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam siste merit	Skor	40	40	40	40	40
	Nilai Pengadaan Pegawai dalam sistem merit	Skor	34	34	38	38	38
	Nilai Sistem Inka dalam sistem merit	Skor	19	19	24	24	24
Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam Unsur Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Kinerja	Nilai Penggajian Penghargaan dan Disiplin dalam sistem merit	Skor	40	40	40	40	40
	Nilai Manajemen Kinerja dalam sistem merit	Skor	72,5	77,5	78	78	78
Meningkatnya Penilaian Meritokrasi Pelayanan ASN dalam unsur mutasi, Rotasi, Promosi dan Pengembangan Karier	Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam sistem merit	Skor	20	20	24	24	24
	Nilai Pengembangan Karir dalam sistem merit	Skor	72,5	80	83	83	83
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja BKD KORPRI	Nilai Sakip BKD KORPRI	Nilai	78,95	79,35	79,55	79,75	79,75
Meningkatnya Kualitas IKU BKD KORPRI	Capaian IKU BKD KORPRI	Nilai	100	100	100	100	100
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	Persentase	28.4	32	34	36	36
	Predikat Akreditasi Lembaga Penyelenggara	Predikat	B e l u m Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi
Terwujudnya Program Pelatihan Terakreditasi	Jumlah Program Pelatihan yang Terakreditasi	Jumlah	0	3	3	4	4

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatnya ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase	28.4	32	34	36	36
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	B	B	B	B	B
Meningkatnya Ketercapaian IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Ketercapaian IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase	100	100	100	100	100
Badan Pengelola Perbatasan Daerah							
Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	persentase	49,47	55	60	65	65
Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga	Persentase Pembangunan Rencana Aksi di Lokasi Prioritas Provinsi Kepulauan Riau	Persentase	49,47	55	60	65	65
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	B	B	B	B	B
Meningkatnya Ketercapaian IKU Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Ketercapaian IKU Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase	100	100	100	100	100
Badan Penghubung Daerah							
Meningkatnya Kualitas Layanan Badan Penghubung Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	87.03	88	89	90	90
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat Pertumbuhan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	Persentase	86.55	88	89	90	90
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah	Nilai SAKIP Badan Penghubung Daerah	Nilai	0	0	0	0	0
Meningkatnya Ketercapaian IKU Badan Penghubung Daerah	Persentase Ketercapaian IKU Badan Penghubung Daerah	Persentase	100	100	100	100	100
Inspektorat Daerah							
Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif untuk Memberikan Nilai Tambah dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan	Indeks	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5
	Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Akuntabilitas	Indeks	3	3,1	3,2	3,3	3,3
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 Ke atas	%	6	7	8	10	15

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
Meningkatnya Pengawasan atas Celah Pengendalian dan Risiko Kecurangan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP BB Ke atas	%	85	86	87	88	88
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SPIP Level 3	%	n/a	30	40	50	50
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani APH	%	n/a	<10	<9	<8	<8
	Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti	%	n/a	95	95	95	95
Meningkatnya Peran Consulting Inspektorat Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang mendapat predikat WBK/WBBM	Jumlah	0	0	1	2	2
	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 ke Atas	Jumlah	3	5	6	7	7
	Kategori Nilai MCP KPK	Kategori	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
Mewujudkan Harmoni Masyarakat dan Stabilitas Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	85,78	81,62	82,93	84,26	84,26
	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	2,95	2,85	2,87	2,89	2,89
Meningkatkan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Persentase konflik (Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Suku, Etnis, Agama, Hukum dan HAM) yang tertangani	%	60	60.01	60.02	60.03	60.03
Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat dan Penegakkan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	78,78	78,78	78,79	78,80	78,80
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,75	70,76	70,76	70,77	70,77
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai	70,75	70,76	70,76	70,77	70,77



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator kinerja ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penetapan target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 8.1.
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Realisasi		Prognosis	Target		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,59	76,46	76,69	77,04	77,39	77,74
2	Angka Kemiskinan	%	5,75	6,03	5,74	5,69	5,63	5,57
3	Angka Pengangguran	%	9,91	8,23	8,05	7,54	7,21	6,91
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	5,09	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3
5	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	130,12	141,68	142,51	143,34	144,17	145,00
6	Indeks Gini	Indeks	0,339	0,325	0,324	0,323	0,321	0,318

8.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam perwujudan visi dan misi daerah. Pencapaian indikator kinerja utama tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 8.2.
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Prognosis	Target		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	5,09	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,91	8,23	8,05	7,54	7,21	6,91
3	PDRB Per Kapita							
	a. PDRB Per Kapita ADHK	Juta Rp	85,43	87,24	87,50	87,76	88,01	88,27
	b. PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rp	130,12	141,68	142,51	143,34	144,17	145,00

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-2



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Prognosis	Target		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	indeks	n.a.	74,13	69,95	70,18	70,28	70,38
5	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	68,66	69,77	70,37	70,97	71,57	72,17
6	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,59	76,46	76,69	77,04	77,39	77,74
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK		84,72	84,54	100	100	100	100
8	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,49	93,49	93,52	93,55	93,57	93,60
9	Angka Kemiskinan	%	5,75	6,03	5,74	5,69	5,63	5,57
10	Prevalensi Stunting	%	16,30	15,40	15,3	14	13,3	12,8
11	Indeks Gini	indeks	0,339	0,325	0,324	0,323	0,321	0,318
12	Rasio Konektivitas	rasio	n.a.	0,51	0,53	0,55	0,56	0,65
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	n.a.	52,12	54,60	55,60	56,60	57,60
14	Rasio Elektrifikasi	rasio	94,50	96,32	97,30	98,10	98,80	99,20
15	Persentase jalan kondisi mantap	%		80,62	80,78	80,94	81,10	81,26

8.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-3



Tabel 8.3.
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (Permendagri No. 18 Tahun 2020)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar							
	Urusan Pendidikan							
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	86,84	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	74,77	78,5	82,4	86,5	86,5	Dinas Pendidikan
	Urusan Kesehatan							
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	1,97	1,98	1,98	1,99	1,99	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	%	54,28	57,00	59,85	62,84	62,84	Dinas Kesehatan
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi	%	34,71	36,4	38,3	40,2	40,2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	%	18,01	18,9	19,9	20,8	20,8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-4



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas provinsi terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	%	53,34	56,0	58,8	61,7	61,7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
6	Rasio kemantapan jalan	%	80,62	84,6	88,9	93,3	93,3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	23,76	24,9	26,2	27,5	27,5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
1	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	9,47	1,47	1,50	1,52	1,52	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-5



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
								Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	41,67	67	83	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	66,667	70,00	73,50	77,18	77,18	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
	Urusan Sosial							
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Provinsi	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
5	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-6



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
	Urusan Tenaga kerja							
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	persen	17,85	18,74	19,68	20,66	20,66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	7,34	7,71	8,10	8,50	8,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah provinsi	persen	16,17	16,98	17,83	18,72	18,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase provinsi yang menyusun rencana tenaga kerja	persen	57,14	60,00	63,00	66,15	66,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen	16,64	17,47	18,35	19,26	19,26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	persen	8,22	8,63	9,06	9,51	9,51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Rasio	29,46	43,70	43,51	43,33	43,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11,26	11,82	12,41	13,03	13,03	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	5,33	5,60	5,88	6,17	6,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	Urusan Pangan							

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-7



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
1	Persentase cadangan pangan	%	11,91	12,51	13,13	13,79	13,79	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Urusan Pertanahan								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100,0	100,0	100,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	%	91,49	96,12	98,53	100,0	100,0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74,13	70,18	70,28	70,38	70,38	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi	-	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	41,86	43,95	46,15	48,46	48,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Desa								

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-8



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	62,5	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri	%	3,468	3,64	3,82	4,01	4,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	<i>Total Fertility Rate</i>	Indeks	2,15	2,17	2,16	2,15	2,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	45,51	59	59,25	59,75	59,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	24,9	22	20	18	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Urusan Perhubungan								
1	Rasio konektivitas provinsi	rasio	0,56	0,62	0,63	0,65	0,65	Dinas Perhubungan
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	rasio	0,47	0,49	0,52	0,54	0,54	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	6,56	25	30	35	35	Dinas Komunikasi & Informatika

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-9



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,40	81,40	81,40	81,40	81,40	Dinas Komunikasi & Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	20,09	30	35	40	40	Dinas Komunikasi & Informatika
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	46,55	54,04	55,04	56,04	56,04	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	29,95	31,45	33,02	34,67	34,67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	-27	3,68	3,55	3,42	3,42	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemuda dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,10	1,30	1,48	1,50	1,50	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,041	0,170	0,180	0,180	0,180	Dinas Kepemudaan & Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	2	3	4	4	11	Dinas Kepemudaan & Olahraga
Urusan Statistik								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi & Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi & Informatika

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-10



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
	Urusan Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	60,90	63,95	67,14	70,50	70,50	Dinas Kebudayaan
	Urusan Persandian							
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	60,31	64	68	72	72	Dinas Komunikasi & Informatika
	Urusan Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62,02	63,00	63,50	64,00	64,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	15,31	15,45	15,65	15,85	15,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Urusan Kearsipan							
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	15,67	20,75	24,50	28,50	28,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Nilai	28,33	62,50	64,16	65,83	65,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Urusan Pilihan Dasar							
	Urusan Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		2049,746	2152,23	2259,84	2372,84	2372,84	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	60,09	63,09	66,25	69,56	69,56	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Urusan Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	349.543	338.920	341.877	344.827	344.827	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	99	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-11



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
	Urusan Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%		10	10	10	10	Dinas Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	13,637	14,00	14,00	14,00	14,00	Dinas Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	%	29,78	45,00	47,00	50,00	50,00	Dinas Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	1,578	1,66	1,74	1,83	1,83	Dinas Pariwisata
	Urusan Kehutanan							
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial		100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Urusan Perdagangan							
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	4,159	4,37	4,59	4,81	4,81	Dinas Perindustrian & Perdagangan
2	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	24,032	25,23	26,50	27,82	27,82	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	82,353	86,47	90,79	95,33	95,33	Dinas Perindustrian & Perdagangan
4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	0	5	5	10	10	Dinas Perindustrian & Perdagangan
5	Tertib Usaha	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perindustrian & Perdagangan
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	59,868	62,86	66,00	69,30	69,30	Dinas Perindustrian & Perdagangan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-12



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	13,45	14,12	14,83	15,57	15,57	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Urusan Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,771	0,81	0,85	0,89	0,89	Dinas Perindustrian & Perdagangan
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	105,00	110,25	115,76	115,76	Dinas Perindustrian & Perdagangan
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75	78,75	82,69	86,82	86,82	Dinas Perindustrian & Perdagangan
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
	Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	-	24,131	25,34	26,60	27,93	27,93	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Rasio PAD	-	47,148	49,51	51,98	54,58	54,58	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3	3,15	3,31	3,47	3,47	Inspektorat Daerah
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	3	3,15	3,31	3,47	3,47	Inspektorat Daerah
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	-	62,045	65,15	68,40	71,82	71,82	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-13



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	50,609	53,14	55,80	58,59	58,59	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	36,333	38,15	40,06	42,06	42,06	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	85,703	89,99	94,49	99,21	99,21	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	32,342	33,96	35,66	37,44	37,44	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	50,657	53,19	55,85	58,64	58,64	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
	Manajemen Keuangan							
1	Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	-	4	4	4	4	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-	0,6531	0,69	0,72	0,76	0,76	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-	21,6831	22,77	23,91	25,10	25,10	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	1,0324	1,08	1,14	1,20	1,20	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-14



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				OPD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Akhir Periode	
	Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	96,142	98,07	99,06	100,0	100,0	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	105,00	110,25	115,76	115,76	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 8.4.
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (Program Pembangunan Daerah)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	DINAS PENDIDIKAN								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	Na	91,5	92,5	93,5	93,5	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	85,43	80,00	81,00	82,00	82	Dinas Pendidikan
		- Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,54	100	100	100	100	Dinas Pendidikan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-15



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	107,72	99,00	99,50	100	100	Dinas Pendidikan
		- Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	82,35	87,00	88,00	90	90	Dinas Pendidikan
		- Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,08	0,36	0,35	0,34	0,34	Dinas Pendidikan
		- Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	99,97	96,27	96,44	96,60	96,6	Dinas Pendidikan
		- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	99,93	100,00	100,00	100,00	100	Dinas Pendidikan
		- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,16	33,85	33,90	33,95	33,95	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	67,28	61	61,50	62,00	62,00	Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum.	%	40,68	31	31,50	32	32	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	97,22	97,22	97,30	97,37	97,37	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	644,92	728,07	72,7	730,00	730,00	Dinas Pendidikan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-16



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	DINAS KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	125	123	122	121	121	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	14	12	11	10	10	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,8	14	13,3	12,8	12,8	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-17



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kabupaten/kota sehat	Kab/Kota	2	5	7	7	7	Dinas Kesehatan
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90	92	93	93	93	Dinas Kesehatan
		Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	64	72	76	80	80	Dinas Kesehatan
		Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	43	57,14	57,14	67	67	Dinas Kesehatan
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (Dinkes)	%	93,60	94,60	95,50	95,50	95,50	Dinas Kesehatan
		Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	57	71	71	71	71	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	89	95	96	97	97	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96	97	97,50	98	98	Dinas Kesehatan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-18



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	85	95	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	92	96	96	96	96	Dinas Kesehatan
		Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Satelit	Utama	Utama	Utama	Utama	Dinas Kesehatan
		Status Akreditasi RSKJKO Engku Haji Daud	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	78,5	80	80	80	80	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSKJKO Engku Haji Daud	Indeks	82	83	84	84	84	Dinas Kesehatan
		Persentase Instalasi farmasi sesuai standar (skor minimal 80)	%	80	82	85	90	90	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	52	56	58	60	60	Dinas Kesehatan
		Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	65	75	80	85	85	Dinas Kesehatan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-19



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSKJKO Engku Haji Daud	%	30	40	50	60	60	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	86	88	89	90	90	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	71,43	85,71	85,71	100	100	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	%	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Wilayah Terlindungi Bangunan Pengendali Banjir	Ha	0	75	150	150	150	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	7,54	25,49	31,48	37,46	37,46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-20



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk.	%	51,59	58,99	62,09	65,39	65,39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak .	%	91,82	91,88	92	92,12	92,12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Pelayanan Air Limbah..	%	91,62	90,51	90,68	90,91	90,91	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pelayanan Drainase.	%	50,79	54,30	57,30	60,30	60,30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.	%	68,75	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota.	%	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap..	%	80,62	80,94	81,10	81,26	81,26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-21



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	%	23,76	26	28	30	30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	85	85	93	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni.	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni.	%	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun.	Unit Rumah	200	50	50	50	350	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh.	Ha	339,21	334,21	329,21	324,21	324,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-22



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum Yang Tersedia Di Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi	7	7	7	7	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,36	2,60	2,80	3,00	3,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,27	0,32	0,33	0,35	0,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,31	0,42	0,43	0,45	0,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-23



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
		Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan	%	41,67	67	83	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	10	10	10	30	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
		Persentase SDM aparaturnya satpol PP yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	%	16	23	27	32	32	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindaklanjutnya	%	71	86	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	DINAS SOSIAL								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-24



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi.	%	35,71	5,63	5,63	5,63	16,88	Dinas Sosial
		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi.	%	44,80	32,61	32,61	32,61	50,93	Dinas Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial Dinas Sosial	%	0	0	100	100	100	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti.	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-25



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti.	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti.	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,42	0,20	0,63	0,73	1,56	Dinas Sosial
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga	%	9,20	13,02	13,05	13,05	39,13	Dinas Sosial
		Persentase kab/kota yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-26



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Persentase daerah yang aktif dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ditingkat provinsi	%	0	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola Dinas Sosial	Unit	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan (RTKD) yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon Tenaga kerja mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	7,69	9	10	12	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-27



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase Lulusan Pelatihan yang di terima Kerja	%	34,12	66,67	66,67	71,79	71,79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54,3	61,53	66,66	71,79	71,79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	48,60	63	64	65	65	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK-	%	67,55	67,59	67,62	67,65	67,65	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	25,29	0	50	55	55	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat upah riil terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) per jam	%	98,07	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	84,56	95,75	96	96,25	96,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	83,78	76,50	77,00	77,50	77,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	%	10,03	13,80	14,80	15,80	15,80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-28



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi	%	11,26	11,82	12,41	13,03	13,03	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi	%	8,89	8	8	8	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	93,43	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	29,46	43,70	43,51	43,33	43,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendaftarann	%	28,71	29	29,50	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-29



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	%	41,86	46,51	51,16	55,81	55,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya	%	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	5,33	5,60	5,88	6,17	6,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	124	115	115,5	116	116	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		89	88,50	89,30	90,10	90,10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-30



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	6.6	≤11	≤11	≤11	≤11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	6.60	≤10	≤10	≤10	≤10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	98	83	84	85	85	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN								
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Fasilitasi Redistribusi Tanah Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau	%	0	0	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-31



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,56	78,04	78,04	78,04	78,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks kualitas Air	Indeks	56,79	56,9	56,9	56,9	56,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks kualitas Udara Ambien	Indeks	90,27	88,46	88,46	88,46	88,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	58	59,10	59,10	59,10	59,10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	28,57	28,57	42,58	57,14	57,14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawas	%	50	40,00	40,00	46,67	46,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-32



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	%	14,82	28	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Penanganan Sampah	%	71	71	70	70	70	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-33



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir. akta kematian. akta perkawinan. akta perceraian)	%	30	75	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kab/ Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-34



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	1,45	5,45	8	10,91	10,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	25,68	34,74	43,81	52,87	52,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT.RW. PKK. Posyandu. LPM. Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	%	44,64	83,33	83,33	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	45,51	59	59,25	59,75	59,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	24,9	22	20	18	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan KB

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-35



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) (Dengan Satuan:Indek)	%	56,83	62	62,5	63	63	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	DINAS PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	%	200	100	100	100	500	Dinas Perhubungan
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	%	200	100	100	100	500	Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah I Kota Batam	%	200	100	100	100	500	Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah V Kab. Lingga	%	200	100	100	100	500	Dinas Perhubungan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-36



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah II Kab. Karimun	%	200	100	100	100	500	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	%	200	100	100	100	500	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan sarana angkutan perairan	%	82,69	90,38	94,23	100	100	Dinas Perhubungan
		Persentase layanan prasarana angkutan perairan	%	37,50	75,00	87,50	100	100	Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam	Juta Rupiah	114,2	252	282	302	1.033	Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun	Juta Rupiah	62,5	144	161	173	601	Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	Juta Rupiah	453	863	967	1.036	3.877	Dinas Perhubungan
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	Juta Rupiah	210	612	685	734	2.669	Dinas Perhubungan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-37



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:Juta Rupiah)		143,7	629	705	755	2.520	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA								
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik. dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	20,09	30	35	40	40	Dinas Komunikasi & Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	Dinas Komunikasi & Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH								

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-38



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	12,86	21,34	26,34	31,34	31,34	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi	%	2,69	4,53	5,53	6,53	6,53	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/UPS yang Dinilai Kesehatannya	%	5,79	9,97	12,07	14,17	14,17	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	%	12,27	23,8	28,8	33,8	33,8	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan	%	31,45	35,18	37,18	39,18	39,18	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Wirausaha	%	29,66	29,02	29,52	30,02	30,02	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase UMKM yang Mengikuti Pelatihan	%	0,95	0,84	1,04	1,24	1,24	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	23,65	32,86	36,36	39,86	39,86	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-39



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan yang terlayani	%	80	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perkembangan Investasi Di Kepulauan Riau	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA								

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-40



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	%	100	100	100	100	100	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	%	0,10	1,30	1,48	1,50	1,50	Dinas Kepemudaan & Olahraga
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan .Kepemimpinan dan Organisasi	%	0,041	0,17	0,18	0,18	0,18	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	0,64	0,77	0,82	0,86	0,86	Dinas Kepemudaan & Olahraga
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	38,09	43,88	46,77	49,66	49,66	Dinas Kepemudaan & Olahraga
		Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10,23	11,54	11,54	11,54	11,54	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	8,43	9,63 (8 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	Dinas Kepemudaan & Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA								

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-41



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi & Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi & Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	DINAS KEBUDAYAAN								
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang telah ditetapkan	%	18,43	20,81	21,52	22,23	22,23	Dinas Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	28,11	28,21	28,24	28,27	28,27	Dinas Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Keterlibatan SDM sejarawan	%	33,33	45	60	80	80	Dinas Kebudayaan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-42



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	30,51	35,39	37,20	39,02	39,02	Dinas Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	Orang	19.117	12.132	12.132	12.132	254.938	Dinas Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (DPK)	Nilai	62,02	63,00	63,50	64,00	64,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (DPK)	Indeks	15,31	15,45	15,65	15,85	15,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor	%	15,67	20,75	24,50	28,50	28,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-43



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (dpk)							
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	28,33	62,50	64,16	65,83	65,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Izin Penggunaan Arsip	Skor	0	5	5	5	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN. PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-Kawasan Konservasi yang Dikelola Minimum (sesuai Perdirjen PRL NOMOR 281 KEP-DJPRL I 2020)	Kawasan	1	4	4	4	4	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	322.107	308.305,6	308.921,6	309.538,6	309.538,6	Dinas Kelautan dan Perikanan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-44



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		-Nilai Nelayan/Tukar NTN	%	112,58	116	116,1	116,3	116,3	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	27.436,03	30.614,37	32.955,78	35.288,63	35.288,63	Dinas Kelautan dan Perikanan
		-Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi	Ton	110,3	111,2	111,76	112,32	112,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	90	90	90	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	8.391,68	13.200	13.400	13.500	13.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
		-Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/perka pita	0	65,17	65,36	65,62	65,62	Dinas Kelautan dan Perikanan
		-Nilai Ekspor Olahan hasil Perikanan	USD	0	31.817.850	31.824.214	31.830.578	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	DINAS PARIWISATA								
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan		100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-45



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata. Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Daya Tarik/Kawasan/Destinas	3	2	2	2	2	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	758.154	1.474.269	1.621.695	1.783.864	1.783.864	Dinas Pariwisata
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara.	Orang	817.282	1.722.943	1.964.155	2.239.136	2.239.136	Dinas Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	3	7	7	7	7	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan.	%	1.63	2	2	2	2	Dinas Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	DINAS KETAHANAN PANGAN. PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	89,98	24,73	25,75	26,76	26,76	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Sarana	%	62,08	24,73	25,75	26,76	26,76	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-46



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Produktivitas Pertanian							
		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak.	%	2,35	1,30	1,35	1,40	1,40	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	2,91	3,20	3,50	3,80	3,80	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	1,20	1,21	1,23	1,26	1,26	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	1,33	2,58	3,14	3,66	3,66	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	64,75	64	65	66	66	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	79,75	60,00	61,00	62,00	62,00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	62,50	42	43,5	45	45	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Kesehatan Hewan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-47



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	84,43	73,90	74,60	74,80	74,80	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	98,88	20	20	20	20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	49,02	50,00	51,00	56,00	56,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	103,34	100,17	100,20	100,22	100,22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	Milyar Rupiah	27,13	27,30	27,41	27,50	27,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Rehabilitasi Lahan Kritis	Hektar	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang terkelola	%	0	0	50	60	60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-48



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok yang mengelola Perhutanan Sosial	Kelompok	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Wilayah Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%	36,36	72,73	81,82	90,91	90,91	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah)	298,38	174,59	228,60	282,84	282,84	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		- Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%		40	45	50	50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	%	14,17	15,43	15,42	15,83	15,83	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-49



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		dalam Bauran Energi (Energy Mixed)							
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Pemegang Izin Usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN								
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Izi Usaha yang di terbitkan	%	0	100	100	100	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	50	100	100	100	100	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	%	34,8	<10	<10	<10	<10	Dinas Perindustrian & Perdagangan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-50



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	24,33	8	8	8	8	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	%	50	60	65	70	70	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kontibusi Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	%	65	70	70	70	70	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	6	6	6	6	18	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen	1	1	1	1	3	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	1	1	3	Dinas Perindustrian & Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan	%	25	33,3	33,3	33,3	33,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-51



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Pemukiman Baru. Satuan Pemukiman Pugar. dan Satuan Pemukiman Tempatan							
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	21,23	34,4	40,2	45,9	45,9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	6,25	18,75	25	31,25	31,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	UNSUR PENDUKUNGURUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
	SEKRETARIS DAERAH								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	%	93	100	100	100	100	Sekretaris Daerah
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	%	38,60	41,60	43,60	44,60	44,60	Sekretaris Daerah
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau	Skor	3,03	3,04	3,05	3,06	3,06	Sekretaris Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-52



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	20	60	80	100	100	Sekretaris Daerah
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	Sekretaris Daerah
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	%	n/a	90	90	100	100	Sekretaris Daerah
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8.2	70	70.5	71	71	Sekretaris Daerah
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	%	90	95	97	100	100	Sekretaris Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD								
	SEKRETARIAT DPRD								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasilitasi	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-53



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
5	UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN								
	BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	%	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN. DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	%	n.a	90	93	95	95	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	%	n.a	90	90	90	90	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	%	n.a	90	93	95	95	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang	%	n.a	90	93	95	95	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-54



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam							
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	%	n.a	90	93	95	95	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan
5.02	KEUANGAN								
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah APBD Provinsi yang disusun	%	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi Penyerapan Kas Daerah	%	90	90	91	92	92	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-55



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang memiliki Dokumen Kepemilikan	%	68	70.98	71.84	74.66	74.66	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	%	10,49	13,73	14,37	15,08	15,08	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	91	92	92	93	93	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda	%	25,32	3,14	-2,87	1,80	1,80	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah.	Layanan	15.300	18.883	20.772	22.849	22.849	Badan Pendapatan Daerah
		Peningkatan pelayanan prima.	Angka	81	83	84	85	85	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih.	%	22	25	27	30	30	Badan Pendapatan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN								

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-56



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	52,57	65,53	66,40	67,15	67,15	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase Penempatan ASN sesuai Kualifikasi	%	97,04	98,47	98,55	98,63	98,40	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase PNS yang mengikuti penilaian kompetensi	%	12,45	9,26	11,54	14,00	14,00	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	%	13,54	4,43	6,53	12,98	12,98	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
		Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik dan Sangat Baik	%	98,08	99,01	99,02	99,03	99,03	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pengajuan Akreditasi Program Pelatihan	%	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-57



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	SUMBER DAYA MANUSIA								
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan	Orang	0	40	100	100	240	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural	Orang	555	762	944	660	2366	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya	Orang	1.615	1.324	1.173	1.587	4084	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan.	%	n.a	100	100	100	100	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN								
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama	%	49,47	55	60	65	65	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-58



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Perbatasan yang Terealisasi							
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG								
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH								
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Badan Penghubung Daerah
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	%	88	88	89	90	90	Badan Penghubung Daerah
		Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat	%	88	88	89	90	90	Badan Penghubung Daerah
		Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	%	88	88	89	90	90	Badan Penghubung Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-59



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							
6	UNSUR PENGAWASANURUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
	INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional pengawasan	%	39	50	60	70	70	Inspektorat Daerah
		Persentase SDM Pengawasan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	90	90	90	90	90	Inspektorat Daerah
		Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	%	10	10	20	30	30	Inspektorat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dari APH yang di limpahkan ke APIP	%	90	90	90	90	90	Inspektorat Daerah

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-60



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	88	88	89	90	90	Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria ZI	Jumlah	-	2	2	3	3	Inspektorat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang didampingi dalam penerapan manajemen risiko	%	n/a	12	14	16	16	Inspektorat Daerah
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK	Jumlah	4	2	2	2	2	Inspektorat Daerah
		Persentase Pelaporan LHKPN Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
		Persentase Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor.	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-61



PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	KARAKTER KEBANGSAAN								
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA. PILEG. PILPRES.)	%	0	70	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Demokrasi Indonesia	%	78,78	78,78	78,79	78,80	78,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21	88	90	93	93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	Persentase Konflik antar Agama	%	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-62



BAB IX

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Bab ini berisi uraian tentang kebijakan-kebijakan Daerah tahun 2021-2026 yang difokuskan pada pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi daerah. Penyusunan Bab ini sebagai penyelaras dan kontrol utama dalam pengendalian program prioritas pembangunan baik yang bersifat *cross cutting* maupun *regional management*.

9.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

9.1.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037. Tujuan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah untuk Mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas JaringanTransportasi Kepulauan;
3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
5. Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
6. Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam, Bintan dan Karimun;



7. Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
8. Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

9.1.2 Kerangka Umum Pengembangan Wilayah

Kerangka umum pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada arah pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko



bencana. Arah pengembangan wilayah tersebut sangat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, serta misi kelima yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun 2021-2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan



merata.

1) Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024

a. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabuapten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.

b. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.



c. *Major Project* Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Batam –Bintan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna
3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
4. 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
5. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
6. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
7. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
8. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
9. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
11. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
12. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan GarduInduk 38.000 MVA
13. Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
14. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RumahTangga)
15. Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)
16. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
17. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
18. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
19. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
20. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT



2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).



Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

4) Pengembangan Kawasan Tertinggal

Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi



daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

5) Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa.

9.1.3 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target sebagai berikut:

Tabel 9.1
Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kota Tanjungpinang	0,59	4,12	4,27	4,41	4,53	4,65	4,65
2	Kabupaten Bintan	0,23	4,44	4,60	4,75	4,88	5,02	5,02
3	Kota Batam	4,75	6,84	7,08	7,32	7,53	7,73	7,73
4	Kabupaten Karimun	2,37	4,38	4,53	4,69	4,82	4,95	4,95
5	Kabupaten Lingga	1,95	3,74	3,87	4,00	4,11	4,22	4,22
6	Kabupaten Natuna	0,02	0,11	0,71	1,31	1,90	2,50	2,50
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	0,04	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
	Provinsi Kepulauan Riau	3,43	5,09	5,27	5,45	5,6	5,75	5,75

Tabel 9.2
Target Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kota Tanjungpinang	9,57	9,85	8,97	8,9	8,8	8,65	8,65
2	Kabupaten Bintan	6,42	6,44	6,24	6,2	6,16	6,12	6,12
3	Kota Batam	5,05	5,19	4,69	4,68	4,66	4,65	4,65
4	Kabupaten Karimun	6,85	6,87	5,5	5	4,5	4	4
5	Kabupaten Lingga	13,93	14,05	13,44	3,84	3,8	3,75	3,75
6	Kabupaten Natuna	4,95	5,32	4,04	3,92	3,8	3,68	3,68
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	7,09	7,51	6	5,85	5,7	5,56	5,56
	Provinsi Kepulauan Riau	6,12	6,03	5,74	5,69	5,63	5,57	5,57

Tabel 9.3
Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kota Tanjungpinang	6,31	5,27	6,57	6	5,5	5	5
2	Kabupaten Bintan	8,62	6,91	7,94	7,92	7,9	7,88	7,88
3	Kota Batam	11,64	9,56	9,75	9,65	9,6	9,55	9,55
4	Kabupaten Karimun	7,2	6,87	7,6	7,1	6,6	6	6
5	Kabupaten Lingga	4,23	3,09	3,88	3,84	3,8	3,75	3,75
6	Kabupaten Natuna	5,15	4,15	2,99	2,89	2,79	2,69	2,69
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1,27	2,15	3,13	2,78	2,42	2,03	2,03
	Provinsi Kepulauan Riau	9,91	8,23	8,05	7,54	7,21	6,91	6,91

Tabel 9.4
Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kota Tanjungpinang	78,93	79,64	79,75	80,04	80,32	80,60	80,60
2	Kabupaten Bintan	74,57	74,99	75,34	75,72	76,09	76,47	76,47
3	Kota Batam	81,11	81,67	81,95	82,29	82,63	82,97	82,97
4	Kabupaten Karimun	71,70	72,65	72,92	73,40	73,88	74,36	74,36
5	Kabupaten Lingga	65,83	66,57	67,11	67,69	68,28	68,87	68,87
6	Kabupaten Natuna	73,09	73,47	73,76	74,08	74,40	74,72	74,72
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	69,23	69,61	70,20	70,69	71,19	71,68	71,68
	Provinsi Kepulauan Riau	75,79	76,46	76,69	77,04	77,39	77,74	77,74

Tabel 9.5
Target Indeks Gini Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kota Tanjungpinang	0,347	0,347	0,342	0,337	0,332	0,327	0,327
2	Kabupaten Bintan	0,272	0,288	0,285	0,281	0,278	0,274	0,274
3	Kota Batam	0,334	0,336	0,332	0,328	0,324	0,320	0,320
4	Kabupaten Karimun	0,307	0,288	0,285	0,281	0,278	0,274	0,274
5	Kabupaten Lingga	0,289	0,277	0,274	0,270	0,267	0,263	0,263
6	Kabupaten Natuna	0,3	0,291	0,288	0,284	0,281	0,277	0,277
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	0,304	0,313	0,310	0,306	0,303	0,299	0,299
	Provinsi Kepulauan Riau	0,339	0,325	0,324	0,323	0,321	0,318	0,318

Tabel 9.6
Target PDRB perkapita Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal		Target Kinerja				Kondisi Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Kota Tanjungpinang	86,13	90,86	90,91	90,97	91,02	91,08	91,08
2	Kabupaten Bintan	130,73	138,71	142,71	146,82	151,05	155,40	155,40
3	Kota Batam	140,51	153,49	165,66	178,80	192,98	208,29	208,29
4	Kabupaten Karimun	54,71	58,44	59,55	60,68	61,83	63,00	63,00
5	Kabupaten Lingga	44,7	47,18	48,00	48,83	49,68	50,55	50,55
6	Kabupaten Natuna	250,35	283,99	288,72	293,52	298,41	303,37	303,37
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	342,6	395,84	399,91	404,02	408,18	412,38	412,38
	Provinsi Kepulauan Riau	130,12	141,68	142,51	143,34	144,17	145,00	145,00



Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut:

1) Kota Tanjungpinang

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompok yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.



c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku;
4. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang;
5. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis;
6. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu;
7. Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu;
8. Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang;
9. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;

2) Kabupaten Bintan

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan



kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun internasional. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Pengembangan di Kabupaten Bintan dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair, dan overhaul*) dan industri pengolahan makanan.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:



1. Pengembangan Wisata Alam, Olahraga Rekreasi Berstandar Internasional;
2. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
3. Percepatan dan Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
4. Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan;
5. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi;
6. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

3) Kota Batam

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kecamatan Belakang Padang), Pulau Puteri (Kecamatan



Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan ekowisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
2. Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, *Offshore*, dan Elektronik;
3. Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang;
4. Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan
5. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

4) Kabupaten Karimun

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.



Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
2. Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan;
3. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
4. Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan;

5) Kabupaten Lingga

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumberdaya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut



antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya.

Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.



b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagaiberikut:

1. Pembangunan Pusat Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu serta Perikanan;
2. Pengembangan Pusat Wisata Sejarah dan Budaya;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu serta Perikanan;
4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
5. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
6. Fasilitiasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
7. Rehab RTLH suku laut Lingga.

6) Kabupaten Natuna

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka- Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal- kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi



lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperoleh masih rendah.

Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang,



Batu Seduyung, dan Batu Catur.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitas Pembangunan Bandara Baru;
2. Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Skala Internasional;
3. Fasilitas Pembangunan Pusat Logistik Kapal Perikanan;
4. Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Perikanan, Manajemen, dan Pemasaran;
5. Pembangunan Wisata Bahari;
6. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;

7) Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok,



Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

- b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.
- c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:
 - 1. Pengembangan Sentra Perikanan Rakyat;
 - 2. Bantuan Peralatan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
 - 3. Pemberian Modal dan Pemasaran Produk Perikanan Dan Kelautan;
 - 4. Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Berstandar Internasional;
 - 5. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
 - 6. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
 - 7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM.



BAB X

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana di bawah ini.

10.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dibuat untuk menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan dan sekaligus bahan pengisi RKPD setelah selesainya periode RPJMD. Perubahan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2024, 2025, dan 2026. Sementara itu, RKPD 2027 akan disusun berdasarkan RPJMN, RPJP, RKP, dan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggungjawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur Kepulauan Riau berkewajiban menyebarluaskan Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;



- b. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Tahun periode 2024 dan 2025 wajib berpedoman pada perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Provinsi Kepulauan Riau agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini;
- f. Penyusunan Perubahan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Riau.
- g. Barenlitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan



Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

- i. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

10.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Program/kegiatan prioritas yang tidak mampu didanai oleh pemerintah seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, akan ditentukan dengan kebijakan pendanaan pembangunan yang diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya.

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.
3. Kemitraan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program



Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

10.4 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau di sisa tahun perencanaan. Dokumen Perubahan RPJMD ini akan menjadi dokumen penerjemahan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak bersama pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Perubahan RPJMD ini. Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan satu tahun yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2024 hingga tahun 2025. Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, perlu disusun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode selanjutnya.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan sisa pembangunan periode 2021-2026. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TTD.

H. ANSAR AHMAD